



KNOWLEDGE
SECTOR INITIATIVE
AUSTRALIA-INDONESIA PARTNERSHIP



LAPORAN

RANTAI NILAI KOMODITAS SUTRA SULAWESI SELATAN

Kerja Sama

BAPPELITBANGDA Sulawesi Selatan | Knowledge Sector Initiative (KSI) | BaKTI | Payo-Payo



LAPORAN KAJIAN RANTAI NILAI KOMODITAS SUTRA SULAWESI SELATAN

Penulis:

Tim Pelaksana Kajian:

Andi Sadapotto
Lusia Palulungan
Mahyuddin Riwu
Muhammad Alif K. Sahide
Nurhady Sirimorok
Syarifuddin Mabe Parenreng

Tim Peneliti Bappelitbangda Provinsi SulSel:

Yvonne M. Salindeho
Andi Fitriyani Yahya
Alsry Mulyani
Rosmala Dewi Said
St. Suryani
Yuliana Rauf
Yossi F. Pratama

Penerbit:

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Laporan Kajian Rantai Nilai Komoditas Sutra Sulawesi Selatan

Kerja sama:

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Knowledge Sector Initiative (KSI),
Yayasan BaKTI, Payo-Payo

Penulis:

Tim Pelaksana Kajian:

Andi Sadapotto
Lusia Palulungan
Mahyuddin Riwu
Muhammad Alif K. Sahide
Nurhady Sirimorok
Syarifuddin Mabe Parenreng

Tim Peneliti Bappelitbangda Provinsi SulSel:

Yvonne M. Salindeho
Andi Fitriyani Yahya
Alsry Mulyani
Rosmala Dewi Said
St. Suryani
Yuliana Rauf
Yossi F. Pratama

Reviewer/Penyelaras:

Darmawan Salman
Agussalim
Athia Yumna
Robert Na Endi Jaweng
Junaedi Bakri
Muh. Taufik

ISBN: 978 – 979-716-129-3

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin dari penulis

Desain Sampul dan Tata Letak:

LSM Payo-Payo

Penerbit:

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No.269
Telp: (0411) 453486
Email: bappelitbangda@sulselprov.go.id

KATA PENGANTAR

Suatu sukacita dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bagi kami Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan atas selesai dan diterbitkannya hasil penelitian "Kajian Rantai Nilai Sutra Sulawesi Selatan" dalam rangka mendukung Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Mengembalikan Kejayaan Sutra di Sulawesi Selatan.

Laporan kajian ini merupakan potret perkembangan sutra Sulawesi Selatan saat ini dengan menangkap realita yang terjadi di Kabupaten Soppeng, Wajo dan Enrekang, yang dulunya merupakan pusat persuteraan di Sulawesi Selatan namun kini meredup dan sulit dikembangkan. Kajian ini melihat gambaran sutra Sulawesi Selatan dari Hulu, Proses atau Manufaktur hingga ke Hilir. Suatu kajian yang komprehensif dan merupakan dasar yang dapat kami ambil untuk digunakan dalam perencanaan berdasarkan bukti.

Kajian ini juga telah berupaya menangkap gambaran masyarakat kecil yang mungkin hampir tidak tersentuh oleh kehadiran pemerintah, padahal komoditi ini pernah mencapai kejayaannya dimasa awal kemerdekaan hingga tahun sembilan puluhan dan merupakan bagian spesifik dari kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan.

Saya berterimakasih kepada Tim Kolaborasi Pelaksana Kajian dari Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Universitas Hasanuddin, LSM Payopayo, dan wakil dari lembaga swadaya masyarakat lainnya. Kajian ini difasilitasi oleh Yayasan BaKTI dengan dukungan Knowledge Sector Initiative (KSI) sebagai bagian dari program Kebijakan Berbasis Pengetahuan. Hal ini merupakan pengalaman baru yang menggembirakan sebagai model dalam menerapkan konsep penta helix sejak awal mulai dari proses *agenda setting*, persiapan dan pelaksanaan kajian dalam kerangka penyusunan kebijakan berbasis bukti.

Akhirnya saya berharap publikasi hasil kajian ini akan berdampak positif bagi pembangunan dan juga merupakan keberhasilan uji coba kajian kolaborasi walaupun ditengah masa pandemi Covid-19. Saya tetap berharap keberlanjutan pelaksanaan kajian kolaborasi seperti ini untuk menilai komoditi atau hal lain yang akan dikaji sebagai basis bukti untuk meningkatkan daya saing Sulawesi Selatan ke depan.

Makassar, 25 Februari 2021



Junaedi B. S. Sos., MH.
Plt. Kepala Bappelitbangda
Provinsi Sulawesi Selatan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	5
1.3. Output	5
1.4. Cakupan	5
BAB 2 KERANGKA PENELITIAN	8
2.1 Pendekatan Multidimensi pada Kajian Rantai Nilai	8
2.2 Analisa Kuasa dan Kepentingan Aktor: Terlibat dan Tereksklusi dari Tatakelola Rantai Nilai Sutra	10
2.3 Pendekatan Para Pihak (<i>co-production knowledge</i>) untuk Agenda Intervensi Kebijakan	13
BAB 3 METODE PENELITIAN	15
3.1 Pendekatan Penelitian	15
3.2 Lokasi dan Waktu	15
3.3. Metode	16
3.4 Instrumen	21
3.5 Analisis Penelitian	21
3.6 Etika dan Keterbatasan Penelitian	22
BAB 4 KECENDERUNGAN MUTAKHIR, DAMPAK, DAN INTERVENSI KEBIJAKAN DI SEPANJANG MATA RANTAI SUTRA SULAWESI SELATAN	24
4.1 Sektor Hulu	27
4.2 Sektor Manufaktur	70
4.3 Sektor Pemasaran	107

4.5.	Tatakelola: Fragmentasi Aktor, Relasi Kuasa dan Kepentingan	136
<i>BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</i>		<i>148</i>
5.1.	Kesimpulan	148
5.2.	Rekomendasi Kebijakan	154
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>		<i>167</i>

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1 Jadwal Kajian Rantai Nilai Komoditas Sutra Sulawesi Selatan	16
GRAFIK 2 Proses Inti dalam Rantai Nilai Sutra	24
GRAFIK 3 Pelaku Rantai Nilai Sutra Sulawesi Selatan	25
GRAFIK 4 Pelaku Sektor Hulu Sutra Menurut Gender, Umur, Wilayah di Sulawesi Selatan	29
GRAFIK 5 Realisasi Penjualan Telur Ulat Sutra (Box) PERHUTANI dalam Wilayah Sulawesi Selatan (1986-2020)	30
GRAFIK 6 Jumlah dan Proporsi Pelaku Hulu Sutra Menurut Pendidikan Sulawesi Selatan	44
GRAFIK 7 Anggaran Dinas Kehutanan untuk Pengembangan Persuteraan Alam di Sulsel tahun 2015-2020.....	45
GRAFIK 8 Perkembangan Jumlah kelompok tani, petani aktif dan produksi kokon, Kabupaten Soppeng	53
GRAFIK 9 Kesepakatan antara KPH Awota dengan kelompok tani hutan yang tidak berlanjut akibat perubahan struktur KPH menjadi KPH Walanae	61
GRAFIK 10 Sebaran Industri Tenun Sutra di Kabupaten Wajo, Tahun 2018.....	74
GRAFIK 11 Klasifikasi Usaha Pelaku Hulu Sutra	79
GRAFIK 12 Anggaran Dinas Perindustrian	96
GRAFIK 13 Perkembangan Produksi Benang Kab. Soppeng.....	99
GRAFIK 14 Rerata Koleksi Pakaian dan Sarung Sutra Konsumen Sulawesi Selatan Tahun 2020	109

GRAFIK 15 Pola Pembelian Konsumen terhadap Produk Sutra Sulawesi Selatan	
<i>Tahun 2020</i>	111
GRAFIK 16 Motif Pembelian dan Atribut Sutra yang dipertimbangkan dalam	
<i>Pembelian Produk Sutra Sulawesi Selatan, Tahun 2020.....</i>	116
GRAFIK 17 Alur Pertambahan Nilai dalam Rantai Nilai Sutra Sulawesi Selatan	130
GRAFIK 18 Kontribusi Nilai Tambah Setiap Pelaku Rantai Nilai dalam satu unit Produk	
<i>Akhir Sarung Sutra Tenun Walida di Sulawesi Selatan.....</i>	134

DAFTAR TABEL

TABEL 1 <i>Sekuensi metodologi pengambilan data empirikal, validasi dan pelibatan para pihak.....</i>	16
TABEL 2 <i>Daftar dokumen yang dikaji pada penelitian rantai nilai.....</i>	17
TABEL 3 <i>Situasi bibit, lahan, sarana, biaya dan produksi sutra, di wilayah sentra persuteraan Sulsel.....</i>	40
TABEL 4 <i>Situasi Input produksi, proses produksi, produksi dan penggunaan produk, di Wilayah Sentra Persuteraan Sulsel.....</i>	41
TABEL 5 <i>Alokasi Anggaran untuk Pengelolaan Sutra di Sulsel Berdasarkan Kebijakan Gubernur Tahun 2020 Terakait Pengembalian Kejayaan Sutra di Dinas Kehutanan Propinsi Sulsel.....</i>	46
TABEL 6 <i>Fragmentasi dual aktor agen pemerintah dalam rantai proses pengembangan komoditi sutra.....</i>	56
TABEL 7 <i>Analisa Ekonomi Proses Pemintalan Rakyat Benang Sutra di Sulawesi Selatan, 2020.....</i>	80
TABEL 8 <i>Kegiatan dan Jumlah Anggaran Setiap Tahun Dinas Perindustrian Soppeng.....</i>	97
TABEL 9 <i>Skema relasi antar-aktor rantai nilai sutra Sulawesi Selatan.....</i>	137
TABEL 10 <i>Dinamika Kebijakan dan Isu Lapangan Rantai Nilai Sutra Sulawesi Selatan....</i>	144

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	<i>Peta Klaster Geografis Pelaku Rantai Nilai Sutra</i>	26
GAMBAR 2	<i>Ulat sutra.</i>	27
GAMBAR 3	<i>Pemeliharaan ulat sutra di Pising, Kab. Soppeng.</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
GAMBAR 4	<i>Kiri: penyortiran kokon. Kanan: memasak kokon.</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
GAMBAR 5	<i>Siklus Hidup Ulat Sutra dan Intervensi Pencegahan Penyakit Pebrine</i>	51
GAMBAR 6	<i>Pemintalan benang sutra.</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
GAMBAR 7	<i>Re-reeling.</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
GAMBAR 8	<i>Penenunan menggunakan gedogan atau walida.</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
GAMBAR 9	<i>Massau'</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
GAMBAR 10	<i>Penenunan</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
GAMBAR 11	<i>Salah satu toko sutra.</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
GAMBAR 12	<i>Jalur Perdagangan Sutra di Sulawesi Selatan</i>	118
GAMBAR 13	<i>Alur Perubahan nilai (Harga) Satu Unit Produk Akhir Sarung Sutra Berbasis Alat Tenun Walida dalam Rantai Nilai Sutra Sulawesi Selatan</i>	132

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa saat ini sektor persuteraan di Sulawesi Selatan sedang mengalami penurunan, padahal sektor ini melekat erat pada budaya masyarakat Sulawesi Selatan dan mempunyai potensi manfaat yang luas dan beragam. Sutra pun telah menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi.

Menggunakan kerangka analisa rantai nilai, kajian ini merupakan penelitian multi-disiplin yang di dalamnya mengadopsi sejumlah aspek dari pendekatan berbeda: ekonomi, kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI), *livelihoods*, dan analisa kebijakan.

Kajian ini diselenggarakan pada Agustus-Desember 2020, dengan penelitian lapangan di Kabupaten Wajo, Soppeng dan Enrekang, dilaksanakan oleh sebuah Tim Pelaksana Kajian yang berasal dari latar belakang berbeda, akademisi, Ornop, dan tim Bapelitbangda Provinsi.

Temuan-temuan

Sektor hulu

- Jumlah petani pembudidaya murbei dan ulat sutra melorot drastis. Kini hanya tersisa 75 petani, tersebar di Kabupaten Soppeng (56 orang) dan Wajo (19 orang). Sebagian besar yang tersisa adalah perempuan (75%), berusia tua (67% petani berusia 51 tahun ke atas), dan berpendidikan rendah (sekitar 46% persen berpendidikan SD, sebagian tidak tamat, 15% SMP, 34% SMA, dan hanya 5% sarjana).
- Mengingat secara kultural para lelaki dianggap sebagai pencari nafkah utama, sektor ini telah mengalami degradasi, menjadi pilihan terakhir dalam strategi penghidupan keluarga tani, menjadi nafkah cadangan atau tambahan.
- Penyebabnya (1) ketergantungan terhadap bibit ulat sutra import, yang ketika mengalami persoalan dalam bentuk rendahnya produktifitas, sektor ini menjadi surut. (2) Penggunaan pestisida yang bisa membunuh ulat sutra dengan mudah. Terjadi di satu kawasan yang tadinya didominasi murbei dan ulat mengalami peralihan komoditas karena susutnya produktifitas pemeliharaan ulat sutra. (3) Kegagalan beruntun membuat petani menghitung perimbangan antara jerih payah (*drudgery*) dan manfaat (*utility*). Mereka pun mengalihkan investasi ke komoditas atau pekerjaan lain.
- Kecenderungan ini terjadi sekalipun petani mengakui bahwa memelihara ulat pekerjaan menguntungkan. Usahatani ini sangat ramah petani kecil, termasuk perempuan kepala keluarga: bisa dimulai dengan modal kecil atau tanpa modal, kebutuhan tenaga kerja lebih ringan, ramah bagi petani perempuan, tidak selalu butuh lahan yang luas (petani yang masih aktif rerata memiliki lahan di bawah 1

hektare), dan bisa mendatangkan pendapatan yang nisbi teratur dalam frekuensi lebih cepat. Karena itu, surutnya pemeliharaan ulat sutra dapat dilihat sebagai dinamika dalam rentang strategi penghidupan para pelaku di hulu. Mereka akan kembali mengusahakan sutra ketika ulat sutra yang bermutu baik kembali tersedia.

- Penyusutan jumlah pelaku di hulu ini menyebabkan rendahnya produktifitas ulat dan penyusutan pada penjualan ulat sutra oleh PT Perhutani. Kurangnya keuntungan yang petani peroleh mendorong mereka menginvestasikan lebih sedikit tenaga dan modal untuk ulat sutra, termasuk mengurangi atau berhenti membeli ulat sutra dari PT Perhutani.
- Kebijakan masih lebih berfokus pada perbaikan komoditas untuk tujuan memacu produksi, dan lebih banyak mengabaikan ciri khas manusia (petani) yang terlibat. Anggaran untuk persuteraan di Sulawesi Selatan secara umum meningkat pesat pada 2019-2020, diikuti rentetan kegiatan berupa bantuan bibit murbei dan ulat sutra (termasuk impor) yang dilaksanakan tanpa persiapan sosial yang memadai. Bantuan juga diarahkan ke pelatihan-pelatihan untuk menambah keterampilan petani.
- Pendekatan yang agak berbeda tampak pada penelitian yang masih terus berjalan untuk mengembangkan indukan bibit ulat sutra yang lebih adaptif (kini belum rampung), yang potensial menghapus ketergantungan terhadap impor bibit ulat.
- Kebijakan mempermudah prosedur impor diiringi menghilangnya fungsi badan pemerintah yang bertugas mendeteksi penyakit ulat di daerah-daerah yang membuat ancaman penyakit terus mengintai.
- Pendekatan yang memberdayakan tampak pada upaya KPH Walenae mengorganisir petani yang berpotensi menjadi persiapan sosial yang baik. Program ini belum berjalan maksimal. Pranata tradisional masyarakat menjadi hambatan oleh perubahan kelembagaan KPH dan pranata patron-klien yang mempertahankan relasi kuasa yang timpang dalam akses lahan.
- Tampak beberapa persoalan kelembagaan di institusi pemerintah terkait. *Pertama*, fragmentasi pembagian mandat organisasi-organisasi pemerintah terkait yang mengurus persuteraan membuat kerja dinas-dinas tersebut kurang fleksibel menangani isu-isu yang berada di luar mandat masing-masing. *Kedua*, institusi pemerintah terus melakukan perubahan struktur kelembagaan dan menghambat keberlanjutan kerja-kerja berjangka panjang. Perubahan struktur dinas-dinas juga mengalihkan sumberdaya di kabupaten menjauh dari persoalan yang dihadapi sektor hulu.

Sektor manufaktur

- Masalah utama yang dihadapi para pemintal saat ini ialah menyusutnya kuantitas dan kualitas produksi kokon. Penyusutan usaha pemintalan berkaitan langsung dengan persoalan dari mata rantai sebelumnya di hulu. Banyak

pemintal rakyat berhenti beroperasi atau beroperasi secara sangat terbatas karena kurangnya pasokan kokon.

- Budidaya murbei dan pemeliharaan ulat sutra yang kurang tepat menghasilkan kualitas kokon rendah dan berpengaruh pada beban kerja pemintal. Dengan kualitas kokon lebih baik, mereka bekerja lebih cepat untuk menghasilkan volume benang yang menjadi ukuran pembayaran upah.
- Keterbatasan pemilikan alat membebani para pemintal. Kokon yang tidak segera dipintal akan mempengaruhi kualitas benang, namun sulit untuk segera memintal karena pelaku kecil punya keterbatasan alat pemintal.
- Alat yang digunakan pemintal rakyat juga kian sulit mengejar kebutuhan pasar yang menginginkan produk sutra yang murah dan halus.
- Bantuan alat pemintal moderen yang didatangkan badan pemerintah terkait belum diiringi oleh model pengelolaan yang bisa memastikan keberlanjutan operasinya dan menguntungkan petani.
- Banyaknya pelaku usaha gulung tikar, tidak aktif, atau menurunkan tingkat aktifitas karena menurunnya produksi benang lokal.
- Para pengusaha tenun berskala kecil, yang kebanyakan adalah penenun mandiri, menghadapi deretan isu yang berhubungan dengan penjualan. (1) berhadapan dengan harga jual produk yang tertinggal di belakang peningkatan harga benang, (2) permainan harga benang oleh pengusaha yang merugikan. Semua persoalan ini tidak jarang membuat mereka kesulitan untuk bertahan.
- Para pengusaha tenun berskala besar lebih banyak menghadapi persoalan yang berhubungan dengan penenun langganan. (1) Perebutan/pembajakan penenun langganan oleh pengusaha lain, (2) kesulitan memenuhi tenggat yang mereka janjikan kepada pembeli karena penenun menurut mereka “terlalu santai”, (3) penenun yang berhenti menenun karena berbagai alasan—terutama alasan keluarga. Namun seluruh persoalan ini tampaknya belum akan membuat mereka akan bangkrut.
- Rendahnya tingkat upah penenun langganan dan penenun pekerja, yang membentuk mayoritas penenun sutra Sulawesi Selatan, merupakan persoalan utama di sektor produksi. Rendahnya upah memastikan para perempuan penenun kesulitan untuk meningkatkan taraf hidup.
- Benang impor sutra dan non-sutra semakin mendominasi pasar tenunan. Persentase penjualan benang sutra lokal jauh menurun dibandingkan benang impor yang meningkat pesat. Ketergantungan pada benang impor secara tidak langsung berdampak pada penenun mandiri dan/atau pengusaha tenun skala kecil.
- Rendahnya pendapatan penenun menciptakan degradasi profesi penenun bagi masyarakat Wajo, tempat mayoritas penenun sutra Sulawesi Selatan tinggal. Kerja memenun tergeser menjadi pilihan penghidupan tersier atau terakhir. Pekerjaan memenun menjadi tidak menarik bagi perempuan muda dengan tingkat pendidikan lebih tinggi.

- Para perempuan yang masih bekerja sebagai penenun harus hidup dalam kemiskinan. Banyak dari mereka adalah perempuan kepala keluarga, janda maupun mereka yang belum pernah menikah. Mereka rentan terhadap guncangan sekecil apa pun.
- Intervensi pemerintah belum kunjung menyentuh penenun langganan dan pekerja. Seluruh informan yang ditemui mengaku belum pernah menerima pelatihan atau bantuan lain. Tampak indikasi bahwa bantuan-bantuan hanya diakses penenun-penenun tertentu.
- Terjadi kelemahan manajemen pengetahuan tentang persuteraan. *Pertama*, alpanya data dasar yang merangkum profil seluruh penenun—termasuk tingkat keterampilan serta akses terhadap bantuan dan pelatihan. *Kedua*, kealpaan laporan tentang *outcome* dan *impact*, berpotensi menyembunyikan kegagalan atau kelemahan program pada tahun-tahun sebelumnya.
- Sulit menghindari kesan hadirnya bias gender dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan program badan pemerintah terkait.

Sektor hilir

- Besarnya *captive market* produk sutra Sulawesi Selatan. Para pengguna masih mengoleksi dalam jumlah nisbi besar, dan jumlah pengguna cukup besar. Ini karena produk sutra melekat erat dalam ritual-ritual siklus hidup masyarakat Sulawesi Selatan: sejak kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Demikian pula, masa-masa perayaan lebaran dan ulang tahun kabupaten dan provinsi.
- Semakin banyaknya sarung yang ditenun menggunakan bahan campuran sutra dan sintetis, karena menurunnya produksi benang sutra di tengah permintaan pasar yang cenderung tetap atau meningkat.
- Relatif tingginya harga sarung sutra asli bagi kebanyakan konsumen. Boleh jadi karena bertambahnya jumlah pengguna dengan daya beli yang lebih rendah sementara harga nominal sarung sutra asli terus menanjak (karena inflasi dan kelangkaan).
- Dalam jumlah terbatas, sebagian konsumen yang tidak tahu membedakan sarung sutra asli dan campuran.
- Bahan produk sutra (benang sutra) lokal kurang bermutu. Kebanyakan konsumen butuh sarung yang bisa bertahan lama dan sebagian sarung/kain sutra asli lebih mudah luntur atau pudar, dan kadang menghasilkan tenunan yang tidak rata karena ketebalan benang yang tidak konsisten. Ini juga menjadi salah satu faktor pencampuran bahan sutra dan sintetis.
- Semakin banyak konsumen yang tidak sanggup membeli sarung sutra asli, membuat motif (atribut yang mencirikan sarung sutra) menjadi penting, berujung pada superioritas motif di atas keaslian bahan. Pentingnya motif dalam penjualan produk tenun ini kemudian memunculkan plagiasi motif yang

menciptakan tekanan harga. Dan pengurusan paten yang memakan waktu cukup panjang menjadi keluhan para pelaku.

- Badan-badan pemerintah terkait lebih berfokus pada kerja promosi, misalnya dengan pameran-pameran, membuat galeri, dan fashion show. BNI lewat program CSR mereka juga melakukan branding terhadap Kampung Sutra BNI yang sangat membantu memperkenalkan produk-produk dari kampung tersebut kepada calon konsumen.

Rekomendasi

Sektor Hulu.

- Produksi telur ulat sutra nasional yang berkualitas, mudah diakses dan dirawat oleh petani, dan berkelanjutan.
- Perbaikan sistem deteksi dini penyakit ulat sutra.
- Perbaikan kelembagaan, infrastruktur, dan SDM untuk uji adaptasi dan produksi telur ulat sutra.
- Pengorganisasian /penguatan kelembagaan petani dalam rangka budidaya murbei dan ulat sutra, serta negosiasi
- Pengadaan dan peningkatan kapasitas tenaga pendamping petani ulat yang sensitif gender.

Sektor Manufaktur

- Pembentukan unit pengelola alat pemintalan full otomatis yang sudah diadakan.
- Lembaga pengelola pemintalan menyiapkan mekanisme dan model pengelolaan alat pintal full otomatis yang sudah diadakan.
- Penyusunan data dasar profil dan pengorganisasian penenun mandiri dan langganan .
- Memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok penenun (berdasarkan tempat tinggal).
- Melakukan pelatihan-pelatihan bagi penenun agar terbiasa menjalankan pertemuan, kelompok, dan usaha secara mandiri.
- Melakukan penelitian bersama penenun (PAR) untuk memformulasikan isu-isu mereka dan menjalankan tindak lanjutnya secara kolektif.
- Perbaikan akses bantuan kepada penenun, bantuan alat dan permodalan bagi penenun mandiri dan langganan/kontrak.
- Pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja terkait upah dan hak-hak penenun pekerja.
- Pertemuan/konsultasi berkala antara pemerintah, penenun pekerja, dan pengusaha untuk membicarakan upah dan hak-hak penenun pekerja.
- Pengadaan tenaga ahli tekstil yang menangani permasalahan pemintalan dan pertenenan.

Sektor Hilir

- Pembuatan Peraturan Bersama Gubernur dan Bupati tentang labelisasi produk sutra serta sosialisasi kepada pelaku usaha.
- Penyediaan sarana dan tenaga pendukung proses labelisasi sutra.
- Program hari kerja dengan pakaian sutra.
- Promosi dalam bentuk fashion show, pameran, galeri, dan even budaya.
- Pembuatan Website Galeri Sutra yang dilengkapi *story telling*
- Perbaikan sistem sertifikasi motif produk sutra termasuk aturan reward dan punishment dalam plagiasi motif

Lintas Sektor

- Pelatihan sensitifitas gender dan inklusi sosial serta prinsip FPIC lainnya yang terinternalisasi dalam mandat institusi para pihak
- Pembentukan gugus tugas yang terkoneksi dengan kebijakan pusat, kuat mengkoordinasi peran yang ada di provinsi dan kabupaten, lentur dalam sinkronisasi perencanaan, pengalokasian sumber daya
- Pengembangan mitra yang kuat di luar sistem birokrasi untuk pengawasan dan kontrol (non parlemen)
- Perluasan peran pelaku masyarakat sipil yang tidak hanya bertumpu pada SSC di level kabupaten, atau mengembalikan mandat SSC sebagai asosiasi pelaku usaha mitra pemerintah yang bisa menjadi lembaga publik mitra pemerintah.
- Penyusunan data base yang lengkap, sistematis, terbaharui, dan dapat diakses oleh publik, serta publik dapat memberikan koreksi dan masukan.
- Melanjutkan dan menguatkan program penciptaan kewirausahaan baru (seperti target Wajo dalam menciptakan 1000 pengusaha baru di sektor sutra) yang lebih terkoneksi dengan pembinaan pelaku kecil
- Memetakan strategi yang dilakukan oleh setiap stakeholder pada wilayah kerja masing-masing.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Beraneka pelaku di Sulawesi Selatan terlibat dalam mengembangkan komoditas sutra sejak 1950-an (Sadapotto, 2010). Sarung sutra dengan mudah ditemukan dalam kegiatan keseharian, pada rangkaian ritual tradisional dan keagamaan, serta belakangan pada upacara hari ulang tahun kabupaten dan provinsi Sulawesi Selatan. Usaha sutra melibatkan sejumlah rangkaian kegiatan, sejak dari budidaya tanaman murbei, pemeliharaan ulat sutra sampai pemintalan kokon menjadi benang, penenunan, hingga pemasaran (Nurhaedah & Bisjoe, 2013; Sadapotto, 2012).

Intervensi pemerintah untuk meningkatkan pengembangan dan peningkatan sutra di Sulawesi Selatan bermula setidaknya sejak 1970, oleh Departemen Pertanian (Dirjen Kehutanan) lewat Proyek Pembinaan Persuteraan Alam Sulawesi Selatan (Ridwan et al., 2011; Balai Persuteraan Alam, 2010). Proyek pengembangan sutra ini kemudian didukung oleh *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dengan membangun Pusat Teknologi Persuteraan Alam pada tahun 1984 (Balai Persuteraan Alam, 2010). Dampaknya, Sulawesi Selatan ketika itu menjadi salah satu wilayah pengembangan persuteraan alam di Indonesia dan berkontribusi 70 sampai 80 persen terhadap produksi benang sutra nasional (Maturidy, 2011; Nuraeni, 2017; Isnan et al., 2019). Produksi sutra Sulawesi Selatan ketika itu didukung oleh 3,556 petani (kk) yang tersebar di 13 daerah dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Balai Persuteraan Alam, 2010).

Kajian ini berfokus pada komoditas sutra karena beberapa alasan. *Pertama*, komoditas sutra melibatkan rantai nilai yang panjang, melibatkan banyak sektor, dan menawarkan beraneka manfaat. Sejumlah kepustakaan mengidentifikasi sedikitnya enam manfaat utama pengembangan komoditas sutra. Pertama, sutra punya andil pada peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat karena sifatnya yang padat karya dan masa pemeliharaan ulat sutra sampai penjualan kokon yang relatif pendek (Atmosoedarjo et al.,

2000; Sadapotto, 2010; Isnan et al., 2019). Kedua, pengembangan sutra terkait dengan pemeliharaan lingkungan karena pohon murbei dapat memperbaiki lahan kritis sehingga dikenal sebagai tanaman konservasi (Sadapotto, 2010; Isnan & Muin, 2015). Dengan demikian, pohon murbei bisa ditanam di semua jenis lahan bahkan di lahan kritis sehingga membantu petani di daerah yang kurang curah hujan (Sadapotto, 2010). Ketiga, pohon murbei merupakan alternatif tanaman hutan sehingga menghindari kerusakan hutan dan dapat menjadi salah satu jalan masuk menuju perhutanan sosial (Sadapotto, 2010; Harbi et al., 2015). Keempat, daun murbei tidak semata untuk pakan ulat sutra tapi bisa juga dikembangkan untuk pakan ternak lain, seperti sapi, kerbau, domba, ayam dan kepiting bakau (Isnan & Muin, 2015; Setiawan & Wiryawan, 2015; Dady et al., 2016; Kamaruddin et al., 2018). Kelima, daun murbei seringkali dimanfaatkan sebagai minuman kesehatan atau obat herbal yang dikenal dengan teh daun murbei (Isnan & Muin, 2015; Wirastuty, 2019; Laelasari et al., 2016; Miladiyah, 2003). Keenam, komoditas sutra memiliki potensi besar untuk pengembangan agrowisata dan industri kreatif (Sumarni & Abdullah, 2019; Cangara et al., 2019; Akil, 2015). Terakhir, yang tak kalah pentingnya pengembangan komoditas sutra juga selama ini melibatkan kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang difabel, dan masyarakat miskin (Lathifah et al., 2015; Ibrahim et al., 2013; Rachmawati; Suyono, 2006).

Keanekaragaman manfaat komoditas ini di sepanjang proses produksi dari hulu ke hilir meletakkannya pada posisi yang sangat strategis. Pengembangan komoditas sutra menyodorkan potensi sangat besar dalam memberikan dampak lebih luas untuk peningkatan perekonomian dan lingkungan Sulawesi Selatan.

Kedua, meski manfaatnya beraneka ragam dan telah menjadi salah satu prioritas pemerintah propinsi, situasi komoditas sutra terus mengalami penurunan sejak dua dekade terakhir. Sesuatu yang kelak berjalan beriringan dengan melambannya laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sejak 2016. BPS (2020) mencatat bahwa terjadi pelambatan sebesar 0,5 persen pada perekonomian di Sulawesi Selatan dalam tiga tahun terakhir. Roda perekonomian Sulawesi Selatan ditopang oleh dua sektor utama

yaitu sektor pertanian dan sektor industri pengolahan, dua sektor yang menjadi domain utama komoditas. Berdasarkan data BPS (2020), sektor pertanian menyumbang sebesar 23,43 persen PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 2016, dan menurun pada titik 21,28 persen pada 2019. Demikian halnya dengan sektor industri pengolahan yang berkontribusi 14,06 persen pada PDRB Sulawesi Selatan tahun 2016 kemudian mengalami penurunan pada angka 13,16 persen pada 2019.

Selain berkontribusi pada PDRB, sektor pertanian juga menjadi penyerap utama tenaga kerja di Sulawesi Selatan. BPS (2020) mencatat sekitar 1,3 juta tenaga kerja atau 36 persen dari total tenaga kerja Sulawesi Selatan menggantung hidup dari sektor pertanian. Sementara sektor industri pengolahan menyerap sekitar 17 persen tenaga kerja di Sulawesi Selatan. Wajar bila penurunan produksi pertanian dan industri Sulawesi Selatan dalam tiga tahun terakhir (2016-2019) berdampak pada pelambatan pertumbuhan ekonomi makro di Sulawesi Selatan.

Alasan *ketiga* kajian ini berfokus pada sutra ialah fakta bahwa sutra kini merupakan salah satu program utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pelambatan sektor pertanian dan industri merespon serius oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan 2018-2023, sektor pertanian menjadi program prioritas. Salah satu strategi di sektor ini ialah mengembangkan komoditas unggulan yang punya basis budaya dan sumberdaya yang saling mendukung. Bentuknya ialah membangkitkan kembali *icon* ekonomi kreatif Sulawesi Selatan, yaitu komoditas sutra. Hal ini sejalan dengan RPJMD Sulawesi Selatan yang menyatakan sutra sebagai salah satu target utama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada pengembangan sektor industri pengolahan, selain kopi, coklat, rumput laut, markisa dan pengolahan hutan.

Sementara itu, merespon pelambatan sektor industri pengolahan sejak 2017, Pemerintah Sulawesi Selatan menetapkan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2038. Kebijakan ini pun menyatakan bahwa komoditas sutra sebagai salah satu program

utama pembangunan industri Sulawesi Selatan. Tim studi perencanaan pengembangan industri Sulawesi Selatan menilai bahwa sutra memenuhi standar penilaian untuk dijadikan komoditas industri unggulan.¹

Menurut perencanaan tersebut Pemerintah Sulawesi Selatan mengharapkan dalam dua dekade nanti industri sutra dapat menambah pendapatan ekspor sebesar USD 1,34 juta, menyerap tenaga kerja tiga kali lipat, dan berkontribusi lebih besar pada sektor industri. Selain itu, pengembangan komoditas sutra ini juga diharapkan dapat membangkitkan kembali perekonomian Sulawesi Selatan pasca pandemic Covid-19.

Untuk mewujudkan harapan itulah, dan mengingat manfaat serta persoalan terkini yang dihadapi sutra, diperlukan sebuah kajian tata kelola dan rantai nilai sutra. Karena itu, kajian ini akan menggunakan kerangka Analisa rantai nilai (*value chain analysis*). Di dalamnya akan mengurai isu, tren, dan potensi komoditas sutra dari hulu ke hilir. Dengan demikian kajian ini juga akan mendalami relasi antar-aktor dan intervensi kebijakan yang telah berlangsung selama ini untuk mendukung rantai nilai sutra Sulawesi Selatan. Untuk bisa mengurai secara terperinci elemen-elemen di atas, kajian mengadopsi aspek-aspek relevan dari sejumlah pendekatan: ekonomi, kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI), penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*), dan pendekatan kajian kebijakan dan aktor.

Kajian ini diharapkan menjadi salah satu jalan untuk pembaharuan informasi dan menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan terkini. Kajian ini pun diharapkan menjadi acuan bagi upaya menata peta jalan pengembangan sutra Sulawesi Selatan untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2038.

¹ Standar penilaian tersebut antara lain adalah nilai tambah ekonomis, kontribusi pada pertumbuhan daerah, kemampuan menjadi penggerak utama, kesiapan dan kesediaan stakholders, penyerapan tenaga kerja, potensi pasar, penguasaan teknologi dan manfaat pada lingkungan.

1.2. Tujuan

1. Mengidentifikasi dan memetakan stakeholder dalam pengembangan komoditas sutra
2. Memahami potensi, persoalan, tantangan tren, dan peluang pengembangan komoditas sutra dari sektor hulu ke sektor hilir dalam kerangka analisis rantai nilai (*value chain analysis*)
3. Mengidentifikasi kebijakan (daerah dan nasional) dan faktor lain yang berpengaruh – positif dan negatif – dalam pengembangan komoditas sutra
4. Merumuskan agenda kebijakan berbasis bukti dan program intervensi pengembangan komoditas sutra yang mengintegrasikan isu kesetaraan gender dan inklusi sosial serta hubungan antar pemerintahan (*intergovernmental relation/multilevel*).

1.3. Output

1. Laporan penelitian kajian rantai nilai pengembangan komoditas sutra Sulawesi Selatan yang memuat arah model bisnis sutra yang inklusif dan berkelanjutan
2. Rekomendasi kebijakan pengembangan komoditas sutra Sulawesi Selatan.

1.4. Cakupan

A. Substansi

Kajian komoditas unggulan sutra Provinsi Sulawesi Selatan ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis rantai nilai (*value chain analysis*). Kajian ini juga mengadopsi pendekatan gender, kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI) yang relevan dalam proses desain, pelaksanaan, dan analisis kajian. Untuk itu, kajian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kajian berikut:

1. Untuk identifikasi dan memetakan stakeholder dalam pengembangan komoditas sutra. *Siapa saja yang terlibat dalam rantai nilai sutra? Bagaimana peran, pengaruh serta akses pelaku (individu/lembaga) terhadap rantai nilai?*

2. Memahami potensi, persoalan, tantangan tren, dan peluang pengembangan komoditas sutra dari sektor hulu ke sektor hilir dalam kerangka analisis rantai nilai. *Bagaimana situasi tatakelola di sepanjang rantai nilai sutra saat ini, apa saja tantangannya, dan bagaimana peluang pengembangan sistem pendukung rantai nilai? Bagaimana hak-hak pekerja, mekanisme pemberian kerja? Bagaimana peningkatan pendapatan, kualitas hidup keluarga terkait pendidikan, kesehatan, dalam rantai nilai sutra? Bagaimana situasi kesetaraan gender dalam rantai nilai sutra?*
3. Untuk identifikasi kebijakan (daerah dan nasional) dan faktor lain yang berpengaruh dalam pengembangan komoditas sutra. *Bagaimana bentuk kebijakan dan program pemerintah dalam mendukung rantai nilai sutra? Bagaimana situasi dan kinerja lembaga/asosiasi yang terlibat dalam persuteraan? Sejauh mana intervensi pemerintah dan keterlibatan lembaga strategis lain (swasta, CSO, lembaga internasional) membangun lingkungan pendukung rantai nilai komoditas? Bagaimana potensi dan keterbatasan dalam pembangunan partisipatoris (kerjasama stakeholder) di sepanjang rantai nilai sutra?*

B. Wilayah

Wilayah kajian ini berfokus di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan beberapa data pendukung juga dikumpulkan di luar provinsi. Penelitian lapangan dilakukan di Kabupaten Wajo, Soppeng, dan Enrekang. Tim juga melakukan sejumlah wawancara dengan beberapa pelaku di luar Sulawesi Selatan, mengkaji dokumen-dokumen pendukung dari level nasional, dan melakukan survai pasar produk sutra secara daring (*online*) yang melibatkan pelanggan dari luar provinsi.

C. Kegiatan

1. Pengumpulan data, termasuk survei, wawancara mendalam dan observasi lapangan.
2. Desk study Kebijakan di level Kabupaten, provinsi dan nasional.

3. Workshop kolaborasi yang melibatkan anggota peneliti yang multidisiplin dan multipihak.
4. Monitoring dan laporan perkembangan.
5. Analisis data kualitatif dan kuantitatif.
6. Presentasi draft dan laporan akhir.
7. Penyusunan laporan.

BAB 2 KERANGKA PENELITIAN

2.1 Pendekatan Multidimensi pada Kajian Rantai Nilai

Kajian klasik tentang rantai nilai selama ini hanya melihat perubahan nilai marjin dari satu pelaku ke pelaku lain di sepanjang rantai dari hulu hingga ke hilir, baik terhadap aliran pasokan bahan baku dan kesenjangan nilai yang didapatkannya (Meixell & Gargeya, 2005). Sedangkan *Food and Agriculture Organization* (FAO) mendefinisikan rantai nilai sebagai 'sistem ekonomi' yang terdiri dari perencanaan distribusi dan pasokan yang digunakan produsen untuk tujuan menjual barang dan bersaing di pasar konsumen yang sama (Fourcadet and Attaie, 2003). Kaplinsky dan Morris (2003) menggambarkan bahwa rantai nilai merupakan 'rangkaian aktivitas' yang diperlukan untuk membawa produk atau jasa dari sebuah konsepsi menuju fase produksi dengan melibatkan kombinasi transformasi fisik serta input yang berbeda, kemudian didistribusikan ke konsumen termasuk pembuangan akhir setelah digunakan.

Analisa rantai nilai secara sederhana dapat didefinisikan sebagai aliran nilai yang terjaga dari hulu ke hilir dalam sebuah rantai pasok. Pendekatan yang sederhana ini memberikan alat yang cukup fleksibel dalam menyoroti distribusi pendapatan di tingkat unit produksi dalam satu mata rantai pasokan. Tapi belum cukup teragregasi ke persoalan yang lebih luas terutama seperti isu kompleksitas tenurial atau tumpang tindih akses, kesenjangan akses, legalitas, kesenjangan antara kesinambungan keuntungan dan distribusi manfaat, serta isu tata kelola lainnya yang lebih luas.

Kajian rantai nilai saat ini telah jauh lebih kompleks yang memberikan ruang interpretasi lebih luas baik terhadap metodologi interdisipliner teoritis maupun implikasi bagi pengambilan kebijakan secara praktis (Neilson & Pritchard, 2011). Kajian ini menggunakan pendekatan rantai nilai yang multidisiplin dengan tetap memijak atau mengikuti aliran manajemen rantai pasok (*supply chain management*) yaitu aliran material, uang, informasi, risiko dan nilai.

Kebanyakan literatur hanya menyebutkan aliran material, uang dan informasi. Risiko dan nilai adalah aliran yang saling terkait dan dibahas

dalam konteks yang lebih mendalam. Risiko yang bisa dimitigasi dalam supply chain akan menjaga nilai dalam *supply chain* agar lebih kompetitif dengan tetap memperhatikan basis modal sosial kebudayaan serta mereka yang teralineaasi atau tereksklusi dari proses dominan serta memposisikan peran tata kelola oleh institusi pelayanan publik. Kajian ini tetap berporos pada domain dasar mengikuti aliran-aliran rantai nilai antara lain *physical flow*, *financial flows*, dan *informational flow* dari kerangka IFAD (2014) dan Kaplinsky dan Moris (2003), namun digeledah lebih jauh dengan analisa *livelihood*, *gender* dan inklusi sosial untuk melihat bagaimana aktor-aktor teralineaasi dan terlibat, serta menganalisa tatakelola (*governance*) dan kebijakan yang lebih kompleks.

Kajian rantai nilai yang multidisiplin ini mengadopsi aspek relasi kuasa dari *global commodity chain* (antara lain Gereffi, 1980) yang mendalami tatakelola (*governance*) rantai komoditas dan melihat siapa yang lebih memegang kuasa di dalam tatakelola tersebut. Meski demikian, kajian ini memilih pendekatan lebih mendalam daripada pendekatan *global commodity chains* yang lebih banyak menyoroti relasi antarpelaku internasional dan terpatok pada satu komoditas tertentu. Menjadi demikian karena dalam kajian ini pelaku sutra lebih banyak berada di level mikro, dan komoditas sutra melekat erat pada rantai komoditas-komoditas lain. Unit-unit usaha tani, misalnya, tidak hanya memproduksi murbei dan kokon, usaha tenun dan penenun tidak hanya menenun produk sutra, dan para pedagang tidak hanya menjual produk-produk sutra.

Kajian ini pun tidak terjebak hanya fokus pada "keunggulan kompetitif" (yang diperkenalkan Porter, 1980; 1985) yang lebih banyak hanya menyelidiki pengembangan kapasitas unit-unit usaha (*firms*) yang bersifat endogenous dalam menciptakan efisiensi dan menjalankan *upgrading* demi mencapai penambahan nilai yang berkesinambungan. Melampaui batasan ini, kajian ini juga melihat bagaimana kapasitas (atau kurangnya kapasitas) bisa juga bersifat *exogenous*, yaitu kapasitas yang secara formal diperoleh dari kebijakan dan infrastruktur yang mendukung, dan secara informal dari faktor-faktor budaya dan mutu relasi dengan setiap pihak di dalam mata rantai (Kaplinsky dan Morris, 2003). Dengan demikian, penyelidikan juga akan sedikit menyinggung aktor-aktor di luar unit-unit usaha (*firms*), dan pranata-pranata informal yang memberi efek penting bagi rantai nilai sutra.

Untuk menelaah keluasan aspek-aspek inilah (distribusi pemasukan, tatakelola rantai nilai, relasi kuasa, dan intervensi kebijakan) pendekatan rantai nilai yang diadopsi di sini butuh masukan dari disiplin-disiplin berbeda. Dengan kata lain, kajian bersifat multidisiplin.

2.2 Analisa Kuasa dan Kepentingan Aktor: Terlibat dan Tereksklusi dari Tatakelola Rantai Nilai Sutra

Dengan multidisiplin kita dapat menyajikan suatu penjelasan kenapa ada pihak yang memperoleh manfaat begitu besar, sementara pihak lain sangat rapuh tereksklusi dari aliran rantai nilai. Analisa penghidupan (*livelihood*), gender dan inklusi sosial dapat dilengkapi dengan literatur teori kuasa *access* (Ribot & Peluso, 2003) dan *exclusion* (Hall dkk, 2011) melihat bagaimana rantai nilai menguntungkan pihak yang tertentu dan mengalienasi pihak lainnya. Teori akses melihat pada bagaimana aktor dapat mengambil keuntungan dari keterlibatannya pada proses tertentu, dan sebaliknya teori eksklusi menjelaskan bahwa di setiap keuntungan (yang bisa saja berlebih) memungkinkan pihak lain mendapatkan kerugian, yang mungkin tidak disadari atau bisa saja karena keterlanjutan sistemik yang mendera kungkungan dari rantai nilai. Analisa kuasa dan kepentingan aktor berpijak pada kerangka yang dikembangkan oleh Krott dkk (2014). Di sini aktor dipahami sebagai mereka yang memiliki kejelasan kuasa dan kepentingan. Kuasa adalah jejaring pengaruh yang dimiliki oleh aktor untuk mempengaruhi aktor lain. Kuasa ini dapat berupa dominasi atas informasi, insentif maupun disinsentif, maupun koersi yang berasal dari wewenang (*authority*) dan posisi aktor.

Penggunaan *Livelihoods analysis* dalam rantai nilai bisa mengungkap dua hal (Challies 2008: 388): Pertama, tingkat diversifikasi dalam rumah tangga pedesaan sehingga bisa menyingkap pentingnya integrasi ke dalam rantai komoditas tertentu dibandingkan dengan sumber pendapatan lain (*on farm* maupun *off farm*). Kedua, fokus pada kerentanan dan ketangguhan rumah tangga pedesaan menghadapi guncangan dan kecenderungan (tren) dari luar, dan ketika sebuah rumah tangga sangat bergantung pada integrasi dalam rantai komoditas tertentu, sejumlah tekanan mungkin muncul sebagai hasil dari dinamika yang terjadi dalam rantai nilai.

Dua alasan ini berarti analisis ini bisa digunakan untuk memahami mengapa sebuah keluarga memutuskan memasuki rantai nilai sutra,

bagaimana mereka bertahan, apa yang terjadi dalam penghidupan selama mereka berada di dalam rantai, dan akhirnya bagaimana mereka keluar.

Melihat lebih terperinci situasi keterlibatan para pelaku dalam rantai nilai sutra, termasuk distribusi pendapatan dari sutra, kajian ini juga dilengkapi dengan alat analisa isu gender dan inklusi sosial (GESI). Kerangka ini digunakan untuk menggali isu yang muncul karena kesenjangan atau ketimpangan gender dan sosial yang berimplikasi pada diskriminasi terhadap salah satu pihak berdasarkan jenis kelamin dan kemampuan fisik/mental. Diskriminasi dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan, akan menimbulkan ketidakadilan gender dan konstruksi sosial lainnya.

Untuk memetakan isu dengan alat analisis GESI dimulai dengan pengumpulan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, kemampuan fisik/mental (disabilitas), umur dan status sosial. Data terpilah tersebut diperoleh dari baseline study, rapid assessment, hasil evaluasi dan lain-lain. Agar lebih mudah menggali isu dan melakukan analisis gender dan sosial, proses menganalisa data dan informasi secara sistematis dilakukan berdasarkan jenis kelamin, kemampuan fisik/mental (disabilitas), umur, dan status sosial.

Untuk mendalami ini, analisis GESI akan diintegrasikan ke dalam kerangka yang dikembangkan Ian Scoone (2015) yang menggabungkan pendekatan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*) dan pertanyaan-pertanyaan politik ekonomi agraria yang dikembangkan Bernstein (2019[2010]). Pembauran GESI ke dalam analisis penghidupan ini akan memastikan pertanyaan-pertanyaan yang terbangun dari kerangka ini senantiasa mengintegrasikan pertanyaan gender di setiap aspeknya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

Siapa memiliki apa? Pertanyaan ini berhubungan dengan relasi sosial dalam rezim properti yang berlaku dominan, yang menentukan akses terhadap sumber-sumber penghidupan (lima aset/modal). Aspek ini mendalami bagaimana alat-alat produksi (tanah, peralatan, tenaga kerja, pengetahuan, dsb.) terdistribusi? Sebanyak apa yang mereka punya?

Siapa melakukan apa? Bagian ini berhubungan dengan aspek pembagian kerja (*division of labor*), dan di dalam setiap kerja

strategi penghidupan yang dipilih para aktor dalam setiap rantai (mis. intensifikasi, diversifikasi, migrasi). Aspek ini mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam rantai nilai (individu atau organisasi/usaha: sebagai petani, pekerja kebun, perawat ulat, pemintal, pembuat sarung, pedagang, pemilik pabrik, pemilik toko, dst.)? Bagaimana bentuk keterlibatan mereka? Bagaimana mereka bisa terlibat, pranata/aturan/mekanisme apa yang memungkinkannya?

Siapa dapat apa? Pertanyaan ini berhubungan dengan pembagian hasil kerja/pendapatan, yang terbentuk dalam beraneka bentuk relasi sosial di dalam rantai komoditas. Pendapatan di sini bisa berhentuk uang maupun non uang. Dengan demikian, pertanyaan ini juga bisa memotret proses diferensiasi sosial dan ekonomi (akumulasi dan alienasi/pemiskinan) yang terjadi di antara aktor. Dengan ini kita bisa bertanya, apa saja yang diperoleh setiap aktor dalam rantai nilai sutra, dalam bentuk uang maupun non uang? Bagaimana keadaan (sosial-ekonomi) para aktor selama berada dalam rantai nilai sutra?

Apa yang mereka lakukan terhadap apa yang mereka dapatkan? Ini berhubungan hasil-hasil penghidupan, yaitu berbagai macam strategi penghidupan para aktor, berikut konsekuensinya sebagaimana tercermin dalam pola konsumsi, reproduksi sosial, tabungan, dan invenstasi.

Dengan demikian, aspek ini mendalami apakah pendapatan mereka dari rantai nilai sutra mencukupi untuk bertahan, apakah mereka bisa menabung dan berinvestasi, sejauh mana? Bagaimana pendapatan (hasil kerja) dari rantai nilai sutra ini berdampak pada keputusan para aktor menjalankan usaha mereka? Dengan aset dan pendapatan yang mereka miliki, apakah mereka bisa bertahan dari guncangan atau krisis, apakah bisa memanfaatkan kecenderungan yang berlangsung? Bagaimana ini menentukan strategi mereka dalam memilih masuk, bertahan dan keluar dari rantai nilai sutra?

Bagaimana kelompok masyarakat dan pemerintah saling berinteraksi? Pertanyaan ini berfokus pada relasi sosial, pranata/institusi dan bentuk-bentuk dominasi dalam masyarakat dan antara warga dan negara ketika mereka membawa efek

terhadap penghidupan. Dengan kata lain pertanyaan ini menyentuh isu tentang pengaruh institusional/organisasional terhadap akses terhadap sumberdaya penghidupan. Pertanyaannya, pranata (formal/informal) dominan apa saja yang mengatur akses terhadap sumberdaya (modal/aset) penghidupan?

Bagaimana perubahan politik dibentuk oleh dinamika ekologi dan sebaliknya? Ini berhubungan dengan dengan pertanyaan-pertanyaan ekologi politik, dan bagaimana dinamika lingkungan memengaruhi penghidupan. Ini kemudian dibentuk oleh aktivitas-aktivitas melalui pola-pola dan daya akses sumber daya.

2.3 Pendekatan Para Pihak (*co-production knowledge*) untuk Agenda Intervensi Kebijakan

Kajian sebelumnya menemukan bahwa rantai nilai sutra sebenarnya sangatlah kompleks yang melibatkan banyak pihak (Nuraeni, 2017; Pratama dkk, 2019). Di sana ada produsen dan konsumen, juga pemerintah dan mitranya, yang seluruhnya menunjukkan kekayaan fragmentasi posisi dan kepentingan yang beragam. Sebagai kajian kebijakan yang secara praktikal bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, kajian ini juga mengadopsi kerangka *science co-production* (Hedges dkk, 2018 dan van der Hel, 2016), dengan sejak awal melibatkan para pihak termasuk pemerintah dalam menyusun dan terlibat dalam memproduksi temuan yang mengajak pelaku utama untuk mengambil peran setelah temuan terkomunikasikan.

Kebijakan yang hendak dirumuskan mesti berbasis bukti dari analisa permasalahan, efek dari penegakannya, dan apa antisipasi dari efek biaya yang ditimbulkan? Pelaku dan korban adalah bagian dari aktor yang bukan hanya objek riset tetapi juga salah satu bagian utama dalam metodologi dan validasi temuan. *Knowledge co-production* bisa bermanfaat dalam mengajak pihak terkait menemukan kesadaran dan intervensi bersama, untuk mengambil tindakan bersama pula. Hasil analisa dokumen kebijakan yang relevan, pemetaan aktor berikut relasi kuasa dan fragmentasinya tidak akan terisolasi dan sejak awal terkomunikasikan dan bahkan dapat ditemukan secara bersama. Memang, belum ada laporan bahwa pendekatan ini betul-betul dapat terwujud sempurna secara

metodologis (Turnhout, et al., 2020), baik karena kendala instrumen partisipasi maupun karena keterbatasan praktis penelitian (seperti waktu dan biaya). Namun instrumen diskusi para pihak, konsultasi publik, FGD dapat digunakan dalam kerangka ini untuk menemukan dan memvalidasi isu temuan, identifikasi pelaku, trend, distribusi keuntungan dan agenda para pihak dalam melakukan intervensi kebijakan.

Mengacu pada tujuan penelitian, pembauran aspek-aspek tertentu dalam sejumlah kerangka analisis di atas bertujuan untuk menjelaskan tiga aspek: 1) gambaran terperinci mengenai situasi terkini, kecenderungan dan potensi rantai nilai sutra; 2) dampak distribusional di antara para pelaku di sepanjang rata nilai, termasuk distribusi akses, kontrol, manfaat, dan peran berbasis gender dan atribusi sosial lain; 3) intervensi kebijakan dan situasi kelembagaan yang selama ini dijalankan/direncanakan dalam mendukung pengembangan rantai nilai sutra dari level daerah, provinsi hingga nasional.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian mengadopsi kerangka multidimensi (*mixed method*) dalam menilai rantai nilai komoditas sutra. Alat analisa rantai nilai digunakan pada tahap awal, dengan melalui analisis terhadap pendapatan di dalam rantai nilai, sehingga dapat dilihat siapa saja yang memperoleh manfaat dari partisipasi dalam rantai nilai, dan pelaku mana yang memperoleh manfaat dari dukungan atau pengorganisasian yang lebih baik. Selain itu analisis rantai nilai untuk mengkaji peran peningkatan (*upgrading*) dalam rantai nilai. Kajian ini akan mengikuti aliran isu utama yang ditemukan oleh analisis rantai nilai (*following the issue within value chain*) lalu diikuti dengan analisis-analisis lanjutan.

Selanjutnya pendekatan multidimensi mengikuti analisis rantai nilai untuk melihat rangkaian aspek di atas secara lebih terperinci. Analisis penghidupan, analisis gender dan inklusi sosial (GESI) diadopsi untuk melihat lebih jauh aktor yang mendapatkan manfaat, ketimpangan relasi gender, aliran distribusi, dan siapa saja yang tereksklusi dari rantai nilai. Analisis kebijakan juga digunakan dengan mengidentifikasi pengaturan kelembagaan yang telah berjalan, kompleksitas institusi pelayan publik dan masyarakat sipil, fragmentasi kelembagaan, distorsi/gangguan distribusi, dan meningkatkan nilai tambah dalam sektor, serta keterhubungannya dengan ketahanan kebudayaan masyarakat.

3.2 Lokasi dan Waktu

Penelitian lapangan dilakukan pada tiga kabupaten: dua kabupaten utama, yakni Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan, dan validasi dan pengayaan data di kabupaten terkait yakni Kabupaten Enrekang. Kajian kolaborasi ini dilaksanakan selama lima bulan (Agustus-Desember 2020). (selengkapnya lihat GRAFIK 1)

GRAFIK 1 Jadwal Kajian Rantai Nilai Komoditas Sutra Sulawesi Selatan

Jadwal Kerja Kajian Rantai Nilai Komoditas Sutra Sulawesi Selatan																								
No	Kegiatan	2020																				2021		
		Agustus				September				Oktober				Nopember				Desember				Januari		
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
1	Pembuatan Proposal Kajian	■																						
2	Presentasi/Sidang Proposal Kajian		■																					
3	Perbaikan & Finalisasi Rancangan Penelitian			■																				
4	Penyusunan instrumen				■	■	■	■	■	■	■	■												
5	fieldwork/ pengumpulan data lapangan									■	■	■	■											
6	Pengolahan data, analisis data													■	■	■	■							
7	presentasi hasil																							
8	Penulisan draft 1 laporan																							
10	Sidang TPM																							
11	Perbaikan Laporan																							
12	Laporan Final																							■

3.3. Metode

Metode pengumpulan data dilakukan secara sequensial yang dimulai dari kajian pustaka (kajian dokumen kebijakan dan studi pendahuluan). Kajian kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan berupa wawancara mendalam kepada pelaku-pelaku kunci, sensus terhadap petani pemelihara ulat, dan pengamatan (observasi) pada aktifitas utama rantai nilai sutra. Untuk memberikan perspektif baru mengenai tatakelola sutra di tempat lain, kajian ini juga melakukan studi banding (yang dilakukan secara virtual melalui wawancara kepada pelaku utama dan atau pihak yang mengenali objek studi banding). Akhirnya, penelitian ini juga melibatkan survai pasar secara daring (*online*) terhadap konsumen produk sutra. Aliran umum secara sekuens metode pengambilan data ini dapat dilihat pada TABEL 1 di bawah.

TABEL 1 *Sekuensi metodologi pengambilan data empirikal, validasi dan pelibatan para pihak*

Pengumpulan data (validasi, objektifitas dan reabilitas)					Analisis dan sintesa	<i>Policy actors engagement</i>			
Desk Study	Wawancara	Sensus petani ulat dan Observasi	Benchmarking	Survai konsumen	Analisis internal	Pengayaan dan validasi para pihak	Dialog para pihak untuk perumusan rekomendasi		

3.3.1 Desk Study (kajian dokumen)

Kajian dokumen adalah metode pengumpulan data yang tepat terutama untuk melakukan pendalaman awal (sebelum melakukan wawancara, survei dan observasi), maupun alat utama pengambilan data untuk kepentingan validasi dan triangulasi (Dul & Hak, 2007). Pada kajian ini dokumen yang dianalisis adalah hasil-hasil riset sutra berupa artikel maupun laporan penelitian, dokumen program resmi pemerintah dan para pihak yang relevan, dokumen anggaran, serta dokumen perencanaan program pemerintah yang relevan, di level nasional, provinsi maupun kabupaten. Laporan-laporan yang dianalisis tersebut dapat dilihat pada TABEL 3 di bawah.

TABEL 2 *Daftar dokumen yang dikaji pada penelitian rantai nilai*

No	Dokumen yang dikumpulkan dan dianalisis
1	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2038
2	Rencana Strategis (RENSTRA) untuk Tahun 2018 -2023. Penyusunan Renstra Tahun 2018-2023 Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan mengacu kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
3	"Roadmap Pengembangan Industri Persuteraan Alam di Kabupaten Wajo" yang diselenggarakan oleh BAPPELITBANGDA Kabupaten Wajo, bekerjasama dengan CV. SMIDCO Makassar. (2020)
4	Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014, tentang Perindustrian
5	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).
6	REVIEW RENCANA PENGEMBANGAN PERSUTERAAN ALAM PROVINSI SULAWESI SELATAN. BALAI PERSUTERAAN ALAM, DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2015
7	RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2038
8	KEPUTUSAN BUPATI WAJO NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN

	WAJO TAHUN 2019-2024
9	Fasilitasi Penelitian Persuteraan Alam di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011. Tantangan Komprehensif Persuteraan Alam di Sulawesi Selatan. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan Institute for Social and Political Economic Issues
10	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P. 56/Menhut-II/2007 TENTANG PENGADAAN DAN PEREDARAN TELUR ULAT SUTRA
11	PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.37/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 TENTANG PENGADAAN DAN PEREDARAN TELUR ULAT SUTRA
12	RPHJP KPHL UNIT XII PADA UPT KPH WALANAE 2019 - 2028
13	SK Menteri Kehutanan No.979 / Menhut-II / 2013
14	Permenhut No. P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu yang menjadi urusan Kementerian Kehutanan
15	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P. 21/Menhut-II/2009 TENTANG KRITERIA DAN INDIKATOR PENETAPAN JENIS HASIL HUTAN BUKAN KAYU UNGGULAN

3.3.2 Survei

Untuk memberikan gambaran secara utuh analisis rantai nilai setiap aktor, terutama biaya produksi, pendapatan dan margin nilai yang didapatkan setiap aktor, maka dilakukan survei. Survei ini penting untuk mendapatkan data terkini (Morris & Wood, 1991).

- Survei petani murbei/pemelihara ulat di Wajo dan Soppeng, tanggal 15-20/10/2020. Karena jumlah petani yang aktif hanya sedikit (75 orang), Tim berhasil melakukan sensus terhadap seluruh petani tersebut.
- Survei pendapatan aktor-aktor pada rantai nilai tanggal 15-20/10/2020
- Survei konsumen 5-22/11/2020 lewat platform 'google form', melibatkan 312 responden. Sebanyak 81,41 persen responden yang berdomisili di Provinsi Sulawesi Selatan, sementara 10,26 persen tersebar di provinsi lain di Pulau Sulawesi, DKI Jakarta dan Banten, dan 3,21 persen, sisanya tersebar di Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Timur, Papua dan Maluku.

3.3.4 Observasi

Observasi adalah metode yang kuat dalam ilmu sosial (Bakker, 2006). Pada kajian ini telah dilakukan observasi non partisipan, yaitu peneliti melakukan pengamatan terhadap kasus-kasus dan isu-isu spesifik dalam rantai nilai sutra. Observasi yang telah dilakukan adalah antara lain:

- Observasi aktifitas mantan petani murbei ulat sutra, pedagang, pemintal di Desa Mata Allo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, 14/10/2020
- Observasi penenun gedokan dan ATBM di Wajo 16-18/10/2020
- Observasi fasilitasi usaha industri sutra melalui CSR dengan program kampung BNI di Wajo 19/10/2020
- Observasi model kampung sutra yang disebut sebagai Kampung Sabbeta di Soppeng 21/10/2020

3.3.5 Wawancara

Wawancara mendalam adalah metode yang dominan yang digunakan pada kajian ini. Pemilihan responden berdasarkan instrumen yang telah disusun sebelumnya dan bahwa peneliti menyusun kerangka dan dikembangkan dalam bentuk rancangan awal pertanyaan yang dapat dikembangkan dilapangan. Berikut ini adalah tokoh atau aktor kunci tata kelola sutra yang kami wawancarai baik secara langsung maupun daring via zoom.

- Muslimin Bando. Bupati Enrekang. Tanggal 14/10/2020
- Andi Armin Kepala Balitbangda Kabupaten Wajo tanggal 26/12/2020.
- H. Baji (Losari Silk) pengusaha sutra. Tanggal. 20/10/2020.
- Bappelitbangda dan Dinas Perindagkop Kab Wajo. Tanggal 20/10/2020.
- Dinas Perindag Soppeng. Tanggal. 20/10/2020.
- Toko Marhaya, pedagang benang. Tanggal. 20/10/2020.
- Hadrah Petani murbei dan ulat sutra. 20/10/2020.
- Bappelitbangda Soppeng. Tanggal 20/10/2020.
- Nurdin, Kampung Sabbeta Tanggal 21/10/2020.

- A Massalangka importir telur Tanggal 21/10/2020.
- Dian (Bank Indonesia) Tanggal 24/10/2020.
- Lincah Andadari Badan Litbang Kehutanan. Tanggal 10/11/ 2020.
- A Parenrengi, Kadis Kehutanan Prop Sulsel. Tanggal 11/11/2020.
- Zulfutriani Dekranasda Prop Sulsel Tanggal. 12/11/2020.
- Ahmadi Kadis Perindustrian Prop Sulsel. Tanggal. 16/11/2020.
- Herudoyo. Direktur Bian Usaha PS KLHK. Tanggal. 18/11/2020.
- Yunan KPH Walannae. Tanggal. 21/11/2020.
- H Kurnia SSC. Tanggal. 22/11/2020.
- Bupati Wajo. Tanggal 23/11/2020.
- Penenun Gedogan di Tosora Wajo. Tanggal. 23/11/2020.
- Pemintal di Pising Soppeng. Tanggal. 24/11/2020.
- Perhutani Soppeng. Tanggal 24/11/2020.
- Malik Faisal, Kadis Koperasi UKM Prop Sulsel. Tanggal 26/11/2020.
- Iskandar Zulkarnaen, Mantan Ka UPT Tekstil Prop Sulsel Tanggal 7/12/2020.

3.3.6 Benchmarking

Kajian perbandingan (*benchmarking*) dijalankan terutama untuk penelitian membutuhkan model untuk arah pengembangan (Arrowsmith, dkk 2004), terutama berfungsi sebagai contoh yang mungkin bisa direplikasi, dimodifikasi dan dipelajari sejarah dan tantangannya, lalu dikontenstualisasi sesuai kajian yang dikerjakan. Untuk itu kami mewawancarai dua perusahaan.

- PT. Begawan Sutra Nusantara Tanggal 17/11/2020 (wawancara via zoom), 20/10/2020. Tim memilih perusahaan ini sebagai obyek kajian perbandingan karena PT Begawan Sutra melewati sejarah panjang, menemui kendala dalam membangun industri dari hilir kemudian bergerak ke industri hulu. Perusahaan ini juga telah bekerjasama dengan KLHK untuk bermitra dengan petani dalam rangka mengakses lahan lewat skema Perhutanan Sosial. Selain itu untuk menghasilkan indukan berkualitas tinggi, mereka bekerjasama dengan Balai Litbang KLHK
- PT. Chu Sai Silk Thailand. Via wawancara hasil kunjungan Masaki Tani Konjen Jepang, 20/10/2020. Perusahaan ini terkenal dengan produk benang sutra yang sangat berkualitas dan diekspor ke Eropa. Iklim tropis pengembangan budidaya murbei

dan bibit ulat mereka juga sesuai dengan iklim tropis Indonesia. Perusahaan ini dibangun 50 tahun lalu dan berfokus pada bisnis menghasilkan benang sutra berkualitas ekspor. Perusahaan ini mengembangkan model plasma inti dengan perusahaan mengkoordinir dan memberdayakan petani murbei dalam menghasilkan pakan dan kokon berkualitas tinggi.

3.3.7 Dialog para pihak

Mengacu pada kerangka *science co-production* (Hedges dkk, 2018 dan van der Hel, 2016), bahwa ilmu dan temuan dapat diproduksi bersama oleh para pihak, baik pihak yang memberi dampak maupun yang menerima dampak.

- Dialog dengan BAPPENAS dan KSI, 3/11/2020 melalui zoom.
- Dialog para pihak dengan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, 20/11/2020. Dialog ini merupakan inisiatif DPRD Sulawesi Selatan, berlangsung di kantor DPRD Provinsi, dan dihadiri oleh anggota DPRD Sulsel, perwakilan badan-badan pemerintahan tingkat provinsi, pengusaha, asosiasi pelaku sutra Wajo, akademisi, dan TPK.
- Dialog para pihak (lanjutan) dengan format FGD untuk konfirmasi temuan lapangan, 14/12/2020, melalui pertemuan virtual zoom, dihadiri 29 orang. Selain Tim Pelaksana Kajian, juga hadir perwakilan badan-badan pemerintahan tingkat provinsi dan Kabupaten Wajo dan Soppeng, akademisi, asosiasi pelaku sutra, Ornop, dan pemerhati sutra.

3.4 Instrumen

Detail instrumen penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 1.

3.5 Analisis Penelitian

Setiap hasil yang didapatkan dari operasionalisasi instrumen di atas akan dianalisis melalui

- Hasil kajian dokumen dari *desk study* dikumpulkan lalu divalidasi melalui proses triangulasi dengan temuan lainnya melalui wawancara dan observasi.

- Hasil dari kajian tersebut melihat evolusi dan devolusi kebijakan persuteraan dan industrinya dengan mengkorelasikan isu-isu di lapangan secara periodik.
- Memakai sejumlah kerangka analisis, data sensus, survai, observasi dan wawancara dikelompokkan dengan pertama-tama mengurai alur kegiatan inti rantai nilai sutra, aktor-aktor yang terlibat. Langkah selanjutnya ialah mengurai secara lebih detil masing-masing bagian rantai nilai, dengan melihat tiga aspek: (1) tren, tantangan, dan potensi; (2) dampak terhadap para pelaku; (3) intervensi kebijakan dan konstruksi kelembagaan pemerintah terkait.
- Melanjutkan analisis terhadap tiga aspek di atas ialah pembahasan tentang bentuk hubungan-hubungan antar-aspek tersebut di setiap sektor, dan lintas-sektor. Aspek-aspek yang diperhatikan dalam ulasan lintas-sektor antara lain ialah tatakelola dan relasi kuasa dan efek distribusional (financial flow) rantai nilai sutra, selain dampaknya dan kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap rantai nilai sutra Sulawesi Selatan.
- Pada bagian rekomendasi, untuk memudahkan pembacaan bagi pembaca sasaran laporan ini (pengambil kebijakan), pertama, rekomendasi akan dilengkapi matriks yang menunjukkan rentang penalaran setiap poin rekomendasi mulai dari isu sampai program dan pihak-pihak yang terkait. Kedua, rekomendasi juga akan menunjukkan level kebijakan yang relevan bagi setiap poin.

3.6 Etika dan Keterbatasan Penelitian

Tim peneliti mendeklarasikan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam pengumpulan dan penyajian data. Kami juga menyatakan bahwa semua data wawancara kami rekam dengan persetujuan responden, beberapa data kami tidak rekam karena tidak memiliki persetujuan dengan responden, dan hanya kami sajikan dalam bentuk pengayaan analisis laporan ini.

Penelitian ini berlangsung di tengah pandemi Covid 19. Situasi ini berimplikasi pada kelancaran kerja penelitian, antara lain, kesulitan untuk melakukan pertemuan-pertemuan Tim Pelaksana Kajian sejak masa perancangan penelitian, analisa temuan, hingga penulisan laporan. Keterbatasan ini cukup terasa mengingat butuh

waktu relatif panjang untuk membangun disain penelitian yang integratif dengan sebagian besar anggota Tim berasal dari latar belakang disiplin berbeda. Setelah penelitian lapangan beberapa anggota Tim terdeteksi positif Covid 19, yang juga menghambat kelancaran kerja analisa temuan dan penulisan laporan. Tim tidak dapat melaksanakan rangkaian lokakarya untuk analisa dan penulisan tersebut. Kesulitan ini diatasi dengan menambal kekurangan dengan pertemuan-pertemuan daring via zoom. Namun sejumlah wawancara mendalam cukup terbantu dengan kebiasaan/kewajaran baru pertemuan lewat zoom. Dengan kebiasaan baru ini Tim cukup mudah melakukan wawancara dengan sejumlah narasumber yang tinggal jauh dari Makassar.

Pandemi juga menyulitkan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam kajian. Tidak semua dokumen bisa dikumpulkan dan kadang butuh waktu cukup lama untuk mendapatkan dokumen yang berhasil Tim kumpulkan, karena kebanyakan permintaan dilakukan tidak secara langsung. Kealpaan sejumlah dokumen menyulitkan proses analisa di beberapa bagian. Misalnya, Tim kesulitan menentukan kontribusi rantai nilai sutra pada PDRB kabupaten karena ketiadaan sejumlah dokumen yang dibutuhkan.

BAB 4

KECENDERONGAN MUTAKHIR, DAMPAK, DAN INTERVENSI KEBIJAKAN DI SEPANJANG MATA RANTAI SUTRA SULAWESI SELATAN

Proses inti dalam rantai nilai sutra Sulawesi Selatan dapat kita bagi ke dalam tiga sektor yang mewakili tiga tahapan besar pengolahan bahan baku sampai ke pengguna akhir. Di *sektor hulu* ada beraneka kegiatan penyiapan bahan baku, yaitu budidaya murbei, pengadaan telur, dan budidaya ulat. Pada tahapan berikutnya, *sektor manufaktur* berisi rentetan proses produksi sutra: proses pemintalan dan penenunan. Di dalam penenunan ini masih banyak proses yang berlangsung (lihat bagian 'Penenunan'). Akhirnya, di *sektor pemasaran*, terdapat rangkaian kegiatan distribusi, penjualan, dan penggunaan akhir. Sebelum menyajikan rantai nilai sutra secara terperinci, GRAFIK 1 di bawah menunjukkan proses Inti dalam rantai nilai industri persuteraan alam Sulawesi Selatan.

GRAFIK 2 Proses Inti dalam Rantai Nilai Sutra



Ada sangat banyak pelaku yang terlibat dalam rantai nilai sutra. Proses dari budidaya murbei sampai penggunaan akhir menggabungkan pelaku dari petani, pemintal, penenun, badan-pengusaha tenun, pedagang kain dan sarung, importir telur ulat, serta pelabagai badan pemerintahan, di antaranya Dinas Kehutanan, Perindustrian, Perdagangan & Koperasi. GRAFIK 2 di bawah menunjukkan fungsi inti masing-masing pihak dalam rantai nilai sutra di Sulawesi Selatan.

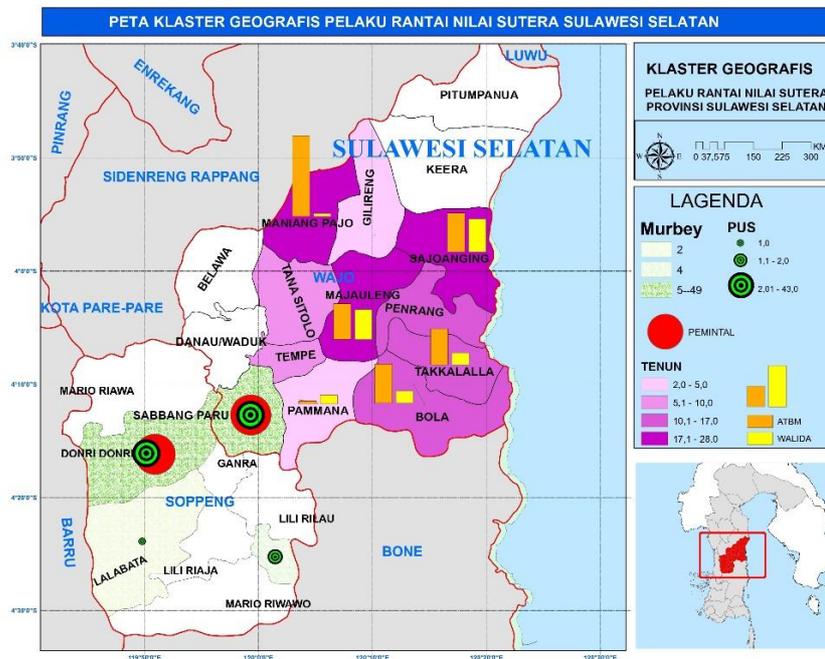
GRAFIK 3 *Pelaku Rantai Nilai Sutra Sulawesi Selatan*



Pelaku	Dinas Kehutanan (BPSKL,Perhutani) Bisnis (Impor) Kelompok Masyarakat			Dinas Perindustrian Bisnis Kelompok Masyarakat		Dinas Perdagangan & Koperasi Bisnis Kelompok Masyarakat	
Aktivitas	Membibit Mena- nam Memeli hara Mema nen Merema jakan	Meng ada kan Mene tas kan	Meme lihara Mema nen	Mengering kan Mensorta si Merebus Menarik serat Mengu lung Mentwist Men- deguming	Memotif Menenun	Menyim pan Menjual Mendistri busikan	Mengguna kan Menjual

Para pelaku di sepanjang rantai nilai sutra Sulawesi Selatan yang kini masih aktif tersebar di dua kabupaten yaitu Kabupaten Wajo dan Soppeng, dengan Kabupaten Soppeng mendominasi setor hulu dan Kabupaten Wajo mendominasi sektor manufaktur dan hilir.

GAMBAR 1 Peta Kluster Geografis Pelaku Rantai Nilai Sutra



Di bawah kami akan mengurai secara terperinci setiap tahapan kegiatan dalam mata rantai sutra di Sulawesi Selatan, mulai dari sektor hulu (budidaya murbei dan pemeliharaan ulat), sektor produksi (pemintalan dan penenunan), dan sektor hilir (pemasaran). Pada setiap bagian tersebut kami akan menyajikan kecenderungan terbaru, dampaknya terhadap para pelaku, dan intervensi kebijakan/program pemerintah serta aktor lain.

GAMBAR 2 *Ulat sutra.*



4.1 Sektor Hulu

4.1.1 Kecenderungan Terbaru

Pelaku sektor hulu melorot drastis. Pelaku-pelaku sektor hulu (petani murbei dan pemelihara ulat sutra) dalam rantai nilai sutra Sulawesi Selatan telah mengalami penciutan secara besar-besaran. Awalnya, para pelaku sektor hulu terkonsentrasi di tiga Kabupaten yakni Kabupaten Enrekang, Soppeng dan Wajo. Namun saat ini pelaku sektor hulu di Kabupaten Enrekang tidak lagi bisa ditemukan. Sedangkan di Kabupaten Wajo dan Soppeng pelaku sektor hulu masih aktif di beberapa tempat, dengan jumlah terbatas. Pelaku sektor hulu sutra yang masih bertahan di Sulawesi Selatan tinggal 75 petani. Di antara mereka, 56 petani (74,67 persen) tinggal di Kabupaten Soppeng, umumnya tersebar di Kecamatan Donri-Donri, dan beberapa berdomisili di Kecamatan Citta dan Kecamatan Lalabata. Sedangkan di Kabupaten Wajo jumlah pelaku sektor hulu yang masih bertahan hanya 19 petani, seluruhnya bermukim di Kecamatan Sabbangparu.

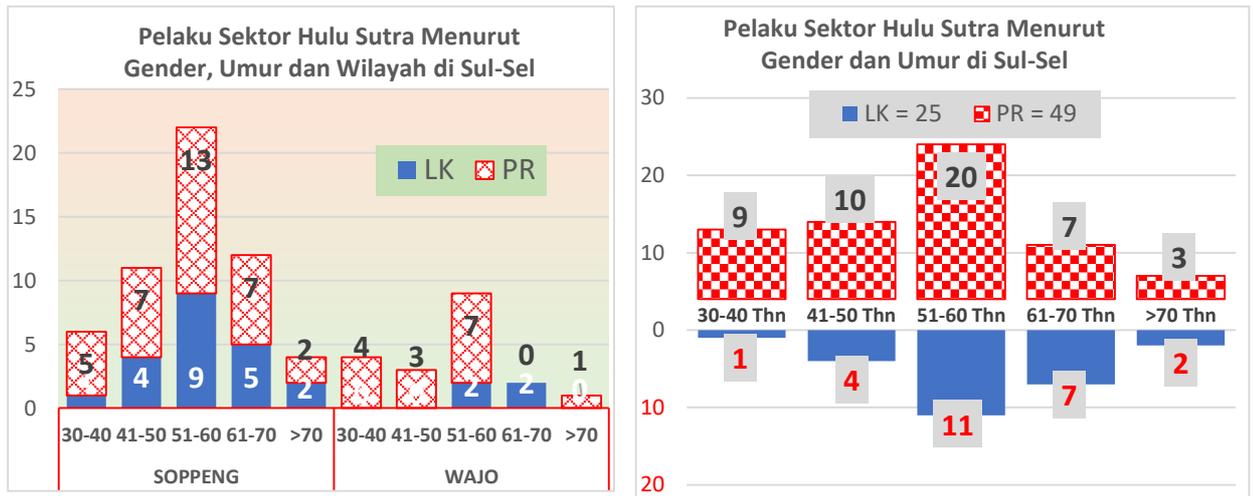
Demografi pelaku sektor hulu. Pelaku sektor hulu sutra Sulawesi Selatan yang masih bertahan didominasi oleh petani lanjut usia, berpendidikan rendah, dan umumnya perempuan. Mereka dominan (67 persen) berumur di atas 51 tahun bahkan ada yang sudah berusia 71 tahun. Sekitar 25 persen pelaku yang masih aktif berusia 61 tahun ke atas, nyaris seluruhnya berasal dari Kabupaten Soppeng, dan lebih separuh dari mereka adalah perempuan (10 dari 19 orang). Dapat dikatakan pelaku sektor ini sedang menua dan ditinggalkan oleh kelompok usia muda terutama laki-laki yang mungkin lebih memilih komoditas atau profesi lain. Di Kabupaten Wajo, laki-laki yang terlibat di sektor ini hanya tersisa 4 orang dan seluruhnya berusia 51 tahun ke atas. Sulit menghindari kesan bahwa di kabupaten ini, para laki-laki berusia muda dan berpendidikan lebih tinggi sedang meninggalkan sutra. Dari sisi pendidikan, sekitar 46 persen petani berpendidikan sekolah dasar (sebagian tidak tamat), dan hanya sekitar 5 persen yang pernah mengesap pendidikan pada tingkat sarjana (seluruhnya tinggal di Soppeng).

Lebih lanjut, sekitar 67 persen dari pelaku sektor hulu ini adalah perempuan *single parent* atau perempuan yang tidak pernah berkeluarga. Selain itu, tampak bahwa secara proporsional pelaku perempuan lebih banyak di Kabupaten Wajo daripada Soppeng, yang menunjukkan bahwa secara proporsional (dan nominal) pelaku laki-laki di Kabupaten Soppeng lebih banyak yang aktif. Gambaran ini boleh jadi mengindikasikan bahwa pelaku lelaki lebih banyak meninggalkan komoditas ini di Kabupaten Wajo. Wawancara mendalam di Kel. Walennae, salah satu lokasi pemeliharaan ulat di Kabupaten Wajo, menemui sejumlah lelaki yang kini sedang tidak aktif memelihara ulat dan telah beralih ke komoditas atau pekerjaan lain.

Dengan kata lain, selain penyusutan jumlah pelaku, di Kabupaten Wajo kaum lelaki meninggalkan perempuan untuk merawat komoditas yang sudah mengalami masa surut. Laki-laki yang pada umumnya bekerja sebagai petani murbei dan berperan sebagai pencari nafkah utama meninggalkan murbei dan beralih ke tanaman lain karena tuntutan peran sebagai pencari nafkah utama. Penanaman murbei kemudian didominasi perempuan. Akhirnya, di

Sulawesi Selatan secara umum sedang terjadi penuaan pelaku komoditas ulat sutra.

GRAFIK 4 *Pelaku Sektor Hulu Sutra Menurut Gender, Umur, Wilayah di Sulawesi Selatan*

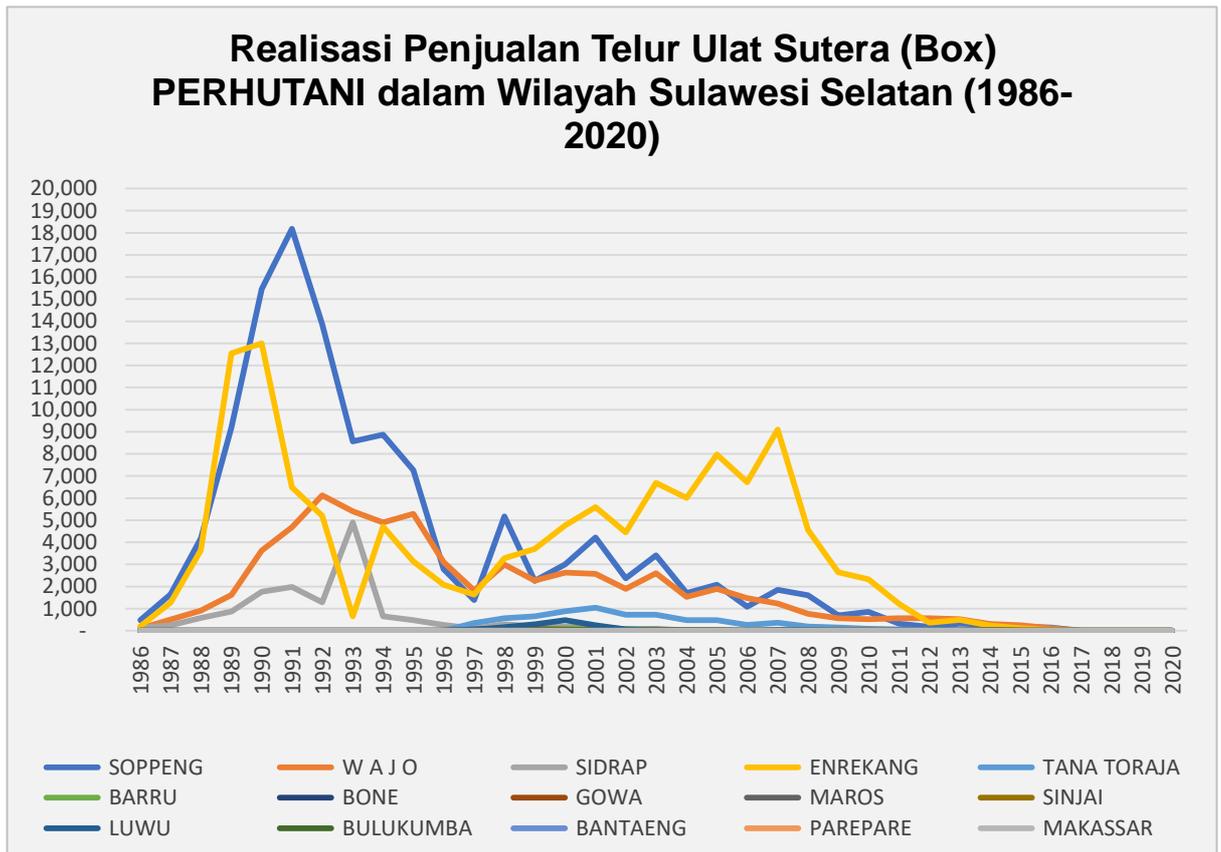


Penjualan telur ulat sutra oleh PT Perhutani terus menurun. Penurunan pelaku di sektor hulu berjalan beriringan dengan penyusutan penjualan ulat sutra oleh PT Perhutani di Sulawesi Selatan, yang berlangsung konsisten sejak 2013. GRAFIK 4 di bawah menunjukkan bahwa dominasi penjualan telur ulat sutra oleh PT. Perhutani di provinsi ini terletak di 4 kabupaten yaitu Kabupaten Soppeng, Wajo, Sidrap, dan Enrekang. Sebelum tahun 2013, di empat kabupaten itu jumlah penjualan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.² Sedangkan di kabupaten-kabupaten lain seperti Tana Toraja, Barru, Bone, Gowa, Maros, Sinjai, Luwu, Bulukumba, Bantaeng, Parepare, dan Makassar, penjualan ulat sutra hanya mengalami kenaikan pada tahun 1997 sampai 2002. Namun setelah itu penjualan di daerah-daerah itu turut mengalami penurunan berangsur sampai sekarang. Fluktuasi penjualan di seluruh daerah terjadi pada rentang antara 1986 dan 2012. Sejak tahun 2013,

² Terjadi peningkatan penjualan yang signifikan di Soppeng dan Enrekang pada rentang tahun 1986 sampai tahun 1990, namun secara drastis mengalami penurunan penjualan pada tahun 1990-an. Sementara itu, secara gradual terjadi peningkatan penjualan di daerah Wajo dan Sidrap mulai tahun 1988, namun pada tahun 1993, penjualan di daerah Sidrap menurun drastis. Begitu pula dengan penjualan di daerah Wajo, terjadi penurunan secara berangsur sejak tahun 1995.

penjualan telur ulat sutra secara konsisten menurun sampai penghujung tahun 2020, pada masa penelitian.

GRAFIK 5 *Realisasi Penjualan Telur Ulat Sutra (Box) PERHUTANI dalam Wilayah Sulawesi Selatan (1986-2020)*



Rendahnya produktivitas ulat sutra. Sebelum para pelaku sektor hulu meninggalkan usaha persuteraan, mereka sudah berhadapan dengan persoalan produktivitas ulat. Rata-rata produksi kokon per box bibit ulat sutra di dua sentra produksi sebesar 25.59 kg, atau setara dengan 3,66 kg benang sutra. Tingkat produksi kokon di Kabupaten Soppeng sebesar 27,34 kg kokon per box ulat, sedikit lebih tinggi dibandingkan produksi Kabupaten Wajo yang hanya mencapai 20,43 kg per box atau hanya setara 2,92 kg benang sutra.

Rendahnya produksi kokon di dua sentra pemeliharaan ulat sutra terjadi karena gabungan beberapa faktor: bibit ulat sutra, lingkungan, sarana, dan perlakuan/pemeliharaan.

Dalam hal bibit, petani di Kabupaten Wajo banyak mengeluhkan buruknya kualitas bibit ulat yang bisa diakses oleh para petani. Masalah ini menyebabkan berkurangnya persentase penetasan telur ulat sutra, juga membuat ulat mati, membusuk, dan tidak menghasilkan kokon. Para petani bercerita bahwa mereka berhenti memelihara ulat sutra setelah mendapati bibit yang mereka terima sebagai bantuan malah membuat mereka tidak menghasilkan apa-apa. Banyak dari bibit itu tidak menetas dan/atau mati sebelum menghasilkan kokon. Para petani yakin bahwa jika masalah akses telur sutra bermutu ini bisa diurai dan diatasi, masalah lain dengan mudah bisa teratasi. Dalam kata-kata seorang petani, “Kalau ada telur bagus, seluruh kampung ini akan berubah menjadi pemelihara telur ulat sutra.”

GAMBAR 3 Pemeliharaan ulat sutra di Pising, Kab. Soppeng.



Mengenai lingkungan, mereka menyebut polusi zat kimia, yaitu input pertanian kimia seperti herbisida dan pestisida. Zat-zat kimia bisa dengan mudah memusnahkan ulat sutra. Menurut para petani, “Bahkan mencium baunya saja, ulat-ulat itu langsung mati.” Hal ini

mencegah sebagian petani memelihara telur bila di sekiling rumahnya jagung sedang ditanam. Saat ini Walenna'e nyaris seluruhnya tertutup ladang jagung sehingga tidak terlihat orang memelihara ulat sutra. Namun ini merupakan kecenderungan baru di Walenna'e karena sebelumnya kampung ini lebih banyak ditutupi ladang murbei. Ini hanya terjadi setelah sebagian besar warga beralih menanam jagung, setelah mengalami rentetan kegagalan bersama ulat sutra. Perubahan ini terjadi karena masalah kedua, yang bahkan lebih berat untuk petani atasi.

Sedangkan sarana pemeliharaan yang terbatas tampak di semua tempat. Pemeliharaan ulat sutra umumnya berlangsung di bawah kolong rumah, hanya sekitar 21 persen petani di Kabupaten Soppeng yang memelihara ulat di bangunan khusus, dan 78 persen melakukannya di kolong rumah. Bahkan di Kabupaten Wajo seluruhnya berlangsung di kolong rumah. Berbagai kebisingan dan bau yang tidak disenangi ulat akan mempengaruhi pertumbuhannya.

Dalam hal perlakuan, rata-rata petani belum menerapkan teknik-teknik pemeliharaan tanaman murbei yang tepat: aplikasi pupuk yang terbatas, penyiangan, pendagiran dan pemangkasan seadanya, semua berdampak pada rendahnya produktivitas dan kualitas daun murbei. Produksi daun murbei yang seringkali terkontaminasi dengan racun pestisida dan herbisida juga menjadi penyebab rendahnya produksi kokon dari pemeliharaan ulat sutra petani. Akibatnya, produksi kokon yang dicapai petani masih jauh dari potensinya.

Teknik pemeliharaan tanaman murbei dan pemeliharaan ulat sutra memberi pengaruh besar pada tingkat rendemen dan kualitas benang yang dihasilkan. Pemberian pakan dan cara pemeliharaan yang kurang tepat akan menyebabkan banyak kokon cacat dan benang putus sering terjadi dalam pemintalan. Selain itu, tahapan dan teknik-teknik dalam proses pemintalan yang kurang tepat juga berpengaruh terhadap rendemen dan kualitas benang yang dihasilkan.

Namun, untuk mencapai perlakuan ideal ini dibutuhkan penelitian lebih jauh untuk melihat apakah petani memang sanggup

menyediakan seluruh hari kerja (mengingat profil demografi saat ini pelaku di hulu) dan sarana yang dibutuhkan.

Ketergantungan terhadap ulat impor. Susutnya penjualan telur ulat sutra oleh PT Perhutani berlangsung karena dua hal yang saling berkaitan: (1) belum ditemukannya solusi terhadap masalah penyakit dan daya adaptasi ulat produksi nasional, sehingga (2) ulat produksi nasional butuh perlakuan lebih intensif daripada ulat impor. Kecenderungan ini punya sejarah panjang. Sejak tahun 1970-an ketika wabah pebrine³ mulai menyerang ulat lokal sehingga sejak dekade 1980-an sudah tidak ditemukan lagi bibit lokal (Sulawesi Selatan) yang dulunya bisa dibudidayakan sendiri oleh para pelaku lokal. Sejak dekade 1980-an itu bibit mulai disuplai oleh lembaga negara. PT Perhutani menjadi sumber bibit utama bagi petani lokal. Sejak itu petani tidak lagi bisa membudidayakan sendiri ulat sutra dan menggantungkan sumber ulat dari PT Perhutani.

Namun penyakit pebrine dan lainnya berulang kali menyerang ulat produksi PT Perhutani. Persoalan ini menciptakan rentetan masalah baru yang cukup memukul sektor hulu. Sampai saat ini belum ditemukan solusi terhadap masalah penyakit ulat lokal. Bibit lokal yang akhir-akhir ini dipelihara oleh sebagian petani didatangkan dari tempat lain di Indonesia (BPSKL Bili-Bili dan Bogor). Menurut petani, ulat ini punya daya adaptasi yang rendah, sehingga ulat produksi nasional ini butuh perlakuan lebih intensif daripada ulat impor. Petani mesti mengikuti standar perlakuan yang ketat untuk mencapai hasil maksimal.⁴ Karena itulah mereka lalu mencari solusi lain, yang kebetulan juga telah tersedia: ulat impor.

³ Penyakit pebrine menyerang selama proses ulat menjadi kokon sehingga berdampak pada kualitas dan jumlah benang yang diproduksi. Pebrine adalah penyakit yang menurut Permen LHK No 37 tahun 2017 disebabkan oleh protozoa *Nozema Bombycis* yang dapat menyerang ulat dari stadia telur, ulat, pupa, maupun ngengat.

⁴ Persepsi petani ini bertabrakan dengan pendapat akademisi yang melakukan penelitian mengenai hubungan murbei dan ulat. Menurutnya, daya adaptasi bibit nasional sama saja dengan bibit impor. Mungkin perbedaan ini terjadi selama pengenalan bibit nasional yang diikuti dengan pengenalan teknik pemeliharaan ulat yang ideal sesuai standar tertentu, yang kemudian menciptakan persepsi di kalangan petani bahwa bibit ulat nasional lebih memakan waktu dan tenaga. (Wawancara dengan Sitti Halimah Larekeng, Fak. Kehutanan UNHAS). Butuh penelitian lanjutan untuk memastikan apakah perbedaan ini hanya persepsi atau memang berupa fakta.

Telur ulat sutra dari Jepang mulai tiba di Sulawesi Selatan setidaknya sejak tahun 1980-an dalam skala kecil, lalu berlanjut sejak 2007 oleh pihak swasta (CV Masalangka), kini merupakan pengimpor tunggal telur sutra di Sulawesi Selatan, yang diberi izin untuk mengimpor telur ulat sutra dari Tiongkok. Menurut petani, ulat impor ini punya daya adaptasi yang lebih baik sehingga tidak butuh perlakuan intensif sebagaimana yang dibutuhkan ulat produksi dalam negeri. Dengan ulat Tiongkok, petani dapat meneruskan kebiasaan merawat ulat sutra yang nisbi serupa ketika merawat bibit ulat lokal. Karena itulah, ulat impor dengan cepat menjadi pilihan utama petani. Sebagian petani membeli dan sebagian lagi memperolehnya sebagai bantuan (terutama di Kabupaten Soppeng).

Namun persoalan tidak berhenti di situ, beberapa tahun terakhir bibit impor pun mengalami kegagalan di sejumlah tahapan pemeliharaan (lebih lanjut di bawah). Sejak beberapa tahun lalu, bibit impor sekalipun semakin gagal mendatangkan hasil yang memadai bagi sebagian petani. Sebagian telur gagal menetas, sebagian lagi mati selama masa pemeliharaan, dan yang lain tidak menghasilkan kokon. Kini, sebagian besar pemelihara telur di Kabupaten Wajo menghentikan usaha mereka di sektor sutra.

GAMBAR 4 Kiri: penyortiran kokon. Kanan: memasak kokon.



4.1.2 Dampak Terhadap Pelaku

Peralihan penghidupan pelaku sektor hulu. Petani dalam rantai nilai sutra di Kabupaten Wajo terlibat sejak menetas telur-telur

sutra, merawat dan memberi makan ulat, memastikan ulat menghasilkan kokon berkualitas, dan memintalnya menjadi benang. Ketika produksi kokon belum menyusut secara signifikan, sebagian besar petani bahkan merangkap sebagai pemelihara ulat dan pemintal; bahkan pada masa lalu mereka menjalankan keseluruhan proses sampai menjadi produk akhir. Di sini, produksi sutra adalah tradisi, sebagaimana dituturkan seorang perempuan paruh baya, pelaku sektor hulu sekaligus ketua kelompok tani:

“Masih kecil ka’ orang tua sudah tanam murbei. Murbei ditanam dalam satu kebun dan hasilnya dipakai sendiri. Saya ingat waktu itu saya masih sekolah. Mamaku juga pelihara ulat dan menenun sutra. Di sini, rata-rata masyarakat pelihara ulat dulu karena itu mi penghasilannya. Dulu kokonnya dipelihara menjadi kupu-kupu dan bertelur lagi kemudian menetas. Tapi sekarang, tidak bisa lagi begitu.”

Sebagian besar ‘petani’ di sini adalah perempuan. Di kelurahan ini, petani murbei membentuk Gapoktan “Ule Sabbe”, dan sebagian tergabung dalam Kelompok Tani Sutra Alam Sejahtera. Kelompok ini diketuai seorang perempuan berpendidikan S1 pensiunan kepala sekolah SD, dan beranggotakan 25 perempuan petani Murbei.⁵ Dalam menjalankan seluruh proses kerja usaha tani sutra, mereka menyebut sejumlah hambatan⁶, namun hanya dua masalah besar yang sulit mereka atasi: buruknya kualitas bibit ulat sutra dan polusi zat kimia.

⁵ Kelurahan Walenna, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, merupakan salah satu sentra pemeliharaan ulat terbesar di Kabupaten Wajo. Kampung ini sangat kondusif bagi pemeliharaan ulat karena berada jauh dari jalan poros Wajo-Soppeng. Dengan demikian, kampung ini nisbi terhindar dari potensi polusi suara dan udara dari kendaraan. Hal ini sangat penting karena pemeliharaan ulat dilakukan petani bukan di dalam gudang atau ruangan yang kedap polusi suara maupun udara. Sebagaimana disebut di atas mereka merawatnya di bawah kolong rumah.

⁶ Hambatan lain ialah guruh yang datang pada masa ulat menghasilkan kokon yang bisa menyebabkan ulat terkejut dan kokon *sikalu-kalu* (berbelitan) sehingga menyulitkan proses pemintalan. Namun mereka mengakui situasi semacam ini jarang terjadi dan mereka bisa mengatasinya karena tidak semua kokon akan rusak guruh.

KOTAK 1 Sumber Bibit Ulat Sutra Pelaku Sektor Hulu Sutra Walenna, Wajo

Para petani menyebut dua asal telur yang dipelihara di Walenna, di sini disusun berdasarkan urutan waktu:

(1) Telur sutra dari 'Cina'. Mereka membeli telur sutra tersebut dengan harga yang terus menanjak. Harga tahun 2007 adalah Rp 150 ribu/box, dan harga terakhir berada pada kisaran Rp 400 ribu/box. Mutu telur ini bagus sehingga petani rela membeli sendiri, namun sudah tidak tersedia lagi.

(2) Telur pembagian UPT Persuteraan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wajo. Petani memandang kualitas telur ini kurang bagus, san ada dua pandangan berbeda tentang mengapa telur-telur ini punya tingkat penetasan yang rendah. Pertama, karena kualitasnya memang buruk, dan kedua, karena perlakuan saat pembagian: menumpuk dan buka tutup ruang pendingin yang menurunkan kualitas telur yang dibagi belakangan sebab telah terkena udara panas. Telur ini berasal dari dari BPSKL Bili-Bili, dibagikan secara gratis lewat seorang mantan staf UPT Persuteraan yang membantu memintanya ke BPSKL Bili-Bili untuk diserahkan kepada kelompok tani. Telur ini disalurkan dalam jumlah terbatas dengan kualitas yang juga tidak sebaik telur impor.

Seorang petani perempuan sepuh, mengatakan:

“Kami berhenti pelihara ulat karena ulatnya selalu busuk hingga berakhir gagal panen berkali-kali. Terakhir memelihara sudah lupa kapan. Andai saja ulatnya bagus, mungkin kami masih memelihara sampai sekarang karena panennya setiap bulan. Beda dari jagung, kami 3 bulan sekali baru bisa panen. Banyak sedikit hasil benang sutranya tergantung dari ulatnya, kalau bagus ulatnya bagus hasilnya, biasa juga tidak bagus, biasa juga ulatnya sedikit tapi hasilnya bagus sekali.”

Dari tuturan para petani kita bisa melihat tiga aspek penting dalam hubungan mereka dengan nafkah dari sutra. *Pertama*, mereka berhenti memelihara ulat hanya untuk sementara. Mereka masih menunggu datangnya bibit ulat berkualitas yang bisa mereka andalkan untuk nafkah yang lebih menjamin. Dengan demikian, *kedua*, posisi sutra bagi petani mengalami pasang surut karena persoalan bibit berkualitas. *Ketiga*, mereka senantiasa menjalankan diversifikasi usaha tani keluarga untuk memenuhi kebutuhan, tetapi

komoditas mana yang menjadi sumber pendapatan utama pada kurun tertentu bergantung pada gabungan tiga faktor: (1) tingkat modal yang dibutuhkan. (2) tingkat tenaga kerja yang dibutuhkan, serta (3) nilai, kepastian dan frekwensi pemasukan dari komoditas yang diusahakan.

Untuk menjelaskan cara bekerja tiga faktor ini, kita perlu melihatnya dalam perbandingan antara usaha komoditas murbei-ulat dan jagung. Dalam usaha murbei-ulat para petani bisa meraih pendapatan yang nisbi lebih pasti dan lebih cepat dibandingkan jagung, dengan modal awal jauh lebih kecil, meskipun menurut sebagian petani usaha jagung bisa mendatangkan keuntungan lebih besar.⁷ Usaha sutra bisa mendatangkan pemasukan setiap bulan, sedangkan jagung antara 3-4 bulan dengan risiko gagal lebih tinggi (dibandingkan ketika ulat sutra berkualitas masih tersedia). Jagung pun butuh modal jauh lebih besar ketimbang sutra. Untuk jagung mereka butuh investasi besar untuk membeli bibit, mengupah tenaga kerja

KOTAK 2 Kemudahan Kerja untuk Murbei dan Ulat Sutra Menurut Petani Walennaë

Seorang petani pria di Kelurahan Walennaë mengatakan, ia cuma butuh sekitar tiga jam per hari untuk merawat murbei dan ulat. Sedangkan untuk jagung mereka harus menghabiskan sepanjang hari. Di titik inilah peran perempuan menjadi penting. Berbeda dengan jagung yang butuh kerja intensif dan panjang, dalam proses perawatan ulat sutra perempuan bisa mengerjakannya berbarengan dengan peran lainnya dalam rumah tangga. Mereka mulai bangun dini hari, sekitar pukul empat subuh, untuk menjalankan ibadah, memasak dan menyediakan makanan untuk keluarga (sarapan dan makan siang), membersihkan rumah, mencuci pakaian dan pekerjaan domestik lainnya sebelum beraktivitas di kebun untuk mengambil daun murbei. Mereka kemudian lanjutkannya dengan pekerjaan lain baik sebagai petani maupun sebagai ASN (guru). Menurut mereka, menjadi petani murbei merupakan pekerjaan yang paling mudah dilakukan oleh perempuan karena proses penanaman dan pemeliharaan murbei yang mudah dan tidak menggunakan pestisida. Selain itu dapat dikerjakan dalam suatu proses yang bersamaan sepanjang hari, dimulai dari pekerjaan domestik, tani murbei dan pekerjaan produktif lainnya. Hasilnya pun telah dapat dinikmati pada akhir bulan.

⁷ Seorang petani lelaki bahkan mengatakan bahwa usaha sutra lebih menguntungkan daripada jagung. Bisa jadi ini berhubungan luas kepemilikan lahan, di mana jagung membutuhkan lahan yang sangat luas untuk mencapai skala ekonomi yang lebih lebih menguntungkan.

(untuk penanaman, perawatan dan panen), serta membeli input-input kimia pertanian. Sedangkan untuk usaha sutra mereka hanya butuh sedikit lahan dan biaya untuk sarana produksi, serta tenaga kerja yang berasal dari anggota keluarga.⁸ Ini karena relatif rendahnya kebutuhan tenaga kerja (hari orang kerja, HOK) yang perlu petani sediakan bagi ulat sutra, bila dibandingkan jagung. Berikut ini perinciannya.

Tanaman murbei merupakan jenis tanaman yang memiliki kemampuan adaptasi yang cukup bagus, dapat tumbuh di lahan kering maupun lahan basah, bahkan tanaman murbei yang pernah terendam banjir sekalipun masih mampu tumbuh kembali dengan baik. Jenis lahan yang digunakan untuk budidaya murbei di kedua sentra produksi murbei Sulawesi Selatan terdiri dari lahan sawah, lahan kebun campuran/tegalan, pekarangan dan kawasan hutan, namun yang paling dominan di kedua wilayah adalah lahan kebun campuran.

Jenis varietas murbei yang ditanam petani bervariasi, seperti *Morus alba*, *M. multicaulis*, *M. cathayana*, *M. bombycis*, *M. alba Var Kanva*, namun jenis varietas yang dominan di dua sentra produksi adalah varietas *M. Multicaulis*. Tanaman murbei petani umumnya tanaman tua dan sebagian besar petani tidak pernah meremajakan. Rata-rata umur tanaman murbei di Kabupaten Soppeng adalah 15,8 tahun dan di Kabupaten Wajo mencapai 22,4 tahun, bahkan di beberapa tempat beberapa tanaman murbei sudah ber umur 50-65 tahun, tanpa pernah melakukan peremajaan.

Karena memiliki adaptasi lingkungan yang baik, tanaman murbei tidak memerlukan perawatan intensif sehingga tidak memerlukan alokasi tenaga kerja dan biaya pemeliharaan yang besar. Dalam satu siklus pemeliharaan yang berlangsung rata-rata 28 hari, alokasi tenaga kerja sebesar sekitar 16 hari kerja (15,89 HOK/Ha/siklus).⁹ Luas lahan murbei yang dipersiapkan petani untuk

⁸ Mereka pun hanya butuh mengeluarkan sedikit uang transpor untuk menjual benang ke pasar terdekat, Salo Jampu, di mana pedagang benang langganan sudah menunggu.

⁹ Panen murbei dilakukan secara bergilir pada lahan-lahan yang dipersiapkan secara khusus pada setiap siklus pemeliharaan ulat sutra. Rata-rata frekuensi panen murbei adalah 5 kali per tahun di Kabupaten Wajo dan 6 kali per tahun di Kabupaten Soppeng.

setiap siklusnya disesuaikan dengan jumlah ulat yang akan mereka pelihara. Secara rata-rata kebutuhan lahan murbei untuk setiap box telur ulat sutra rata-rata 0,275 Ha.

Dengan demikian, usaha sutra dan murbei sangat memungkinkan bagi petani murbei yang rata-rata memiliki luas lahan 0,96 Ha di Kabupaten Soppeng dan 0,72 Ha di Kabupaten Wajo.¹⁰ Luas lahan murbei yang ada di dua sentra produksi murbei Sulawesi Selatan saat ini adalah seluas 65,2 Ha, dengan 80,6 persen di antaranya ada di Kabupaten Soppeng. Dan dengan kebutuhan luasan lahan semacam itu, besarnya alokasi tenaga kerja dan biaya lahan murbei untuk pemeliharaan ulat 1 box adalah 4 hari kerja (4,37 HOK) dengan biaya saprodi sekitar Rp. 139.608/box ulat.

Biaya untuk sarana pemeliharaan ulat sutra juga relatif kecil, terutama jika pemeliharaan ulat dilakukan di kolong rumah. Rata-rata biaya investasi usaha pemeliharaan ulat sutra di Kabupaten Soppeng sekitar Rp. 5,06 juta, dengan lebih 60 persen merupakan biaya investasi bangunan khusus untuk rumah ulat. Biaya investasi ini jauh lebih tinggi dibandingkan biaya investasi petani pemelihara ulat di Kabupaten Wajo yang berkisar Rp. 1,4 juta per petani, karena pemeliharaan ulat di daerah ini seluruhnya berlangsung di kolong rumah. Biaya bahan dalam pemeliharaan ulat sutra juga relatif kecil, rata-rata Rp. 25.471 per boks bibit ulat. Biaya tersebut belum termasuk biaya bibit karena sebagian besar mereka peroleh secara gratis dari bantuan pemerintah daerah, BPSKL dan Litbanghut Bogor. Namun ada yang membeli bibit yang bersumber dari PT Perhutani dan pengusaha seharga Rp. 150.000 per box. Rata-rata total biaya non tenaga kerja dalam pemeliharaan ulat sutra per siklus untuk 1 box telur sutra adalah Rp. 96.056, namun jika memasukkan biaya tenaga kerja yang dihitung menurut upah lokal yang berlaku, maka total biaya pemeliharaan ulat sutra sebesar Rp. 1.045.756/box/siklus.

Frekuensi panen murbei ini sama dengan frekuensi pemeliharaan ulat sutra di masing-masing wilayah.

¹⁰ Dengan rata-rata produksi per siklus panen sekitar 1,5 ton di Kabupaten Soppeng dan sekitar 1,05 ton di Kabupaten Wajo per siklus panen

TABEL 3 *Situasi bibit, lahan, sarana, biaya dan produksi sutra, di wilayah sentra persuteraan Sulsel*

WIL Sentra	Pengadaan Bibit (Telur US)	Keb Lahan dan Sarana Pemeliharaan	Biaya dan Produksi		
SOPPENG	Jenis Bibit (%)	Frekuensi/thn	6	Prod/Box Bibit (kg)	
	• Lokal	Jum Bibit (Box)	1,05	• Prod Kokon	27,34
	• Impor	Tempat Pelihara (%)	78,4	• Prod Benang	3,91
	Pemasok bibit lokal : Perhutani, BPSKL, Pengusaha	•K-Rumah	21,6	Harga Benang/Kg Penerimaan/Box (Rp)	538.929
	Sumber	•B-Khusus	5.057.886		2.105.132
	Bibit (%)	Investasi (Rp.)	3.442,308	TK/Box Bibit (HOK)	21.98
	• Beli	•Rumah Ulat	913.158	Upah/HOK (Rp)	42.300
	• Bantuan	•Rak Penetas	366.133	Biaya PUS/Box (Rp)	1.029.590
	Hrg Bibit Rp/Box	•Tempat Kokon	336.087	• B.Pemeliharaan	18.675
		•Lainnya	0.25-0,3 Ha	• Biaya TK	929.929
		Keb L-Murbey/Box		• Biaya Lainnya	80.986
				Biaya Pintal/box (@60.250/Kg)	235.345
WAJO	Jenis Bibit (%)	Frekuensi/thn	5	Prod/Box Bibit (kg)	
	• Lokal	Jum Bibit (Box)	0,72	• Prod Kokon	20,43
	• Impor	Tempat Pelihara (%)	100	• Prod Benang	2,92
	Pemasok bibit lokal: BPA, Perhutani, Litbanhut Bogor, BPSKL, Pengusaha	•K-Rumah	0	Harga Benang/Kg Penerimaan/Box (Rp)	470.000
	Sumber	•B-Khusus	1.443.667		1.371.863
	Bibit (%)	Investasi (Rp.)	587.500	TK/Box Bibit (HOK)	23,83
	• Beli	•Rumah Ulat	366.667	Upah/HOK (Rp)	45.500
	• Bantuan	•Rak Penetas	240.000	Biaya PUS/Box (Rp)	1.093.404
	Hrg Bibit Rp/Box	•Tempat Kokon	249.500	• B.Pemeliharaan	40.354
		•Lainnya	0,25-0,35 Ha	• Biaya TK	1.007.974
		Keb.L-Murbey/Box		• Biaya Lainnya	45.076
				Biaya Pintal/box (@55.000/Kg)	160.537

Alokasi tenaga kerja untuk pemelihara ulat sutra didominasi perempuan. Namun beberapa petani dibantu oleh tenaga kerja lain dalam keluarga di beberapa bagian kegiatan dalam usaha tani

murbei. Karena tenaga kerja bersumber dari dalam keluarga, mereka tidak pernah menghitungnya sebagai biaya.¹¹

TABEL 4 *Situasi Input produksi, proses produksi, produksi dan penggunaan produk, di Wilayah Sentra Persuteraan Sulsel*

Wil Senta	Input Produksi	Proses Produksi	Produksi & penggunaan
Soppeng	Tot L Lahan (Ha) 52.55	P-Kimia 78%	Frek Panen/Thn 6 Produksi/Siklus 1.470 (Kg) Penggunaan * G-Sendiri 84% * Jual 16% Harga Rp/Kg 43,125
	R-L Lahan (Ha) 0.96	P-Organik 5%	
	Umur Tan 15.8	Obat-2an 20%	
	* M 38%	Penyiangan 11%	
	Multicaulis Var Lainnya : Alba, A-Macrophylla, Nigra, Cathayana, Australis, Bombycis, Kanva (india)	Pemangkasan 11%	
	Pupuk Urea, Za, TSP, Cair, Organik	HOK/Ha 16,45	
Obat2 Pest, Herb	Biaya (Rp/Ha) 507,668 * 695,835	B.Saprodi/Ha 59,513 * B. TK/Ha * B. Tetap/Ha	
Wajo	Tot L Lahan (Ha) 12.65	P-Kimia 47%	Frek Panen/Thn 5 Produksi/Siklus 1.051 (Kg) Penggunaan * G-Sendiri 89% * Jual 11% Harga Rp/Kg 140,000
	R-L Lahan (Ha) 0.70	P-Organik 0%	
	Umur Tan 22.4	Obat-2an 32%	
	Var-M 27%	Penyiangan 16%	
	Multicaulis Var-Lainnya : Alba, A-Macrophylla, Nigra, Cathayana, Australis, Bombycis	Pemangkasan 5%	
	Pupuk Urea, Za, TSP, Organik	HOK/Ha 14.23	
Obat2 Pest, Herb	B.Saprodi/Ha 124,781 * B. TK/Ha * B. Tetap/Ha		

¹¹ Namun bila mereka memperhitungkannya dengan mengacu pada upah harian berlaku secara lokal (berkisar antara Rp. 40.000 – Rp 50.000 per hari), biaya tenaga kerja pemeliharaan murbei per box ulat yang dipelihara setara dengan Rp. 196.609 per siklus.

Dari perincian di atas kita bisa melihat bahwa dari usaha sutra petani bisa memperoleh pendapatan yang lebih pasti setiap bulan, dengan pengerahan kerja yang lebih ringan dibandingkan jagung. Dalam usaha sutra pula, perempuan bisa berperan lebih besar. Pembagian tugas dalam keluarga tani biasanya dengan lelaki menyediakan daun murbei dan perempuan merawat ulat dan memintal, yang bisa mereka lakukan sembari menjalankan kegiatan lain.

Hasil dari usaha sutra bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seorang petani perempuan mengatakan ia bisa menyekolahkan tiga orang anaknya, seorang bahkan bisa berkuliah di fakultas kedokteran dengan usaha utama dari sutra. Sementara petani lelaki dari keluarga lain mengatakan ia pernah bisa menabung (dalam bentuk benang) dari usaha sutra. Tabungan itu bisa ia jual ketika mereka butuh uang mendadak dalam jumlah besar. Ia bisa menyimpan sampai puluhan kilogram benang.

Bahkan di masa lalu, sebagaimana disebut di atas, para perempuan bisa langsung menenun sarung setelah memintal benang yang dihasilkan sendiri. Maka, pada masa itu, ketika mereka masih bisa membudidayakan ulat sendiri, setiap keluarga petani/penenun, dapat memelihara ulat hingga menghasilkan sarung sutra sendiri. Mereka sangat berdaulat secara ekonomi.

Para perempuan menyatakan bahwa penghasilan sebagai petani murbei maupun penghasilan lainnya dalam keluarga berada dalam penguasaan mereka, dan para perempuan secara independen bisa menentukan alokasi belanja baik untuk kebutuhan keluarga maupun keperluan pribadi. Jika ada kebutuhan untuk pembelian aset, barulah mereka membicarakannya dengan suami. Belum lagi, sebagian perempuan petani bisa menjalankan beberapa peran sekaligus, mulai dari menanam murbei, memelihara ulat dan memintal. Sebagian perempuan bahkan menjadikan pemintalan benang sebagai profesi utama. Dengan kata lain, komoditas sutra lebih bisa memberdayakan perempuan ketimbang komoditas lain—meskipun mereka masih harus menanggung beban kerja ganda.

Namun semua kelebihan ini menjadi tidak relevan ketika petani gagal memperoleh jaminan kualitas ulat sutra. Banyak dari mereka

lalu beralih ke penghidupan lain, sebagian dengan mengkonversi lahan, sebagian lain melakukan diversifikasi pekerjaan di antara anggota rumah tangga, dan yang lain menjalankan strategi migrasi.

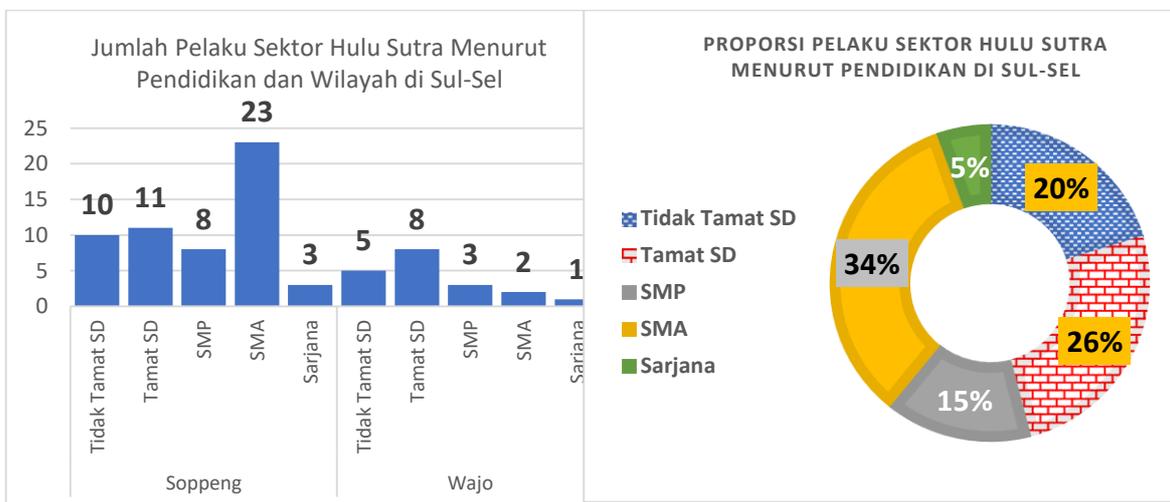
Perubahan demografi. Sebagaimana disebut di atas, pelaku usaha ulat sutra di Sulawesi Selatan semakin tua dan didominasi perempuan. Ketiadaan alternatif komoditas yang mudah terjangkau dengan modal kecil oleh sebagian petani mungkin menjadi satu alasan yang memaksa mereka meninggalkan kampung halaman. Walennae, misalnya, menyaksikan sangat banyak keluarga yang harus pergi dari kampung halaman untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Di sini tampak indikasi meningkatnya migrasi dari sentra pemeliharaan ulat sutra.

Migrasi ini mungkin bisa menjelaskan fenomena penuaan dan rendahnya tingkat pendidikan pelaku budidaya murbei dan pemelihara ulat sutra di Wajo. GRAFIK 5 di bawah menunjukkan bahwa pelaku 'sektor hulu sutra' di Wajo hanya menyisakan 1 sarjana dan 2 orang berpendidikan SMA. Selebihnya, 16 orang, hanya berpendidikan SMP dan SD. Perginya anak-anak meninggalkan orangtua dan kakek-nenek mereka di kampung bisa menjelaskan mengapa pelaku sektor hulu sutra di Wajo menjadi lebih tua dan berpendidikan lebih rendah. Ketika komoditas ini susut, para lelaki yang secara kultural merupakan pencari nafkah utama segera beralih ke penghidupan lain, meninggalkan perempuan (dan lelaki usia lanjut) dengan kegiatan "ekonomi tambahan" memelihara sutra, suatu kegiatan yang lebih ringan dan dapat dilakukan dari rumah. Inilah yang menjelaskan fenomena dominannya perempuan sektor hulu sutra. Namun ketika sutra benar-benar sudah tidak dapat diandalkan, perempuan pun kehilangan kegiatan produktif yang bisa mereka lakukan secara independen.

Situasi lebih baik tampak di Kabupaten Soppeng, Di sini, jumlah pelaku sektor hulu didominasi oleh mereka yang berpendidikan SMA, yaitu 23 orang. Sementara SMP 8 orang, dan SD 21 orang. Bahkan, 3 orang sarjana terlibat dalam sektor ini di Kabupaten Soppeng. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa pelaku sektor ini di Soppeng memandang usaha ulat sutra lebih menjanjikan ketimbang pandangan rekan mereka di Wajo. Bila masih cukup banyak pelaku

berusia produktif dan berpendidikan nisbi lebih tinggi terlibat dalam sektor hulu sutra di Soppeng, ini mengisyaratkan bahwa komoditas ini masih cukup menjanjikan sebagai pendapatan utama keluarga. Kebijakan pemerintah setempat yang secara agresif memberi bantuan kepada petani, dengan mensponsori impor bibit ulat sutra dari Tiongkok, bisa menjelaskan perbedaan situasi di dua daerah. Kebijakan dan program pemerintah memang sangat penting dalam mempertahankan minat warga untuk terus terlibat dalam sektor ini, sebagaimana akan kita lihat di bagian berikutnya.

GRAFIK 6 Jumlah dan Proporsi Pelaku Hulu Sutra Menurut Pendidikan Sulawesi Selatan



4.1.3 Intervensi Kebijakan

Anggaran persuteraan secara umum meningkat pada 2019-2020. Lonjakan anggaran untuk persuteraan para 2019-2020 terutama didorong oleh peningkatan kucuran dana Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Grafik di bawah ini menerangkan alokasi anggaran untuk dua agen pemerintah utama yang menangani program yang berkaitan dengan pengembangan sutra, yakni Dinas Kehutanan dan Dinas Perindustrian Provinsi Sulsel.

GRAFIK 7 Anggaran Dinas Kehutanan untuk Pengembangan Persuteraan Alam di Sulsel tahun 2015-2020



Sumber: Alokasi APBD untuk unit pelaksana teknis Dinas Kehutanan

Pada tahun 2015 dan 2016, alokasi anggaran Dinas Kehutanan untuk pengembangan Sutra termuat dalam salah satu program/kegiatan Dishut, yaitu program Pengembangan Sutra Alam. Melalui identifikasi terhadap data alokasi anggaran Dinas Kehutanan, kami bahkan tidak menemukan alokasi anggaran khusus untuk pengembangan sutra pada tahun 2017 dan 2018. Lalu, alokasi anggaran oleh Dinas Kehutanan tahun 2019 dan 2020 kami filter berdasarkan nomenklatur alokasi untuk KPH Walanae, yang merupakan unit pelaksana teknis pengelolaan hutan di wilayah Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng. KPH Walanae juga menjadi representasi bagi alokasi anggaran Dinas Kehutanan untuk pengembangan sutra karena menurut mandat program utama mereka berfokus pada pengembangan Persuteraan Alam. Namun tidak semua alokasi anggaran tahun 2019 dan 2020 untuk KPH Walanae dialokasikan untuk pengembangan sutra.

Grafik di atas menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk pengembangan sutra tahun 2015 hanya sebesar 1,35% dari total anggaran yang direncanakan oleh Dinas Kehutanan. Pada tahun 2016, alokasi anggaran mengalami penurunan menjadi sebesar 1,26% dari total anggaran. Penurunan signifikan terjadi pada tahun

berikutnya: tidak ada alokasi anggaran untuk pengembangan sutra pada 2017 dan 2018. Sementara pada tahun 2019, alokasi anggaran untuk pengembangan sutra lebih kecil dibanding tahun 2016, yakni 0,40% dari total anggaran Dishut. Pada 2020, alokasi anggaran untuk pengembangan sutra melonjak mencapai 20,81% dari total anggaran, sebesar Rp. 5 miliar dari Rp. 24 miliar.

Menyusul penetapan anggaran tersebut beraneka program dan kegiatan mulai dijalankan, terutama program di seputar murbei dan ulat sutra, baik yang berasal dari program Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten. Pemerintah memproyeksikan bahwa salah satu langkah untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai sentra sutra nasional adalah dengan melakukan perluasan lahan tanaman murbei seluas 10.000 ha - 27.000 ha dengan kebutuhan telur mencapai 220.000 - 240.000 boks pertahun (Wawancara dengan pelaku usaha dan instansi kunci pemerintah dan juga asumsi dari peneliti litbang KLHK Andadari, 2014; nd). Logika yang bersembunyi di balik langkah ini cukup sederhana: jika target tersebut terpenuhi, Sulawesi Selatan akan menghasilkan kokon hingga 4.200 - 6.700 ton per tahun yang ditaksir akan menghasilkan benang 600 - 1000 ton.

Demi mewujudkan prediksi ini, TABEL 5 di bawah menunjukkan bahwa alokasi anggaran persutraan berdasarkan kebijakan gubernur tahun 2020 hanya memuat dua jenis belanja, yaitu belanja pengadaan bibit murbei dan ulat sutra.

TABEL 5 Alokasi Anggaran untuk Pengelolaan Sutra di Sulsel Berdasarkan Kebijakan Gubernur Tahun 2020 Terakait Pengembalian Kejayaan Sutra di Dinas Kehutanan Propinsi Sulsel

Kelompok Tani Lawadong Desa Bontopenno Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo			
No	Alokasi	Jumlah	Satuan
1	Belanja pengadaan bibit tanaman murbei	220,000	Batang
2	Belanja pengadaan telur ulat sutra impor	110	Box
Kelompok Tani Panreng-Panreng Desa Pasaka Kecamatan Sabbangparu			

Kabupaten Wajo			
No	Alokasi	Jumlah	Satuan
1	Belanja pengadaan bibit tanaman murbei	80,000	Batang
2	Belanja pengadaan telur ulat sutra impor	40	Box

Dalam pelaksanaannya, alokasi anggaran di APBD Perubahan Tahun 2020 mencapai 320 juta rupiah untuk pengolahan lahan penanaman murbei seluas tiga puluh hektar dan 2 miliar rupiah pada APBD Tahun 2021 untuk sarana produksi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui KPH Walenna'e Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan juga telah mendistribusikan tanaman murbei untuk tahap pertama sebanyak 300.000 pohon ke kelompok tani sebagai berikut:

- Kelompok Tani Panreng-panreng Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu sebanyak 80.000 tanaman dengan luas lahan 2 hektar.
- Kelompok Tani Lawadong Desa Bottopenno, Kecamatan Majauleng sebanyak 220.000 tanaman dengan luas lahan 5,5 hektar.
- Menyusul tahap kedua sebanyak 700.000 tanaman karena masih dalam proses tender di Dinas Kehutanan Provinsi :
 - Kelompok Tani Lapalewoi Desa Watanrungpia, Kecamatan Majauleng sebanyak 220.000 tanaman dengan luas lahan 5,5 hektar.
 - Kelompok Tani Sipatuo Desa Wajoriaja, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo sebanyak 480.000 tanaman dengan luas lahan 12 hektar.

Di sini tampak bahwa skema-skema intervensi terhadap petani masih mengikuti pola lama yang berpusat pada komoditas: di sektor hulu berarti bantuan murbei, ulat, serta "pendampingan" teknis dan sarana produksi yang utamanya bertujuan memperbaiki produksi keduanya. Fokus pada tanaman dan ulat ini, tampak mengabaikan fokus terhadap strategi penghidupan masyarakat petani. Rangkaian

program ini masih kurang lebih serupa dengan tahun-tahun sebelumnya, yang berubah cuma jumlahnya yang kini jauh lebih banyak, misalnya dengan rencana penyaluran bantuan 1 juta bibit murbei.

Namun, prediksi di atas, berikut anggaran dan program yang mengikutinya jauh lebih sederhana daripada kenyataan. Sebagaimana kita lihat di atas, menurunnya jumlah pelaku secara umum, dan khususnya mereka dalam usia produktif, mengisyaratkan bahwa beraneka aspek perlu perbaikan sebelum rangkaian intervensi ini bisa diterjemahkan menjadi minat para pelaku yang akan terlibat, lalu akhirnya kesejahteraan mereka. Bahkan, mengejar “kuantitas” yang terlihat fantastis di atas kertas dengan sedikit persiapan di lapangan berpotensi menjadikan seluruh belanja ini terbuang sia-sia. Di sini, kesesuaian antara situasi pelaku di lapangan dengan skema intervensi menjadi sangat penting. KOTAK 3 di bawah bisa menunjukkan apa yang mungkin terjadi bila bantuan disalurkan sebelum persiapan berjalan dengan memadai.

KOTAK 3 Tumpukan Bibit Murbei di Wajoriaja

Seorang petani anggota Kelompok Tani Sipatuo di Desa Wajoriaja, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, mengaku tak tahu menahu bagaimana kelanjutan program bantuan bibit murbei yang sedianya akan ia terima setelah bergabung dalam kelompok tani. Ia tahu bahwa bibit murbei itu sudah lama datang, bahwa kelompoknya adalah bagian dari petani yang akan menerima bantuan, namun ia tidak tahu kapan dan bagaimana bibit itu akan dibagikan.

Kepala desa tidak berada di desanya ketika tim mendatangi Wajoriaja. Sebagai salah satu orang yang bertanggungjawab dalam rantai distribusi bantuan bibit murbei itu, paling tidak ia bisa memberi keterangan lebih banyak daripada anggota kelompok tani. Ia mengaku belum tahu apakah sudah ada pembagian, belum melihat adanya penanaman, namun tahu bahwa ada lahan yang sudah disiapkan untuk penanaman, meski tidak menyebutkan itu lahan siapa. Anggota kelompok itu enggan memberi informasi lebih jauh.

“Pak Desa yang tahu semua urusan [bantuan] itu, kami [anggota kelompok] tidak tahu apa-apa,” katanya berulang-ulang sembari meminta kami bertanya langsung kepada kepala desa.

Tim akhirnya berjumpa putra kepala desa yang berusia pertengahan 20-an. Ia mantan aktivis selama mahasiswa, sehingga cukup artikulatif menjelaskan apa yang bisa ia jelaskan, meskipun ia mengakui tak tahu keseluruhan cerita. Dengan enggan ia pun mengajak Tim melihat tempat bibit-bibit itu ditumpuk. Menurut dokumen yang kami terima bantuan itu berjumlah 300.000 bibit murbei, merupakan tahap pertama dari pembagian satu juta bibit murbei.

Setahu putra kepala desa, seharusnya bibit-bibit itu sudah dibagikan kepada petani-petani di desanya dan dua desa lainnya (menurut dokumen yang kami terima, ada empat desa yang akan menerima pembagian pada tahap pertama tersebut).

Batang-batang murbei itu, dalam potongan sekitar 20 sentimeter, tergeletak di tanah dalam dua tumpukan besar setinggi kira-kira satu meter. Batang-batang itu telah mengering, mustahil tumbuh bila ditanam. Mereka berbaring di halaman sebuah gudang di tepi jalan desa yang berdebu. Di dalam gudang ada dua traktor tangan yang merupakan bagian dari paket bantuan tersebut, tampak masih dalam kondisi baik, seolah belum pernah digunakan.

Menurut putra kepala desa, batang-batang murbei itu tiba di desanya dalam bentuk batangan yang panjang, kira-kira semeter lebih, dan 'fasilitator' yang datang mengantarkannya menjanjikan uang 1 juta rupiah untuk kerja memotong-motongnya menjadi potongan kecil agar siap untuk penanaman. Batang-batang murbei itu telah dipotong sesuai permintaan dan uang satu juta itu belum pernah datang. Bahkan, 'fasilitator' itu sendiri belum pernah datang ke desa itu sesuai mengantarkan bantuan.

Tak jauh dari tumpukan bibit yang terabaikan itu ada beberapa bedeng yang dibuat untuk penanaman murbei bantuan, di lahan seluas kira-kira 0,5 are. Lahan itu telah dirambati semak. Di ujung tiga bedeng, tampak puluhan batang murbei yang telah ditanamkan ke tanah, tumbuhnya kerdil karena selain dikepung semak juga ditanam sangat rapat, jarak sekira 10 cm antar-tegakan.

Dulu, sekira tiga dekade lalu, Desa Wajoriaja memang pernah menjalankan pemeliharaan tanaman murbei dan ulat, sedangkan kokon yang mereka hasilkan akan dibawa ke Kecamatan Sabbangparu untuk dipintal.

KOTAK 4 Rekomendasi FGD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Wajo, 2019

- (i) Memenuhi keperluan benang sutra saat ini;
- (ii) Pentingnya kolaborasi terhadap potensi yang ada terutama stakeholders dalam pengembangan sutra alam (seperti pemanfaatan Corporate Social Responsibility / CSR terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Sulawesi Selatan);
- (iii) Untuk meningkatkan minat dan keaktifan masyarakat dalam usaha persuteraan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menyiapkan skim pemberian insentif bagi petani dan penenun yang ingin kembali melakukan usaha sutra hingga mereka boleh berdikari atau mandiri;
- (iv) Pemerintah menggariskan lima tahun ke hadapan untuk memiliki laboratorium induk untuk bibit sutra;
- (v) Menghadirkan teknologi;
- (vi) Kolaborasi dengan pihak swasta terutama pendampingan terhadap petani; dan
- (vii) Membangun perkampungan sutra di Wajo sebagai perkampungan destinasi pelancongan.

Pada tahun 2019, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan telah menggagas dan melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* yang dipusatkan di Kabupaten Wajo, mengundang para pihak yang berasal dari Kabupaten Wajo dan Soppeng. FGD ini ingin mengidentifikasi masalah dan kebutuhan untuk mewujudkan upaya mengembalikan kejayaan sutra alam dalam jangka 2020-2025. Bagi para pelaku di

sektor hulu, FGD ini cukup penting karena merekomendasikan bahwa: “Untuk meningkatkan minat dan keaktifan masyarakat dalam usaha persuteraan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menyiapkan skim pemberian insentif bagi petani dan penenun yang ingin kembali melakukan usaha sutra hingga mereka boleh berdikari atau mandiri.” (Rekomendasi lebih lengkap lihat KOTAK 4) Meskipun kita masih perlu menunggu bagaimana bentuk implementasi dari poin rekomendasi ini di lapangan, Khususnya bagaimana bentuk skema ‘insentif’ yang akan diberikan kepada pelaku di hulu, perhatian pada pelaku ini mengisyaratkan pentingnya memerhatikan satu bagian yang selama ini tampaknya diabaikan dari program.

Dukungan terhadap impor bibit ulat sutra. Ketergantungan terhadap produk ulat impor menjadi satu persoalan besar di hulu persuteraan Sulawesi Selatan. Sudah banyak penelitian dilakukan dan sampai saat ini persoalan yang sudah berlangsung selama beberapa dekade itu belum kunjung teratasi. Indukan lokal yang dapat dimuliakan sendiri oleh petani sudah lama ‘habis’. Namun produksi indukan secara nasional yang kemudian mensuplai kebutuhan Sulawesi Selatan belum punya daya adaptasi cukup kuat sehingga masih belum menjadi pilihan utama para pelaku di hulu, walaupun persoalan ini telah secara drastis menurunkan tingkat partisipasi mereka.

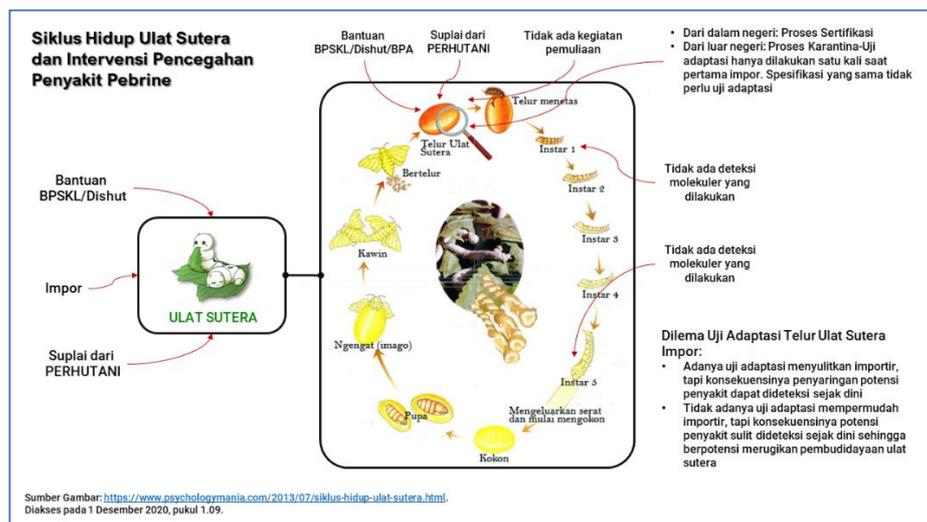
Merespons permintaan akan ulat sutra dan keluhan pegiat importir yang memandang uji adaptasi memakan waktu lama, terbitlah Permen LHK No 37/20017 yang mempermudah proses uji adaptasi, meskipun telur sutra yang diimpor tetap harus dilengkapi dengan sertifikat yang menerangkan asal usul, sertifikat kesehatan, dan sertifikat kualitas dari otoritas negara asal. Sertifikat ini lazim diterapkan untuk lalulintas produk asal hewan dan tumbuhan. Uji adaptasi tak perlu dilakukan ulang untuk telur sutra dari jenis yang sama. Pelaku importir juga tidak lagi dibatasi: pemerintah, badan usaha milik negara atau swasta, maupun perorangan bisa melakukan impor. Kemudahan regulasi lainnya ialah perizinan hanya diperlukan di tingkat Unit Pelaksana Teknis Kementerian LHK cq Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), sebelumnya perizinan harus diurus hingga ke tingkat pusat.

Padahal, menurut tim peneliti bioteknologi Unhas, penyakit ulat sutra masih bisa ada pada fase-fase yang berbeda dalam siklus hidup ulat sutra sehingga pemeriksaan secara berkala masih

diperlukan baik untuk deteksi morfologi maupun molekuler. Menjalankan pemeriksaan semacam ini bukan pekerjaan mudah dan butuh lembaga yang berkompoten, dengan dukungan fasilitas dan wewenang yang kuat. Sementara itu, institusi seperti BPSKL yang diberi mandat untuk pekerjaan ini berada pada posisi yang cukup dilematis. Di satu sisi mereka diberi tugas untuk pemeliharaan bibit induk ulat sutra, namun disisi lain juga diminta untuk menangani pengujian mutu, sertifikasi, dan akreditasi lembaga sertifikasi telur ulat sutra.

Gambar 2 di bawah menyajikan siklus hidup Ulat Sutra dan dilema instrumen uji adaptasi telur ulat sutra bagi importir ulat untuk mengisi kelangkaan bibit ulat di Indonesia. Permen LHK No 37/20017 merevisi ketentuan lama yang sebelumnya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No P. 56/ 2007 yang pada intinya memberikan banyak kemudahan kepada importir pengadaan bibit ulat untuk mengatasi kelangkaan bibit ulat.

GAMBAR 5 *Siklus Hidup Ulat Sutra dan Intervensi Pencegahan Penyakit Pebrine*



Di sini pun terlibat bahwa peningkatan belanja bibit murbei dan ulat sutra berlangsung bersamaan dengan penelitian untuk meningkatkan mutu murbei dan ulat sutra yang belum rampung ketika penelitian ini dijalankan.

Bahkan ketika uji adaptasi tetap dihilangkan untuk mempermudah impor, idealnya kebijakan ini harus diikuti dengan membangun institusi dan infrastruktur di level kabupaten (yang lebih dekat dengan petani) untuk melayani pemeriksaan deteksi dini terhadap ulat sutra yang dikelola petani. Institusi ini dapat bersifat pelayanan berbasis permintaan setiap saat oleh petani maupun lewat pemeriksaan rutin bibit ulat yang sedang dikembangkan di setiap instar siklus hidup sutra. Dengan begitu, penyebaran penyakit dan virus dapat diminalkan.

Dari observasi dan wawancara kami kepada beberapa institusi kunci pemerintah dan pengusaha di sektor ini, tampak kesepakatan bahwa mereka memandang kebijakan impor ulat dilakukan untuk “penyelamatan bagi sekitar 21.000 pelaku pengrajin sutra di Sulsel dan pengusaha di sektor pemintalan.” Saat ini kebutuhan telur ulat sutra di Sulawesi Selatan diperkirakan mencapai 40.000 boks per tahun¹² dengan setiap box berisi sekitar 20.000 telur dan diperkirakan bisa menghasilkan sekitar 3-5 kilogram benang sutra (Nurjayanti, 2011). Produksi sebesar ini mereka proyeksikan dapat memenuhi kebutuhan benang sutra di Sulsel sebanyak 150 - 200 ton per tahun. Sementara produksi kokon secara nasional hanya bisa menghasilkan sekitar 70-80 ton benang sutra dalam setahun. Padahal kebutuhan tahunan benang sutra nasional bisa mencapai 800 ton.¹³ Diproyeksikan pula bahwa warga akan menerima manfaat dengan ketersediaan telur sutra memadai karena perputaran uang dari usaha sutra akan cukup besar. Kabupaten Wajo saja diperkirakan bisa memproduksi sekitar 2 juta meter persegi (m²) tenun sutra. Bila setiap meter persegi dinilai Rp 100.000, perputaran uang di warga diperkirakan mencapai Rp 200 miliar.¹⁴

Argumen di atas dapat membuat kita terlena untuk terus mengimpor bibit ulat, padahal sektor ini saja, lewat nasionalisasi, dapat menjadi industri hulu yang berpotensi sangat besar,

¹² Wawancara dengan pelaku usaha sutra wajo dan staf dinas perindustrian dan perdagangan sulsel

¹³ Data yang valid sangat susah didapatkan, sehingga data hipotetik ini digali dari hasil wawancara dengan pelaku utama usaha sutra wajo yang aktif terlibat dengan forum para pihak dan juga konfirmasi dengan wawancara staf dinas perindustrian dan perdagangan sulsel

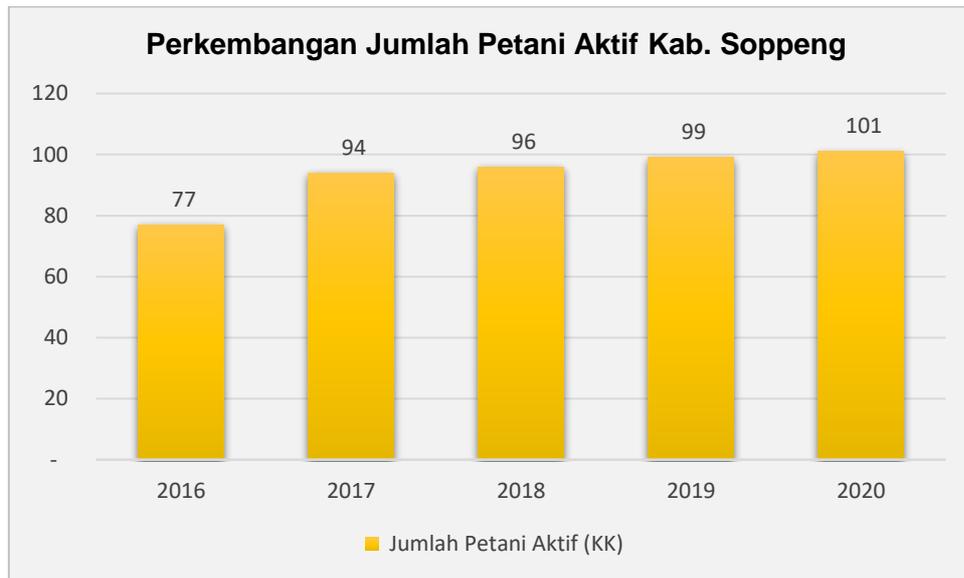
¹⁴ Wawancara dengan pelaku usaha sutra Wajo.

mengingat Sulawesi Selatan memiliki tradisi panjang bersama sutra—di samping bahwa impor ulat sutra punya masalahnya sendiri: tanpa sistem pengujian berkala, import bibit ulat bisa membuat penyakit pebrine terus mengintai.

Perbedaan data temuan lapangan dan data resmi. Masih berhubungan dengan kesiapan intervensi di lapangan, hasil penelitian di lapangan menemukan perbedaan mencolok antara jumlah temuan lapangan dan data resmi jumlah pelaku aktif (dan tingkat produksi kokon) yang dikeluarkan dinas-dinas terkait. Misalnya, kami menemukan bahwa hanya ada 75 pelaku hulu yang pada masa penelitian aktif memelihara murbei dan ulat, 56 di antaranya berada di Kabupaten Soppeng, 19 di Wajo, dan tidak ada lagi di Enrekang. Sementara data dari Dinas Perkebunan Kabupaten Soppeng, misalnya, menyebutkan bahwa jumlah petani yang mengusahakan ulat sutra terus mengalami kenaikan. Data tersebut mencatat bahwa pada tahun 2020, ada 101 petani aktif di Kabupaten Soppeng saja. Kelompok tani aktif dan produksi kokon juga tercatat terus meningkat oleh data resmi. Observasi kami menemukan hal yang sebaliknya, sangat susah membayangkan jumlah kokon dan benang sebanyak itu bisa tercapai.

GRAFIK 8 *Perkembangan Jumlah kelompok tani, petani aktif dan produksi kokon, Kabupaten Soppeng*





Peralihan sumberdaya dan fragmentasi di lembaga terkait. Berdasarkan hasil diskusi dengan pelaku utama produksi bibit ulat sutra di Indonesia yakni Perhutani, terungkap bahwa persoalan mereka lebih pada kualitas staf dan dukungan manajemen untuk melakukan pemurnian indukan, daripada persoalan dalam menghasilkan indukan bibit F1 yang baik. Artinya, masalah lebih bersifat dukungan kelembagaan daripada teknis menghasilkan bibit. Perum Perhutani masih punya fasilitas *breeding* dan PSA Soppeng, namun unit ini telah merugi sekitar 1 milyar rupiah per tahun. Hanya karena mandat melakukan bisnis persuteraan alam, unit ini

dipertahankan. Dulu, ada 120 orang staf bekerja di unit ini, kini tersisa hanya 6 orang, dan semua kegiatan manajemen rutinitasi didukung oleh kantor pusat Perhutani.

Perubahan kelembagaan pemerintah daerah juga menjadi salah satu penyebab beralihnya sumberdaya menjauh dari persuteraan. Pada masa desentralisasi yang berbasis kabupaten, ada dua UPTD Kabupaten Wajo yang mengurus persuteraan: UPTD Persuteraan Alam yang berada di bawah Dinas Pertanian/Perkebunan dan UPTD Tekstil yang berada di bawah Dinas Perindustrian. Kedua UPTD ini menjalankan mandat yang berbeda. UPTD Persuteraan Alam mengurus hulu, terkait pelayanan pakan (bibit murbei) dan fasilitasi bantuan bibit ulat sutra. UPTD Persuteraan alam banyak berkoordinasi langsung dengan BPA dan Dinas Kehutanan Provinsi. Sementara itu, UPTD Tekstil berkoordinasi dengan dan berada di bawah naungan Dinas Perindustrian Provinsi. Lalu, karena urusan kehutanan beralih ke Provinsi, dan dengan alasan perampingan organisasi di Kabupaten, UPTD Persuteraan Alam digabungkan dengan UPTD Tekstil Dinas Perindustrian Kabupaten Wajo. Pengalihan mandat ini tidak dibarengi dengan pengalihan staf UPTD Persuteraan Alam yang memiliki sejumlah keahlian untuk melayani sektor hulu. Pada masa ini pula BPA sebagai organ regional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dileburkan ke dalam Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Regional Sulawesi (dengan alasan reorganisasi KLHK). Perubahan-perubahan organisasi ini dibuat untuk penyederhanaan struktur tapi kaya akan fungsi, namun persoalan sutra di lapangan semakin kompleks.

Selain surutnya dukungan kelembagaan terhadap sejumlah bagian dalam pengelolaan sutra di sektor hulu, juga tampak fragmentasi yang berpotensi melemahkan upaya menuju perbaikan. Kajian terhadap ragam peraturan Menteri Kehutanan dan Perindustrian serta perencanaan di level provinsi dan kabupaten menunjukkan bahwa sektor pengelolaan sutra dari sudut pandang pemerintah berada di dua ranah, yaitu sektor Kehutanan dan Perindustrian. Di level pemerintah pusat memang ada Peraturan Bersama pada tahun 2006 yang melibatkan tiga sektor: Kementerian Kehutanan, Perindustrian, dan Koperasi. Namun sektor Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah menjadi agen pendukung, karena sektor ini dianggap sebagai penerima dampak dari beraneka persoalan (*bottleneck*) yang berasal dari sektor kehutanan dan industri. Fragmentasi ini dapat kita lihat pada TABEL 6 di bawah.

TABEL 6 *Fragmentasi dual aktor agen pemerintah dalam rantai proses pengembangan komoditi sutra*

Dua sektor utama agen pemerintah				Agen pendukung	
Sektor kehutanan		Sektor perindustrian		Sektor pengembangan	
Kegiatan utama sektor kehutanan	Aktor lain yang mendukung kehutanan	Kegiatan utama sektor perindustrian	Aktor lain yang mendukung perindustrian	Kegiatan utama	Aktor agensi pemerintah
<i>Budidaya Murbei</i> , BPA/BPSKL ; Dinas Kehutanan Provinsi; Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten	-	<i>Pertanian Sutra</i> , Dinas Perindustrian Provinsi dan Kabupaten	BNI – Kampung BNI, <i>pemberdayaan pengrajin, dan transformasi menjadi pengusaha kecil menengah</i>	<i>Pengembangan industri usaha kecil menengah</i>	Dinas koperasi, dinas perdagangan
<i>Pemeliharaan ulat</i>	Perhutani, CV Massalangka (Importir bibit ulat)	<i>Pemintalan Benang Sutra</i> , Dinas Perindustrian Provinsi dan Kabupaten		<i>Pengembangan wisata berbasis sutra</i>	Dinas Pariwisata

Fragmentasi ini menyebabkan sektor hulu terhalang untuk menjalankan peranan agen pemerintah yang lain karena tidak mendapatkan mandat secara langsung. Misalnya, tanaman murbei justru banyak ditanam di kawasan pertanian, di luar kawasan hutan.

Artinya, agen pemerintah dari sektor berbeda tidak turut mengambil bagian berarti dalam rangkaian kegiatan semacam ini, sementara fakta di lapangan menunjukkan banyak persilangan.

Pengorganisasi petani gagal memberdayakan petani. Laporan Kepala Dinas Kehutanan Sulsel tahun 2019 menyebut bahwa komoditas sutra telah banyak ditinggalkan. Gambaran ini bersepatat dengan temuan lapangan yang diurai di atas: hanya tersisa 75 petani murbei saat ini aktif, tersebar di Kabupaten Wajo¹⁵ dan Soppeng.

Pada kurun 1997 – 2000, sebenarnya ada upaya penguatan kelompok tani persuteraan alam melalui kredit Usahatani Persuteraan Alam (KUPA) melalui instrumen Keputusan Menteri Kehutanan, hanya saja program ini hanya menyisakan kredit macet yang disebabkan tidak kuatnya program penguatan kelembagaan petani serta serangan penyakit pebrine yang membuat usaha mereka gagal mengembalikan dana kredit bantuan.

Sementara itu, kondisi kelembagaan kelompok tani cenderung bersifat normatif karena gabungan sejumlah faktor, antara lain: Kelompok tani sangat bergantung pada bantuan pemerintah, baik bantuan bibit murbei maupun bibit ulat. Mereka melakukannya di dalam kondisi absennya jaminan stok, harga, dan pasar. Semua ini masih dibayangi pula dengan ketidakpastian lain yang berhubungan dengan lingkungan (hama dan polusi). Rangkaian ketidakpastian di banyak aspek usahatani ini tentu mendorong mereka mencari usaha lain yang lebih menjanjikan kepastian. Bergabung dalam kelompok tani dan mendapat bantuan secara teratur adalah salah satu jalan untuk itu. Dan bila ketidakpastian itu berkepanjangan hingga mulai mengganggu keseimbangan antara jerih payah yang mereka kerahkan dan faedah yang mereka terima, mereka akan beralih komoditi. Karena itu, di Soppeng dan Wajo, petani cenderung memilih mengkonversi areal kebun murbei ke komoditi lain mengikuti *booming* komoditas pertanian, seperti kakao dan belakangan ini jagung.

¹⁵ Anggota kelompok Tani Sutra Sejahtera Kelurahan Walanae, sentra pemeliharaan ulat sutra di Kabupaten Wajo, tidak aktif lagi.

Ketidakpastian yang menciptakan ketergantungan itu menjadi berkepanjangan ketika mereka berhadapan dengan guncangan perubahan institusi pelayanan pemerintah, seperti hilangnya BPA dan minimnya peran BPSKL yang menggantikan peran BPA, berubah-ubahnya struktur organisasi KPH di Wajo dan Soppeng dalam kurun waktu yang sangat dekat, perubahan desentralisasi sektor kehutanan dari Kabupaten ke Provinsi, membuat mitra kelompok tani persuteraan alam di lapangan juga turut terguncang. Artinya, kelompok tani selama ini hanya bergantung pada program pemerintah, dan ketika skema itu terguncang, kelompok tani juga mengalami guncangan. Kerja ‘pemberdayaan’ gagal membawa mereka ke sebuah aksi kolektif yang berasal dari kebutuhan dan orientasi kelompok tani itu sendiri.

Agen pemerintah lewat KPH sebenarnya sudah berusaha menjalankan program pemberdayaan lewat pengorganisasian petani dalam skema Kemitraan Kehutanan. Namun program yang berusaha membangun kelembagaan petani ini berbenturan dengan pranata lokal masyarakat dan perubahan kelembagaan di KPH sendiri. Dalam program ini, tampak bahwa KPH Awota (yang kemudian berubah menjadi KPH Walanae) mengalami hambatan berat ketika berusaha mengorganisir petani. Upaya ini gagal membangun organisasi petani yang punya daya tawar yang cukup kuat sehingga, bahkan di bawah dukungan sejumlah badan pemerintah, para petani tidak sanggup menembus kuasa para *gatekeeper* lokal. Dua hambatan ini telah membawa program menuju kegagalan. KOTAK 5 di bawah memuat cerita kasus program tersebut.

KOTAK 5 Perhutanan Sosial: Sengkarut persoalan tenurial dalam usaha pemberdayaan petani

Di kawasan hutan Kabupaten Wajo dan Soppeng, telah terbentuk KPH Walanae sebagai unit pengelola tapak kawasan hutan yang berada di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Implementasi Perhutanan sosial sebagai agenda prioritas nasional untuk mengatasi konflik dan pemberdayaan petani telah menjadikan pemberdayaan petani dalam perusahaan persuteraan alam sebagai salah satu agenda prioritas KPH Walanae, yang tergambar dalam dokumen

rencana pengelolaan hutan mereka (RPHJP KPHL UNIT XII PADA UPT KPH WALANAE 2019–2028, Lihat LAMPIRAN 2).

Arahan perhutanan sosial menurut dokumen ini dialokasikan pada blok pemberdayaan seluas total 7.033,12 Ha (Hutan Produksi 4.654,44 Ha; Hutan Produksi Terbatas 2.378,63 Ha), yang dalam implementasinya dilakukan melalui skema perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. Program perhutanan sosial yang telah berjalan di wilayah kelola KPHL Unit XII adalah IUPHHK-HTR sebanyak 3 izin (839 Ha), HPHD sebanyak 4 izin (7.242 Ha) dan IUPHKm sebanyak 7 izin (1.257 Ha). Untuk program kemitraan kehutanan, direncanakan menggandeng pemegang izin IPHHBK (getah pinus) sebanyak 14 KTH yang berlokasi di blok pemberdayaan. Sementara rencana fasilitasi Kelompok Tani Hutan Sutra Alam hanya menyebutkan 3 Kelompok Tani Hutan Sutra Alam.

Salah satu agenda prioritas KPH nasional termasuk KPH Walanae adalah Pembinaan dan pemantauan kegiatan penyelesaian konflik melalui skema pemberian izin pemanfaatan seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan di areal KPH. Konflik tenurial ini terjadi akibat banyaknya keterlanjuran di dalam kawasan hutan, seperti konflik klaim akses pemanfaatan dan kepemilikan tanah KPH (waktu itu masih KPH AWOTA Kab. Wajo) bekerjasama dengan UNHAS pada tahun 2016 memfasilitasi salah satu skema perhutanan sosial, yakni kemitraan kehutanan. Kemitraan kehutanan ini ditetapkan dalam rangka mengajak KPH dan masyarakat lokal di dalam dan luar kawasan hutan untuk mengembangkan usaha perhutanan berbasis persuteraan alam. KPH Awota saat itu sangat tertarik untuk menampilkan diri sebagai KPH percontohan, menjadi skema kemitraan yang menyediakan mekanisme strategis untuk menjembatani berbagai kepentingan dengan mengambil instrumen SK Menteri Kehutanan No.979 / Menhut-II / 2013, sebagai model KPH yang berbasis persuteraan alam.

Ragam dialog formal dan non formal, negosiasi dan FGD dilaksanakan di level desa, dusun, dan KPH sendiri. Semua informasi tentang skema kemitraan disampaikan dengan sangat terperinci, termasuk agar para elit bisa mengembangkan pemahaman lebih luas dan memutuskan syarat-syarat kesepakatan. Dalam skema kemitraan ini, KPH memberikan dukungan untuk 25 hektar di "blok pemberdayaan". Dukungan diberikan untuk budidaya tanaman murbei, yang merupakan langkah pertama dalam menyediakan habitat ulat sutra. KPH sendiri sangat ingin memperkuat diri dengan memberi dukungan untuk penanaman murbei kepada masyarakat lokal dan membuka peluang penyaluran proyek dalam bingkai proyek pemberdayaan.

Namun, meskipun kesepakatan telah dicapai dengan kelompok tani lokal tentang penanaman murbei dan budidaya ulat sutra, tiga elit lokal tidak mengikuti proses ini. Secara khusus, ketiga elit lokal yang mengaku sebagai *pengongko* kawasan sengaja menghindari proses awal untuk mencapai kesepakatan. Ketiga aktor elit kunci dengan klaim hak atas tanah tersebut tidak menghadiri kegiatan implementasi program untuk menunjuk "blok pemberdayaan." Mereka diundang

tetapi tidak pernah menghadiri FGD, termasuk pemetaan partisipatif yang diakhiri dengan kesepakatan bersama tentang aturan kemitraan dengan kelompok tani. Setelah diskusi selesai, mereka menyatakan tidak hadir karena bukan anggota kelompok tani. Tetapi setelah proses kemitraan berlanjut, menjadi jelas bahwa ketidakhadiran mereka merupakan cerminan dari kurangnya dukungan mereka terhadap keseluruhan proses penunjukan ulang lahan untuk penggunaan selain yang telah mereka rencanakan sebagai pemilik lahan dari situs-situs ini.

Kepala Desa dan Dinas Kehutanan Kabupaten dalam perjanjian awal menyatakan bahwa pendapatan murbei (100%) akan masuk ke kelompok tani. Namun, sumber pendapatan lokal yang lebih penting berasal dari panen kayu, membuat keseluruhan kesepakatan ini menjadi lebih kontroversial, dan pada akhirnya mengarah pada kesepakatan kompromi bagi hasil di tiga blok. Ketiga anggota elit tersebut mengklaim bahwa mereka menanam pohon di sana dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut. Mereka juga menyatakan bahwa inisiatif tersebut juga menunjukkan klaim kepemilikan tanah. Setelah beberapa kali FGD, masih belum ada kesepakatan karena tiga elit tersebut. Pada akhirnya, KPH, kelompok tani, dan tiga elit lokal mencapai kesepakatan tentang pembagian hasil yang setara (1: 1: 1). Dalam proses negosiasi, KPH Awota menjanjikan insentif bagi bibit Jabon untuk ditanam di 25 hektare Kawasan inti yang ditunjuk di blok pemberdayaan skema kemitraan. Jangka waktu skema kemitraan yang diusulkan termasuk dua siklus pengelolaan kayu Jabon, selama 15 tahun, yang mencakup 14 tahun hingga jatuh tempo serta waktu tambahan untuk persiapan dan evaluasi.

Akhirnya, walaupun perjanjian kemitraan ini berhasil disepakati oleh para pihak, skema ini tidak berlanjut karena perubahan KPH Awota menjadi KPH Walanae.

Dari narasi ini, kita melihat sengkabut persoalan tenurial di kawasan hutan bukanlah hal yang sederhana. Pranat lokal membuat skema perhutanan sosial memakan waktu yang panjang untuk negosiasi dan proses internalisasi, sementara perubahan kelembagaan pemerintahan yang terus berlangsung menghambat kesinambungan program. Padahal, Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial KLHK menyatakan bahwa KLHK bukan hanya bisa menyediakan bantuan pakan untuk bibit murbei dan alokasi bibit ulat, tetapi juga bisa memberikan bantuan alat pemintal rakyat serta alat tenun, sepanjang kelompok tani yang dibantu adalah kelompok usaha perhutanan sosial. Ada 14 izin perhutanan sosial yang aktif saat ini di wilayah KPH Walanae dan tidak satupun kelompok izin perhutanan sosial ini yang terpantau melakukan kelola persuteraan alam. Saat ini ada 3 perencanaan untuk kelompok usaha persuteraan alam (non izin perhutanan sosial) yang akan didampingi oleh KPH.

Tujuh belas kelompok ini dapat mulai didampingi dengan salah satu unit usahanya adalah persuteraan alam yang bukan hanya diintervensi pada hulu tetapi juga pendampingan perusahaan pertenunan di hilir.

GRAFIK 9 *Kesepakatan antara KPH Awota dengan kelompok tani hutan yang tidak berlanjut akibat perubahan struktur KPH menjadi KPH Walanae*

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEPALA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MODEL AWOTA
DENGAN
KELOMPOK TANI SIPAKATAU**

Pada hari ini Minggu, tanggal 23 bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Kantor Desa Minanga Tellue, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusmiati, S.Hut.
Alamat : BTN Bulupabbulu Blok A9/14 Sengkang Kabupaten Wajo
Jabatan : Kepala KPHP Model Awota

Dalam hal ini bertindak atas nama KPHP Model Awota yang beralamat di:
Kota Sengkang : Jalan Veteran No. 33 Sengkang Kabupaten Wajo
Kabupaten : Wajo

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Muh. Asmidin
Alamat : Dusun Tingaraposi, Desa Minangatellue, Kabupaten Wajo
Pekerjaan/Jabatan : Petani/Ketua Kelompok Tani Hutan Sipakatau

Selanjutnya bertindak atas nama **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bermusyawarah dan sepakat untuk melakukan kerjasama kemitraan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Kemitraan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan disepakati kedua belah pihak, dan ditandatangani bersama dengan materai yang cukup.

Diketahui oleh:

PIHAK KEDUA
KELOMPOK TANI SIPAKATAU
Muh. ASMIDIN
Kepala Desa Minangatellue
ANDI BAU MADDUALENG

PIHAK PERTAMA
RUSMIATI, S.Hut
Kepala Dinas Hutan Kab. Wajo
DR. BASO CAPPE



4.1.4 Rangkuman dan Analisis

Sektor hulu persuteraan Sulawesi Selatan pada saat ini menampilkan gambaran suram. Jumlah pelaku melorot drastis, dan yang tersisa sebagian besar adalah perempuan berusia tua dan berpendidikan rendah. Sektor ini tampak tengah ditinggalkan oleh para petani muda dan berpendidikan lebih tinggi. Sementara para perempuan yang memang sejak dulu menjadi tulang punggung sektor ini juga semakin banyak yang meninggalkannya. Bila secara kultural para lelaki dianggap sebagai pencari nafkah utama, sektor ini telah mengalami degradasi, menjadi pilihan terakhir dalam strategi penghidupan keluarga tani, menjadi sekadar nafkah cadangan atau tambahan. Demikian kurang menjanjikannya sektor ini sehingga hanya segelintir lelaki muda berpendidikan yang tertarik untuk terlibat bersama para perempuan yang masih tetap berjibaku di dalamnya. Dalam hal ini kondisi di Kabupaten Soppeng lebih baik ketimbang Kabupaten Wajo dan apalagi Enrekang yang kehilangan seluruh pelaku sutranya.

Tren penyusutan jumlah pelaku di hulu ini berjalan seiring dengan rendahnya produktifitas ulat dan penyusutan penjualan ulat sutra oleh PT Perhutani. Kurangnya keuntungan yang petani peroleh mendorong mereka menginvestasikan lebih sedikit tenaga dan modal untuk ulat sutra, termasuk mengurangi atau berhenti membeli ulat sutra dari PT Perhutani. Kita ingat, bibit nasional lebih butuh perlakuan intensif daripada bibit impor dari Tiongkok.

Ada beberapa penyebab utama dari situasi ini. *Pertama*, ketergantungan terhadap bibit ulat sutra impor. Hilangnya bibit lokal sejak 1980-an dan bibit produksi nasional yang dipersepsikan petani butuh perlakuan intensif (karena daya adaptasi yang lebih rendah) menjadikan petani sangat bergantung bibit impor. Ketika bibit impor kemudian mengalami persoalan dalam bentuk rendahnya produktifitas atau bahkan gagal mengokan, sektor ini menjadi surut—bahkan benar-benar ditinggalkan sebagaimana yang terjadi di Enrekang.

Kedua, penggunaan input kimia, yang bisa membunuh ulat sutra dengan mudah. Namun ini hanya terjadi apabila satu kawasan yang tadinya didominasi murbei dan ulat mengalami peralihan

komoditas karena berkurangnya produktivitas bibit ulat. Sebagian petani dipaksa menghentikan pemeliharaan ulat sutra *setelah* sebagian lainnya beralih ke komoditas yang butuh input kimia dalam jumlah lebih besar, seperti jagung di Wajo dan sayur-sayuran di Enrekang. Dengan kata lain, persoalan ini adalah *efek* dari menurunnya minat petani membudidayakan murbei dan ulat sutra, namun semakin menyusutkan jumlah pelaku di sektor hulu, dan secara potensial bisa menghambat arus balik (*bounce back*) budidaya murbei dan ulat sutra di satu kawasan.

Ketiga, ciri khas usahatani kaum tani (*peasant farming*) yang menentukan posisi sutra dalam strategi penghidupan mereka. Karena kegagalan pemeliharaan ulat yang datang beruntun, baik dalam bentuk gagal panen atau panen kokon yang menurun drastis, petani mulai menghitung pertimbangan antara jerih payah (*drudgery*) dan manfaat (*utility*) yang mereka peroleh (van der Ploeg 2013). Dalam prinsip keseimbangan ini, petani biasanya rela menjalankan kerja lebih ketika mereka merasa bisa memperoleh pendapatan yang lebih besar daripada usaha(tani) lain yang bisa mereka kerjakan. Karena usahatani ulat sutra tampaknya gagal mendatangkan manfaat yang setara dengan jerih payah mereka, para petani pun mengalihkan investasi (modal dan tenaga kerja) ke komoditas atau pekerjaan lain, baik dengan strategi diversifikasi (salah satu anggota keluarga mencari pekerjaan lain atau mengusahakan tanaman lain), intensifikasi (menanam tanaman lain secara lebih intensif), maupun migrasi.

Prinsip keseimbangan ini juga turut berperan mengalihkan mereka dari bibit nasional—yang berujung pada ketergantungan terhadap ulat impor. Ketika mereka menemukan bahwa ulat produksi nasional butuh perlakuan lebih intensif daripada ulat impor, mereka lalu menghitung keseimbangan antara jerih payah dan faedah dari memelihara ulat sutra. Di masa lalu, bersama bibit lokal, mereka tidak perlu bekerja seintensif bila mereka mengikuti seluruh standar perlakuan ulat sutra nasional. Karena itulah mereka lebih memilih bibit impor yang menurut mereka tidak butuh perlakuan seintensif bibit nasional.

Prinsip keseimbangan ini pula menuntun petani menentukan intensitas perlakuan terhadap murbei dan ulat sutra: memilih antara yang perlu mereka lakukan dengan yang tidak. Dari perspektif petani, masalah utama dalam usahatani ulat sutra ialah mutu bibit ulat yang secara substansial menyusutkan produksi kokon—dan membuat mereka merugi. Sejumlah petani di Walennaë yang pada masa penelitian sedang tidak merawat ulat bahkan mengaku bersedia membeli bibit ulat impor dari Kabupaten Soppeng bila kualitas ulat tersebut baik dan menjamin pendapatan yang stabil. Sedangkan persoalan teknik budidaya murbei bagi mereka “bukan masalah”, mereka bisa kembali menanam dan merawatnya sebagaimana kebiasaan sebelumnya ketika ulat bermutu kembali tersedia. Teknis pemeliharaan yang kurang ideal memang bisa menghambat *pencapaian potensi maksimal murbei dan kokon*, namun untuk mencapai produksi lebih tinggi itu mereka perlu mempersembahkan lebih banyak tenaga dan/atau jam kerja lebih panjang, modal yang mungkin bagi mereka lebih bermanfaat bila digunakan untuk kerja lain. Bagi mereka, *pendapatan yang lebih baik dari perlakuan lebih baik* bukan pilihan yang menguntungkan apabila mereka perlu menghabiskan lebih banyak modal dan tenaga. Masih perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah pilihan ini mereka ambil karena para petani perempuan mengalami beban ganda (karena kekurangan tenaga kerja) atau karena kekurangan modal finansial, atau keduanya.

Dengan demikian, cara pandang petani ini juga turut menjelaskan mengapa semua penyusutan ini (pelaku, produksi, penjualan ulat) terjadi sekalipun mereka mengaku lebih suka memelihara ulat. Bergantung pada level modal yang dipunyai petani, usaha sutra sangat ramah bagi petani kecil, terutama bagi perempuan kepala keluarga. Mereka bisa memulai dengan modal kecil atau tanpa modal uang sama sekali, tenaga kerja yang harus disediakan nisbi lebih ringan, dan ramah bagi petani perempuan. Pemeliharaan ulat juga tidak selalu butuh lahan yang luas (petani yang masih aktif di sektor hulu rerata memiliki lahan di bawah 1 hektare), dan bisa mendatangkan pendapatan yang nisbi teratur dalam frekuensi yang lebih cepat.

Dengan perspektif seperti ini, dapat diduga bahwa surutnya pemeliharaan ulat sutra hanya merupakan bagian dari dinamika dalam rentang strategi penghidupan para pelaku di sektor hulu. Mereka akan kembali mengusahakan sutra ketika ulat sutra yang bermutu baik kembali tersedia. “Kalau ada telur bagus, seluruh kampung ini akan berubah menjadi pemelihara telur ulat sutra,” kata seorang petani di Wajo. Boleh jadi, bagi mereka telur ulat bermutu bisa mengembalikan keseimbangan antara jerih payah dan faedah. Dan mereka memang punya pandangan berbeda mengenai apa yang ingin mereka capai ketika (kembali) memulai usahatani. Menurut van der Ploeg (2013) usahatani versi petani (*peasant farming*) tidak melihat modal dan tenaga kerja seperti usahatani kapitalis (*capitalist farming*). Modal mereka diinvestasikan bukan untuk mendapatkan laba pada tingkat tertentu relatif terhadap investasi modal (*rate of return to investment*), sehingga mereka hanya perlu memperoleh pendapatan dari kerja (*labor income*) untuk terus melanjutkan usahatani. Mereka tidak akan berhenti dan beralih ke komoditas/usaha lain karena laba tidak mencapai tingkatan yang memuaskan modal investasi. Mereka juga tidak memakai tenaga kerja dari pasar tenaga kerja, tetapi dari dalam rumah sendiri. Karena kedua ciri inilah mereka tidak menghitung tenaga kerja sendiri sebagai bagian dari ongkos produksi. Sekali lagi, mereka lebih menimbang keseimbangan antara jerih payah (*grudgery*) dan manfaat (*utility*). Ketika pendapatan sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarga (bukan ketika tingkat laba menurun), atau ketika jerih payah tidak terbayar oleh pendapatan (manfaat) yang memadai, seperti ketika produksi kokon gagal atau menurun drastis, barulah mereka mencari solusi lain.

Menghadapi rangkaian persoalan khas di atas, institusi-institusi pemerintah terkait belum punya solusi spesifik yang efektif, setidaknya sampai saat ini. Kebijakan yang ada selama ini masih terus berfokus pada ‘pengadaan’ barang-barang untuk tujuan memacu produksi komoditas, dan lebih banyak mengabaikan ciri khas manusia (petani) yang terlibat di sektor ini. Boleh jadi, kecenderungan ini berangkat dari asumsi bahwa bila barang tersebut (mis., luasan lahan murbei dan volume ulat sutra) tersedia dalam kuantitas yang membaik, produksi ulat dan kokon juga akan membaik, dan dengan begitu kesejahteraan pelaku di hulu akan ikut

terangkat sehingga mereka akan bertahan atau bahkan bertambah. Asumsi semacam ini tidak keliru di semua bagian, hanya saja peningkatan ketersediaan barang-barang itu, serta anggaran penyokongnya, tidak secara otomatis bisa menggerakkan petani untuk terlibat dan bertahan dalam rantai nilai sutra. Ciri khas strategi penghidupan dan pranata masyarakat tani bisa saja menganulir asumsi tersebut.

Anggaran untuk persuteraan di Sulawesi Selatan secara umum meningkat pada 2019-2020. Mengiringi lonjakan ini ialah rentetan kegiatan berupa bantuan bibit murbei dan ulat sutra (termasuk impor), sesuatu yang selalu berlangsung nyaris setiap tahun, dan kadang dilaksanakan tanpa didahului persiapan sosial yang memadai, seperti kasus bantuan bibit murbei di Desa Wajoriaja, Wajo. Di samping itu, bantuan juga diarahkan ke pelatihan-pelatihan untuk menambah keterampilan petani, dan kemudahan prosedur impor ulat sutra dari luar negeri.

Berderet upaya badan pemerintah terkait ini memunculkan rentetan pertanyaan: Apakah perangkat pendampingan dan kelembagaan yang akan mengelolanya sudah siap untuk mendampingi kelompok petani sasaran? Di mana lahan untuk menanam bibit murbei bantuan, apakah di lahan-lahan yang mudah diakses petani, apakah di lahan-lahan petani yang masih melihat murbei dan ulat sebagai komoditas menjanjikan? Siapa yang akan menerima bantuan bibit ulat, apakah mereka sudah terbiasa atau siap memelihara bibit ulat, dan apakah lingkungan sekitar mereka cukup kondusif untuk pemeliharaan ulat?

Pendekatan yang agak berbeda tampak pada penelitian yang masih terus berjalan untuk mengembangkan indukan bibit ulat sutra yang lebih adaptif (kini belum rampung). Keberhasilan penelitian ini akan mengurangi, bahkan potensial menghapus ketergantungan terhadap impor bibit ulat sutra. Di samping itu, keberadaan bibit adaptif ini akan memberdayakan kembali institusi-institusi dan/atau usaha dalam negeri yang bertindak sebagai penghasil bibit. Kita ingat bahwa sudah ada kebijakan untuk mempermudah prosedur impor, diiringi menghilangnya fungsi badan pemerintah yang

bertugas mendeteksi penyakit ulat di daerah-daerah yang membuat ancaman penyakit akan terus mengintai.

Pendekatan yang memberdayakan juga tampak pada upaya KPH Walenae yang mengorganisir petani dan berpotensi menjadi persiapan sosial yang baik guna mengakses lahan kawasan hutan untuk usaha persuteraan dalam skema kemitraan kemasyarakatan. Sayangnya program ini belum berjalan maksimal, setidaknya sampai saat ini. Pranata tradisional masyarakat juga menjadi hambatan dalam upaya pengorganisasian ini. Pranata patron-klien yang mempertahankan relasi kuasa timpang dalam akses lahan ini perlu pengorganisasian agar petani marjinal bisa lebih berdaya, punya daya desak lebih besar untuk bisa mengakses lahan yang dikuasai para patron lokal.

Di sini tampak bahwa sebagian besar program yang dijalankan selama ini bertujuan untuk memacu kuantitas produksi. Ini berdampak pada meningkatnya ketergantungan pemerintah dan petani terhadap bibit ulat impor. Cara cepat menyediakan ulat bermutu dengan mengimpor (yang idealnya hanya berupa langkah *ad hoc* atau komplementer), sepertinya sedang bergerak menjadi permanen. Kebijakan yang berfokus pada aspek 'kuantitas' dan komoditi telah mengabaikan aspek 'kualitas' dan manusia yang menggerakkan sektor hulu. Murbei dan ulat tidak akan menghasilkan kokon tanpa manusia yang berminat membudidayakan keduanya. Kualitas kokon pun sulit diperoleh dengan semakin menurunnya kualitas para pelaku terutama dalam hal usia, tingkat pendidikan, dan ketersediaan waktu para perempuan yang harus menanggung beban ganda. Selain itu, mengingat sektor ini kini didominasi perempuan tua dan berpendidikan rendah—para pelaku marjinal, sulit membayangkan mereka dilibatkan dalam proses-proses pembentukan strategi program. Fakta bahwa beraneka program selama ini mengabaikan aspek manusia, yaitu para perempuan, mengindikasikan bias gender dalam pengambilan kebijakan di sektor hulu sutra Sulawesi Selatan.

Berkelindan dengan persoalan kebijakan program/anggaran ialah rangkaian isu kelembagaan di institusi pemerintah terkait. Pertama, fragmentasi pembagian mandat organisasi-organisasi

pemerintah terkait yang mengurus persuteraan membuat kerja dinas-dinas tersebut kurang fleksibel menangani isu-isu di lapangan yang berada di luar mandat masing-masing. Kedua, pergantian rezim (kekuasaan/kerangka aturan) di pusat memicu institusi pemerintah untuk terus melakukan perubahan dan menghambat keberlanjutan kerja-kerja berjangka panjang. Perubahan struktur kelembagaan di KPH, misalnya, secara serius menghambat langkah-langkah pemberdayaan di masyarakat petani di hulu. Demikian pula, perubahan struktur dinas-dinas mengalihkan sumberdaya di kabupaten menjauh dari kerja-kerja pengembangan bibit yang lebih adaptif. Padahal, upaya menuju kedaulatan bibit dan pemberdayaan petani¹⁶ merupakan dua langkah yang bisa mengokohkan dan menjamin keberlanjutan sektor hulu persuteraan di Sulawesi Selatan. Terakhir, di sektor ini juga terdapat perbedaan data temuan lapangan dan data resmi di badan pemerintahan terkait.

Rangkaian persoalan sektor hulu mengarahkan pada pentingnya untuk memerhatikan beberapa hal untuk mengembalikan petani ke sektor hulu. *Pertama*, dibutuhkan ketersediaan bibit yang lebih memudahkan bagi petani dan paling tidak diproduksi secara nasional, atau lebih bagus lagi bila dapat diproduksi secara lokal. Upaya ini akan lebih menjamin ketersediaan dan keamanan ulat dari penyakit. *Kedua*, dibutuhkan upaya untuk menjamin keamanan ulat sutra dari beraneka penyakit lewat pemantauan berkala agar bisa dengan cepat mengendalikannya. Saat ini, fungsi pemantauan dan pengendalian ini tidak tersedia lagi. *Ketiga*, pemahaman akan ciri khas usahatani petani kecil. Ciri khas ini mungkin turut menjelaskan gagalnya intervensi yang hanya berfokus pada teknis budidaya, misalnya dengan memperkenalkan terlampau banyak prasyarat teknis sehingga petani merasa terbebani.

Keempat, untuk masalah polusi pestisida, dibutuhkan lebih dari sekadar imbauan. Petani bukanlah sebuah entitas kolektif yang

¹⁶ 'Pemberdayaan' di sini adalah *empowerment* yang bersifat relasional, berbeda dengan program *empowermen* yang berupa penambahan pengetahuan dan keterampilan yang tidak secara otomatis menciptakan perubahan relasi kekuasaan antara pihak yang lemah (petani) dan pihak-pihak lain yang lebih kuat.

seragam, di samping petani kecil yang melihat usaha ulat sutra sebagai nafkah yang ideal, ada petani dengan modal besar. Bila sebagian petani mengkonversi lahan dari murbei ke komoditas lain, siapakah yang paling bisa memulai? Meski perlu penelusuran lebih jauh, cukup beralasan jika kita mengatakan bahwa petani yang lebih bisa beralih komoditas ialah yang punya volume modal, tenaga kerja, dan lahan dalam jumlah cukup besar. Mereka punya cukup fasilitas untuk mempertaruhkan investasi ke komoditas yang lebih berisiko seperti jagung atau sayuran. Dengan demikian, keuntungan dari komoditas padat modal ini bisa lebih terasa bagi mereka. Mereka bisa menanam jagung di lahan lebih luas sehingga mencapai skala keekonomian yang nisbi lebih menjanjikan daripada ulat sutra—dan mengganggu usaha ulat sutra tetangga mereka. Masalah ini butuh pengorganisasian petani agar mereka bisa membicarakan isu Bersama ini, dan mengambil langkah kolektif untuk mengatasinya, bila perlu dengan dukungan pemerintah. Secara kolektif mereka bisa berusaha bernegosiasi atau meyakinkan petani lain (terutama yang berskala besar) untuk mengkonversi lahan kembali ke murbei, dengan cara yang mereka kenali dengan baik.

Bila berhasil, upaya ini pun secara potensial dapat mengatasi potensi masalah yang tidak selalu disadari oleh para pelaku: keberadaan ulat sutra juga berpotensi punya efek baik terhadap lingkungan. Pengurangan input kimia pertanian mutlak dibutuhkan dalam sebuah kawasan yang sedang memelihara ulat sutra. Hal ini mendorong para petani mengurangi luasan lahan pertanian dengan input kimia, atau tidak menggunakan input kimia samasekali—alias bertani organik. Dengan begitu, bertani organik juga sangat ramah bagi tubuh perempuan yang mengemban peran kodrati (hamil, menyusui) maupun untuk kesehatan reproduksi.

Di luar itu, petani yang terorganisir juga bisa memuluskan kerja program-program bantuan teknis budidaya. Kerja-kerja kolektif memungkinkan pembagian peran—sehingga meringankan beban petani—dalam kegiatan-kegiatan seperti pelaksanaan uji coba atau riset bersama yang butuh kerja jangka panjang. Terbangunnya kepercayaan terhadap kelompok yang memang bekerja untuk kepentingan bersama bisa juga memudahkan

pembentukan usaha bersama atau pembelajaran-pembelajaran teknis.



GAMBAR 6 Pemintalan benang sutra.

4.2 Sektor Manufaktur

Sektor ini terdiri dari dua rangkaian besar tahapan kegiatan, yaitu pemintalan dan penenunan. Pemintalan adalah proses menarik serat kokon menjadi helai-helai pintalan-pintalan benang. Terdapat dua kategori pemintalan, yaitu pemintalan modern dan pemintalan rakyat. Pemintalan modern adalah pemintalan yang menggunakan mesin baik yang *full automatic* maupun yang *semi automatic*.

Mesin pemintalan rakyat di Kabupaten Wajo dan Soppeng memiliki tiga tahap dalam proses pemintalan, dan semua tahap tersebut berpengaruh pada kualitas benang. Tiga tahap tersebut adalah proses penanganan kokon, pemintalan dan penanganan benang hasil pemintalan. Secara terperinci keseluruhan proses, alat dan bahan yang digunakan dalam usaha pemintalan dapat dilihat di KOTAK 6 di bawah.

KOTAK 6 Rangkaian Pemintalan dalam Usaha Pemintalan Rakyat

Tahap pertama, penanganan kokon, dengan kegiatan utama terdiri dari kegiatan pengeringan, seleksi dan perebusan kokon. Kegiatan perebusan diperlukan jika kokon yang baru dipanen tidak segera dipintal, hal ini dimaksudkan agar kokon tidak rusak atau ulat kokon berubah menjadi kupu-kupu. Namun kegiatan ini tidak diperlukan jika kokon yang baru dipanen segera dipintal. Kokon yang segera dipintal umumnya memiliki kokon cacat yang lebih sedikit serta memiliki kualitas benang yang lebih bagus. Namun hal ini seringkali sulit dilakukan karena sarana pemintal terbatas. Waktu yang diperlukan dalam pengeringan kokon biasanya 2-3 hari atau sesuai kondisi cuaca.

Selain kegiatan pengeringan, tahap penanganan kokon ini juga meliputi kegiatan seleksi. Kegiatan seleksi dilakukan untuk memisahkan kokon cacat, yakni kokon yang memiliki ulat double dan kokon rusak (kempes) atau kokon yang berisi ulat mati. Kokon cacat jika dipintal menghasilkan kualitas yang rendah karena benang lebih sering putus. Secara rata-rata proporsi kokon cacat di pemintalan rakyat Kabupaten Soppeng sekitar 7,5% dari volume awal kokon. Seleksi kokon cacat biasanya tidak terlalu lama, untuk volume kokon awal 45 kg dapat diseleksi setengah hari oleh satu tenaga kerja. Kokon cacat hasil seleksi atau sering disebut aval kokon, jika dipintal menghasilkan *spun silk*, dan kokon hasil seleksi jika dipintal menghasilkan *raw silk*. Spunsilk hasil pemintalan kokon cacat masih dapat digunakan sebagai bahan pembuatan hiasan-hiasan seperti bros atau semacamnya. Sesuai seleksi kokon, kegiatan selanjutnya adalah perebusan kokon. Kegiatan perebusan kokon tidak dilakukan sekaligus, tetapi dilakukan berkali-kali. Volume kokon yang direbus disesuaikan kebutuhan dan kapasitas perebusan, biasanya sekitar 1 kg kokon setiap perebusan dengan lama perebusan kurang lebih 10 menit. Perebusan kokon tidak boleh terlalu lama karena akan merusak serat benang.

Tahapan setelah penanganan kokon adalah tahapan pemintalan. Usaha pemintalan rakyat di Kabupaten Soppeng menggunakan alat pemintalan yang disebut mesin *reeling*. Alat ini digerakkan oleh dinamo listrik berkapasitas 100 VA. Terdapat 18 unit mesin pemintalan seperti ini di Kabupaten Soppeng yang kesemuanya merupakan bantuan dari pemerintah. Pemintalan dilakukan setelah kokon direbus kemudian dimasukkan ke dalam wadah tertentu yang berisi air hangat atau air rebusan kokon (sekitar 30-50°C), selanjutnya dilakukan pencarian ujung serat benang. Kegiatan pencarian ujung serat benang merupakan tahapan penting dalam pemintalan. Kegiatan ini memerlukan teknik dan keterampilan khusus. Kesalahan menarik ujung serat benang dapat menyebabkan benang sutra sulit terurai dan putus.

Setelah ujung benang ditemukan, selanjutnya serat benang dikaitkan pada alat peluncur dan diikatkan pada haspel (alat penggulung benang yang terbuat dari pipa paralon 3 inci sepanjang 10 cm), setelah itu mesin *reeling* akan menarik serat benang hingga kulit kokon habis dan hanya menyisahkan pupa (ulat yang ada di dalam kokon). Apabila selama proses itu ada benang yang putus, ujung benang tersebut harus disambung kembali dan melakukan pemintalan.

Salah satu ciri kualitas benang yang bagus adalah serat benang kokon yang dipintal tidak pernah putus. Namun dalam prakteknya pada usaha pemintalan rakyat, frekuensi putus benang dalam satu kokon adalah 10-100 atau lebih. Seringnya putus benang dalam proses pemintalan ini selain mempengaruhi kualitas benang juga memperlambat pekerjaan *reeling*. Secara rata-rata jumlah produksi benang yang dihasilkan tenaga *reeling* dalam satu hari (sekitar 8 jam)

berikisar 1,25 kg benang (raw silk), namun bisa kurang jika benang yang dipintal terlalu sering putus.¹⁷

Kegiatan setelah *reeling* adalah *re-reeling*, yakni menarik benang dari haspel (gulungan kecil) dan menggulung ulang benang kedalam gulungan lebih besar yang alat penggulungnya terbuat dari kayu berdiameter 50 cm. Alat *re-reeling* digerakkan oleh dinamo listrik berkapasitas 180 Va dan dijalankan oleh satu tenaga kerja yang umumnya adalah perempuan. Pekerjaan *re-reeling* ini memerlukan waktu yang relatif singkat yakni hanya sekitar 30 menit per kg benang. Namun pekerjaan ini memerlukan kehati-hatian terutama dalam pembuatan gulungan benang agar tidak menyebabkan benang menjadi kusut.

Tahap terakhir dalam proses pemintalan ialah penanganan benang. Setelah kegiatan *re-reeling* dilakukan pengikatan benang. Pengikatan benang juga menggunakan cara pengikatan khusus. Teknik pengikatan ini dimaksudkan agar posisi benang tidak berubah susunannya, sehingga penarikan benang mudah dilakukan dan tidak membuat benang menjadi kusut. Setelah benang diikat, selanjutnya benang diangin-anginkan selama 24 jam.

GAMBAR 7 Re-reeling.



¹⁷ Mesin pemintalan *reeling* dijalankan oleh satu orang tenaga kerja dan biasanya perempuan. Output dari proses *reeling*, selain benang yang tergulung dalam haspel, juga terdapat pupa sebagai produk sampingan. Pupa adalah ulat pada kokon yang dipintal benangnya. Pupa saat ini, tidak memiliki nilai ekonomi bagi pengusaha pemintal, tetapi pupa ini sering diminta oleh peternak itik atau pemelihara ikan untuk dijadikan pakan, juga sering ada permintaan untuk digunakan sebagai bahan pembuatan kosmetik. Di Kabupaten Wajo Pupa sering di buat tepung untuk bahan pembuatan makanan ringan.

Tahap selanjutnya adalah penenunan. Ada banyak pekerjaan yang terangkum dalam kategori umum 'penenun'. Helai-helai benang perlu melewati serangkaian perlakuan sebelum terpasang di alat tenun. Pengusaha yang menjual kain atau sarung biasanya menjadi pihak atau aktor yang membeli benang lalu membawanya ke pekerja-pekerja berbeda yang menjalankan usaha berbeda di sepanjang pengolahan benang menjadi kain atau sarung.

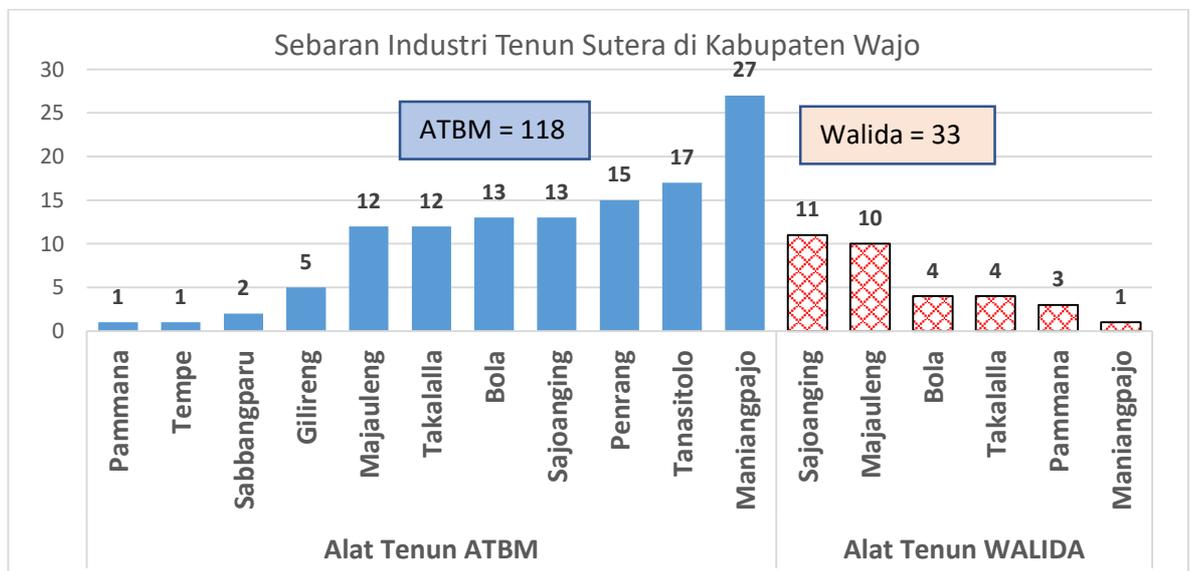
Industri tenun sutra Sulawesi Selatan terkonsentrasi di Kabupaten Wajo yang ibukotanya yang sering dijuluki "kota Sutra". Sebelum dasawarsa 2000-an pelaku industri tenun sutra di daerah ini mencapai ribuan pelaku, namun saat ini menurut data yang tersedia tinggal sebanyak 151 pelaku. Sebanyak 89,40 persen pelaku industri tenun ini adalah industri rumah tangga yang secara mandiri melakukan kegiatan pertenunan tanpa memiliki tenaga kerja upahan, hanya sebanyak 16 usaha (10,59 persen) merupakan pelaku usaha pertenunan yang mempekerjakan tenaga penenun berkisar antara 2-100 penenun. Pelaku industri tenun sutra di Kabupaten Wajo tersebar di 11 dari 14 kecamatan.

Sebagian besar pelaku industri tenun yang ada di Kabupaten Wajo telah melakukan transformasi alat tenun dan bahan baku benang. Alat tenun beralih dari dominasi alat tenun tradisional, disebut gedogan atau secara lokal "*walida*", ke alat tenun semi modern yang disebut Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) atau secara lokal dikenal dengan nama *bola-bola*. Menurut data yang tersedia, jumlah penenun sutra yang masih bertahan menggunakan walida tinggal sebanyak 33 penenun atau sekitar 21,85% dari total penenun di Kabupaten Wajo. Sisanya sudah beralih menggunakan ATBM. Pelaku industri tenun sutra berbasis ATBM tersebar di 11 kecamatan, dengan Kecamatan Maniangpajo, Tanasitolo, dan Penrang sebagai sentra utama industri tenun berbasis ATBM. Sedangkan petenun berbasis walida tersebar di 6 kecamatan terutama di dua kecamatan yakni Kecamatan Sajoanging dan Majauleng. Desa Tosora yang berada di Kecamatan Majauleng merupakan lokasi lahirnya motif sarung Tosora yang merupakan sarung sutra dengan motif termahal di Kabupaten Wajo.

GAMBAR 8 Penenun menggunakan gedogan atau walida.



GRAFIK 10 Sebaran Industri Tenun Sutra di Kabupaten Wajo, Tahun 2018



Selain transformasi alat tenun, juga terjadi pergeseran penggunaan bahan baku benang. Para pelaku industri tenun ini tidak lagi hanya menenun sarung atau kain berbahan sutra, tetapi juga menghasilkan produk berbahan benang *vicecose* dan *poliester*. Penggunaan bahan baku non sutra ini tidak hanya terjadi pada industri pertenunan berbasis ATBM, tetapi juga pada pelaku

penenun berbasis walida. Pelaku industri tenun yang menggunakan bahan baku benang sutra juga tidak menggunakan 100 persen benang sutra lokal, tetapi mengkombinasikan sutra impor sebagai benang lusi dan benang sutra lokal sebagai benang pakan.

Transformasi penggunaan bahan baku benang ini di sebabkan oleh banyak faktor, di antaranya: (1) benang sutra lokal yang tidak punya ukuran yang standar/seragam dan dalam proses pemintalan tingkat putusannya yang tinggi membuat penggunaan benang impor sebagai benang lusi tak terhindarkan. Benang sutra lokal hanya bisa dijadikan benang pakan dalam proses produksi sarung dan kain sutra. (2) Persaingan pasar yang menghendaki harga produk yang lebih murah, mendorong pelaku usaha menggunakan bahan baku benang *vicecose* dan *poliester* untuk menghadirkan sarung dan kain yang meyerupai sutra namun dapat dijual dengan harga yang lebih murah. Harga benang sutra yang semakin tinggi (berkisar Rp. 1,45 juta/kg benang impor sebagai benang lusi dan Rp. 600.000/kg benang sutra lokal sebagai benang pakan) mendorong pelaku industri memilih benang alternatif (*Vicecose* dan *poliester*) yang jauh lebih murah. (3) Proses produksi yang mudah, cepat dan murah menurunkan risiko produksi bahan baku non sutra. Benang sutra yang lebih halus dan lebih mudah putus menyebabkan proses produksi sarung dan kain berbahan sutra memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan bahan benang non sutra.

Produksi sarung dan kain berbahan sutra memiliki proses yang panjang dan sering melibatkan beberapa pelaku yang memiliki keterampilan khusus. Secara umum tahapan utama dalam pembuatan sarung dan kain berbahan sutra terdiri dari tahap pemasakan benang, pencucian dan pengeringan benang, pewarnaan, penggulungan benang, pemasangan serat benang ke sisir alat tenun, kemudian pelicinan benang dan penenunan untuk menghasilkan sarung dan kain sesuai ukuran yang sudah ditentukan.

Proses pemasakan benang (*degumming*) yang dilanjutkan dengan kegiatan pencucian dan pengeringan, biasanya memakan waktu 1 minggu. Proses pemasakan sesungguhnya relatif singkat, namun mempersiapkan air pemasakan biasanya memerlukan waktu 1-2 hari. Air pemasakan adalah air dari abu buah maja dan buah ketapang yang dibakar sebelumnya dan didiamkan minimal 24 jam sampai menghasilkan air yang jernih. Selain abu buah maja dan ketapang, di Kabupaten Wajo ada juga yang menggunakan abu dari buah singkong untuk memperoleh air pemasakan benang. Proses pemasakan akan menghasilkan benang sutra yang bersih dan

berkilau. Setelah pemasakan adalah kegiatan membilas/mencuci benang dengan air sabun, proses ini dilakukan berulang kali sampai benang terasa lembut. Benang hasil cucian selanjutnya dikeringkan dan diangin-anginkan yang menggunakan bandul agar benang tidak kusut dan lebih halus.

Benang yang sudah kering selanjutnya di gulung ke alat khusus yang dalam bahasa daerah disebut *pappali* dan *pagganra*. Benang yang sudah tergulung rapi lalu diwarnai sesuai warna dasar kain yang diinginkan. Khusus untuk benang pakan, sebelum pewarnaan biasanya ada bagian tertentu yang diikat untuk memberi pola pada kain. Benang yang sudah di warnai, selanjutnya satu persatu helai benang dipasang di sisir alat tenung (dalam bahasa daerah disebut *Jakka*). Kegiatan ini dalam bahasa daerah di sebut *massau*. Setelah pemasangan benang ke sisir tenun, berikutnya dilakukan pelicinan benang dengan menggunakan air jeruk, dalam bahasa daerah disebut *mapparisi*, kegiatan ini biasanya dilakukan setiap kali sebelum kegiatan penenunan.

Proses pembuatan sarung dan kain dari bahan benang *viscose* sebagai benang lusi dan *poliester* sebagai benang pakan melewati tahapan lebih ringkas. Proses produksi sarung dan kain dari benang non sutra ini tidak memerlukan proses pemasakan, pencucian, dan pewarnaan karena sudah tersedia dalam berbagai warna dasar. Kecuali menginginkan warna tertentu, maka proses pewarnaan masih biasa dilakukan. Proses penggulungan benang juga lebih sederhana karena benang yang dibeli sudah dalam bentuk gulungan. Namun proses pemasangan benang ke sisir tenun masih diperlukan.

Proses ini berbeda-beda di setiap unit usaha tenun, dengan pengusaha tenun menerapkan proses ini sesuai kebutuhan dan ketersediaan tenaga terampil dalam rumah tangga mereka. Para pengusaha tenun sering kali menyerahkan sejumlah pekerjaan kepada pekerja spesialis berbeda seperti *papparisi*, *pacello*, *pagganra*, dan *pattennung*. Salah satu kasus bisa kita lihat di KOTAK 7 di bawah.

KOTAK 7 Kasus Pemrosesan Benang Mentah Hingga Siap Tenun

Dalam satu contoh kasus, 'pengusaha tenun' atau *pappattennung*, menuturkan proses pengolahan benang-hingga-sarung sebagai berikut:

1. Benang dicuci dan direndam selama sehari.
2. *Maccello*: benang diwarnai selama sehari.

3. Membilas benang, merendam dengan larutan kanji, lalu menjemur, selama sehari.
4. *Mappali*: meretas benang menjadi gulungan-gulungan kecil di tabung-tabung bambu berukuran sekira 30 cm (*taropong*). Kerja ini berlangsung 3 hari.
5. *Massau'*: memindahkan benang ke sebuah gulungan panjang (boom lusi) berukuran sekira 2 meter. Paling tidak 200 utas benang dari 200 gulungan bambu dipindahkan ke gulungan yang lebih Panjang. Proses ini dilakukan sepuluh kali (200 utas benang digulung rapat bersisian sebanyak 10 kali, membentuk gulungan 2000 utas benang bersisian), dengan masing-masing gulungan sepanjang 4 meter.
6. *Mapparisi*: memasukkan utas benang satu per satu ke dalam alat tenun berbentuk sisir.
7. *Mattennung*: benang yang sudah dimasukkan ke dalam sisir dan bong mulai ditenun. Untuk sarung samarinda, dengan ATBM memakan waktu 2-4 hari.

GAMBAR 9 Massau'



Dalam kasus ini, sang pengusaha tenun mengerjakan sendiri seluruh proses kecuali dua proses terakhir (*mapparisi* dan *mattennung*). Kasus di atas, dan kasus sejumlah informan lain, menunjukkan bahwa *mapparisi* dan menenun, serta pada tingkatan lebih rendah *maccello*, tidak dikerjakan oleh para pengusaha tenun sendiri. Di kasus lain kami menemukan satu lagi jenis pekerjaan lain yang menyediakan jasa bagi pengusaha tenun, yaitu *pagganra*

(orang yang menggulung benang kering ke alat khusus sebelum diwarnai).

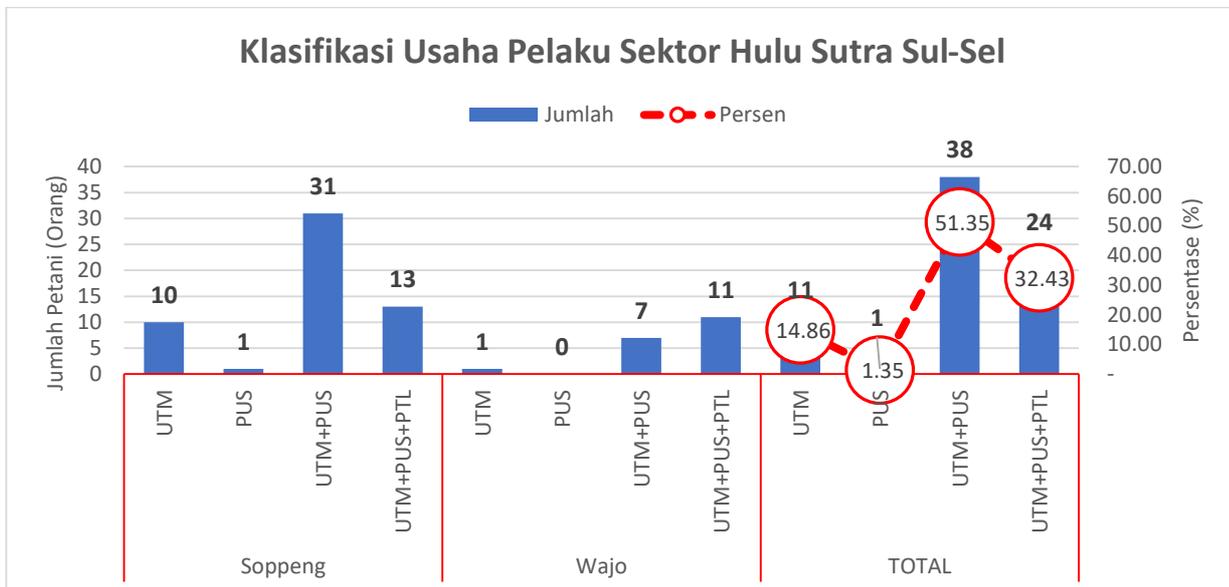
4.2.1 Kecenderungan Mutakhir

Usaha pemintalan mengalami penyusutan. Semua mesin pemintalan benang sutra yang masih beroperasi di Kabupaten Wajo dan Soppeng adalah mesin pemintalan rakyat. Di Kabupaten Wajo terdapat 4 instalasi pemintalan semi otomatis: instalasi pemintalan yang terdapat di UPT Tekstil milik Pemerintah Provinsi, instalasi pemintalan di UPTD Persuteraan milik Dinas Perindustrian Kabupaten Wajo, instalasi Pemintalan milik Haji Kurnia, dan instalasi pemintalan yang kini tidak bekerja lagi milik Perhutani. Salah satu instalasi ini adalah mesin *twisting* yang kini kondisinya masih bagus namun tidak berfungsi karena mesin pendukungnya seperti mesin *winding* dan *doubling* (perangkapan benang) tidak tersedia. Sementara di Kabupaten Soppeng terdapat dua instalasi pemintalan semi otomatis, keduanya saat ini tidak beroperasi lagi, milik Perhutani dan milik UPT Tekstil. Belum ada instalasi pemintalan full otomatis di Sulawesi Selatan. Karena itu jenis benang yang dihasilkan oleh pemintalan rakyat di kedua daerah masih berupa sutra mentah (*raw silk*). Jenis benang ini umumnya hanya digunakan sebagai benang pakan dalam industri pertenunan.

Wawancara-wawancara mengindikasikan terjadi penurunan drastis usaha pemintalan rakyat secara umum. Di kelurahan Welannae kecamatan Sabbangparu, Wajo, yang pernah menjadi sentra pemeliharaan ulat, semua informan menyebutkan bahwa dulu ketika pemeliharaan ulat sutra menjadi pekerjaan utama hampir setiap petani juga menjadi pemintal. Saat ini hanya satu jasa pemintal rakyat yang beroperasi, itu pun hanya beroperasi sesekali karena tidak mendapat banyak pesanan dari petani. Jika dilihat dari data yang tersedia di BPS, di Sulawesi Selatan saat ini pemintal rakyat tersisa 26 unit pemintalan.

Pemintal yang mengusahakan murbei dan ulat sekaligus sudah tidak banyak dipraktikkan. Seiring semakin berkurangnya aktifitas pemeliharaan ulat, pemisahan pemintalan dari pemeliharaan ulat terjadi karena pemintalan semakin tidak ekonomis jika dilakukan sendiri dengan volume produksi kokon yang semakin kecil. Pengintegrasian pemintalan dalam usaha pemeliharaan ulat sutra membutuhkan waktu dan tenaga kerja lebih.

GRAFIK 11 *Klasifikasi Usaha Pelaku Hulu Sutra*



Sementara itu, instalasi pemintalan moderen juga mengalami persoalan. Dari enam pemintalan moderen yang terdapat di Wajo dan Soppeng, tiga di antaranya sudah berhenti beroperasi (milik Perhutani di Soppeng dan Wajo dan milik UPT Tekstil di Soppeng).¹⁸ Sementara instalasi pemintalan milik H. Kurnia tidak bisa beroperasi optimal karena sangat kurangnya pasokan kokon. Penyusutan usaha pemintalan berkaitan langsung dengan persoalan dari mata rantai sebelumnya, berkurangnya pasokan kokon dari unit-unit pemeliharaan ulat sutra.

Ada perbedaan penting dalam proses pemintalan antara mesin pemintal moderen dengan alat pintal rakyat. Pada mesin pintal semi dan full otomatis terdapat alat *denier control* yang mengontrol tingkat kerataan benang. Alat pintal semi otomatis milik Perhutani punya 16 mata pintal yang digerakkan oleh mesin berbahan bakar jenis minyak bakar. Sedangkan alat pintal semi mekanis yang dimiliki UPT Tekstil dijalankan oleh listrik dan memiliki 4 mata pintal. Sementara alat pintal full otomatis di Tiongkok, misalnya, memiliki 400 mata pintal. Kelebihan mesin pintal full otomatis ialah mengurangi pemakaian tenaga kerja dan menghasilkan kualitas

¹⁸ Satu instalasi mesin pemintalan di Enrekang sudah lama tidak beroperasi.

benang sutra yang lebih baik. Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam mengoperasikan satu rangkaian alat pintal full otomatis adalah 5 orang.

Pada pemintalan rakyat, keseluruhan kegiatan dalam proses pemintalan benang sutra umumnya dikerjakan 2 orang, dan biasanya adalah perempuan. Pembagian tugas yang spesifik hanya pada kegiatan *reeling* dan *re-reeling* karena keduanya memerlukan keterampilan khusus. Kedua kegiatan ini selalu dikerjakan oleh tenaga kerja tertentu. Sedangkan pada kegiatan lainnya tidak ada pembagian kerja khusus dan dapat dikerjakan secara bersama-sama. Upah tenaga *reeling* lebih tinggi dibandingkan tenaga *re-reeling*. Upah jasa pemintalan rakyat di Kabupaten Soppeng umumnya Rp. 60.000/kg benang. Tenaga *reeling* memperoleh Rp. 45.000/kg benang, sementara tenaga *re-reeling* mendapatkan Rp. 15.000/kg benang. Pembagian upah ini juga sesuai dengan alokasi waktu kerja di antara mereka.

TABEL 7 Analisa Ekonomi Proses Pemintalan Rakyat Benang Sutra di Sulawesi Selatan, 2020

Proses Pemintalan						
	Alat/Bahan	<ul style="list-style-type: none"> • Terpal • Panci Perebusan • Pompa Air (450 VA) • Ember • Tabung Gas/Kayu bakar 		<ul style="list-style-type: none"> • Ruang pemintalan • Alat Reeling, • Alat Re-Reeling • Dinamo listrik Reeling 100 VA • Dinamo Re-Reeling 180 VA • T-Gulungan kecil (pipa plastik 3 inci panjang 10 cm) • T-Gulungan besar (Kayu) 		<ul style="list-style-type: none"> • Gunting • Tali Rapih • Meja
Rendemen	<ul style="list-style-type: none"> • Vol Koko (kg) • % Kokon cacat • Volume Hasil seleksi untuk perebusan 	45 7,5% 41,6 Kg	<ul style="list-style-type: none"> • Volume kokon dipintal 	41,6 Kg	Volume Akhir <ul style="list-style-type: none"> • Benang Sutra • Aval kokon • Pupa Kokon 	6,4 Kg 3,4 Kg 35,2 Kg
Biaya proses	Bahan <ul style="list-style-type: none"> • Vol Air Rebusan 	7,5% 416 ltr	Biaya pemintalan		Biaya proses/Kg B Sutra	Rp. 4.911

	<ul style="list-style-type: none"> • Listrik pompa • Tabung Gas 3 kg 1 buah 	Rp.694 Rp.20.000	<ul style="list-style-type: none"> • Listrik Reeling • Listrik re-reeling • Lampu R Produksi 	Rp. 4.759 Rp. 642 Rp. 5.354		
Waktu dan TK	TK (HOK) <ul style="list-style-type: none"> • Pengeringan kokon • Seleksi kokon cacat • Perebusan 	3,12 HOK 1,75 HOK 0,50 HOK 0,87 HOK	TK (HOK) <ul style="list-style-type: none"> • Reeling (1 Org) • Re-Reling (1 Org) 	5.7 HOK 5,3 HOK 0,40 HOK	Jasa Pemintal /Kg B Sutra (2 Org TK)	Rp. 60.000

Usaha pemintalan rakyat benang sutra merupakan kegiatan yang padat kerja dengan biaya proses yang kecil. Volume awal kokon sebesar 45 kg memerlukan alokasi tenaga kerja sebesar 5,7 HOK, dengan alokasi kerja paling besar pada kegiatan pemintalan (*reeling*) yakni sebanyak 5,3 HOK atau setara 0,8 HOK/kg benang. Sedangkan biaya prosesnya sebesar Rp. 31.452 yang sebagian besar merupakan biaya bahan bakar dalam perebusan kokon. Jumlah produksi benang yang dihasilkan dari volume awal (45 kg) tersebut adalah sebanyak 6,4 kg benang sutra. Total biaya proses pemintalan per kg benang sutra setara dengan Rp. 4.911/kg benang. Biaya proses pemintalan ini ditanggung oleh pemilik mesin pemintal yang umumnya merangkap sebagai tenaga *reeling*. Dengan demikian pendapatan bersih yang diperoleh oleh tenaga *reeling* sebagai pengusaha pemintalan adalah sekitar Rp. 40.000/kg benang.¹⁹

Usaha pemintalan rakyat bergantung pada produksi kokon lokal. Keberlangsungan usaha pemintalan rakyat sangat ditentukan oleh ada tidaknya kokon yang bisa dipintal. Saat usaha budidaya ulat sutra masih banyak, di Soppeng dan Enrekang pemintal juga berperan sebagai usaha mandiri (bukan penyedia jasa). Saat itu usaha pemintalan membeli kokon dari petani (atau kokon yang diperoleh dari unit pemeliharaan sutra sendiri), yang kemudian diolah menjadi *raw silk*. Pemintalan rakyat ketika itu tidak mengusahakan sendiri produksi kokon yang menjadi bahan bakunya, pemintalan rakyat hanya beroperasi jika ada kokon dari petani yang menggunakan jasa pemintalan mereka. Seorang

¹⁹ Bila kita mengurangi pendapatan ini dengan alokasi tenaga kerjanya sebagai tenaga re-reeling, sebesar 0,8 HOK per kg benang, maka sesungguhnya mereka tidak memiliki keuntungan usaha (dengan asumsi upah setara RP. 50.000 per HOK). Sekali lagi, serupa dengan pelaku usaha murbei-ulat, mereka punya logika berbeda dalam menghitung 'laba'.

pemintal mengatakan, karena tergantung pada ketersediaan kokon, umumnya dia mengerjakan pemintalan dua kali sebulan. Sebelum masa pandemic Covid-19, dia mendapatkan orderan pemintalan 15-20 kg/bulan, namun tahun ini angka itu susut menjadi 4-5 kg/bulan. Dengan demikian, tampak penurunan penghasilan pemintalan dari Rp. 900.000-1.200.000/bulan menjadi Rp. 240.000-300.000/bulan.

Kualitas kokon mempengaruhi hasil pemintalan. Jika pemberian pakan dan cara pemeliharaan kurang tepat banyak kokon cacat dan benang putus sering terjadi dalam proses pemintalan. Selain itu, tahapan dan teknik-teknik dalam proses pemintalan yang kurang tepat juga berpengaruh terhadap rendemen dan kualitas benang yang dihasilkan. Kualitas kokon ini kemudian berpengaruh terhadap beban kerja pemintal. Dengan kualitas kokon yang baik, 5-7 kg kokon bisa menghasilkan satu kilogram benang, sementara dengan kualitas kokon yang buruk dibutuhkan 10 kg atau lebih kokon untuk menghasilkan satu kilogram benang. Artinya, kualitas kokon yang kurang bagus melipatgandakan beban kerja pemintal sementara upahnya tetap sama.

Pengusaha Tenun. Pengusaha tenun adalah mereka yang memesan pembuatan produk kain tenun (sutra maupun non sutra), lalu menjualnya kepada pedagang atau pedagang perantara. Para pengusaha ini biasanya perempuan dan sudah menjadi bagian dari usaha tenun sebelum menjadi pengusaha tenun (biasanya sebagai penenun). Pengusaha tenun bisa berasal dari penenun yang kemudian berhasil mendapat suntikan atau mengumpulkan modal untuk menjalankan usaha tenun sendiri, atau penenun yang mendapatkan bantuan peralatan tenun sehingga bisa mandiri sebagai pengusaha tenun (sekaligus penenun mandiri). Di satu kasus, seorang pengusaha perempuan berasal dari *pagganra* (pengurai benang sebelum diwarnai), lalu mengumpulkan modal dengan awalnya menjual benang, yang bisa ia “ambil-dulu-bayar-kemudian” dari toko benang terbesar di Sengkang (Toko Marhaya).²⁰ “Modal kepercayaan,” katanya. Namun kasus semacam ini tampaknya jarang terjadi. Para pengusaha tenun ini, oleh para penenun pekerja disapa dengan sebutan ‘bos’ atau ‘*pappattennung*’ (orang yang memesan tenunan).

Pengusaha tenun berbeda-beda berdasarkan ukuran usahanya, biasanya dilihat dari jumlah alat tenun *dan* langganan

²⁰ Para penjual benang di Wajo membeli benang dari Toko Marhaya. Benang sintesis, disebut ‘india’, dari mana datangnya? Dari Jawa. Siapa yang beli dari Jawa?

penenun yang bekerja padanya.²¹ Pengusaha tenun biasanya membeli alat tenun dan meminjamkannya kepada setiap penenun yang menjadi langganannya. Alat tenun itu akan mereka bawa dan simpan di rumah penenun sampai mereka putus hubungan kerja, biasanya karena penenun memutuskan berhenti menenun atau beganti langganan pengusaha (berganti bos). Dengan demikian, jumlah penenun yang menjadi langganan seorang pengusaha ini biasanya dapat diketahui dari jumlah alat tenun milik sang 'bos' yang masih beroperasi.²²

Pengusaha yang lebih besar biasanya memulai dengan modal besar karena mendapatkan warisan atau suntikan modal dari keluarga inti (orangtua atau suami). Biasanya mereka bisa bertahan lama, berkembang menjadi lebih besar, dan menjadi pelanggan banyak penenun serta menguasai jalur pasar. Pedagang berebut mendatangi mereka untuk membeli sarung/kain dalam jumlah besar (untuk kasus semacam ini lihat KOTAK 8).

KOTAK 8 Pasang Surut Usaha Tenun

H. Ida sudah 32 tahun bekerja sebagai pengusaha tenun. Ia memulai tak lama setelah menikah. Sebelumnya, ia sudah bekerja sebagai penenun sejak ia berhenti sekolah pada kelas empat SD. Setelah menganggur sebentar ia mulai belajar menenun dari bibinya dan kemudian bekerja pada usaha bibinya tersebut. Bibinya juga *pappattennung*, *memesan kain kepada penenun dan menjualnya kepada pedagang*, bibinya mempekerjakan puluhan penenun. Suami H. Ida berdagang di pasar,

Dengan modal yang diberikan oleh suami, berupa uang sebesar 700 ribu, H. Ida memulai usahanya dengan membeli 7 alat tenun. Tujuh orang penenun yang tinggal di rumahnya menjadi pekerja awalnya. Ia memanfaatkan pengalaman sebagai penenun ketika bekerja di bawah bimbingan bibinya. Ia punya pengetahuan dan kenalan penenun yang memadai untuk memulai. Orang tuanya sendiri juga adalah pengusaha tenun yang mempekerjakan penenun. Saudara-saudaranya juga demikian. Pada tahun-tahun awal menjadi pengusaha sutra, ia berlangganan dengan rata-rata 10 penenun. Di masa jayanya, ia pernah punya langganan 70 penenun, dan kini tinggal 20 penenun saja. Pada masa jayanya,

²¹ Dibutuhkan kajian mendalam demi membangun indikator untuk meletakkan satu pengusaha sebagai pengusaha 'besar' dan yang lainnya 'kecil'. Saat ini kami baru mewawancarai tiga informan pengusaha, dua di antaranya masing-masing punya 3 dan 20 alat tenun (yang satunya lagi tidak punya karena kini lebih berkonsentrasi menjual produk tenun di toko). Dalam laporan ini, pengusaha pertama inilah yang disebut 'kecil' dan yang kedua disebut 'besar'.

²² Dalam satu kasus seorang *pappattennung*, atau bos, punya 70 alat tenun, dan saat penelitian berlangsung hanya 20 yang aktif. Sebagian penenunnya berpindah bos, Sebagian lagi menjadi penenun mandiri setelah mendapatkan bantuan alat tenun.

akhir 1990-an sampai awal 2000-an, ia bisa mendapatkan keuntungan yang melampaui pendapatan suaminya yang berdagang di pasar.

"Samarenda biasa l jama. Marejijing ladde biasa," katanya.

Ia mengenang bagaimana dulu para pedagang mendatangi rumahnya untuk membeli sarung sejak pukul 4 pagi. Mereka membeli sepuluh atau dua puluh lembar sarung.

Begitu banyak pedagang yang datang ke rumahnya sehingga ia tak jarang harus berbohong, mengatakan barangnya sudah habis padahal belum agar pedagang lain tidak pulang dengan tangan hampa.

"Karena [saya] ingin membagi rata kepada seluruh pedagang langganan [...] Kadang-kadang kalau [pedagang langganan] sangat butuh saya memberi lima sarung saja untuk satu orang. Dibagi rata. Masalahnya, kadang satu orang pedagang bisa membeli seratus [lembar sarung]."

Kadang-kadang bila sepi, ditandai dengan menumpuknya barang jadi yang belum terjual di rumah H. Ida, suaminya akan membawa barangnya untuk dijual di Makassar.

Semakin sedikit pesanan datang kepadanya akhir-akhir ini. Karena itu, ia hanya membuat kain sendiri lalu menjualnya kepada langganan lamanya yang masih datang membeli, meskipun jumlahnya sudah jauh menurun. Kini, pembeli datang ke rumahnya dalam frekwensi yang jauh lebih rendah. Bila dulu ia menerima pembeli siang dan malam setiap hari, kini rata-rata pembeli datang sekali dalam dua pekan, atau bahkan sekali sebulan.

Menurutnya, ini terjadi karena ia sudah punya banyak saingan dari mantan penenun yang kini sudah bekerja secara mandiri. H. Ida menjual kepada pedagang kain atau sarung, ada yang memesan lalu barang diantarkan, dan lebih banyak yang datang langsung membeli di rumahnya.

Sejak putrinya menikah beberapa tahun lalu H. Ida dibantu mulai dibantu menantunya untuk mengangkut benang ke rumah-rumah penenun. Benang yang dibawa ke penenun berupa ribuan helai benang telah dipasangkan sejenis sisir (*are*), sehingga butuh orang lebih muda untuk mengangkutnya. Usia H. Ida sudah 48 tahun. Menantunya membantu di sela pekerjaannya sebagai petani sawah.

Sekarang cukup banyak alat tenunnya yang menganggur karena penenunnya tinggal sedikit.

Dalam kasus lain, seorang pengusaha kemudian membuka toko sendiri di jalan utama Kampung Sutra BNI, Wajo. Dengan demikian, ia menjalankan usaha sejak pembelian benang sampai ke penjualan langsung kepada konsumen.

Sementara pengusaha yang berukuran kecil, yang memiliki satu atau dua alat tenun (dengan dua penenun), biasanya memulai dari bantuan dan modal yang kecil. Di sini mereka juga kami kategorikan sebagai 'penenun mandiri'. Ketika mereka terkena guncangan biasanya tidak dapat bangkit lagi (lebih jauh di bawah).

Deretan isu yang dihadapi pengusaha tenun. Persoalan-persoalan yang dihadapi para pengusaha tenun biasanya berhubungan dengan dua hal: penjualan dan penenun langganan mereka. Dalam hal penjualan mereka mengalami persoalan sebagai berikut:

Pertama, berkurangnya pesanan.²³ Ini masalah besar bagi pengusaha tenun berskala kecil. Mereka sangat bergantung pada arus uang kas yang cepat akan terpukul dengan berkurangnya pesanan. Susutnya pesanan berarti mereka harus mengambil risiko bila membuat tanpa pesanan. Produk mereka bisa tidak laku atau ditawarkan rendah oleh pedagang, dan mereka tetap harus menjualnya karena harus segera membayar upah penenun. Modal mereka tidak banyak untuk bisa menutupi semua ongkos produksi sebelum barang laku. Salah satu pengusaha kecil mengatakan berkurangnya pesanan mematikan usaha tenunnya.

²³ Perlu pendalaman tentang *mengapa* dan *kapan* saja pesanan bisa turun?

GAMBAR 10 *Penenunan.*



Kedua, harga jual produk tetap dan harga benang naik. Masalah ini juga dihadapi oleh pengusaha skala kecil yang bila menghadapi naiknya harga benang harus mengurangi keuntungan (selisih benang dan harga jual) karena tidak mungkin menaikkan harga kain/sarung produksi mereka yang berskala kecil. Posisi tawar mereka sangat lemah di hadapan para pedagang (dan pedagang perantara). Seorang mantan pengusaha tenun yang kini menjadi penenun menurkannya sebagai berikut:

“Harga sarung atau kain terkadang rendah sedangkan harga beli benang mahal, sedangkan saya tidak bisa menahan barang sampai harga kembali tinggi karena orang yang saya pekerjakan butuh uang segera. Saya terpaksa menjual murah untuk menggaji. Kalau pengusaha yang bermodal besar bisa menumpuk sarung, nanti kalau sudah naik harga baru dijual. Pengusaha dengan modal besar masih bisa menggaji penenun sebelum menjual sarung.”

Ketiga, bertambahnya saingan. Masalah ini disebutkan oleh pengusaha skala besar karena sebagian pengusaha baru yang muncul di sekitarnya adalah mantan penenun yang sebelumnya

bekerja padanya. Dari sisi lain, kita bisa mengatakan bahwa ini kecenderungan yang baik bagi para penenun yang punya aspirasi untuk menjadi pengusaha sekaligus penenun (mandiri). Semakin banyaknya saingan bisa berarti semakin berkurangnya monopoli jalur pasar oleh para pengusaha besar.²⁴

Keempat, plagiasi motif kain/sarung. Plagiasi atau peniruan motif rentan terjadi dalam usaha tenun. Para pelaku meniru motif yang laku (atau diperkirakan akan laku) dengan dua cara: meniru motif barang yang mereka beli dari pengusaha tenun/toko atau mengintip kain yang sedang ditenun lalu menirunya. Mereka kemudian menjualnya dengan harga lebih murah. Para pengusaha/toko tidak bisa menindak sendiri para pelaku. Mereka biasanya hanya bisa menjual kain dengan motif tersebut dengan harga lebih rendah daripada barang tiruannya. H. Ana bercerita bahwa birokrasi penerbitan hak paten belum bisa melindungi karena prosesnya terlalu panjang. “Pengurusan hak paten memakan waktu lama. Kemungkinan barang sudah habis baru ke luar hak patennya.” Karena itu mereka sulit menunggu untuk menjual kain setelah hak paten jadi. Selain itu, katanya, “motif yang sudah dipatenkan jika diubah sedikit saja tidak menjadi masalah [untuk dipatenkan],” sehingga secara praktis ‘peniruan’ bahkan bisa berlangsung secara legal.

Sementara itu, dalam hubungannya dengan penenun langganan, para pengusaha menghadapi persoalan sebagai berikut:

Pertama, kesulitan memenuhi tenggat waktu yang pengusaha janjikan kepada pembeli/pemesan. Menurut mereka, terkadang penenun bekerja “terlalu santai”. Seorang pengusaha bertutur, “penenun biasa beristirahat lima hari jika ada acara keluarga. Mereka tidak memikirkan pesanan lagi. Sedangkan saya yang berhubungan langsung dengan konsumen berusaha memenuhi waktu pesanan.” Independensi relatif para penenun ini berhubungan erat dengan rendahnya upah yang dibayarkan kepada mereka. Karena itu, para pengusaha cenderung bisa memahami bila

²⁴ Mungkin yang bisa dilakukan di sini adalah membangun semacam asosiasi pengusaha kecil, salah satunya agar bisa menghimpun barang produksi mereka sehingga punya daya tawar lebih tinggi di hadapan pedagang (perantara).

penenun enggan mengerjakan pesanan dari pengusaha atau “bos”. Para pengusaha mengerti, mereka tidak bisa terlalu memaksa karena mereka membayar terlalu rendah.²⁵

Kedua, pembajakan (perebutan) penenun langganan oleh pengusaha tenun lain. Persoalan ini juga biasanya dihadapi oleh para pengusaha tenun yang punya banyak langganan penenun. Caranya ialah dengan menawarkan upah lebih besar daripada yang biasanya dibayarkan pengusaha tenun lain. Misalnya, dalam satu kasus, seorang pengusaha menuturkan bahwa salah satu penyebab berkurangnya jumlah penenun langganannya ialah karena pengusaha lain menawarkan Rp 30.000 untuk menenun selembar sarung, sedangkan ia biasanya membayar Rp 25.000. Biasanya penenun terus-menerus menolak dengan berbagai alasan, dan baru ketahuan apabila sang pengusaha langganannya mendengar bahwa sang penenun mengerjakan pesanan pengusaha lain.

Ketiga, para penenun berhenti bekerja. Biasanya ini terjadi karena bermacam-macam alasan. Pertama, karena alasan domestik: penenun telah menikah atau melahirkan. Kedua, ingin mencari pekerjaan lain (“saya bosan, saya ingin mencari pekerjaan lain.”) Ketiga, bila seorang penenun sudah bisa berdiri sendiri, yaitu menenun dan menjual sendiri hasil tenunan (menjadi penenun mandiri). Sebagian dari mereka ini mendapatkan modal berupa uang untuk membeli alat atau bantuan benang. Keempat, karena pendapatan dari menenun sangat rendah.

Sebaliknya, sesekali pengusaha berhenti memesan kepada seorang penenun apabila ia ‘mencuri’ sarung; misalnya, menenun 20 sarung dan mengambil satu lembar. Kadang juga pengusaha melakukan hal serupa pada penenun dengan kualitas yang buruk, namun biasanya pengusaha memanggil penenun seperti ini ke rumahnya untuk mengajarnya.

²⁵ Kondisi ini terlihat selama wawancara di salah satu toko tenun di Kampung BNI, yang pemiliknya juga seorang pengusaha tenun. Satu keluarga dari luar kota (Parepare) datang mencari bahan kain yang akan dijahit menjadi seragam dalam acara resepsi pernikahan, mereka menemukan kain yang diinginkan tetapi jumlah kain itu tidak cukup untuk membuat seragam. Sang pengusaha segera mengontak langganannya penenunnya, namun setelah mengontak beberapa, tak satu pun yang mengaku bersedia menerima pesanan itu dalam beberapa hari. Mereka butuh waktu lebih lama. Akhirnya calon pembeli meninggalkan toko dengan tangan hampa.

Penenun. Penenun pada dasarnya ada tiga jenis. Penenun langganan/kontrak, penenun pekerja, dan penenun mandiri.

- *Penenun langganan* adalah penenun yang menjadi langganan pengusaha tenun atau *bos* tertentu. Mereka bekerja atas pesanan pengusaha yang menjadi bos mereka namun tidak bekerja di rumah pengusaha tersebut. Mereka menerima alat tenun (ATBM) dari bos langganan mereka yang ditempatkan di rumah sang penenun. Karena menggunakan ATBM yang dalam Bahasa Bugis disebut *bola-bola*, mereka juga dikenal sebagai *pattennung bola-bola* (penenun yang memakai bola-bola).
- *Penenun pekerja.* Penenun yang bekerja pada majikan, di tempat yang disediakan pengusaha yang menjadi majikan mereka, kadang tinggal di rumah majikan. Mereka sangat bergantung pada majikan.²⁶
- *Penenun mandiri.* Penenun mandiri banyak dilakoni oleh para penenun yang memakai alat tenun tradisional (walida atau gedogan); tapi penenun dengan ATBM juga ada yang menjadi penenun mandiri. Penenun walida tidak ingin dikejar waktu oleh para pemesan, mereka akan menentukan durasi pengerjaan pesanan, mereka juga menentukan harga produk sendiri. Mereka melakukan seluruh proses penenunan setelah membeli benang sutra, sebagian mereka hanya mengerjakan kain sutra. Ketika penenun bola-bola—yang menerima pesanan dari bos, pelan-pelan berpindah ke benang non-sutra, merekalah yang mempertahankan kebedaraan tenun kain/sarung sutra asli. Mereka biasanya menenun selama satu sampai dua bulan untuk satu lembar sarung.

Seluruh penenun adalah perempuan, biasanya mulai menenun tak lama setelah menyelesaikan sekolah. Di Kampung Sutra BNI, mereka yang berusia di atas 50 tahun biasanya hanya pernah bersekolah sampai SD, sebagian tamat dan sebagian lagi tidak. Dengan begitu, sebagian besar memulai ketika mereka belum menikah. Bagi mereka, tidak ada kesulitan mengakses pengetahuan dan keterampilan menenun. Profesi penenun sudah menjadi 'budaya tradisional' di Wajo, yaitu praktik lazim yang dijalankan banyak anggota masyarakat, khusus perempuan, secara turun-temurun.

²⁶ Masih perlu pendalaman tentang jenis penenun ini.

Bergantung pada peluang dan modal, sebagian kecil dari mereka bisa naik kelas menjadi penenun mandiri atau pengusaha tenun, atau keduanya. Namun keadaan ini bisa sangat dinamis, kadang ada yang naik kelas lalu surut menjadi penenun, dan sebagian kecil bisa bertahan setelah menjadi pengusaha tenun. Sebagian besar penenun terus-menerus menjadi penenun pekerja atau penenun langganan sampai mereka tidak sanggup lagi secara fisik mengerjakannya. Rendahnya upah tenun menjadi salah satu penyebab utama dari stagnansi ini. Selengkapnya kita lihat beberapa isu yang dihadapi oleh para penenun.

Tingkat upah penenun langganan dan penenun pekerja sangat rendah. Sebagian perempuan penenun menjadikan kerja menenun sebagai pilihan terakhir. Kerja menenun yang membutuhkan ketelitian, dan dengan demikian tenaga dan waktu banyak, di tambah upahnya yang sangat rendah, membuat para penenun akan lebih memilih pekerjaan lain yang umumnya menawarkan upah lebih baik. Upah buruh tani jauh lebih tinggi daripada upah menenun, Upah penenun dibayar berdasarkan pesanan, Rp 25-30.000/sarung, yang mereka kerjakan rerata 3 hari. Jadi upah mereka sekira Rp 10 ribu per hari. Untuk perhitungan lebih terperinci lihat KOTAK 9. Sementara itu, dengan bekerja di kebun, semisal memanen kacang, cabe atau padi, mereka bisa mendapatkan upah Rp 50.000 sehari.

Penenun langganan dan penenun pekerja tidak punya posisi tawar upah di hadapan pengusaha tenun yang memesan tenunan. Bagi penenun langganan, para pengusaha telah menentukan harga beli dari hasil tenun mereka, dan harga tersebut sudah termasuk modal benang yang dikeluarkan oleh pengusaha. Selain tidak punya posisi tawar dalam hal upah, mereka pun tidak pernah menghitung modal sebagai biaya produksi, harga kain juga berbeda-beda tergantung dari benang yang digunakan. Semua ini turut membuat mereka menggantungkan penentuan upah pada pengusaha. Akan tetapi, penenun bola-bola bisa memutuskan bekerja untuk pengusaha lain. Mereka pun bisa menolak untuk mengerjakan pesanan pengusaha langganan mereka, bahkan bisa mengambil jeda libur di tengah mengerjakan pesanan. Dalam hal waktu kerja, mereka relatif independen, karena upah mereka terlalu rendah dan kerja menenun bukan pendapatan utama keluarga.

Begitu pula dengan penenun yang bekerja sebagai buruh tenun, mereka tidak punya posisi tawar samasekali di hadapan majikan. Upah mereka ditentukan majikan dengan jumlah yang tak terpaut jauh dengan penenun langganan, dan dengan besaran tidak tetap, sesuai volume pekerjaan mereka (selengkapnya di bawah).

Sementara itu, para penenun walida bisa menjadi penenun mandiri setidaknya karena tiga alasan. *Pertama*, harga sarung buatan mereka cukup tinggi, karena sutra asli, antara Rp 1-1,5 juta/sarung, dan karena mereka mengerjakannya sendiri pendapatan jauh lebih tinggi dibandingkan penenun jenis lain. Namun karena masa kerja yang panjang, tetap saja pendapatan ini tidak dapat disebut sebagai pendapatan yang tinggi (rerata Rp 1 juta/bulan), *Kedua*, pemesan sutra asli umumnya datang dari kelas menengah atas yang memang tahu bahwa pengerjaan sarung sutra asli memakan waktu lama. Mereka memesan jauh hari sebelum memakainya. Para penenun walida jarang mengerjakan produk massal yang akan dipasarkan oleh pedagang yang akan memasarkannya ke publik, tapi lebih banyak menenun pesanan khusus (dengan motif khusus) dari konsumen. *Ketiga*, sebagaimana penenun lain, kebanyakan mereka menenun sebagai kerja sampingan, hasil tenunan bukan pendapatan utama keluarga. Salah seorang penenun perempuan berusia 53 tahun di Tosora, misalnya, menjadi penenun sembari sesekali menemani suaminya bekerja di sawah.

Namun kelapangan ini tidak berlaku bagi perempuan penenun yang bisa menjadi penenun ATBM mandiri (tidak tergantung pada pengusaha tenun), terutama mereka yang tidak punya sumber pendapatan lain seperti dalam kasus perempuan kepala keluarga ("janda") atau yang terus hidup sendiri. Bagi mereka upah kerja menenun adalah satu-satunya yang bisa mereka akses sebagai pendapatan utama.

KOTAK 9 Perhitungan Pemasukan Penenun

Wawancara dengan seluruh informan perempuan penenun menunjukkan bahwa mereka kurang mampu menghitung besarnya biaya produksi, modal dan keuntungan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan. Dari tiga penenun yang bekerja sebagai suatu kelompok untuk memenuhi pesanan sarung sutra dari seorang perempuan muda (perantara/pengusaha) kami peroleh perincian seperti di bawah ini.

Pertama, perantara menyediakan 2 kg benang lusi dari sutra impor harga Rp 1.450.000/kg, total Rp 2.900.000. Menyiapkan 1,5 kg benang pakan dari sutra impor seharga Rp 1.500.000. Sedangkan penenun menyediakan benang berwarna atau variasi lainnya untuk membuat bunga atau motif.

Kedua, berdasarkan jumlah tersebut maka total biaya yang penenun ketahui dikeluarkan oleh perantara/pengusaha adalah Rp 4.400.000. Benang sejumlah itu menghasilkan 30 lembar sarung yang dihargai Rp 330.000/sarung. Sehingga total harga sarung adalah Rp 9.900.000. Selisih harga sarung dengan modal benang (lusi dan pakan) adalah Rp 5.500.000, dimana jumlah ini sudah termasuk modal benang motif dan upah penenun.

Ketiga, lamanya waktu menenun untuk 1 sarung paling singkat 3 hari jika dikerjakan secara intens mulai dari pagi sampai sore. Menurut mereka 30 sarung dapat diselesaikan antara 4-6 bulan. Sementara selisih harga benang dan sarung adalah Rp 5.500.000, yang bila dibagi 30, penenun mendapatkan Rp. 183.000/sarung: jumlah ini meliputi modal benang motif, upah kerja dan biaya produksi lainnya seperti listrik, air dan tempat yang digunakan. Jadi, jika nilai ini dibagi menjadi 4 hari (lamanya proses menenun) maka perhitungan upah perhari adalah Rp. 45.750, namun 'jumlah bersih' ini baru mengeluarkan semua modal yang berasal dari pengusaha saja. Di dalamnya masih ada modal benang motif, upah kerja, dan biaya produksi lainnya.

Seorang perempuan kepala keluarga muda (cerai), yang dapat dikategorikan penenun mandiri, menyatakan menenun sarung sutra sintesis (#viscose dan polyester) dengan modal sendiri. Darinya kita dapat mengurai perhitungan sebagai berikut:

Pertama, di pasaran harga benang *pasulu* (lusi) adalah Rp. 300.000/kg dan benang *timpo* (pakan) Rp 70.000/kg. Mereka menyiapkan 1 kg benang lusi dan benang pakan seharga Rp 320.000 untuk menghasilkan 60 lembar sarung. Sedangkan harga benang motif dan biaya penggulungan benang *pasulu*, mereka tidak dapat menguraikannya secara terperinci.

Kedua, dengan total harga benang Rp. 620.000 (300.000+320.000), yang kemudian dibagi 60 (sarung), maka modal benang untuk setiap sarung berada pada kisaran Rp. 10.000. Jumlah ini belum memasukkan biaya lain seperti upah kerja, benang motif, biaya penggulungan.

Ketiga, sarung yang dihasilkan dijual ke tangan pertama seharga Rp 75.000/lembar. Jadi terdapat selisih Rp 65.000, yang meliputi upah, harga benang motif dan biaya penggulungan. Jika 1 sarung dikerjakan penenun selama 4 hari maka upah harian (kotor) sebesar Rp. 16.250.

Perhitungan keuntungan dan upah penenun pekerja rumahan maupun penenun mandiri sebagaimana diuraikan di atas, kondisinya hampir sama. Gambarnya cukup jelas menunjukkan bahwa upah penenun masih sangat jauh di bawah dari standar upah yang layak.

Kondisi yang sama juga dialami oleh penenun pekerja. Selain tidak memiliki kemampuan menghitung upah berdasarkan hasil kain yang mereka hasilkan (mereka menerima saja perhitungan pengusaha), mereka juga tidak memiliki posisi tawar dalam menentukan harga kain. Perhitungan modal pengusaha dalam benang dan proses produksi hanya diketahui oleh pihak pengusaha.

4.2.2 Dampak Terhadap Pelaku

Pelaku usaha pemintal gulung tikar, tidak aktif, atau menurunkan tingkat aktifitas. Karena menurunnya produksi kokon lokal, terjadi penyusutan jumlah usaha pemintalan rakyat yang sangat signifikan. Menurut data BPS, jumlah usaha pemintalan rakyat saat ini hanya berjumlah sekitar 26 saja dari sejumlah 255 unit usaha pemintalan rakyat pada tahun 2015. Dari sejumlah yang tersisa tersebut juga tidak beroperasi optimal hanya beroperasi saat ada kokon yang tersedia untuk dipintal.

Sementara untuk instalasi pemintalan modern (*semi automatic*) dampaknya juga cukup besar. Secara ekonomis instalasi pemintalan tidak menguntungkan karena skala produksi tidak sebanding dengan potensi produksi yang bisa dihasilkan karena sangat kurangnya bahan baku kokon yang bisa diolah. Akibatnya, sebagaimana disebut di atas, sejumlah instalasi pemintalan benang sutra sendiri di Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng saat ini sudah berhenti beroperasi.

Menenun menjadi pilihan penghidupan tersier/terakhir. Dapat dikatakan, kerja menenun dilakoni sebagai profesi bila alternatif sulit ditemukan. Karena itu, posisinya dalam pendapatan rumah tangga berada di urutan paling akhir, dari pendapatan utama (biasanya dari suami); pendapatan sampingan dari pekerjaan lain dengan upah lebih baik. Ketika seorang penenun sudah menikah, dan apalagi punya anak, kerja menenun menjadi lebih sering dikesampingkan daripada sebelumnya. Perempuan berkeluarga lebih mudah mengesampingkan kerja menenun karena mereka punya pendapatan utama dari suami. Sangat mudah mereka memilih kerja rumah tangga daripada menenun bila keduanya bertabrakan. Juga ada kasus yang mengindikasikan kecenderungan para perempuan muda dari keluarga penenun walida tidak lagi tertarik menjadikan menenun sebagai pekerjaan (lihat di bawah). Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa keberadaan alternatif nafkah selalu menjadi 'alternatif lebih baik' daripada kerja menenun. Tradisi panjang tenun yang dijaga oleh para perempuan Wajo dari generasi ke generasi, merupakan pekerjaan paling tidak menjanjikan pendapatan yang layak.

Tingkat pendidikan penenun semakin rendah dan usia menua. Dengan rendahnya tingkat pendapatan para penenun, wajar bila pekerjaan ini menjadi tidak menarik bagi para perempuan muda dengan tingkat pendidikan yang biasanya lebih tinggi daripada orangtua mereka. Seorang penenun walida di Tosora, Wajo, menyatakan bahwa anak perempuannya tidak tertarik menjadi penenun dan sudah bekerja di Sengkang. Anaknya sudah menyelesaikan pendidikan SMA. Karena perubahan demografis seperti inilah tingkat pendidikan para penenun secara rata-rata menjadi rendah, kebanyakan dari mereka yang kami temui adalah tamatan SD, sebagian bahkan tidak selesai SD, dan hanya sedikit sedikit yang berpendidikan SMP. Namun kami belum bisa menampilkan data secara menyeluruh di sini karena alpanya data dasar yang mencakup keseluruhan penenun di Kabupaten Wajo.

Penenun sebagai perempuan kepala keluarga miskin. Salah satu ciri menarik dari sebagian besar perempuan yang kami temui ialah bahwa banyak dari mereka adalah perempuan kepala keluarga (cerai hidup) atau hidup sendiri (tidak menikah). Masih perlu penelitian lebih mendalam untuk menyelami isu ini namun observasi kami mengisyaratkan bahwa mereka merasa cukup nyaman dengan status mereka. Bahkan tampak fenomena bahwa mereka saling membantu, walaupun dengan pendapatan yang rendah mereka sulit meningkatkan taraf hidup dari menenun. Atau, boleh jadi mereka saling bantu justru karena kesulitan tersebut. Seorang perempuan kepala keluarga (tidak kawin) usia lanjut dan tidak menempuh pendidikan sama sekali menuturkan bahwa dia menenun sejak kecil. Dengan menganggurkan alat tenun ATBM miliknya sendiri di rumahnya, perempuan ini bekerja di rumah keponakannya yang juga perempuan kepala keluarga (tidak kawin) dan berusia paruh baya. Dalam menenun sarung sutra, mereka dan berapa perempuan lain secara berkelompok menerima order langsung dari pengusaha dan perempuan pengusaha yang menjual ke pengusaha perantara lain. Sarung sutra yang mereka hasilkan dipasarkan ke Madura.

Terakhir, ada kemungkinan terjadinya penurunan jumlah penenun aktif secara umum, namun belum ada data dasar yang bisa menunjukkan profil penenun secara menyeluruh.

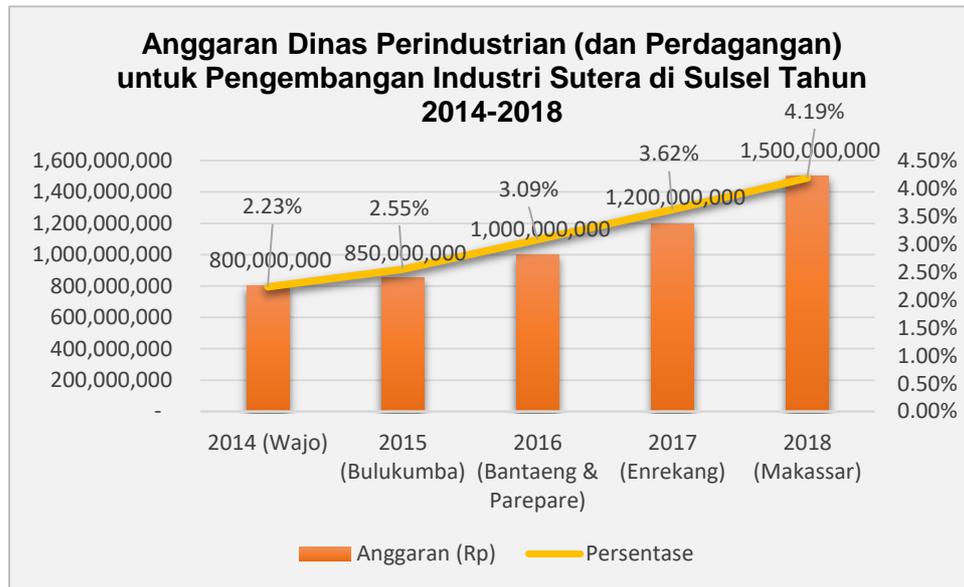
4.2.3 Intervensi kebijakan

Bantuan alat pemintalan lebih berorientasi ke kuantitas alat pintal belum mengarah ke kualitas yang akan dihasilkan. Alat pintal yang diberikan berupa alat pintal tradisional dan alat pintal semi mekanis yang belum punya alat *denier control*. Alat berperan sangat penting dalam menjaga tingkat keseragaman ukuran benang yang dihasilkan. Akibatnya benang sutra yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan pasar, selain bahwa kualitas kokon juga turut mempengaruhi kualitas benang yang dihasilkan.

Sementara Rencana Pemerintah Propinsi untuk pengadaan alat pintal *reeling full automatic* pada 2021 di Kabupaten Wajo dan Soopeng belum diiringi dengan persiapan kelembagaan pengelola alat pintal tersebut. Dinas Perindustrian Propinsi maupun Dinas Perindustrian kabupaten belum memiliki rencana kelembagaan yang akan mengelola alat-alat tersebut. Hal ini berpotensi menghambat maksimalisasi penggunaan bantuan alat pintal full automatic tersebut di lokasi masing-masing.

Pelatihan pemintalan (Kab. Soppeng). Dinas Perindustrian dan perdagangan Kab. Soppeng melatih sejumlah perempuan untuk menggunakan mesin pintal berdinamo dan memberi bantuan beberapa unit mesin untuk peserta pelatihan. Beberapa unit mesin masih bisa kita temukan di Desa Pising. Dioperasikan di kolong rumah panggung pada waktu pagi, siang, dan sore hari. Karena keterbatasan waktu Tim belum sempat mendalami outcome dan dampak dari program ini sehingga dibutuhkan kajian lanjutan untuk hal ini.

GRAFIK 12 *Anggaran Dinas Perindustrian*



Sumber: Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan

Persoalan pada data. Dalam menjalankan mandat, badan-badan pemerintah terkait menunjukkan kelemahan pada manajemen pengetahuan, khususnya pada ketidaklengkapan data yang bisa dipakai untuk menyusun kebijakan/program. Ketidaklengkapan ini bisa berasal dari model pengolahan data. Misalnya, untuk Dinas Perindustrian, kami memfilter nomenklatur yang menyebutkan ‘Pengembang Sentra Industri Sutra’ di enam Kabupaten/Kota, yaitu 2 unit sentra di Kab. Wajo, 2 unit di Kab. Bulukumba, 2 unit sentra di Kab. Bantaeng dan Parepare, 2 unit di Kab. Enrekang, dan 1 unit di Kota Makassar (total 9 sentra industri di Sulsel). Pengembangan itu dilakukan bertahap dari tahun 2014 sampai tahun 2018, dan setiap tahun pembangunan dilakukan pada daerah yang berbeda.

Pada tahun 2014, Dinas Perindustrian mengalokasikan anggaran untuk pengembangan sentra sutra ke Kab. Wajo, sebesar 2.23% dari total anggaran. Persentasenya meningkat pada tahun berikutnya (2015), yang ditujukan ke Kab. Bulukumba, yaitu 2.55% dari total anggaran. Pada tahun 2016, alokasi anggaran diberikan ke dua daerah yaitu Kab. Bantaeng dan Kota Parepare sebesar 3.09% dari total anggaran. Tahun 2017 alokasi ditujukan ke daerah kab.

Enrekang dengan jumlah 3.62%. Terakhir, tahun 2018, alokasi anggaran ditujukan di daerah Kota Makassar dan menjadi alokasi anggaran terbesar dari daerah lainnya yaitu 4.19% dari total anggaran.

Grafik di atas menunjukkan peningkatan alokasi anggaran dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Namun data kenaikan anggaran ini memiliki kelemahan karena setiap tahun alokasi anggaran diberikan pada daerah yang berbeda. Dengan demikian kita sulit mengetahui apakah terjadi peningkatan alokasi anggaran di daerah tertentu. Misalnya, jika seandainya program pengembangan sutra pada tahun 2014 diarahkan ke Kota Makassar, maka kita tidak bisa mengetahui apakah terjadi peningkatan alokasi anggaran di daerah lain pada tahun tersebut.

Ketidaklengkapan lain bisa datang dari persoalan metodologis. Misalnya, kami belum menemukan laporan tentang outcome dan dampak dari program-program yang telah dijalankan. Yang tampak hanya input (jumlah anggaran dan kegiatan) yang disalurkan, seperti TABEL 8 di bawah, yang hanya menyebutkan anggaran dan program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Soppeng, dan beberapa program telah dilaksanakan. Masalah lain dengan perancangan/metodologi pengumpulan data tampak pada ketiadaan data dasar yang memuat profil seluruh penenun yang aktif bekerja, berikut kategori mereka sebagai penenun, alat apa yang mereka gunakan, dan sejarah penerimaan bantuan, dan semacamnya.

TABEL 8 *Kegiatan dan Jumlah Anggaran Setiap Tahun Dinas Perindustrian Soppeng*

Tahun	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)
2017	Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah	Pelatihan Pemintalan Benang Sutra	30.913.000
2018	Pengembangan dan Peningkatan	Penguatan Sentra dan Kelompok	16.250.000

	Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah	Pengrajin	
		Pelatihan Pemintalan Benang Sutra	41.250.000
2019	Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah	Pelatihan Pemintalan Benang Sutra	131.755.000
		Pelatihan Industri Olahan Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan (Pelatihan Ecoprint, Pertenunan, dan Kerajinan Kain Sutra)	227.665.000
2020		Pengadaan Gedung UPT Tekstil Soppeng	470.000.000*
Jumlah			917.833.000

*Alokasi APBD Provinsi Sulawesi Selatan

Terakhir, persoalan data juga bisa berupa ketidaksesuaian data dengan kondisi di lapangan. Misalnya pada GRAFIK 9 di bawah, yang memuat perkembangan produksi benang Kabupaten Soppeng, tampak bahwa terjadi peningkatan produksi nyaris dua kali lipat dari tahun 2019 ke tahun 2020: dari kisaran 649 ribu kilogram ke kisaran 1,2 juta kilogram. Angka ini sulit dipahami mengingat temuan kami di lapangan menunjukkan bahwa jumlah petani yang aktif di Kabupaten Soppeng hanya berjumlah 55 orang. Mereka mengakumulasi produksi kokon rata-rata sebanyak 1.470 kg per siklus, dan dalam setahun mereka memproduksi dalam 6 siklus. Artinya, pada tahun 2020 produksi kokon mereka hanya berkisar 8.820 kilogram. Dengan angka produksi kokon sebesar itu sulit mengharapkan produksi benang sebesar 1,2 juta kilogram pada tahun 2020.

Dampaknya, memberikan angka yang mentereng di atas kertas bisa membuat para penentu kebijakan merasa tidak perlu bergerak lebih agresif untuk memperbaiki keadaan.

GRAFIK 13 *Perkembangan Produksi Benang Kab. Soppeng*



Akses terhadap Pelatihan. Terkait dengan akses terhadap bantuan pelatihan keterampilan (dan permodalan) dalam sektor pertenunan, semua informan penenun yang Tim temui menyatakan hal yang sama: mereka tidak pernah menerima maupun mengikuti pelatihan keterampilan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak lainnya. Staf Bank Indonesia yang menyelenggarakan program pelatihan kepada penenun, secara tidak langsung membenarkan keterangan tersebut. Mereka menyatakan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan, pihak BI tidak berhubungan langsung ke kelompok-kelompok penenun karena keterbatasan sumber daya tetapi menghubungi salah satu pihak pengusaha yang diminta mengorganisir penenun sebagai peserta pelatihan. Pelatih dalam pelatihan tersebut melaporkan bahwa ada beberapa peserta yang telah beberapa kali mengikuti pelatihan yang sama. Dengan kata lain, akses terhadap bantuan hanya diterima oleh penenun yang dikenal dan memiliki hubungan dengan pengusaha yang menjadi kontak person dari pemerintah dan pihak lainnya. Boleh jadi, salah satu penyebab dari masalah ini ialah ketiadaan data dasar tentang seluruh penenun yang aktif di Kabupaten Wajo. Dengan data yang

lebih komprehensif, akan segera bisa terdeteksi penenun mana saja yang paling membutuhkan pelatihan tertentu.

Bantuan alat tenun. Seorang pengusaha tenun menuturkan bahwa beberapa penenun pernah menerima bantuan alat tenun. Meskipun narasumber belum bisa menyebutkan asal bantuan dan kapan pelaksanaannya, ia menuturkan bahwa bantuan ini kemudian memungkinkan penenun langganan menjadi penenun mandiri, dan dengan begitu mengusahakan pemasukan yang lebih besar. Namun hambatan-hambatan seperti naiknya harga bahan dan turunnya harga jual produk, rendahnya daya tawar di hadapan perantara, dan susutnya permintaan (pesanan), masih menghantui mereka. Di satu kasus, penenun mandiri ini bahkan jatuh bangkut dan kembali menjadi penenun langganan karena salah satu guncangan tersebut. Kasus semacam ini masih perlu didalami, namun bantuan seperti ini tampaknya bisa menjadi jalan untuk memberdayakan penenun non-mandiri.

4.2.4 Rangkuman dan Analisis

Sektor manufaktur melingkupi rangkaian kegiatan mulai dari pemintalan sampai penenunan. Di sana ada banyak kategori pelaku yang terlibat: pemintal, penjual benang, penenun, dan pengusaha tenun. Di lini pemintalan ada dua kategori, pemintalan rakyat dan pemintalan modern (baik yang otomatis maupun semi otomatis). Pemintalan rakyat terbagi dalam dua kategori, mereka yang memintal dan menghasilkan kokon sendiri, dan mereka yang hanya menyediakan jasa pemintalan.

Sementara dalam kerja menenun ada tiga jenis penenun: penenun langganan/kontrak, penenun pekerja, dan penenun mandiri. Penenun dari tiga kategori ini membentuk mayoritas pelaku di sektor manufaktur, dan mereka seluruhnya perempuan. Di samping mereka, yang juga sering kali dimasukkan dalam kategori penenun ada pekerja-pekerja spesialis di sepanjang pemrosesan benang menjadi produk tenun, seperti *papparisi* (orang yang memasukkan setiap helai benang ke dalam alat tenun) atau *pacello* (orang yang mewarnai benang). Sementara penjual benang dan pengusaha tenun sama-sama menampilkan dua kategori, yaitu yang berskala besar dan kecil.

Hubungan antara pemintal di sektor ini dan petani di sektor hulu sangat erat, bahkan banyak dari mereka adalah pelaku yang sama. Masalah utama yang dihadapi para pemintal, baik yang menggunakan pemintalan manual maupun moderen, berhubungan langsung dengan mata rantai sebelumnya, yaitu menyusutnya kuantitas dan kualitas produksi kokon. Keberlangsungan usaha pemintalan sangat tergantung pada pasokan bahan baku kokon dari unit-unit pemeliharaan ulat sutra.

Dalam hal kualitas, pemberian pakan dan pemeliharaan yang kurang tepat menghasilkan banyak kokon cacat dan benang putus dalam proses pemintalan. Kualitas kokon akan berpengaruh terhadap beban kerja pemintal: kualitas kokon yang lebih baik memungkinkan kerja yang lebih cepat untuk menghasilkan volume benang tertentu yang menjadi ukuran pembayaran upah. Selain itu, keterbatasan pemilikan alat juga membebani para pemintal. Kokon yang tidak segera dipintal akan lebih banyak cacat, namun itu sulit dilakukan para pelaku skala kecil karena keterbatasan alat pemintal. Sementara itu alat yang digunakan pemintal rakyat juga sudah kian sulit mengejar kebutuhan pasar yang menginginkan produk sutra yang murah dan halus. Akhirnya, bantuan alat pemintal moderen yang didatangkan badan pemerintah terkait belum diiringi oleh model pengelolaan yang bisa memastikan keberlanjutan operasinya.

Dampak dari deretan persoalan ini ialah, pertama, banyak pelaku usaha gulung tikar, tidak aktif, atau menurunkan tingkat aktifitas karena menurunnya produksi kokon lokal. Karena berkurangnya suplai kokon dari petani terjadi penyusutan jumlah usaha pemintalan rakyat yang sangat signifikan. Dari yang tersisa itu pun tidak beroperasi optimal, hanya beroperasi saat ada kokon yang tersedia untuk dipintal. Kecenderungan ini juga terlihat pada instalasi pemintalan moderen (*semi automatic*). Secara ekonomis instalasi pemintalan tidak menguntungkan karena produksi aktual tidak sebanding dengan potensi produksi ideal, dan ini terjadi karena langkanya bahan baku kokon lokal.

Masalah di alat pemintalan ini berhubungan dengan dampak kedua, yaitu sulitnya benang lokal bersaing dengan benang impor.

Alat pemintalan moderan dapat meningkatkan mutu (kehalusan) sarung, satu atribut yang dianggap penting oleh konsumen (Lihat di bawah). Karena itulah, benang sutra produksi lokal hanya dapat digunakan untuk bahan benang pakan, sedangkan untuk benang lusi lebih banyak menggunakan benang sutra impor dan benang non sutra. Dua jenis benang ini semakin mendominasi pasar tenunan. Persentase penjualan benang sutra lokal jauh menurun dibandingkan benang impor yang meningkat pesat. Kecenderungan ini tentu saja menciptakan ketergantungan lain rantai bilai sutra Sulawesi Selatan terhadap produk impor.²⁷ Padahal, nyaris seluruh usaha yang potensial bisa menghasilkan benang sutra di provinsi ini tersedia dalam jumlah cukup memadai. Bahkan, dapat diduga bahwa sebagian besar instalasi pemintalan mogok atau beroperasi dalam skala terbatas karena kurangnya produksi kokon lokal. Ini sebuah kerugian besar dalam rantai nilai sutra Sulawesi Selatan.

Sementara itu pada usaha pertenunan, tampak fenomena ketimpangan yang cukup tinggi, baik di antara pengusaha tenun (skala besar dan kecil) maupun antara pengusaha tenun dan penenun. Para pengusaha tenun, terutama yang berskala kecil, yang kebanyakan juga adalah penenun mandiri, menghadapi deretan isu yang berhubungan dengan penjualan. Mereka harus berhadapan dengan harga jual produk yang tertinggal di belakang peningkatan harga benang, dan menyaksikan menurunnya pesanan secara umum. Mereka pun menghadapi masalah di pasokan benang berupa permainan harga benang oleh pengusaha yang jelas merugikan mereka. Semua persoalan ini tidak jarang membuat mereka kesulitan untuk bertahan.

Sementara itu, para pengusaha tenun berskala besar lebih banyak menghadapi persoalan yang berhubungan dengan penenun langganannya mereka. Mereka misalnya berhadapan dengan persoalan perebutan/pembajakan penenun langganannya oleh pengusaha lain, kesulitan memenuhi tenggat yang mereka janjikan kepada pembeli karena penenun menurut mereka “terlalu santai”, dan penenun yang

²⁷ Wawancara dengan Toko Marhaya mengungkap bahwa benang impor sutra dan non-sutra semakin mendominasi pasar tenunan. Persentase penjualan benang sutra lokal jauh menurun dibandingkan benang impor yang meningkat pesat.

berhenti menenun karena berbagai alasan—terutama alasan keluarga. Seorang pengusaha tenun besar juga menyebutkan bertambahnya saingan dari penenun yang naik kelas menjadi penenun mandiri dan/atau pengusaha tenun skala kecil. Namun seluruh persoalan ini bukan masalah yang dapat membuat para pengusaha tenun besar menjadi bangkrut.

Dengan kata lain, persoalan yang menggelayuti pengusaha tenun skala kecil/penenun mandiri jauh lebih berat ketimbang yang dihadapi para pengusaha tenun besar. Bahkan dapat dikatakan kebangkrutan pengusaha skala kecil bisa menjadi berkah bagi pengusaha tenun besar, dalam bentuk bertambahnya penenun langganan yang baru saja bangkrut (turun kelas dari penenun mandiri menjadi penenun langganan/kontrak). Selain itu, para pengusaha besar biasanya berasal dari keluarga pengusaha tenun yang makmur sehingga punya modal cukup besar dan jaringan luas untuk segera alih usaha, sesuatu yang tidak dimiliki oleh para pengusaha skala kecil. Walaupun kedua jenis pengusaha ini harus berhadapan dengan plagiasi motif kain/sarung sutra, dampaknya akan lebih berat dirasakan oleh pengusaha skala kecil ketimbang rekannya yang berskala besar.

Satu hal yang penting dicatat di sini ialah bahwa ketergantungan pada benang impor juga secara tidak langsung berdampak pada penenun mandiri dan/atau pengusaha tenun skala kecil. Permainan harga oleh pengusaha, bisa terjadi karena akses informasi harga menyempit dan/atau jarak yang menjauh karena menyusutnya saluran perdagangan benang. Ini bisa terjadi karena semakin banyaknya benang impor yang jalur impornya hanya dapat diakses sedikit pedagang. Kondisinya akan berubah apabila cukup banyak pengusaha lokal (skala kecil) bisa memproduksi benang, atau lokasi produksi benang bermutu setara impor bisa hadir di tempat yang lebih dekat dari penenun. Alternatif tempat pembelian benang akan banyak, harga akan bersaing, dan jarak fisik menyempit. Mekanisme serupa juga akan membantu penenun mandiri dan pengusaha tenun skala kecil dalam memoderasi dampak kenaikan harga benang sutra impor.

Semua persoalan di atas berujung pada degradasi profesi penenun bagi masyarakat Wajo, di mana mayoritas penenun sutra Sulawesi Selatan tinggal dan berkarya. Kerja memenun tergeser menjadi pilihan penghidupan tersier atau terakhir, hanya menarik bagi mereka yang tidak punya alternatif pekerjaan lain. Sebagai konsekuensinya, sebagaimana di sektor hulu, pekerjaan memenun menjadi tidak menarik bagi perempuan muda dengan tingkat pendidikan lebih tinggi. Melambatnya regenerasi ini melorotkan tingkat pendidikan para penenun dan menaikkan usia mereka.

Bersamaan dengan itu, para perempuan yang masih bekerja sebagai penenun harus hidup dalam kemiskinan. Banyak dari mereka adalah perempuan kepala keluarga, entah janda maupun mereka yang belum pernah menikah. Para perempuan tekun dan berketerampilan tinggi ini, yang menjaga tradisi panjang tenun bagi daerah yang senantiasa membanggakan sutra, justru menerima upah paling kecil dari tugas mulia tersebut. Maka, wajar bila mereka akan meninggalkan tradisi itu begitu kesempatan lain terbuka. Ini sebuah ancaman besar.

Namun masih banyak perempuan penenun yang tidak bisa beranjak dari profesi mereka sebagai penenun pekerja atau penenun langganan. Mereka tidak punya alternatif penghidupan yang lebih layak. Rendahnya tingkat upah penenun langganan dan penenun pekerja, yang membentuk mayoritas pelaku sektor manufaktur sutra di Sulawesi Selatan, merupakan persoalan utama di sektor ini. Mereka tidak punya daya tawar di hadapan para pengusaha yang memesan jasa tenun mereka. Rendahnya upah juga memastikan para perempuan penenun kesulitan untuk meningkatkan taraf hidup dan usaha mereka.

Perempuan-perempuan kepala keluarga, baik yang pernah menikah maupun tidak, biasanya harus terus menekuni penghidupan sebagai penenun. Mereka bahkan saling bantu untuk sedikit meringankan beban hidup masing-masing. Perempuan-perempuan itu mengalami marjinalisasi dan subordinasi, hidup dalam tingkat pendapatan yang rentan terhadap guncangan sekecil apa pun. Sangat mungkin mereka hidup dalam kemiskinan.

Di tengah kondisi kelas penenun yang muram, intervensi yang dilakukan pemerintah sepertinya belum kunjung menyentuh mereka. Seluruh informan yang kami wawancarai mengaku belum pernah menerima pelatihan atau bantuan lain dalam bentuk apa pun. Padahal pelatihan semacam ini bukan tidak pernah diprogramkan oleh badan pemerintah terkait. Masalahnya, tampak indikasi bahwa pelatihan-pelatihan tersebut hanya diakses oleh penenun-penenun tertentu, sebagaimana tampak dalam kasus pelatihan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Salah satu persoalan yang mungkin menyebabkan kelemahan intervensi ini ialah pada manajemen pengetahuan. Pertama, kami tidak menemukan data dasar yang merangkum profil seluruh penenun—termasuk tingkat keterampilan serta akses terhadap bantuan dan pelatihan. Ketiadaan data semacam ini menyulitkan perancangan kebijakan dan program yang akurat untuk, misalnya, mendukung para penenun yang benar-benar membutuhkannya dan terus mengalami marginalisasi dengan menerima upah yang terlalu rendah, sesuatu yang kemudian menjadikan profesi menenun sebagai pilihan terakhir.

Kedua, kealpaan laporan tentang *outcome* dan *impact* juga bisa menyumbang kelemahan dalam intervensi. Untuk mengetahui efek dari input yang dibelanjakan, kita perlu tahu *outcome*, lalu *impact* (dampak) dari anggaran/program tersebut. Kealpaan data tentang *outcome* dan dampak ini berpotensi menyembunyikan kegagalan atau kelemahan jalannya program pada tahun-tahun sebelumnya. Kelemahan ini kemudian dapat membuat berulanginya kegagalan dan kelemahan yang sudah berlangsung sebelumnya. Bahwa industri tenun sutra terus memarginalisasi mayoritas pelaku utamanya meskipun bertahun-tahun diintervensi dan dengan *captive market* masih tersedia bagi produk sutra, sudah cukup menjadi indikasi bahwa setidaknya sebagian kelemahan ini masih terus berulang atau belum kunjung teratasi.

Akhirnya, melihat seluruh kelemahan di atas, dan mengingat bahwa seluruh penenun (yang sebagian besarnya mengalami marginalisasi dan subordinasi) adalah perempuan, sungguh sulit menghindari kesan hadirnya bias gender yang cukup parah dalam

penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan program badan pemerintah terkait.

Dengan deretan persoalan di atas, sektor ini membutuhkan setidaknya empat upaya untuk meningkatkan produksi dan mutu benang lokal, dan meningkatkan posisi para penenun, yang seluruhnya adalah perempuan.

Pertama, alat pemintal moderen yang didatangkan pemerintah perlu dikelola secara kolaboratif bersama para produsen kokon, agar tercipta skema saling menguntungkan. Dengan kerja kolaboratif antara pemegang mandat alat dan produsen kokon, suplai kokon bisa diperoleh, dipertahankan, dan mungkin ditingkatkan dari waktu ke waktu, serta tetap bisa menguntungkan para petani yang memproduksi kokon.

Kedua, dibutuhkan kerja pengorganisasian jangka panjang yang sensitif gender agar para penenun bisa membentuk kelompok-kelompok yang genuin, di mana mereka dapat menghimpun dan mensistematisasi pengetahuan, membicarakan isu-isu yang tengah mereka hadapi, dan secara kolektif mencari cara untuk menangani isu-isu tersebut. Mereka butuh kelompok-kelompok yang bisa menghimpun suara mereka dan dapat menjalankan tindakan kolektif menyelesaikan persoalan nyata mereka; bukan kelompok pasif yang bersifat top-down dan karena itu hanya aktif saat menerima program bantuan dari luar.

Ketiga, bersamaan atau setelah pengorganisasian ini mereka perlu diberi bantuan alat dan modal untuk meningkatkan daya tawar mereka di hadapan para pengusaha tenun yang akan membeli produk mereka dan/atau membantu pembukaan akses pasar baru bagi mereka.

Keempat, khusus untuk penenun pekerja, dibutuhkan upaya advokasi kepada para pengusaha yang mempekerjakan mereka untuk menaikkan tingkat upah dan memerhatikan hak-hak pekerja lainnya. Hal ini bisa dilakukan lewat pengorganisasian seperti di atas atau upaya advokasi dari dinas terkait.

4.3 Sektor Pemasaran

4.3.1 Situasi Mutakhir Pasar Produk Tenun Sutra

Captive market *produk sutra*. Produk-produk sutra merupakan bahan busana yang sudah menjadi bagian dari tradisi panjang masyarakat Sulawesi Selatan. Busana berbahan sutra dipakai oleh masyarakat Sulawesi Selatan dalam berbagai ritual siklus hidup, utamanya rangkaian panjang acara pernikahan. Produk sutra juga digunakan dalam perayaan-perayaan keagamaan seperti lebaran. Praktik-praktik budaya ini menciptakan *captive market* di pasar produk sutra, baik di Sulawesi Selatan maupun di provinsi lain, mengingat banyaknya orang dari provinsi ini yang merantau dan tinggal di daerah-daerah lain. Karena itu, pada masa-masa tertentu seperti menjelang lebaran dan musim pernikahan (biasanya berlangsung sesuai Idul Adha), produk berbahan sutra diburu oleh

GAMBAR 11 *Salah satu toko sutra.*



ulang tahun Kabupaten Wajo, Soppeng, Bone, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut para pemilik toko dan pedagang di Kampung BNI, Wajo, pada periode-periode tersebut, kampung mereka dibanjiri pembeli yang datang dari pelbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Kecenderungan pasar ini terkonfirmasi oleh survei konsumen yang dilakukan tim terhadap pengguna produk sutra.²⁸ Sebagian besar responden (di atas 50%), laki-laki maupun perempuan, memiliki dan membeli produk sutra karena 'kebutuhan', terutama kebutuhan untuk bisa bergabung dalam acara-acara tradisi, seperti acara perkawinan dan tradisi lainnya. Sebagai contoh, dalam seluruh tahapan ritual perkawinan di Sulawesi Selatan, tuan rumah dan tamu undangan banyak menggunakan pakaian dan sarung sutra. Bahkan beberapa peralatan dalam ritual perkawinan di Sulawesi Selatan biasanya beralaskan sutra. Dalam acara *mappaci*, misalnya, tempat duduk calon pengantin harus beralaskan sarung sutra; alat-alat pacci sendiri juga beralaskan sarung sutra. Motif kedua yang cukup besar mendasari pembelian produk sutra ialah adanya rasa cinta dan bangga terhadap produk sutra Sulawesi Selatan. Selain kedua jenis dua motif di atas, motif ekonomi juga merupakan salah satu alasan yang mendasari kepemilikan dan pembelian produk sutra Sulawesi Selatan. Beberapa responden menganggap bahwa produk sutra lebih awet sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang. Beberapa di antara mereka juga menganggap bahwa harga produk sutra Sulawesi Selatan relatif masih terjangkau.

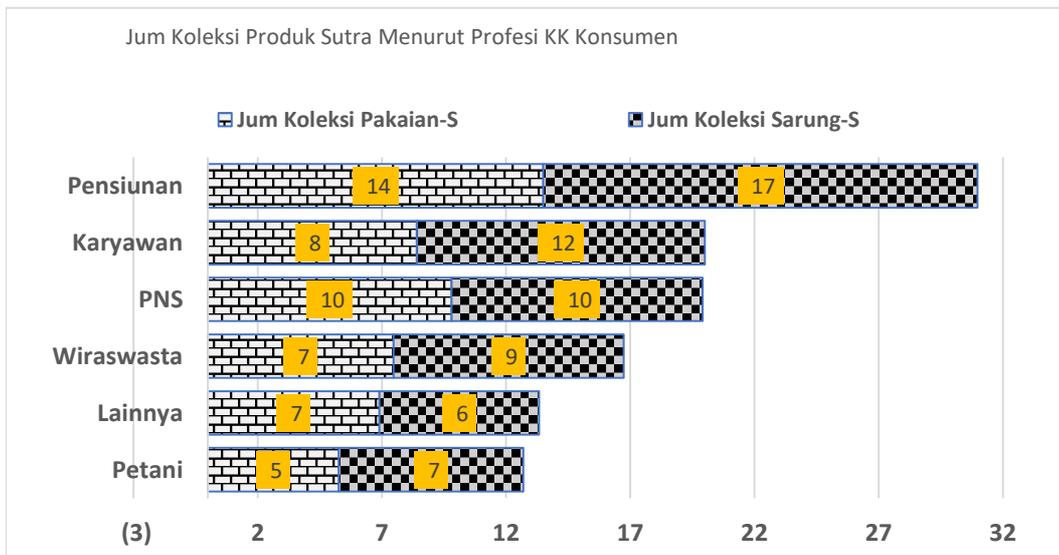
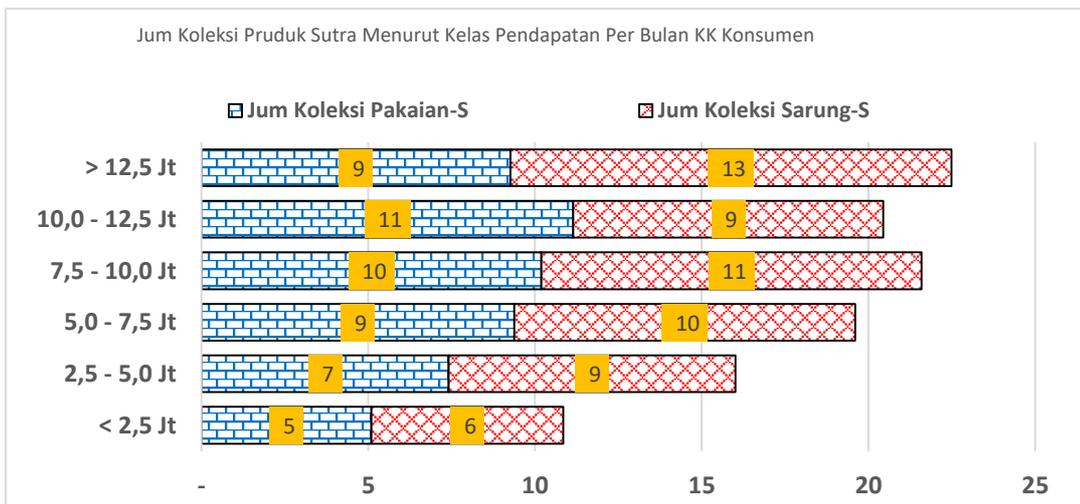
Produk sutra Sulawesi Selatan juga dipakai secara luas di tanah air, dan tidak hanya dikoleksi oleh orang dari etnis yang menghuni Sulawesi Selatan, tetapi juga oleh berbagai suku di tanah air. Sekitar 86,54 persen responden mengaku dari suku asli Sulawesi Selatan, terutama Bugis dengan proporsi sekitar 59,19 persen dari total responden. Sekitar 13,46 persen responden beretnis non-Bugis yang tinggal di Sulawesi Selatan juga menggunakan produk sutra Sulawesi Selatan, mereka berasal dari etnis-etnis di Pulau Sulawesi, Jawa, Sumatra, Papua dan Maluku. Selanjutnya, proporsi responden dari etnis-etnis Sulawesi Selatan yang tinggal di berbagai provinsi lebih besar dari proporsi seluruh responden yang berdomisili di provinsi ini. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meski tidak lagi berdomisili di Sulawesi Selatan orang yang berasal dari provinsi ini mengoleksi dan menggunakan

²⁸ Pengguna produk sutra Sulawesi Selatan adalah rumah tangga yang memiliki koleksi sarung atau pakaian sutra yang diproduksi di Sulawesi Selatan.

produk sutra dari tanah asal. Sebaliknya, beberapa suku lain yang saat ini berdomisi di Sulawesi Selatan juga ikut memiliki dan menggunakan produk sutra Sulawesi Selatan.

Produk sutra, dalam hal ini pakaian dan sarung sutra, juga digunakan secara luas oleh beraneka lapisan masyarakat Sulawesi Selatan, baik yang berbeda tingkat pendapatan, maupun dari pelbagai status/profesi. Jumlah koleksi pakaian dan sarung sutra yang dimiliki rumah tangga responden juga relatif banyak, rata-rata mereka memiliki koleksi pakaian sutra sebanyak 8 buah dan 10 buah sarung sutra.

GRAFIK 14 *Rerata Koleksi Pakaian dan Sarung Sutra*



Konsumen Sulawesi Selatan Tahun 2020

Jumlah koleksi pakaian sutra dan sarung sutra menurut kelompok pendapatan masyarakat Sulawesi Selatan menunjukkan kecenderungan bahwa semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka semakin banyak koleksi pakaian dan sarung sutra yang mereka miliki. Kelompok masyarakat dengan pendapatan di atas 12,5 juta per bulan, yang merupakan kategori responden dengan pendapatan tertinggi, memiliki koleksi produk sutra paling banyak. Sementara mereka yang berasal dari kategori pendapatan paling rendah juga memiliki jumlah koleksi produk sutra paling sedikit.

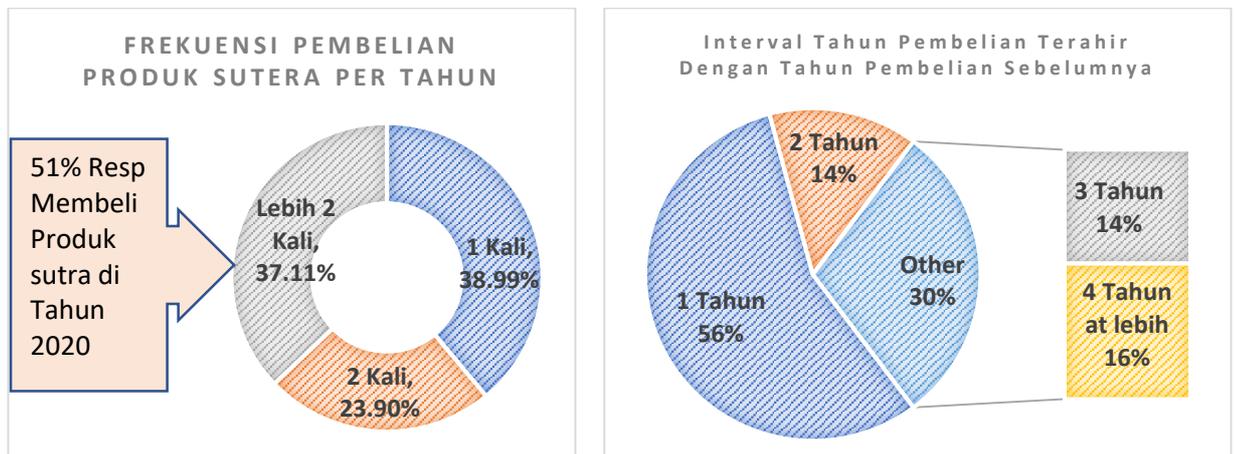
Selanjutnya, jumlah koleksi pakaian dan sarung sutra yang dimiliki rumah tangga menurut profesi/status kepala keluarga, menunjukkan bahwa para pensiunan merupakan kelompok masyarakat yang memiliki koleksi pakaian dan sarung paling banyak, yakni rata-rata memiliki 14 unit pakaian sutra dan 17 unit sarung sutra. Bahkan beberapa rumah tangga dari kelompok pensiunan ini memiliki koleksi sarung sutra di atas 50 unit. Sementara kelompok profesi yang memiliki koleksi produk sutra paling sedikit adalah para petani. Rata-rata jumlah koleksi pakaian yang dimiliki rumah tangga petani berjumlah 5 unit dan sarung sebanyak 7 unit.

Potensi pasar yang cukup luas dan besar ini bukan hanya tergambar dari karakteristik pengguna dan jumlah koleksi produk sutra, tetapi juga dari pola pembelian konsumen terhadap produk sutra Sulawesi Selatan. Survei mengungkap bahwa sebanyak 51 persen responden melakukan pembelian produk sutra Sulawesi Selatan pada tahun 2020, sekitar 19 persen membeli produk sutra di tahun 2019, sisanya membeli pada tahun 2018 dan tahun sebelumnya. Khusus responden yang membeli produk sutra pada tahun 2020, lebih dari 60 persen di antara mereka membeli lebih dari satu kali selama periode waktu tersebut, bahkan sebanyak 37 persen dari mereka membeli lebih dua kali. Selanjutnya, dalam hal interval antara tahun pembelian terakhir dan tahun pembelian sebelumnya, survei menunjukkan bahwa sekitar 56 persen responden membeli produk sutra Sulawesi Selatan dalam interval waktu satu tahun. Gambaran ini menunjukkan bahwa pola pembelian

produk sutra oleh konsumen umumnya sekali dalam setahun, dan setiap tahun umumnya mereka membeli lebih dari satu kali.

Jika pola pembelian ini diproyeksikan ke penduduk Sulawesi Selatan yang pada tahun 2020 berjumlah sekitar 8,8 juta jiwa, dan sekitar separuhnya berada pada kelompok usia 25-64 tahun yang merupakan kelompok usia paling potensial menjadi konsumen produk sutra, maka sesungguhnya ada potensi pasar yang besar bagi produk sutra Sulawesi Selatan.

GRAFIK 15 *Pola Pembelian Konsumen terhadap Produk Sutra Sulawesi Selatan Tahun 2020*



Jalur distribusi dan pelaku. Karena sebagian besar sarung tenun sutra Sulawesi Selatan berasal dari Kabupaten wajo, bagian ini akan berkonsentrasi mengulas jalur distribusi komoditas ini dari Wajo ke daerah-daerah lain. Setidaknya ada tiga saluran distribusi sarung sutra dari Wajo:

- *Pertama.* penenun mandiri, terutama yang memakai walida, menjual langsung ke konsumen berdasarkan pesanan khusus. Biasanya sarung ini adalah sutra asli dengan motif khusus seperti Bunga Tosora. Karena kelasnya yang premium barang seperti ini dipesan sesekali saja.
- *Kedua,* pengusaha tenun memesan tenunan dari penenun lalu menjual kepada pedagang perantara, atau langsung ke toko-toko di Wajo dan Makassar, atau mengirim langsung ke luar

provinsi (daerah yang sering kali disebut penenun dan pengusaha tenun adalah Madura). Pedagang perantara kemudian menjual sarung ke luar daerah dan provinsi. Barang yang dijual biasanya kain dan sarung tenun, baik yang berbahan asli sutra maupun campuran sutra dan sintetis.

- *Ketiga*, penenun mandiri menjual tenunan mereka langsung ke pasar, di sana sudah menunggu pedagang pengumpul (*pappalele*) yang membeli sarung mereka untuk dijual ke pedagang besar. Pedagang besar yang membeli dari *pappalele* untuk mengumpulkannya kemudian dipasarkan ke luar daerah, di dalam dan luar provinsi. Lalu, pedagang keliling (*passompe*) dari Wajo membawa sarung dagangan keliling ke kabupaten-kabupaten di Sulawesi Selatan dan di luar provinsi. Mereka adalah perpanjangan tangan pedagang besar dan menjual ke kota-kota besar di Sulawesi (Palu, Gorontalo, Manado) dan Sumatra (Lampung, Palembang, Bengkulu), Nusa Tenggara Timur (Kupang), dan Papua. Kadang-kadang mereka menjual ke pedagang di luar provinsi yang akan menjualnya ke konsumen.

Dengan demikian ada beberapa pelaku yang terlibat dalam distribusi dan pemasaran sarung sutra di Wajo. Selain **penenun** dan **pengusaha tenun**, yang sudah dijelaskan di atas, beberapa jenis pelaku lain juga terlibat dalam pemasaran sarung sutra dari Wajo. Pelaku-pelaku lain tersebut adalah sebagai berikut:

- ***Pappalele***. Pedagang pengumpul yang berkeliling ke pasar-pasar untuk membeli sarung dari penenun lalu menjualnya ke pedagang lebih besar. Pasar-pasar yang biasa menjadi tempat mereka menunggu penenun adalah Pasar Atapangnge, Pasar Sempangnge, Pasar Salojampu, dan Pasar Kampiri.
- **Pedagang besar**. Pedagang yang membeli sarung dari para *pappalele* untuk kemudian menjualnya di dalam dan luar provinsi. Mereka bukan hanya mendagangkan sarung tenun sutra dan non sutra yang mereka beli dari *pappalele* dan pengusaha tenun, tetapi juga sarung-sarung pabrikan, serta produk-produk tekstil lainnya seperti seprei dan kelambu. Mereka menggunakan jasa para *passompe* (pedagang keliling)

untuk memasarkan barang-barang mereka. Jumlah pedagang seperti ini tidak banyak.

- ***Passompe***. Pedagang keliling, biasanya terdiri dari dua kategori: yang menjual di dalam provinsi, dan yang menjual sampai ke luar provinsi. *Passompe* yang menjual di dalam provinsi biasanya memakai motor dan bepergian seorang diri antara 1-3 hari sebelum pulang. Mereka biasa menjual antara 7-15 lembar sarung per hari. Sementara *passompe* yang menjual ke luar provinsi biasanya berangkat dalam kelompok-kelompok besar, puluhan hingga ratusan, dan ketika tiba di kota tujuan mereka terbagi lagi ke dalam kelompok-kelompok kecil 10 orang. Mereka membawa sarung dari pedagang besar (H. Tahang), dan setiap kelompok kecil mengontrak rumah di kota-kota tujuan selama kira-kira enam bulan sebelum pulang. Dalam sekali berangkat, sekelompok kecil ini biasanya sanggup menjual dua bal, dengan setiap bal berisi sekira 800 lembar sarung. Sebagian besar sarung yang mereka jual adalah sarung tenunan campuran sutra (mereka menyebutnya 'kw') dan sarung pabrikan (*taleka*). Mereka hanya membawa sedikit sarung sutra asli, sebab di luar provinsi barang seperti itu lebih sedikit yang bisa terjual. Selain itu mereka juga membawa produk-produk tekstil lain yang dititipkan oleh pedagang besar.
- **Pedagang perantara**. Pedagang perantara adalah mereka yang membeli produk tenun (sutra dan non sutra) dari pengusaha tenun.²⁹ Mereka mendatangi rumah-rumah para pengusaha tenun untuk membeli barang. Para pedagang perantara ini datang dari Sengkang dan Makassar. Mereka menjualnya di Sengkang, Makassar, maupun kota lain, baik di toko khusus sutra maupun di pasar (termasuk Pasar Sentral, Makassar). Seorang informan menyebut bahwa salah satu jenis sarung banyak dijual di Madura. Kadang-kadang bila pedangan perantara jarang yang datang, ditandai dengan menumpuknya barang jadi yang belum terjual di rumah, barang akan dibawa

²⁹ Perlu wawancara dengan pedagang perantara ini untuk memperdalam info tentang mereka. Termasuk bentuk hubungan mereka dengan pengusaha tenun, margin yang mereka terima dari berdagang, ke mana mereka menjual, dan sebagainya.

untuk dijual di Makassar (di pasar sentral, atau toko-toko yang khusus menjual produk sutra).

- **Toko sarung.** Biasanya membeli dari pengusaha tenun dan menjual langsung kepada konsumen akhir. Kebanyakan ada di Wajo dan Makassar.

Susutnya permintaan sarung sutra asli. Dari penuturan para *passompe* tertangkap indikasi bahwa permintaan terhadap sarung sutra asli, sarung tenun berbahan 100% benang sutra, tengah menurun. Kecenderungan ini mungkin berhubungan erat dengan beberapa perihal.

Pertama, semakin banyaknya sarung yang ditenun menggunakan bahan campuran sutra dan sintetis, mungkin terjadi karena menurunnya produksi benang sutra di tengah permintaan pasar yang cenderung tetap atau meningkat.

Kedua, relatif tingginya harga sarung sutra asli bagi kebanyakan konsumen. Harga sarung sutra asli bermotif tradisional berkisar antara Rp 500.000-700.000, dan sarung sutra asli bermotif moderen berharga sekitar Rp 300.000-500.000. Sedangkan harga sarung berbahan campuran berkisar Rp 70.000-100.000. Sementara sarung sutra asli yang ditenun dengan walida, bermotif tradisional, dan dipesan khusus, cenderung lebih mahal daripada sarung tenunan dengan ATBM, berkisar Rp 1 - 2 juta untuk selebar sarung. Tingginya harga sarung sutra asli bagi konsumen kebanyakan mungkin terjadi karena bertambahnya jumlah pengguna dengan daya beli yang lebih rendah sementara harga nominal sarung sutra asli (karena inflasi dan kelangkaan) terus menanjak. Fakta bahwa sarung sutra asli bermotif modern lebih banyak diburu daripada yang bermotif tradisional dan yang dipesan khusus bisa menjelaskan fenomena ini.

Ketiga, menurunnya permintaan terhadap sarung sutra asli, hingga taraf tertentu, bisa juga terjadi karena semakin sedikit konsumen yang tahu membedakan sarung sutra asli dan campuran. Ini terutama terjadi pada konsumen yang tinggal di luar kabupaten-kabupaten penghasil sutra dan luar provinsi. Mereka hanya melihat penampilan, yang memang mirip sarung sutra, dan membelinya.

Keempat, bahan produk sutra (benang sutra) lokal yang kurang bermutu. Bagi kebanyakan konsumen, mereka butuh sarung yang bisa bertahan lama, dan menurut sejumlah informan sebagian sarung atau kain sutra asli lebih mudah luntur atau pudar dibandingkan produk berbahan campuran. Karena itulah sering kali terdengar ungkapan bahwa “sarung sutra asli itu hanya satu kali pakai, [karena] tidak boleh dicuci.” Selain itu, sebagian sutra asli kadang menghasilkan tenunan yang tidak rata, karena ketebalan benang yang tidak konsisten. Dan bila sebagian besar konsumen punya daya beli yang relatif rendah, sarung yang bisa dikenakan berkali-kali tentu menjadi pilihan yang masuk akal.

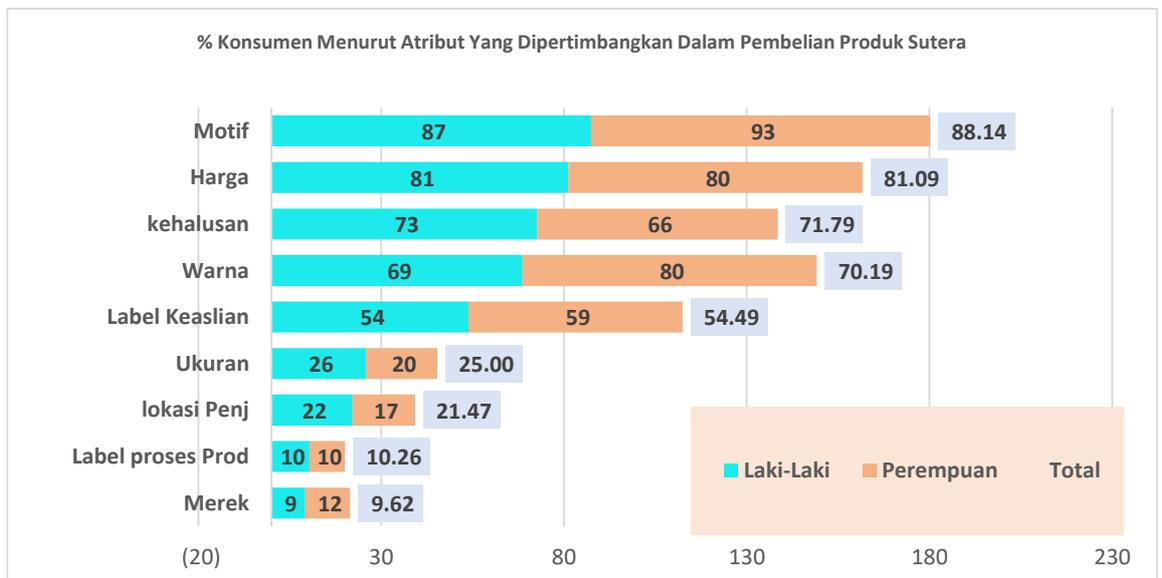
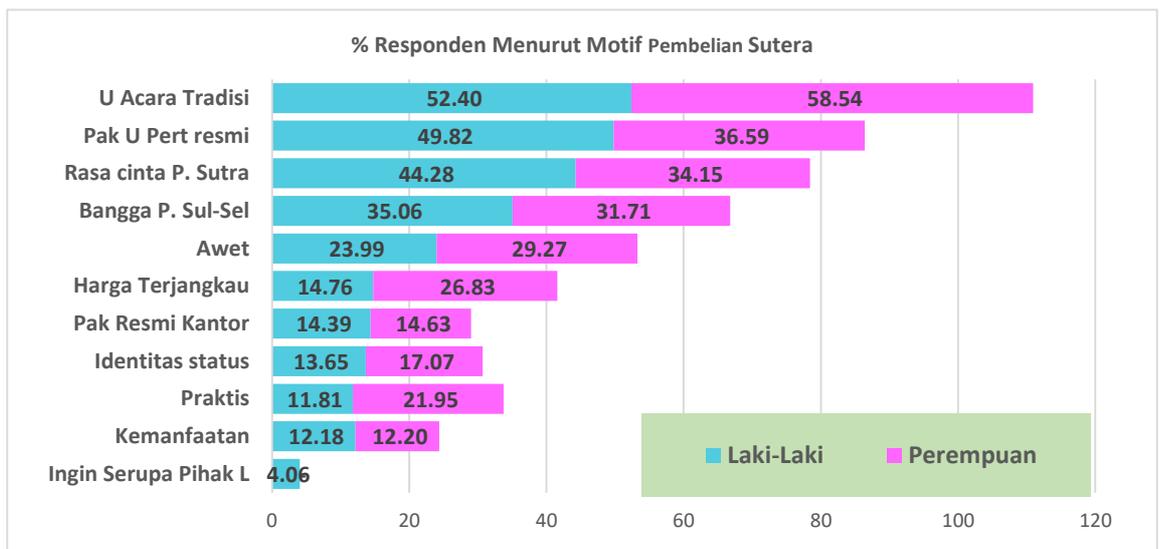
Karena beraneka sebab inilah para penenun biasanya lebih memilih menenun sarung sutra asli ketika menerima pesanan. Bahkan para *passompe* juga menuturkan hal serupa, mereka cenderung lebih suka membawa sarung sutra asli bila ada pesanan konsumen di tempat tujuan penjualan. Bagi mereka, membawa sarung sutra asli ke luar Wajo sama dengan menambah beban kerja. Tetapi bukan berarti mereka tidak membawa sarung sutra asli setiap kali berangkat ke provinsi lain walau tanpa pesanan, mereka cuma membatasi jumlahnya.

Superioritas motif di atas kualitas bahan. Karena penurunan permintaan akan produk tenun sutra asli, tampak kesan bahwa para konsumen lebih memilih sarung atau kain berdasarkan motif daripada keaslian bahan. Para konsumen biasanya memilih motif yang sedang banyak dipakai di daerah tertentu. Permintaan pasar terhadap motif-motif tertentu ini kemudian berefek pada produksi: para pengusaha tenun dan penenun mandiri lebih banyak menenun motif yang sedang laku di tempat tertentu pada masa tertentu.

Survei konsumen menunjukkan bahwa ada 5 atribut yang merupakan pertimbangan utama responden dalam membeli kain atau sarung sutra, baik oleh konsumen pria maupun wanita. Kelima atribut tersebut secara berurutan adalah motif, harga, kehalusan, warna dan label keaslian. Urutan seperti ini mengisyaratkan bahwa konsumen selalu mengikuti trend perkembangan motif, meski tidak menghilangkan citra sutra Sulawesi Selatan. Selain itu konsumen juga senantiasa menginginkan harga produk sutra yang lebih

terjangkau namun berkualitas, lalu menyusul kepastian tentang keaslian produk sutra. Label keaslian produk sutra menjadi penting bagi konsumen karena sekitar 41 persen di antara mereka tidak bisa membedakan kain yang terbuat dari sutra asli dan sintesis.

GRAFIK 16 *Motif Pembelian dan Atribut Sutra yang dipertimbangkan dalam Pembelian Produk Sutra Sulawesi Selatan, Tahun 2020*



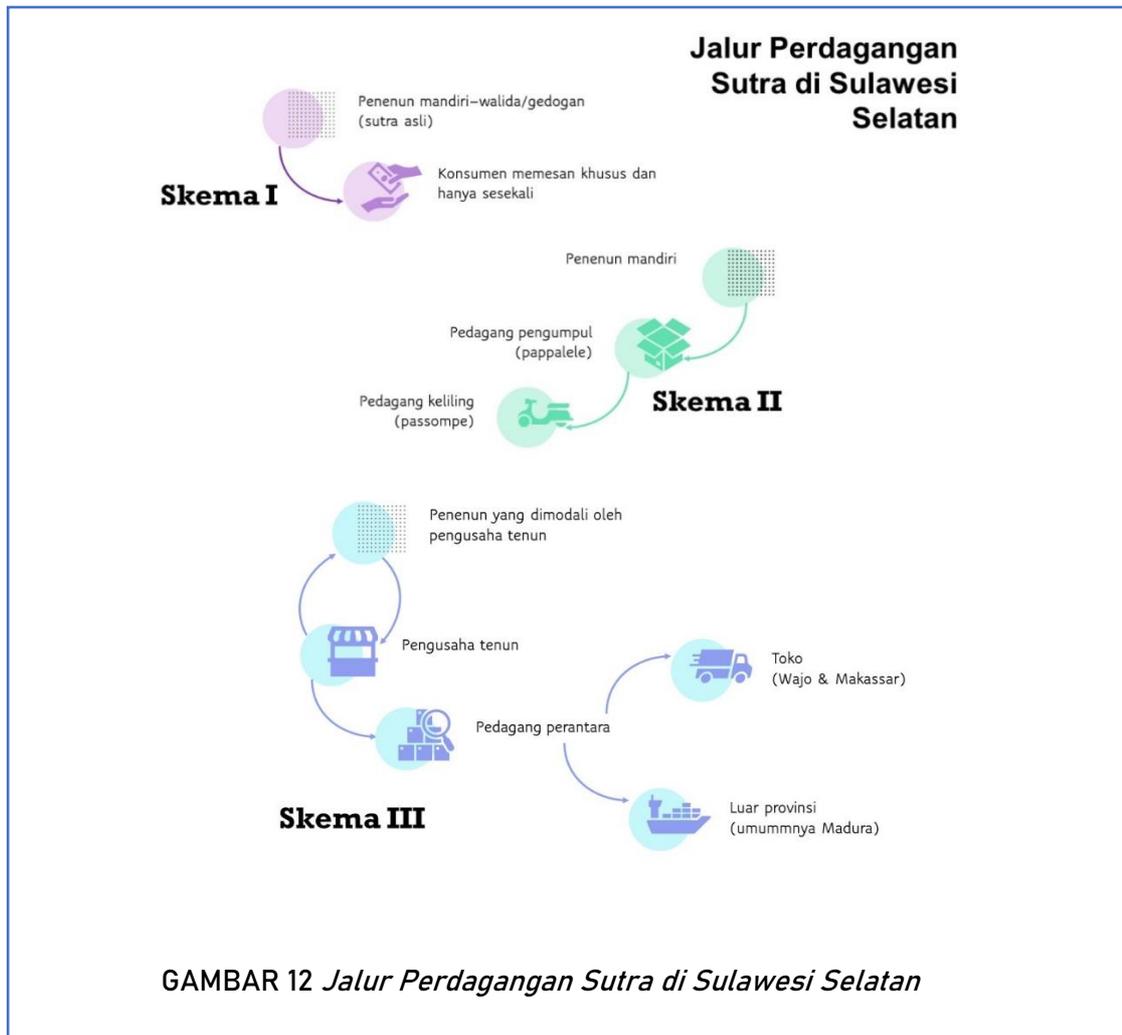
Namun tren semacam ini sepertinya kurang berlaku pada sarung kelas premium, dengan konsumen biasanya memesan motif-motif pilihan yang tersohor dan tidak selalu mengikuti motif

yang sedang diinginkan pasar. Dalam ceruk pasar ini, konsumen justru lebih mencari penenun yang bisa menghasilkan motif-motif unik yang tersohor daripada motif yang sedang banyak dikejar konsumen umum. Di sini tentu saja berlaku hukum pasar: semakin langka semakin mahal.

Pentingnya motif dalam penjualan produk tenun juga memunculkan masalah, bagi khususnya pengusaha tenun dan pemilik toko: plagiasi motif. Sebagaimana dijelaskan di atas, plagiasi masih marak terjadi dan pengurusan paten yang memakan waktu cukup panjang. Di sini elemen waktu menjadi sangat penting. Ketika satu motif tertentu laku di pasaran, para pengusaha tenun akan membuat lebih banyak dan toko memesannya. Pada saat itulah plagiasi biasanya marak dan barang tiruan ini akan tiba di pasar dengan harga lebih murah.

Penjualan produk tenun di masa pandemi Covid 19. Selama masa awal pandemi Covid-19, terutama tiga bulan pertama, toko-toko di Kampung BNI tutup. Bahkan setelah mereka buka, karena menurunnya daya beli dan warga harus tinggal di rumah, para penjual kain dan sarung di Kampung Sutra BNI lebih gencar memposting produk tenun di berbagai platform media sosial (Facebook dan WA). Mereka kemudian berhasil menjual sutra ke Jakarta, Kalimantan, dan daerah lain. Mereka sudah bekerja sama dengan kantor Pos dan JNT untuk penjualan daring ini. Toko-toko ini bisa meminta harga ongkir dengan cepat untuk diteruskan kepada calon pembeli, dan mengambil barang pesanan ke toko untuk dikirimkan. Penjualan daring ini kemudian memunculkan satu aktor baru: 'reseller' sutra.

Para reseller ini pada dasarnya adalah pedagang perantara atau toko daring, yang memasarkan produk tenun yang ada di toko-toko di Kampung BNI lewat platform-platform media sosial. Mereka mengirimkan gambar-gambar kepada calon pembeli, dan mengurus pengiriman bagi pembeli.



4.3.2 Dampak Terhadap Pelaku

Penurunan permintaan. Setidaknya dari satu kasus, seorang pengusaha tenun mulai beralih bisnis karena turunnya permintaan dari pedagang. Ia mulai membuat pakaian tradisional (baju bodo), renda-renda, gorden, serta aksesoris hiasan acara pernikahan untuk menambal surutnya pemasukan dari usaha utama mereka. Masih perlu penelusuran lebih jauh mengapa ini bisa terjadi. Boleh jadi, ini disebabkan oleh semakin banyaknya saingan yang menjual produk tenun dengan harga lebih murah (terutama yang memakai bahan campuran sutra lebih sedikit), dan konsumen yang lebih banyak memilih sarung berbahan campuran seperti itu.

Plagiasi motif menyebabkan sebagian pengusaha tenun dan toko merugi. Para pengusaha tenun dan toko-toko yang menjual barang-barang yang mengalami plagiasi motif mengalami tekanan harga. Kadang-kadang mereka baru mengetahui plagiasi telah terjadi ketika mereka mendapati barang dengan motif yang sedang laku di pasaran teronggok di toko mereka. Atau, seseorang memberitahu mereka bahwa tiruan motif tersebut telah beredar luas dengan harga lebih murah. Biasanya mereka tidak punya pilihan selain menurunkan harga barang tersebut.

Sebagian penenun mandiri gulung tikar. Pentingnya motif di atas kualitas bahan, yang kemudian menentukan harga jual, berdampak pada penenun mandiri. Mereka kesulitan bertahan karena margin ongkos produksi (benang) dan harga produk jadi yang sangat kecil. Meski perlu penelusuran lebih jauh, tampaknya kecenderungan ini disebabkan oleh persaingan harga dengan pengusaha tenun yang sanggup menghasilkan sarung/kain dengan harga lebih murah. Seorang penenun mandiri, perempuan muda kepala keluarga (cerai hidup dengan seorang anak balita), menuturkan bahwa ia punya modal sendiri namun karena keterbatasan modal hanya bisa menjangkau benang viscose dan polyester. Dengan modal kecil itu ia hanya bisa menjual sarung hasil tenunnya ke tangan pertama seharga Rp 75.000 per lembar. Harga tersebut sudah termasuk upah tenun dan harga benang. Wawancara dari toko benang terbesar di Sengkang mengungkap bahwa harga benang untuk satu paket sarung adalah sebesar Rp 30.000.³⁰ Jadi, bila mereka bisa membeli benang dengan harga tersebut, hanya ada selisih Rp 45.000 buat mereka setelah bekerja tiga hari untuk menyelesaikan selebar sarung.

Tekanan harga yang dihadirkan oleh pengusaha tenun (dalam bentuk harga lebih murah) membuat mereka tidak sanggup untuk menetapkan harga lebih tinggi. Para pengusaha sanggup menetapkan harga lebih murah karena mereka menjalankan produksi massal (beli benang lebih banyak selalu lebih murah) dan eksploitasi (upah murah) terhadap penenun pekerja maupun penenun langganan. Yang belakangan ini bisa terjadi antara lain

³⁰ Dengan perincian: benang Polyester untuk lusi ukuran 100 gr dengan harga Rp 10.000, dan benang Viscose untuk pakan dengan ukuran 150 gr dengan harga Rp. 15.000.

karena para perempuan penenun berpendidikan rendah itu tidak punya banyak alternatif pekerjaan yang lebih baik.

Penyebab lain ialah permainan harga benang yang ditetapkan oleh pengusaha, yang terjadi dalam kasus ketika pengusaha yang memesan tenunan juga menyuplai benang untuk ditenun. Pengusaha menyediakan benang sutra (impor) yang akan digunakan sebagai benang lusi dan pakan dalam pertenenan. Sedangkan penenun menyediakan benang untuk membuat motif (bunga atau lainnya) di atas sarung yang ditenun. Menurut mereka, harga benang yang disebut oleh pengusaha ialah: benang lusi Rp 1.450.000/kg dan benang pakan Rp 450.000/kg. Padahal, harga benang lusi (impor) di Toko Marhaya, Sengkang, hanya sebesar Rp 1.150.000. Berarti ada selisih Rp 300.000 dengan yang disampaikan kepada penenun.

Penenun mengaku hasil tenun sarungnya dinilai seharga Rp. 350.000/sarung, dan jumlah tersebut masih akan dikurangi dengan harga modal benang lusi dan pakan yang disediakan pengusaha. Dengan demikian, penenun menyatakan bahwa dari harga setiap sarung sutra, mereka mendapatkan upah Rp 30.000 dari setiap lembar sarung. Untuk menenun selebar sarung sutra, mereka membutuhkan waktu tiga hari, jika dikerjakan dengan intensif mulai pukul 8.00 sampai pukul 17.00 dan hanya jeda istirahat makan siang dan sholat. Dengan demikian, pada dasarnya mereka hanya mendapatkan upah 10.000 per hari. Sungguh pendapatan yang sangat mudah membuat mereka gulung tikar.

Selain itu, penenun mandiri juga sering kali tidak sanggup menerima pesanan dalam jumlah besar, sebab konsumen biasanya memesan sarung/kain yang seragam dalam jumlah besar untuk membuat seragam dalam acara pernikahan.

Surutnya penjualan online. Intensitas penjualan online oleh toko-toko di Kampung BNI menurun ketika masa pembatasan sosial berakhir. Satu keluhan pemilik toko tentang mereka ialah mereka jarang datang mengambil gambar langsung di toko. Hal ini merepotkan bagi pemilik toko karena mereka harus membuka dan menggulung kembali kain yang telah dipotret, dan biasanya ini tidak terjadi sekali saja bagi setiap calon pembeli. Ini menjadi salah satu

alasan mengapa toko-toko berhenti memasarkan barang lewat *reseller*, terutama ketika pelanggan mulai datang langsung ke toko sesuai masa pembatasan sosial. Mereka berharap para reseller datang sendiri dan memotret kain-kain tersebut buat para calon pembeli.

4.3.3 Intervensi kebijakan

Branding Kampung Sutra BNI. Program branding kampung sutra ini berhasil meningkatkan penjualan lokal dan memunculkan banyak toko produk tenun. Menarik untuk melihat kisah kesuksesan BNI sebuah perusahaan perbankan negara yang mengalokasikan dana CSR mereka untuk mengangkat penenun menjadi pengusaha kecil menengah tenun. Adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang pada awalnya memiliki dana yang tersedia kurang lebih 1 milyar untuk mewujudkan bantuan ini. Syarat utama dari program kampung BNI ialah adanya komoditas yang telah menjadi penciri dan budaya di satu daerah, dan mesti berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Haji Kurnia menjadi salah satu tokoh yang menjembatani antara Pemda Wajo dan BNI pada tahun 2015. Pemda Wajo sangat mendukung dengan pengalokasian perbaikan jalan, dan BNI mengalokasikan dana sekitar 600 juta dengan komposisi 300 juta berupa kredit lunak dan lainnya berupa hibah seperti *capacity building*, dukungan sewa outlet, sewa rumah, pembuatan gerbang dan kampanye branding lokasi ini. Akhirnya ada sekitar 176 IKM yang terlibat, dan tidak ada laporan kredit lunak ini gagal bayar. Mereka berhasil mentransformasi dari pengrajin menjadi pengusaha ada sekitar 176 IKM.

Ide 'branding' Kampung Sutra BNI, ternyata bisa membuka pasar baru bagi toko-toko yang menjual produk tenun di kampung tersebut. Menurut seorang pemilik toko, branding Kampung BNI sebagai sentra penjualan sutra bisa dibilang mampu meramaikan orang yang datang mencari produk tenun.

"Sebelum ada kampung BNI belum ramai orang yang menjual, baru 2 toko. Sekarang di sini ada 5 toko. Orang datang ke sini tahunya dari internet. Orang dari Makassar pernah datang ke sini, katanya tahu dari Facebook. Bahkan orang Sengkang sendiri masih ada yang tidak tahu kalau ada toko di sini."

Pameran, Fashion Show dan Galeri. Melalui Dekranasda/PKK Propinsi Sulawesi Selatan melakukan pameran yang diikuti oleh pengusaha sutera di Sulawesi Selatan. Selain itu Dekranasda/PKK Propinsi juga mengikuti pameran-pameran yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga, di dalam Propinsi maupun luar propinsi, seperti Inacraft yang berlangsung di Jakarta. Dekranasda Propinsi juga menyelenggarakan lomba fashion show sutera sebagai salah satu sarana promosi produk sutera. Perancang mode di Sulawesi Selatan memamerkan baju rancangan mereka yang menggunakan bahan sutera. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Wajo bekerjasama dengan pengusaha sutera Wajo dan Hotel Four Point Makassar mendirikan Gerai Silk of Sengkang di Hotel Four Point Makassar. Gerai ini berisikan produk kain dan sarung sutera produksi pengrajin di kabupaten Wajo.

Tumpang tindih program dinas-dinas terkait. Selain melakukan pembinaan kelembagaan koperasi dan pelaku usaha, Dinas Koperasi dan UKM mengikuti pameran di luar propinsi dengan membawa produk sutera, juga melakukan pelatihan pembatik sutera dengan mengundang pakar pembatik muda UNM dan UNHAS. Menurut mereka upaya ini dimaksudkan agar budaya membatik bukan saja milik atau simbol dari Jawa, tapi juga menjadi media bagi desain motif yang menggunakan motif lokal. Selain untuk membuka peluang usaha baru, upaya ini diharapkan agar simbol daerah tertentu seperti kelelawar dari Soppeng bisa menjadi motif dari Sulawesi Selatan, agar terbentuk ikon daerah yang mewakili daerah tertentu. Mereka juga melakukan pelatihan penenunan di Toraja karena regenerasi yang sulit. Pada masa datang, Dinas Koperasi dan UKM berencana mempromosikan produk-produk sutera di rest area yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Propinsi. Masalahnya, pada proses promosi kadang kala terjadi tumpang tindih (*overlap*), misalnya dalam pameran pembangunan. Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi UMKM menampilkan produk sutera yang sama.

4.3.4 Rangkuman dan Analisis

Sektor hilir masih tampak lumayan sehat dengan nisbi besarnya *captive market* produk sutra Sulawesi Selatan. Para konsumen masih mengoleksi dalam jumlah nisbi besar, dan jumlah pengguna tersebut cukup besar. Mayoritas pengguna ialah mereka yang berasal dari etnis-etnis yang mendiami Sulawesi Selatan, baik yang masih tinggal di provinsi ini maupun yang di luar. Bahkan pengguna dari etnis-etnis lain pun turut mengoleksi dan menggunakan produk tenun sutra. Ini karena produk sutra melekat erat dalam ritual-ritual siklus hidup masyarakat Sulawesi Selatan: sejak kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Demikian pula, masa-masa perayaan lebaran dan ulang tahun kabupaten dan provinsi juga memacu penjualan produk sutra di provinsi ini.

Dengan potensi pasar sebesar ini, wajar bila terbentuk tiga jalur distribusi berbeda dengan pelakunya masing-masing.

- Penenun mandiri, terutama yang memakai walida atau gedogan, menjual langsung ke konsumen berdasarkan pesanan khusus. Biasanya sarung ini berbahan sutra asli dengan motif khusus dan pemesanannya datang sesekali saja.
- Pengusaha tenun memesan tenunan dari penenun lalu menjual kepada pedagang perantara, atau langsung ke toko-toko di Wajo dan Makassar, atau mengirim langsung ke luar provinsi (daerah yang sering kali disebut penenun dan pengusaha tenun adalah Madura). Pedagang perantara kemudian menjual sarung ke luar daerah dan provinsi.
- Penenun mandiri menjual tenunan mereka langsung ke pasar, pedagang pengumpul (*pappalele*) membelinya untuk dijual ke pedagang besar. Pedagang besar yang membeli dari *pappalele* mengumpulkannya, lalu pedagang keliling (*passompe*) dari Wajo membawa sarung dagangan keliling ke kabupaten-kabupaten di Sulawesi Selatan dan kota-kota besar di luar provinsi. Kadang-kadang mereka menjual ke pedagang di luar provinsi yang akan menjualnya ke konsumen.

Namun di balik cerahnya gambaran pasar ini, tampak satu fenomena penting: permintaan sarung sutra asli justru semakin surut. Ini terjadi karena gabungan beberapa persoalan:

- Semakin banyaknya sarung yang ditenun menggunakan bahan campuran sutra dan sintetis, mungkin karena menurunnya produksi benang sutra di tengah permintaan pasar yang cenderung tetap atau meningkat.
- Relatif tingginya harga sarung sutra asli bagi kebanyakan konsumen. Boleh jadi karena bertambahnya jumlah pengguna dengan daya beli yang lebih rendah sementara harga nominal sarung sutra asli terus menanjak (karena inflasi dan kelangkaan).
- Dalam jumlah terbatas, ada konsumen yang tidak tahu membedakan sarung sutra asli dan campuran.
- Bahan produk sutra (benang sutra) lokal kurang bermutu. Kebanyakan konsumen butuh sarung yang bisa bertahan lama dan sebagian sarung/kain sutra asli lebih mudah luntur atau pudar, dan kadang menghasilkan tenunan yang tidak rata karena ketebalan benang yang tidak konsisten. Ini juga menjadi salah satu faktor pencampuran bahan sutra dan sintetis.

Deretan penyebab ini mengisyaratkan bahwa pada dasarnya semakin banyak konsumen yang tidak sanggup membeli sarung sutra asli, dan karena itulah motif (atribut yang mencirikan sarung sutra) menjadi penting. Survai terhadap konsumen pun mengkonfirmasi bahwa inovasi motif dan harga merupakan dua atribut dengan skor tertinggi yang menentukan kepuasan konsumen. Semua ini berujung pada superioritas motif di atas keaslian bahan. Pentingnya motif dalam penjualan produk tenun ini kemudian memunculkan rentetan persoalan, khususnya bagi pengusaha tenun dan pemilik toko kecil. Plagiasi motif yang menciptakan tekanan harga, dan pengurusan paten yang memakan waktu cukup panjang, menjadi keluhan para pemilik toko.

Mereka pun jadi kesulitan bertahan karena selisih antara ongkos produksi (benang) dan harga produk jadi yang sangat kecil. Kecenderungan ini Sebagian disebabkan oleh tekanan harga jual

dari pengusaha tenun besar yang sanggup menghasilkan sarung/kain dengan harga lebih murah dan produk non sutra asli. Hal ini berhubungan dengan superioritas motif di atas kualitas bahan, yang kemudian menentukan harga jual. Ketika pengusaha skala kecil hendak mengejar motif boleh jadi mereka akan mengalami tekanan harga dari pengusaha tenun skala besar yang juga memproduksi motif serupa dalam jumlah besar.

Belum ada kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengatasi persaingan yang timpang ini. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh badan-badan pemerintah terkait lebih berfokus pada kerja promosi. Dalam hal promosi, badan-badan pemerintah terkait tampak cukup aktif, misalnya dengan menyertakan produk sutra Wajo ke pameran-pameran, membuat galeri khusus, hingga menyelenggarakan fashion show. BNI lewat program CSR mereka juga melakukan branding terhadap Kampung Sutra BNI yang sangat membantu memperkenalkan produk-produk dari kampung tersebut kepada calon konsumen. Ini tampak pada cukup tingginya kunjungan konsumen dari luar kabupaten.

Dengan kata lain, di tengah potensi pasar yang besar, pelaku-pelaku berskala besar mendapatkan keuntungan lebih besar daripada pelaku kecil. Bahkan bila kita melihat dari seluruh mata rantai nilai sutra Sulawesi selatan, pelaku-pelaku skala besar menjadi pihak yang paling diuntungkan daripada pelaku lain.

Dari perspektif gender, di sektor ini tampak ketimpangan dalam hal penerimaan manfaat. Secara spesifik, pemilik dan pengelola toko-toko yang relatif berompol kecil di Kampung BNI didominasi oleh perempuan, dan mereka mengalami persoalan lebih besar daripada pedagang besar yang sanggup mensubsidi silang (potensi) kerugian dari menjual produk sutra asli dengan menjual dagangan non sutra atau setengah sutra. Tentu saja ini tidak menafikan upaya pemerintah Kabupaten Wajo yang memperbaiki infrastruktur jalan yang turut membantu kelancaran penjualan di Kampung Sutra BNI.

Persoalan ketimpangan ini akan menciptakan hambatan teknis dalam memastikan penerimaan dan perluasan pasar produk sutra dari Sulawesi Selatan. Diagram kartesius dalam KOTAK 9 di bawah

menunjukkan bahwa atribut-atribut yang perlu dijaga kinerjanya ialah inovasi motif dan warna, sedangkan atribut yang perlu diperbaiki ialah label keaslian, harga yang lebih terjangkau, dan kehalusan. Seluruh atribut ini akan lebih mudah dipertahankan dan diperbaiki lewat bekerja sama dengan pelaku-pelaku berskala besar. Untuk mendapatkan produk berlabel asli dan bermutu tinggi dengan harga lebih murah, misalnya, akan lebih mudah bekerjasama dengan pengusaha tenun skala besar yang bisa melakukan produksi massal. Dan dengan begitu, eksploitasi terhadap penenun pekerja dan penenun langganan akan terus berlanjut.

Hal ini menciptakan dilema yang masih perlu dijawab: apakah rantai nilai sutra akan memilih memajukan mutu komoditas dan meninggalkan para pelaku marjinalnya? Dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan. Untuk mendapatkan harga yang bersaing dan kehalusan bahan lokal yang lebih baik pemerintah telah mendatangkan alat pemintal moderen. Namun seperti di singgung di atas, agar alat itu mendapat bahan baku kokon yang berkesinambungan, dibutuhkan kolaborasi intensif dengan produsen kokon (petani) untuk memastikan pasokan bahan baku yang berkesinambungan dalam jumlah memadai di satu sisi, dan perbaikan pendapatan petani produsen kokon di sisi lain. Produksi sutra lokal dan bermutu ini juga akan memperlebar akses penenun mandiri dan pengusaha tenun kecil terhadap benang bermutu, serta berpotensi memoderasi fluktuasi harga benang impor. Selanjutnya, pengorganisasian penenun sebagaimana disebut di bagian sebelumnya (Sektor Manufaktur) juga dapat berperan menguatkan posisi tawar para penenun mandiri dan pengusaha skala kecil untuk berhadapan dengan pasar bahan dan pasar produk jadi yang kini menjepit mereka. Akhirnya, kebijakan dan aturan mengenai hak paten juga dibutuhkan untuk melindungi para produsen sutra mandiri dari plagiasi motif.

Seluruh upaya ini berpotensi memperbaiki dua hal penting yang sangat penting bagi perbaikan rantai nilai sutra Sulawesi Selatan: perbaikan mutu produksi benang sutra lokal dan meningkatkan pendapatan para penenun. Capaian-capaian semacam ini akan memudahkan akses terhadap benang lokal

bermutu dan menaikkan pendapatan penenun marjinal. Perbaikan mutu benang local akan membatasi ketergantungan terhadap impor local, membuka lapangan usaha baru, memoderasi kenaikan harga benang impor, sekaligus memudahkan akses terhadap benang lokal bermutu. Capaian ini, bersama upaya lain, juga berpotensi mengangkat status penenun sebagai profesi yang lebih menjanjikan ketimbang kondisinya sekarang: penenun yang ada sekarang lebih mungkin memilih bertahan dan calon penenun yang tertarik bisa bertambah.

KOTAK 10 *Atribut Sutra dalam Diagram Kartesius*

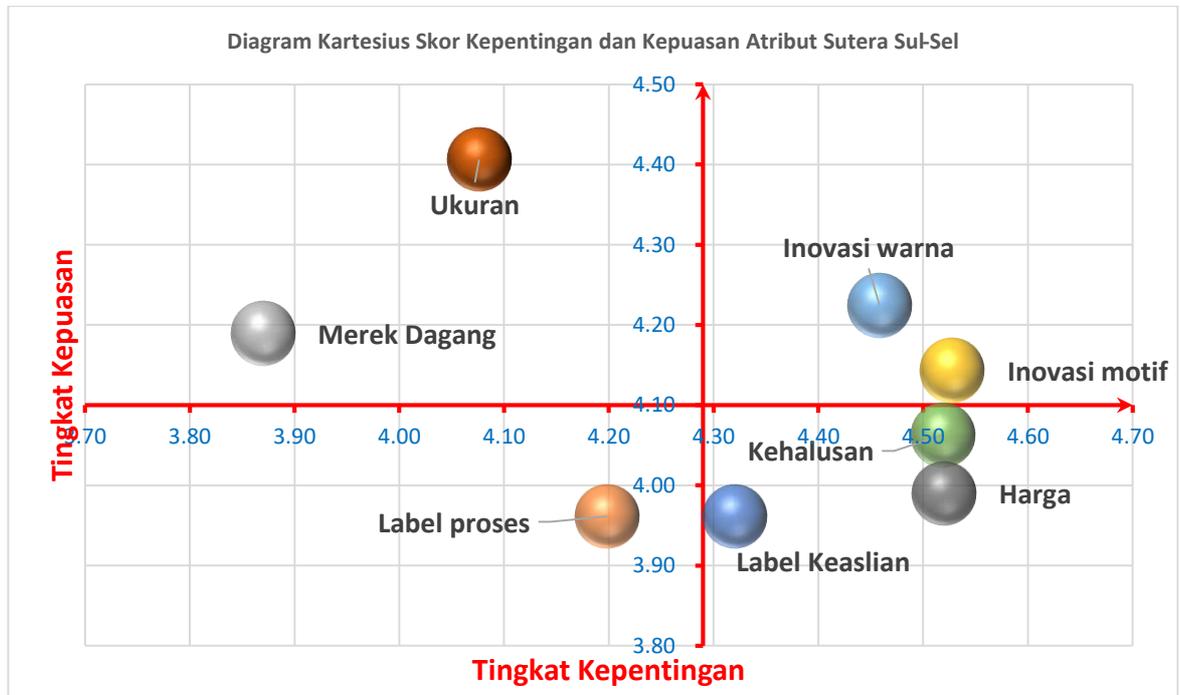
Dalam analisa ini setiap responden diminta untuk memberikan skor pada setiap atribut tentang pentingnya atribut tersebut dalam membeli produk sutra, serta skor kepuasan mereka terhadap atribut tersebut dari produk sutra yang mereka beli. Skor diukur dalam skala 1-5, yang selanjutnya dipetakan dalam diagram kartesius.

Analisis ini memberikan indikasi atribut apa saja yang perlu segera diperbaiki agar penerimaan konsumen terhadap produk semakin baik. Selain itu, Analisis ini juga memberikan indikasi atribut apa saja yang kinerjanya penting untuk dijaga dan dipertahankan, serta atribut apa saja yang dianggap tidak penting sehingga diabaikan saja.

Atribut-atribut yang *kinerjanya perlu diperbaiki*, yang berada di kuadran IV, yakni atribut yang memiliki skor kepentingan tinggi namun memiliki skor kepuasan rendah. Sedangkan skor yang *kinerjanya perlu dijaga* adalah yang berada pada kuadran I yakni atribut memiliki skor tinggi dan kinerja kepuasan tinggi. Sedangkan atribut yang perlu diabaikan adalah yang berada pada kuadran II dan III, yakni atribut yang memiliki skor kepentingan rendah baik yang berkinerja bagus maupun yang tidak.

Hasil analisis menunjukkan terdapat tiga atribut yang perlu diperbaiki dalam atribut produk sutra Sulawesi Selatan, yakni atribut *label keaslian*, *harga yang lebih terjangkau* dan *kehalusan*. Sedangkan yang perlu dijaga dan terus dikembangkan adalah atribut *inovasi motif* dan *inovasi warna*.

Diagram Kartesius Berdasarkan Skor Kepentingan dan Kepuasan Konsumen Setiap Atribut Produk Sutra Sulawesi Selatan, Tahun 2020



4.4. Aliran dan Distribusi Finansial dalam Rantai Nilai Sutra

Mengingat kecenderungan, dampak dan intervensi di sepanjang rantai nilai sutra Sulawesi Selatan, sebagaimana digambarkan di atas, kita perlu mengurai lebih terperinci dampak dalam hal distribusi manfaat (distributional impact) bagi setiap pelaku utama yang terlibat. Menghitung distribusi ini bukan hal yang sederhana. Rantai nilai sutra di Sulawesi Selatan melibatkan banyak pelaku utama, dan masing-masing pelaku utama ini melakukan aktivitas yang berbeda dan menghasilkan bentuk produk berbeda pula. Pendapatan yang diperoleh per unit output sangat berbeda antar pelaku, curahan waktu per unit output masing-masing pun sangat berbeda. Karena itu, nilai pendapatan per curahan waktu yang sama (dalam Hari Orang Kerja, HOK) digunakan sebagai pendapatan yang dapat diperbandingkan di antara pelaku utama dalam rantai nilai sutra Sulawesi Selatan.

Pelaku utama di sektor hulu terdiri dari penyedia bibit (telur) ulat sutra, petani murbei dan pemelihara ulat sutra. Pelaku penyedia telur ulat sutra umumnya dijalankan oleh lembaga non komersial. Meskipun ada keterlibatan sektor swasta dalam pengadaan telur ulat sutra impor di Kabupaten Soppeng, namun swasta berperan sebagai pengimpor yang disponsori pemerintah kabupaten. Pemerintah Kabupaten Soppeng lalu menyalurkan telur ulat impor tersebut secara gratis ke petani pemelihara ulat sutra. Pemelihara ulat sutra di Wajo umumnya memperoleh secara gratis bibit ulat sutra lokal, yang bersumber dari BPA, Perhutani, Litbanghut Bogor dan BPSKL. Hanya sebagian kecil petani membeli bibit ulat sutra lokal yang diproduksi Perhutani dengan harga Rp. 150.000 per box.

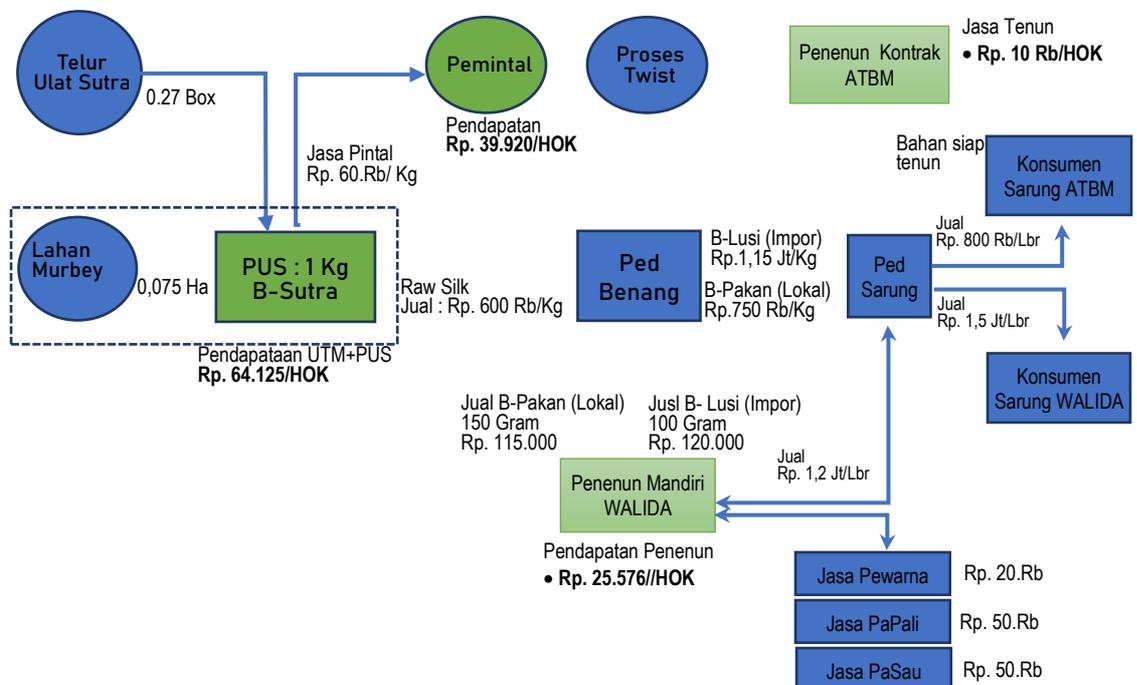
Kegiatan usahatani murbei dan pemeliharaan ulat sutra, dikelola secara terintegrasi oleh petani yang sama. Produksi usahatani murbei berupa daun murbei, tidak dikomersialkan dan memang tidak memiliki pasar. Usahatani ini bersifat subsisten, yakni menghasilkan daun murbei untuk penggunaan sendiri sebagai pakan ulat sutra. Pemeliharaan ulat sutra dengan bibit 1 box memerlukan lahan murbei seluas 0.275 ha, dengan biaya usahatani murbei sebesar Rp. 583.716/ha dan curahan waktu sebesar 15,89 HOK/ha. Biaya pemeliharaan ulat sutra sebesar Rp.96.056/box dengan curahan waktu sebesar 22,45 HOK/box. Rata-rata produksi kokon yang dicapai pemelihara ulat sutra sebesar 25,59 kg kokon atau setara 3,66 kg benang sutra *raw silk*. Total biaya usahatani murbei dan pemeliharaan ulat, setara dengan Rp. 70.103/kg benang. Setelah melakukan pemintalan, petani menjual produksi benangnya ke pedagang benang dengan harga Rp. 600.000/kg benang. Dengan demikian petani murbei yang merangkap sebagai pemelihara ulat sutra memperoleh pendapatan sebesar Rp. 467.897/kg benang atau setara dengan Rp. 64.125/HOK.

Hasil produksi pemelihara ulat sutra berupa kokon di Kabupaten Wajo dan Soppeng seluruhnya dipintal dengan mesin pemintal rakyat. Saat ini, beberapa petani melakukan proses pemintalan ini secara mandiri, namun sebagian besar menggunakan jasa pemintalan benang dengan upah sebesar Rp. 60.000/kg benang. Semua aktivitas pemintalan memerlukan biaya proses sebesar Rp. 4.911/kg benang dengan alokasi tenaga kerja sebesar 1,38 HOK/kg

benang. Pelaku usaha pemintalan rakyat memperoleh pendapatan sebesar Rp. 55.089/kg benang atau setara Rp. 39.920/HOK.

Benang yang dibeli pedagang benang masih dalam bentuk *raw silk* diproses lebih lanjut untuk menghasilkan benang *thrown silk* (benang yang siap diproses untuk penenunan). Benang *thrown silk* lokal digunakan sebagai benang pakan dan dipaketkan dengan benang impor sebagai benang lusi. Pedagang menjual paket benang untuk satu lembar sarung sutra yang terdiri dari 150 gram benang *thrown silk* lokal sebagai benang pakan seharga Rp. 115.000 dan 100 gram benang impor sebagai benang lusi seharga Rp. 120.000. Jika pembelian benang *thrown silk* lokal lebih banyak, pedagang biasanya menjual sedikit lebih murah yakni seharga Rp. 750.000/kg. Dengan demikian pedagang benang memperoleh margin penjualan sebesar Rp. 150.000/kg benang *thrown silk*, atau setara Rp. 25.000/paket benang untuk sel lembar sarung sutra (150 gram benang *Thrown Silk* lokal).

GRAFIK 17 Alur Pertambahan Nilai dalam Rantai Nilai Sutra Sulawesi Selatan



Jenis bahan yang digunakan untuk alat tenun walida dan ATBM adalah sama, tahapan dan proses penanganan benang sebelum penenunan juga sama. Akan tetapi alokasi waktu dalam menghasilkan produk akhir berbeda, demikian pula kualitas dan harga jual produk akhirnya. Proses tenun sarung sutra berbasis ATBM memerlukan curahan waktu 3 HOK/lembar, sedangkan alat tenun Walida memerlukan curahan waktu 30 HOK dalam penenunan untuk motif yang memiliki kerumitan sedang. Karena alasan kualitas hasil yang lebih halus, para pedagang juga memberi harga lebih tinggi untuk sarung yang diproses dengan walida dibandingkan ATBM. Harga pembelian pedagang terhadap sarung tenun walida dengan motif yang memiliki kerumitan sedang seharga Rp. 1,2 juta/lembar, sementara hasil tenun ATBM seharga Rp 800.000.

Penenun mandiri berbasis walida umumnya membeli paket benang dengan komposisi 150 gram benang pakan (thrown Silk lokal), 100 gram benang lusi (impor), benang genggang, dan pewarna kimia. Total biaya produksi pembuatan sarung sutra bagi penenun mandiri ialah Rp. 356.000/ lembar sarung, dengan pendapatan sebesar Rp. 844.000/lembar sarung atau setara dengan Rp. 25.576 per HOK untuk motif dengan keumitan penenunan sedang. Sedangkan bagi penenun kontrak/langganan berbasis ATBM mereka hanya memperoleh pendapatan sebesar Rp. 30.000/lembar sarung atau setara dengan Rp. 10.000/HOK.

Jika diasumsikan bahwa para pengusaha tenun dapat menjual satu unit sarung per hari, tentu mereka memperoleh pendapatan paling besar dalam rantai nilai sutra di Sulawesi Selatan. Pendapatan pedagang sarung paling besar diperoleh sistem pembuatan sarung secara kontrak berbasis ATBM yakni dengan pendapatan Rp. 470.000/lembar, sedangkan pendapatan dari penjualan sarung sutra dari penenun mandiri berbasis walida sebesar Rp. 300.000/lembar.

Untuk mengetahui perubahan nilai (harga) dari bahan baku hingga sarung, berikut ini adalah analisa perubahan nilai (harga) dengan memakai satung yang ditenun dengan walida sebagai contoh kasus.

Di sektor hulu, untuk memenuhi kebutuhan benang lokal dalam pembuatan satu unit sarung, petani harus memelihara murbei dan ulat sutera untuk menghasilkan kokon sebesar 1,05 kg (setara 150 gram benang lokal yang diperlukan dalam pembuatan satu unit sarung). Nilai kokon tersebut ditingkat petani setara dengan Rp 81.000. Kokon dipintal dengan menggunakan jasa pemintal rakyat. Biaya jasa pemintalan ini sebesar Rp 60.000/kg benang *raw silk*, atau setara dengan Rp 9.000/150 gram benang lokal. Setelah melalui proses pemintalan benang, *raw silk* dijual ke pedagang benang seharga Rp 90.000/150 gram benang. Sebelum benang lokal diproses menjadi sarung, benang tersebut diproses menjadi benang *thrown silk* melalui proses *twisting*. Pedagang eceran benang menjual benang lokal dalam bentuk *thrown silk* ke penenun seharga Rp 115.000/150 kg benang. Selanjutnya di tingkat penenun, benang lokal difungsikan sebagai benang pakan, dipadukan dengan benang impor sebagai benang lusi. Perbandingan kebutuhan benang lusi dan pakan dalam sarung sutera ialah 1:1,5, jadi untuk setiap sarung diperlukan 100 gram benang lusi (impor), dan 150 gram benang pakan (lokal). Para penenun biasanya mencurahkan waktu setara 30 HOK untuk menghasilkan satu unit sarung dengan alat tenun walida. Sarung sutera dengan motif yang memiliki kerumitan sedang dijual ke pedagang seharga Rp. 1.200.000/lembar, dan di tingkat konsumen Rp. 1.500.000/lembar.

GAMBAR 13 Alur Perubahan nilai (Harga) Satu Unit Produk Akhir Sarung Sutra Berbasis Alat Tenun Walida dalam Rantai Nilai Sutra Sulawesi Selatan



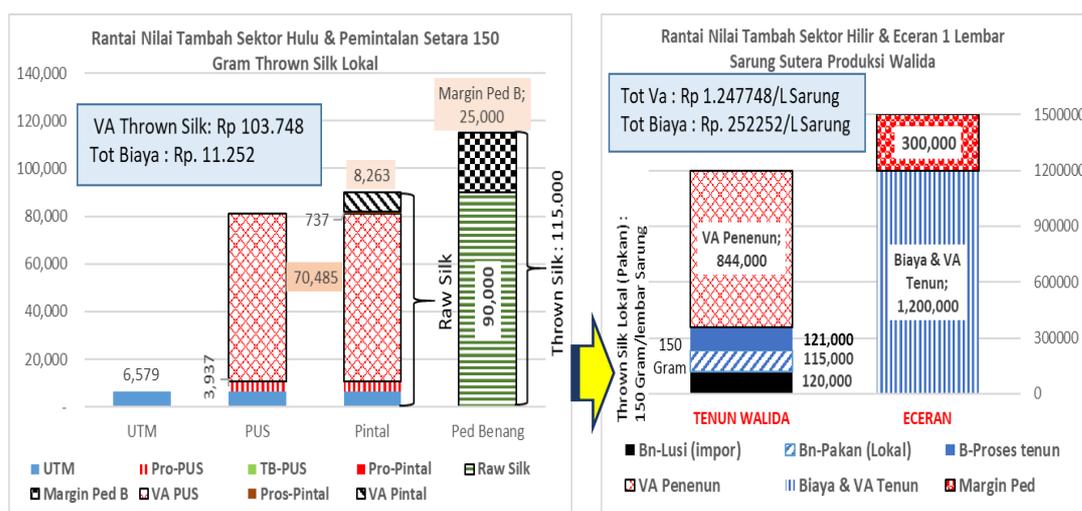
Perlu diingat bahwa harga atau nilai kain dan sarung sutera di sektor hilir (penenun dan pedagang), sesungguhnya memiliki

variasi yang sangat lebar, hal ini ditentukan oleh alat tenun (walida atau ATBM) dan status penenun (penenun mandiri atau penenun langganan) dan motif. Harga sarung atau kain sutra yang diproses dengan alat tenun walida memiliki harga lebih tinggi dibandingkan yang diproses dengan ATBM. Kualitas tenun yang dihasilkan dengan walida memang lebih halus, namun curahan waktu pembuatannya juga lebih lama. Harga penenun sarung pada tingkat penenun mandiri juga lebih tinggi dibandingkan penenun langganan yang menima kontrak penenunan dari pengusaha tenun, akan tetapi penenun mandiri juga memiliki risiko yang lebih besar baik risiko modal maupun risiko penjualan (pasar). Selanjutnya, motif juga merupakan faktor determinan menentukan harga sarung di tingkat penenun, motif menentukan kerumitan dalam proses pembuatan sehingga berkorelasi juga dengan curahan waktu dalam proses pembuatannya.

Uraian tentang aliran nilai tambah yang dijelaskan sebelumnya memberikan gambaran tentang besaran nilai tambah yang diperoleh setiap pelaku berdasarkan curahan waktu yang seragam yakni 1 HOK. Hanya saja aliran tersebut belum menggambarkan tentang struktur biaya, kontribusi nilai tambah yang diciptakan setiap pelaku dalam satu unit produk akhir. Gambar yang disajikan berikut dapat memberi jawaban kedua hal tersebut, serta dapat digunakan untuk menilai efisiensi proses produksi pada setiap pelaku seperti ukuran rasio biaya per output (penjualan), persentase profit margin (rasio antara VA atau keuntungan dengan nilai penjualan, dalam persen).

Analisis ini menggunakan ukuran biaya dan pendapatan (VA) yang setara dengan 150 gram benang *thrown silk* lokal. Penyetaraan tersebut berkenaan bobot benang sutra lokal yang diperlukan dalam menghasilkan satu lembar sarung sutra. Berdasarkan penyetaraan tersebut, untuk menghasilkan satu unit sarung sutra yang ditenun oleh penenun mandiri berbasis walida, diperlukan total biaya dari hulu hingga akhir sebesar Rp. 252.252/lembar sarung, dan total nilai tambah yang tercipta sebesar Rp.1.247.748/lembar sarung.

GRAFIK 18 *Kontribusi Nilai Tambah Setiap Pelaku Rantai Nilai dalam satu unit Produk Akhir Sarung Sutra Tenun Walida di Sulawesi Selatan*



Penenun berkontribusi paling besar dalam penciptaan nilai tambah yakni sekitar 67,64%, disusul pedagang sarung sebesar 24,04% dan pemintal adalah kontributor terkecil dalam penciptaan nilai tambah yakni hanya sekitar 0,66%. Akan tetapi persentase profit marginnya, terbesar justru diperoleh oleh pelaku pemintal yang mencapai 92%, kemudian disusul oleh pemelihara ulat sutra sebesar 78% dan penenun walida sekitar 70%. Pelaku rantai nilai yang memiliki profit margin paling kecil ialah pengusaha tenun yakni hanya sekitar 20%. Semakin tinggi profit margin tidak hanya menggambarkan efisiensi usaha, tetapi juga dapat menggambarkan risiko modal pada usaha tersebut. Pelaku pemintalan memiliki biaya yang cukup kecil dalam operasi usahanya, karena itu risiko modal dalam usaha ini juga kecil. Sebaliknya pengusaha tenun, meski memperoleh pendapatan yang cukup tinggi dalam satu lembar sarung yang terjual, tetapi modal yang digunakan juga cukup besar, dan dengan demikian risiko modal pelaku ini juga cukup tinggi.

Beberapa catatan bisa kita peroleh dari analisis ini. Pertama, besarnya risiko modal yang dihadapi para pengusaha tenun menjelaskan mengapa mereka mulai lebih banyak memproduksi dan menjual produk campuran sutra, dan semakin sedikit memproduksi sarung sutra asli bila tak ada pesanan khusus. Strategi ini mengurangi risiko modal mereka secara signifikan. Hal serupa juga diterapkan para penenun mandiri berbasis walida.

Kedua, ketika produksi kokon masih tinggi, petani lebih banyak memintal sendiri kokon mereka, sehingga memperoleh margin lebih tinggi hasil dari penjualan benang (*raw silk*) yang mereka pintal sendiri. Namun perlu diingat, persentase margin profit pemintal tidak mencerminkan pendapatan nominal yang besar, yaitu hanya sekitar Rp 40.000/HOK.

Ketiga, penenun adalah pihak yang paling dirugikan dalam rantai nilai sutra. Mereka berkontribusi paling besar dalam penambahan nilai, dan menerima pendapatan paling kecil (meskipun dengan margin yang besar). Gambaran di atas hanya memberikan ilustrasi untuk penenun yang memakai alat tenun walida, yang juga adalah penenun mandiri. Mereka adalah kategori penenun yang memperoleh pendapatan paling tinggi sekitar Rp 25.500/HOK, jauh lebih tinggi dibandingkan rekan mereka yang masuk dalam kategori penenun kontrak/langganan dan penenun pekerja, sekitar Rp. 10.000/HOK. Mereka pun rata-rata harus bekerja lebih lama untuk mengantongi pendapatan yang kecil. Para penenun walida mesti menenun selama rata-rata dua bulan sebelum bisa memperoleh Rp 25.000/HOK, dan para penenun ATBM perlu tiga hari untuk bisa mengantongi Rp 10.000/HOK. Sementara para pengusaha tenun bisa menjual lebih dari satu sarung setiap hari dengan margin Rp. 470.000/lembar sarung sutra yang ditenun dengan ATBM, dan Rp. 300.000/lembar untuk sarung sutra yang ditenun dengan walida.

Tidak jauh beda dengan para penenun, para pemelihara ulat sutra harus melewati rata-rata 28 hari untuk meraih pendapatan sekitar Rp 64.000/HOK. Para pemintal rakyat harus bekerja rata-rata selama 2-3 hari untuk bisa mendapatkan sekira Rp

40.000/HOK. Jelas nasib mereka masih lebih baik daripada para penenun, namun masih jauh di bawah para pengusaha tenun.

Akhirnya, dibutuhkan penelitian lanjutan untuk menentukan margin yang diperoleh para pelaku di sektor hilir, yaitu para *pappalele* (pedagang pengumpul), pedagang besar, pedagang perantara, pemilik toko, dan *passompe* (pedagang keliling).

4.5. Tatakelola: Fragmentasi Aktor, Relasi Kuasa dan Kepentingan

Dari gambaran di atas bisa dibangun skema yang menunjukkan bagaimana bentuk posisi dan relasi kuasa antar-aktor utama yang terlibat dalam rantai nilai sutra Sulawesi Selatan. Dari posisi dan relasi kuasa di antara mereka, kita pun bisa membayangkan bagaimana mereka secara potensial berperilaku untuk mengambil keuntungan atau terlibat dalam distribusi yang lebih adil. TABEL 10 di bawah ini mengurainya.

TABEL 9 Skema relasi antar-aktor rantai nilai sutra Sulawesi Selatan

Aktor	Posisi, dan relasi kuasa dalam rantai nilai	Kepentingan	Potensi 'adil' dan 'tidak adil'	
			Potensi untuk mengambil keuntungan	Potensi untuk keadilan distribusi
Silk Solution Centre	Pemain tunggal dalam asosiasi pengusaha sutra yang resmi (diakui Permen bersama). Kuasa Dominan dalam akses terhadap informasi dan program pemerintah provinsi dan kabupaten.	Mengamankan keberlanjutan usaha	Jaringan usaha yang diperoleh dari limpahan informasi bisa digunakan untuk mengambil ancap-ancang lebih awal, dan mengamankan investasi yang sedang dan akan dilakukan	Kelompok usaha dari jaringan ini dapat melakukan kemitraan lebih adil dengan petani dan penun kecil yang terorganisir, dengan delegasi dari kelompok petani dan penun kecil terlibat aktif dalam asosiasi.
Importir bibit ulat (CV Masalangka)	Pemain tunggal dalam mengimpor bibit ulat. Individu, badan hukum non pemerintah, maupun pemerintah diperkenankan mengimpor, tapi perusahaan ini memiliki informasi dan kapasitas dalam melakukan impor, sehingga dapat mengamankan margin	Mengambil keuntungan dari absennya uji adaptasi (melancarkan proses impor)	<i>Common sense</i> (pengetahuan publik) tentang benih ulat yang lebih bagus akan melanggengkan ketergantungan terhadap impor; kurangnya barrier uji adaptasi memungkinkan perolehan keuntungan lebih lanjut	Importir mendorong upaya deteksi dini penyakit pebrine, dengan kualitas bibit ulat yang bebas penyakit akan menguntungkan posisi mereka dan juga mengisi posisi distribusi ke petani dengan kejelasan informasi dan fasilitasi kemitraan
Importir benang sutra	Pelaku ini dan informasi dominan yang diduparkannya luput dari perhatian publik	Kekosongan benang sutra lokal yang berkualitas dari hulu memperkuat posisi ini	Mengambil manfaat sebesar mungkin dengan melanggengkan impor dan ketergantungan terhadap benang impor sutra	Memfasilitasi/mendukung produksi benang sutra (lokal) bermutu dari hulu lewat kemitraan dengan pemintal rakyat, terutama untuk mendapatkan benang lusi

BPSKL	Lembaga ini kelanjutan dari BPA, yang belum punya pengalaman memfasilitasi secara formal ijin Perhutanan Sosial berbasis sutra. Infrastruktur rumah indukan yang dikuasainya dan terkoneksi dengan Balai Riset Bogor, dapat diharapkan untuk dikembangkan sebagai model	Menjalankan mandat pemerintah pusat dalam reforma agraria sektor kehutanan terutama sektor distribusi keadilan tenurial	Carut marut sutra, akan melanggengkan business as usual, atau sekedar menjalankan tugas saja, apalagi bila mandat kurang jelas	Mengagendakan fasilitasi izin perhutanan sosial berbasis persuteraan alam, dan fasilitasi bantuan ke manufaktur seperti pemintalan profesional sesuai mandat baru yang tidak hanya fasilitasi izin tapi juga usaha perhutanan sosial
Pemerintah Provinsi Sulsel	Jargon “mengembalikan kejayaan sutra” diikuti dengan konsisten intervensi perencanaan dan kebijakan, telah membuat sektor ini bergeliat dari sektor kebijakan; dengan koersi dan kewenangan yang dimilikinya Pemprov dapat memfasilitasi para pihak yang terlibat.	Adanya perencanaan yang sistematis dan mendorong para pihak berkontribusi dalam kejayaan sutra; terutama keterlibatan Dinas terkait yang tidak hanya bertumpu pada Dinas Kehutanan dan Dinas Perindustrian.	Jaringan mitra aktor yang selama ini dekat dengan Pemprov diuntungkan lewat dominasi akses informasi dan kebijakan; kejayaan sutra berpotensi hanya menguntungkan pemain besar, seperti konsultan pengadaan barang, pengimpor bibit ulat, dan pengusaha besar	Ratusan ribu pelaku terutama penenun dan petani (baik yang aktif maupun ‘bera’) dapat mengambil manfaat jika kebijakan/program yang diupayakan Pemprov berpihak pada mereka yang termarginalisasi dari rantai nilai. Memulai dengan kedaulatan bibit ulat serta fasilitasi kelompok petani dan penenun yang selama ini menjadi tumpuan kejayaan sutra
Pemerintah Kabupaten Enrekang	Petani murbei di kabupaten ini pernah menjadi mayoritas dan kini telah beralih ke komoditas lain, membuat sektor ini telah mengurangi pendapatan daerah (secara langsung). Banyaknya alat manufaktur Perhutani yang	Pemkab berkepentingan mengembalikan kejayaan sutra, karena (mantan) petani telah memiliki	Mengikuti persepsi dominan bahwa ada kendala berat untuk mengembalikan kejayaan sutra; komoditi pengganti telah membuat nyaman dan menyulitkan beralih Kembali ke sutra,	Komoditi persuteraan alam yang anti terhadap bahan kimia, dapat menguntungkan lingkungan dan pertanian yang lebih berkelanjutan dan mengambil nilai lebih dari citra ‘organik’, Pemkab Enrekang berkomitmen serius untuk

	ada di Enrekang, serta iklim yang kodusif bagi pengindukan bibit ulat, menjadikan posisi enrekang strategis	pengalaman dengan budidaya murbei dan ulat sutra.	memfasilitasinya berarti berhadapan dengan risiko besar dan kendala struktural yang butuh solusi jangka panjang.	mengembalikan usaha petani mereka bekerja di sektor ini dengan mengoptimalkan sarana Perhutani yang ada di kabupaten ini
Pemerintah Kabupaten Wajo	Brand kota sutra, dan pelaku terbanyak dalam industri serta pekerja penenun, menjadikannya strategis	Berkepentingan di hilir melindungi pengusaha mitra pemerintah selama ini dan ratusan industri langsung dan tidak langsung, serta ratusan petani dan penenun	Posisi anggaran pemerintah yang kecil dibandingkan provinsi dan pusat, dapat menjadi alasan utama untuk bekerja dengan operasi normal, mempertahankan eksisiting rantai nilai saat ini. Menilai bahwa industri tetap berjalan walupun dengan benang non sutra asli.	Mengamankan program 1000 usahawan baru, dapat mentransformasi penenun menjadi pengusaha kecil yang dapat memotong margin berlebih yang didapatkan oleh oligopoli pengusaha tenun besar Memanfaatkan bantuan pemrov terkait mata alat pinal untuk menyejahterakan petani dan pemintal dengan penyediaan institusi pemintal yang menguntungkan tetapi tetap berorientasi pelayanan
Pemerintah Kabupaten Soppeng	Kabupaten Soppeng kini memegang posisi pemasok kokon utama bagi Wajo.	Berkepentingan di hulu. Walaupun Soppeng kini lebih banyak menggeliat di sektor hulu, namun branding sebagai sentra sutra hulu hilir akan diupayakan	Ambisi untuk berjaya di hilir berpotensi mengabaikan konsentrasi pemberdayaan petani. Dengan miniatur persuteraan yang diperlihatkan ke publik hanya akan terus menjadi miniatur tanpa follow up berarti buat petani	Pemerintah Soppeng dapat berkonsentrasi mensejahterakan petani, dengan sektor hulu yang menguntungkan dan fasilitasi kemitraan dengan petani dan pengusaha hulu Memanfaatkan upaya Pemprov untuk berdaulat dalam bibit ulat dalam menyediakan infrastruktur rumah indukan dan institusi deteksi

		oleh Soppeng.		dini penyakit ulat
Pengusaha tenun besar	Hanya sekitar 8-10 pengusaha tenun besar, yang menguasai jaringan konsumen dari <i>captive market</i> sutra selama ini	Mendapatkan keuntungan yang stabil dengan situasi persuteraan apapun, baik normal maupun 'berjaya'	Terus melanggengkan hubungan patron klien/buruh-majikan dengan penenun, melanjutkan sistem upah murah dan pelibatan buruh anak	Mendukung pemerintah menciptakan 1000 wirausahawan baru dengan pola kemitraan yang lebih adil, pengusaha terus mendapatkan laba namun penenun dapat menjadi mitra pengusaha baru atau terus menjadi buruh dengan upah yang lebih adil. Dapat mencontoh PT Begawan Sutra dalam kemitraan dengan petani dan penenun
Pemintal rakyat	Sebagai pemain tengah, aktor ini mendapatkan imbas dari rendahnya kualitas & produksi kokon terutama untuk mendapatkan benang lusi	Tetap menjamin usaha pemintalan rakyat dan memberikan layanan dalam rangka mendapatkan benang lusi yang berkualitas	Sama sekali tersingkirkan akibat kehadiran dan orientasi baru dari alat pemintal modern	Pemintal rakyat dapat berdaya dengan adaptasinya dengan sistem bisnis baru, atau adanya usaha baru akibat teralienasi dari sistem pemintalan baru
Petani	Ketergantungan terhadap bantuan bibit murbei dan bibit ulat serta tidak adanya pengorganisasian yang kuat	Mendapatkan layanan menyejahterakan petani, memacu generasi petani muda, serta margin keuntungan yang	Petani tetap tua dan berpendidikan semakin rendah, serta tetap mendapatkan dampak dari carut marut sutra dan ketahanan mereka semakin lemah dan sangat mudah berganti ke komoditi lain	Petani dapat mengorganisir diri, menghadirkan perwakilan petani yang dapat masuk dalam jaringan negosiasi kebijakan dan pasar

		labih layak		
Penenun perempuan	Ketergantungan terhadap hubungan patron-klien dan buruh majikan yang menindas dari pengusaha tenun besar	Mendapatkan layanan menyehatkan penenun perempuan, memacu generasi penenun muda serta margin keuntungan yang lebih layak, mendapatkan bantuan alat, modal, dan keterampilan	Penenun perempuan tetap hanya dijadikan buruh murah, tanpa keberdayaan yang cukup	Penenun dapat mengorganisir diri, menghadirkan perwakilan penenun yang dapat masuk dalam jaringan negosiasi kebijakan dan pasar

TABEL 9 di atas menunjukkan bahwa para pelaku yang punya posisi kuat memegang kendali atas rantai nilai sutra. Dalam hal ini, para pengusaha tenun menjadi pelaku dominan (*governor*) dalam tatakelola (*governance*) rantai nilai sutra Sulawesi Selatan. Mereka menetapkan aturan (*legislative governance*) dengan menentukan motif, harga, jumlah barang, dan standar kualitas barang yang akan diproduksi. Mereka menegakkan aturan (*judicial governance*) dengan menetapkan upah dan sanksi-sanksi bagi penenun dan pedagang perantara/keliling yang melanggar 'kontrak'. Mereka pun, hingga taraf tertentu menjadi pengelola yang proaktif (*executive governance*), misalnya membantu penenun (*supplier*) agar mencapai standar kualitas dengan sesekali mengajarkan keterampilan menenun bagi penenun yang masih butuh. Mereka pula yang mengelola beraneka "link subordinat" di dalam rantai nilai. Misalnya, mereka segera menghubungi penenun langganan begitu menerima pesanan dari pedagang perantara ataupun konsumen. Atau menjadi penghubung apabila pemerintah atau pihak lain ingin mengadakan program yang melibatkan penenun. Ujungnya, mereka menguasai informasi, jaringan, dan dapat mempengaruhi kebijakan serta program-program pemerintah.

Postur tatakelola rantai nilai semacam ini, dengan tatakelola yang didominasi pengusaha tenun, juga memicu importir/pedagang untuk mengimpor ulat dan benang sutra (dan benang non-sutra) dari luar Sulawesi Selatan. Hal ini lalu menciptakan ketergantungan terhadap ulat dan benang impor, yang kemudian memunculkan pelaku dominan lain (importir ulat/pedagang benang), meskipun tidak sedominan para pengusaha tenun. Menjadi demikian karena pada dasarnya para pengusaha tenunlah yang menetapkan kuantitas dan kualitas benang yang dibutuhkan dalam rantai nilai sutra Sulawesi Selatan.

Postur tatakelola seperti ini menunjukkan kedalaman (*depth*) dan keluasan (*pervasiveness*) kuasa pelaku dominan. Tentu saja, dominasi ini tidak berlaku total, misalnya, mereka tidak punya kuasa atas penenun mandiri yang berbasis walida, namun jumlah penenun walida dapat dikatakan marjinal dibandingkan seluruh pelaku yang terlibat. Tatakelola semacam ini terbentuk dari fakta bahwa para pengusaha tenunlah yang memesan mayoritas barang yang akan ditenun untuk kemudian mereka lempar ke pasar. Rantai nilai semacam ini disebut "*producer-driven chain*", yaitu ketika produsen menguasai teknologi produksi, memainkan peran koordinasi, dan membantu efisiensi supplier dan pelanggan. Sebagaimana kita lihat di atas, model tatakelola seperti ini kemudian menekan pelaku-pelaku marjinal seperti petani (dalam bentuk risiko gagal produksi kokon) dan penenun (upah rendah, rasio harga bahan-harga jual yang tipis). Model semacam ini kemudian menciptakan ketergantungan terhadap bibit ulat dan benang sutra impor di

satu level, dan di level berikutnya berkontribusi pada terjadi ketimpangan pendapatan yang cukup lebar di antara pelaku yang kuat dan lemah di sepanjang rantai nilai sutra Sulawesi Selatan.

Di tengah kondisi seperti ini, lembaga-lembaga pemerintah terkait tampak lebih berperan menyokong atau setidaknya menimbulkan pembiaran yang berujung pada terjadinya ketergantungan (pada bibit ulat dan benang impor) dan ketimpangan (distribusi pendapatan). Kedekatan antara para pelaku dominan dengan Lembaga pemerintah terkait tampak berjalan beriringan dengan kebijakan, atau kealpaan kebijakan, yang menguntungkan para pelaku dominan (importir dan pengusaha tenun besar). Kebijakan yang memudahkan impor dan pembiaran terhadap upah rendah penenun, adalah contohnya. Sementara, itu aktor-aktor marjinal seperti petani dan penenun, yang justru merupakan tulang punggung rantai nilai sutra Sulawesi Selatan, mengalami marginalisasi baik dalam hal distribusi pendapatan maupun pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan komoditi sutra. Sulit menghindari kesan bahwa kedekatan ini justru menciptakan ketimpangan dan ketergantungan, dua hal utama yang berkontribusi pada merosotnya rantai nilai sutra di Sulawesi Selatan, sekaligus mengancam keberlanjutannya, setidaknya dalam bentuknya sekarang yang masih berdaulat di beberapa bagian—sebagian benang masih diproduksi secara lokal dan seluruh produk sutra lokal masih dibuat oleh para penenun lokal.

Sejarah kebijakan pemerintah dalam mendukung rantai nilai sutra Sulawesi Selatan memang mengindikasikan kurangnya perhatian terhadap pelaku-pelaku kecil, misalnya dengan kurangnya program khusus untuk pengorganisasian penenun dan petani pemelihara ulat sutra. Selain itu, program-program pemerintah terkait juga kurang menunjukkan program khusus untuk mengatasi persoalan khas penghidupan pelaku-pelaku kecil tersebut sesuai dengan perspektif mereka. Yang banyak tampak adalah program top-down yang teknokratik berpusat pada komoditas di setiap tahapan transformasinya (perbaikan suplai telur, murbei, kokon, dan benang). Misalnya, ketika petani mulai bergeser meninggalkan sutra untuk memulai usahatani kakao dan jagung, yang merupakan ciri khas strategi penghidupan petani, pemerintah gagal memberi respon berarti. Bahkan, sebagaimana disebut di atas, akhir-akhir ini tampak kecenderungan kebijakan yang memudahkan impor bibit ulat sutra sembari membiarkan badan yang mengurus suplai ulat nasional menjadi kian lemah. Dengan kata lain, tampak peralihan yang menjauh dari kedaulatan dan keadilan dalam rantai nilai sutra.

TABEL 10 *Dinamika Kebijakan dan Isu Lapangan Rantai Nilai Sutra Sulawesi Selatan*

Tahun	Dinamika Kebijakan	Tahun	Dinamika isu di lapangan
1970	Masyarakat mulai mengenal Bibit ulat Jepang	1970	Masyarakat mulai mengenal Bibit ulat Jepang.
1970	Proyek Pembinaan Alam Sulawesi Selatan.	1970	Di kabupaten Soppeng, Puncak kejayaan Persuteraan Alam - Menghasilkan benang 90 ton - Dilakukan sebanyak 9.000 KK Luas perkebunan Murbei sebesar 5.500 Ha dan terus bertambah
1971	-	1971	Benang sutra berhasil memenuhi permintaan usaha sarung Sulsel dan sutra Serangan penyakit pebrine (produksi hanya 25 ton), kebutuhan benang sutra 202 ton, sidang kabinet nasional. Komoditi unggulan tembakau icou.
1971	Pemerintah melarang penggunaan bibit ulat lokal dan menganjurkan penggunaan bibit bivoltive yang disediakan oleh pemerintah	1971	Bibit ulat lokal mulai punah. ATBM di Takalar, Sinjai dan Pinrang.
1974	Pembangunan SPA (Stasiun Persuteraan Alam) di Tajuncu Kec. Donri-Donri (Peletakan batu pertama oleh Presiden Soeharto). Penyerahan Banpres (Bantuan Presiden) berupa mesin pemintalan untuk 4 Kabupaten yaitu, Soppeng, Sidrap, Wajo, dan Enrekang, yang secara simbolis diadakan di Tajuncu Kec. Donri-Donri	1974	
1978	Kerjasama teknik antara Dirjen . Kehutanan dengan Pemerintah Jepang dalam kegiatan Persuteraan Alam Proyek Kerjasama ATA-72 (JICA)	1978	Sutra alam menjadi pekerjaan utama masyarakat Soppeng

1981	Penggunaan telur ulat sutra F1 dihentikan, harganya mahal sehingga PPA Perhutani memproduksi telur F2 namun tidak menaikkan produksi		
1984	Keputusan Menteri Kehutanan 097/1984 menetapkan Balai Persuteraan Alam	1984	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi kokon hanya 136.040 Kg dengan 17.900 Kg benang sutra • BPA menjadi agen sentral tata kelola sutra
1985	-	1985	Menanam, memintal dan menenun sampai menjadi sarung bukan hanya di Wajo tapi mulai juga di Soppeng
1986	Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:02/Menhut-II/86 ditetapkan Crash Program Penanganan Persuteraan Alam di Sulawesi Selatan	1986	Fragmentasi Perhutani Perusahaan Ulat Sutra dan Pemintalan, Dirjen Rehabilitasi Lahan mengurus Penyuluhan, Balai Litbang mengurus Pemuliaan Ulat
1990	Studi banding ke India, susun SK Gubernur tim pengembangan industri sutra Sulsel, 2 kebijakan, arah pengembangan kebijakan sutra alam, wajib sertifikasi ulat sutra. Kalau ketemu selalu masalah telur dan pasar, 1991 akhir studi banding,		<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan sutra alam mulai menurun karena persaingan dengan komoditas terutama Kakao • Harga kokon dan benang menurun
1993			Perkembangan persuteraan alam semakin menurun. Di Kabupaten Soppeng hanya sisa satu kecamatan yang tetap mengusahakan sutra alam (Kec. Donri-Donri) dengan 7 Kelompok Tani yang masih bertahan
1997	Kredit usahatani persuteraan kepada petani dengan instrumen SK Menteri Kehutanan No.50/1997	1997	Projek Kredit usaha persuteraan alam (KUPA) gagal karena tidak dapat membayar kembali dan membuat petani tidak melaksanakan usaha pemeliharaan (murbei dan ulat)
		2001	Tingkat produksi benang sutra mencapai ± 67.653 kg (cukup stabil)
2002	Kepmen Kehutanan 664/2002 menetapkan tugas BPA berupa rencana, pemeliharaan bibit induk ulat, pengujian mutu, sertifikasi dan akreditasi lembaga sertifikasi telur ulat sutra, pengelolaan sistem informasi persuteraan alam.	2002	Tersedia sentra data sutra yang terpusat di BPA, serta terdapat akreditasi sertifikasi ulat, dan pengujian

2004	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Gerbang Emas) Sulawesi Selatan	2004	Anggaran Gerbang Emas tidak jelas, tidak menjadi gerakan akar rumput, kurang koordinasi
			Tanaman jagung mulai lebih diminati, konversi tanaman murbei ke jagung banyak dimulai
2005	-	2005	Penyakit pebrine menyerang
2006	Peraturan Menteri Bersama (kehutanan, Industri, Koperasi) ttg Pembinaan dan Pengembangan Persuteraan Alam Nasional dengan Pendekatan Klaster	2006	Pengembangan Pendekatan Klaster kurang koordinasi dengan tidak adanya dampak yang dihasilkan
		2007	Pembentukan Silk Solution Centre diberbagai kabupaten termasuk di Wajo
2007	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/2007 tahun 2007	2007	Sertifikasi dan uji adaptasi bagi importir bibit ulat sutra
2008	Import bibit ulat dimulai		Masyarakat menggunakan bibit ulat sutra impor dari Tiongkok dan dipersepsikan lebih baik dari produk PERHUTANI
2009		2009	Tingkat produksi benang sutra turun drastis menjadi ± 15.808 kg
2013	Impor bibit ulat dihentikan		Pasokan bibit ulat mulai semakin susah didapatkan
2016	Fasilitasi Konjen Jepang kunjungan ke CTS	2016	Adanya cakrawala baru teknik pemintalan modern
2017	Impor bibit ulat dibuka kembali dengan Instrumen Permen LHK 37/2017 tanpa uji adaptasi	2017	Bibit impor lebih mudah, bibit impor berasal dari Tiongkok
2019	Pemkab Wajo kerjasama dengan CTS Thailand mengirimkan peserta latih	2019	Terdapatnya beberapa tenaga terampil oleh pelaku swasta
2019	Komitmen dan Kebijakan Gubernur Sulsel Mengembalikan Kejayaan Sutra	2019	Alokasi dana Pemprov Mengembalikan Kejayaan Sutra untuk Kabupaten Wajo dan Soppeng
		2020	Karena Covid-19 dana pemprov diatas tidak semua terserap (<i>refocusing budget</i>)

Secara spesifik, risiko yang dihadapi tatakelola rantai nilai seperti ini ialah langgengnya ketimpangan: pengusaha bisa saja terus memanfaatkan dominasi mereka atas informasi dan kebijakan/program, memanfaatkan kekosongan benang lokal bermutu, dan melanjutkan bentuk-bentuk hubungan yang timpang (dan eksploitatif) dengan para pelaku subordinat. Sementara badan-badan pemerintah terkait, tanpa perubahan signifikan, akan melanjutkan tugas secara *business as usual*, melanjutkan hubungan-hubungan yang menguntungkan pelaku dominan, dan kurang tepat menetapkan prioritas, semisal Pemkab Soppeng yang tampak berkonsentrasi membangun seluruh sektor dengan risiko mengabaikan perbaikan penghidupan petani yang menjadi tulang punggung sektor hulu—sektor yang justru dominan di Soppeng. Tatakelola semacam ini bisa berujung pada langgengnya pemiskinan para penenun dan hilangnya petani pemelihara ulat sutra, sebagaimana yang sudah terjadi secara faktual di Enrekang.

Sebaliknya, pelbagai upaya bisa ditempuh untuk membalikkan proyeksi kelam ini. Dengan intervensi yang tepat, para pengusaha bisa membangun kemitraan yang adil dengan para pelaku marjinal (petani dan penenun) dan melibatkan penenun dan petani terorganisir dalam asosiasi pelaku sutra (SSC) agar lebih banyak mendengar keluhan dan aspirasi mereka. Sementara badan-badan pemerintah bisa mendorong hadirnya produksi bibit ulat berdaya adaptasi tinggi yang dibarengi deteksi dini yang regular. Mereka pun bisa secara berkesinambungan memfasilitasi akses petani atas lahan dan bantuan, juga akses penenun atas bantuan modal dan peralatan agar bisa bertransformasi menjadi pengusaha-pengusaha tenun yang berdaya. Akhirnya, pemerintah pun dapat menyokong pengorganisasian petani dan penenun untuk meningkatkan daya tawar mereka.

BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Di sektor hulu, tampak penyusutan para pelaku kecil, para petani. Kecenderungan ini disebabkan susutnya produksi dan kualitas kokon yang dihasilkan petani. Penyusutan ini disebabkan oleh gabungan sejumlah persoalan. Pertama, ketergantungan terhadap bibit impor, yang ketika akhirnya terserang penyakit (terutama pebrine), petani tak punya alternatif yang setara. Ini juga terjadi karena rendahnya kualitas (adaptasi) bibit ulat sutra produksi nasional. Kedua, konfersi lahan ke komoditas yang butuh pestisida dalam jumlah besar yang bisa membunuh ulat. Namun persoalan ini baru muncul ketika petani mengkonfersi lahan setelah produksi kokon menyusut. Ketiga, karena ciri khas strategi penghidupan kaum tani yang menghitung perimbangan antara jerih payah dan faedah.

Sementara di sektor manufaktur, para penenun yang terikat dalam hubungan patron-klien atau buruh-majikan, menemukan diri terjebak dalam profesi dengan pendapatan sangat rendah. Jumlah pendapatan yang disodorkan oleh model-model relasi ini tidak memungkinkan mereka untuk meningkatkan taraf hidup lewat rantai nilai sutra. Karena itulah banyak dari mereka yang beralih profesi begitu peluang lain terbuka. Mereka yang bertahan kebanyakan adalah yang tidak punya pilihan lain; bahkan mereka pun segera meninggalkan kerja menenun untuk sementara waktu begitu peluang kerja serabutan muncul, karena upah yang sangat rendah.

Rentatan persoalan ini berdampak pada beralihnya banyak pelaku kecil (y.i. petani dan penenun) ke komoditas bahkan penghidupan lain. Di sini tampak bahwa semakin sedikit pelaku berusia muda, berpendidikan, dan laki-laki yang berminat terlibat dalam rantai nilai sutra. Dalam jangka panjang, bila ini terus berlangsung tanpa perbaikan serius, kita akan menyaksikan hilangnya para pelaku kecil yang justru menjadi pelaku utama dalam rantai nilai sutra Sulawesi Selatan. Merekalah yang secara nyata bekerja untuk mentransformasi bahan baku dari ulat, kokon, menjadi benang lalu beraneka produk akhir berbahan sutra. Tanpa mereka, rantai nilai sutra akan hilang, atau akan sangat bergantung pada impor produk sutra. Dalam kondisi semacam itu, permintaan dari *captive market* produk sutra dengan sendirinya akan menciptakan impor barang yang seluruhnya didatangkan dari luar Sulawesi Selatan.

Sementara itu, kebijakan dan program pemerintah provinsi dan kabupaten tampak kurang memperhatikan situasi dan strategi penghidupan (*livelihoods*) pelaku-pelaku marjinal, terutama petani dan penenun, dua

profesi yang didominasi perempuan. Program-program juga tampak kurang menyoal persoalan ketimpangan relasi kuasa dan akhirnya pendapatan yang mereka terima dari rantai nilai sutra. Kebijakan dan program lebih banyak berkonsentrasi perbaikan fisik komoditas, khususnya kuantitas input (lewat bantuan bibit murbei dan ulat) dan output (semisal jumlah penerima bantuan bibit murbei dan ulat), serta dampaknya pada produksi barang komoditas; ketimbang dampaknya kepada para pelaku yang bekerja mentransformasi komoditas.

Di samping kesulitan melihat *apa* yang benar-benar dibutuhkan pelaku, program-program juga sepertinya kurang bisa melihat *siapa* atau pelaku mana saja yang benar-benar butuh bantuan. Hasilnya, kegiatan-kegiatan utama yang didominasi oleh perempuan menjadi bagian yang paling tereksplorasi, dan akhirnya para pelakunya mengalami marjinalisasi dan subordinasi. Hal ini bisa kita lihat khususnya pada nasib para penenun di sektor manufaktur. Keberadaan penenun yang secara keseluruhan adalah perempuan masih bermasalah pada akses terhadap upah yang layak, bantuan permodalan, peralatan, pelatihan, dan akses terhadap pemasaran. Mereka menjadi pihak yang tersamar (*invisible*). Dengan kata lain, tampak bias gender dalam rantai nilai yang didominasi perempuan.

Keberadaan asosiasi pelaku seperti SSC di level kabupaten dan provinsi sepertinya belum bisa membantu agar para pelaku yang tersamar ini bisa lebih tampak. Bahkan, dapat diduga keberadaan organisasi seperti SSC yang didominasi oleh pelaku dominan malah membuat para pelaku marjinal semakin tersamar dengan pelaku dominan menguasai akses terhadap informasi dan jaringan dengan pemerintah, juga akses bahan baku dan pasar.

Demikian pula, beraneka program promosi produk sutra Sulawesi Selatan yang diselenggarakan sejumlah lembaga juga lebih banyak mempertunjukkan barang daripada pelaku yang memproduksinya. Karena itu, program-program tersebut belum bisa membuat para pelaku marjinal, khususnya para perempuan yang menghasilkan barang yang dipromosikan tersebut menjadi lebih terlihat sehingga mendapat perhatian. Situasi ini butuh intervensi yang bisa meningkatkan posisi tawar para pelaku tersamar ini agar mereka terlihat (*visible*).

Di sini tampak keterputusan antara kebutuhan pelaku kecil dengan kebijakan. Dalam ketergantungan pada bibit ulat impor (bantuan) yang ternyata juga rentan gagal mengokong, dan dalam ikatan relasi yang timpang, program-program pelatihan kepada pelaku tidak akan banyak membantu. Tambahan keterampilan belum bisa secara langsung berdampak pada

pendapatan yang ditentukan oleh jaminan keamanan bibit (di sector hulu) dan “kebaikan” para pengusaha tenun besar (di sektor manufaktur). Hal ini sangat mungkin terjadi karena kurangnya pelibatan para pelaku marjinal (petani dan penenun perempuan) secara partisipatif dan terorganisir baik sejak merancang program yang sebenarnya dalam banyak hal ditujukan bagi mereka.

Persoalan ini berjalan beriringan dengan kelemahan manajemen pengetahuan persuteraan tampak dalam bentuk kelemahan akurasi dan bahkan ketiadaan data-data yang relevan. Kelemahan ini memungkinkan terlewatkannya kelemahan-kelemahan lain yang masih perlu diperbaiki. Kealpaan data tentang *outcome* dan *impact* program yang telah dikerjakan, misalnya, memungkinkan laporan tetap baik dari tahun ke tahun meskipun berefek kurang signifikan kepada pelaku marjinal. Laporan tentang input (pelatihan) dan output (sekian orang sudah dilatih) bisa saja tampak baik, namun efek kepada penenun atau petani bisa saja nihil. Ketiadaan data profil penenun juga boleh jadi turut menyumbang pada terlewatkannya akses beraneka bantuan kepada penenun-penenun yang justru lebih membutuhkan.

Sementara itu program-program yang cukup bisa membantu para pelaku marjinal belum mencapai tingkat yang memadai. Program pengorganisasian petani untuk mengakses skema perhutanan sosial untuk budidaya sutra terhambat secara serius karena perubahan kelembagaan KPH Walenae dan relasi kuasa tradisional (patron-klien) yang menempatkan para petani menjadi pihak tak berdaya mengakses lahan—bahkan ketika mendapat dukungan pemerintah. Sementara program lain yang cukup menjanjikan, penelitian tentang bibit ulat sutra adaptif, masih terus berlangsung. Demikian pula, program-program promosi produk sutra juga belum banyak membantu para pelaku kecil—karena pendapatan mereka bergantung pada jenis relasi yang disebut di atas.

Kebijakan-kebijakan nasional dan dinamika pasar produk sutra belum bisa banyak membantu para pelaku marjinal yang membentuk sebagian besar pelaku di rantai nilai sutra. Kebijakan-kebijakan yang memudahkan impor seperti pengurangan uji adaptasi, yang juga didukung oleh pemerintah kabupaten, memperdalam ketergantungan impor dan secara tidak langsung mengurangi keterdesakan untuk menemukan bibit ulat yang benar-benar adaptif, di samping melemahkan kemampuan deteksi dini penyakit. Pergeseran ini berjalan beriringan dengan perubahan kelembagaan pemerintah terkait, sebagaimana disebut di atas, yang secara perlahan meninggalkan upaya deteksi dini dan produksi bibit ulat di tingkat kabupaten. Perubahan nasional berupa desentralisasi juga berdampak pada perubahan-

perubahan kelembagaan yang kemudian melenyapkan sejumlah unit, berikut fasilitas dan SDM yang dulu dimiliki daerah dalam mendukung sektor persuteraan.

Sementara itu, di sektor hilir, khususnya pada penerimaan pasar, tampak fenomena superioritas motif atas keaslian bahan. Hal ini menyebabkan penenun skala kecil semakin terdesak, karena tidak dapat menjangkau harga jual yang lebih murah untuk kualitas produk yang halus dan asli. Produk sutra asli, apalagi dengan motif khusus, juga datang dengan harga yang semakin mahal bagi sebagian besar konsumen, kecenderungan yang menurunkan permintaan terhadap sarung sutra asli. Rendahnya daya beli kebanyakan konsumen untuk mengakses produk sutra asli kemungkinan juga menjelaskan mengapa sebagian konsumen kesulitan membedakan produk asli dan campuran atau bahkan non sutra. Kecenderungan ini mempengaruhi harga jual yang dapat diperoleh para penenun mandiri yang banyak menenun produk sutra asli (dengan motif tertentu). Situasi semakin memburuk bagi para penenun karena maraknya plagiasi motif, dan mengakses aturan-aturan HaKI bukan pekerjaan mudah bagi para penenun perempuan, yang kian menua dan rata-rata berpendidikan rendah, serta termarjinalkan.

Gambaran di atas memang menampakkan sebuah rantai nilai yang suram: surutnya pembudidayaan ulat sutra yang menyusutkan kuantitas dan kualitas produksi kokon, lalu berefek pada berkurangnya produksi benang. Lalu, bersama absennya alat pemintal moderen yang bisa menghasilkan benang bermutu, surutnya produksi kokon juga menjadikan sektor manufaktur lebih bergantung pada benang impor, yang kemudian melemahkan potensi pemintalan lokal dan turut menyulitkan pengusaha skala kecil untuk bertahan sebagai pengusaha. Sebagian dari mereka bangkrut dan kembali menjadi penenun upahan.

Akan tetapi, di balik gambaran suram itu masih tersimpan potensi besar. Rantai nilai sutra sebenarnya cukup menjanjikan bagi para pelaku skala kecil, termasuk bagi petani dan penenun. Surutnya persuteraan Sulawesi Selatan masih bisa dilihat sebagai satu dinamika. Artinya, prospek rantai nilai sutra bisa kembali menarik bagi para pelaku marginal apabila komoditas ini bisa menjamin kelangsungan sumber bibit dan pasar kokon menguntungkan bagi petani, dan mendatangkan penghidupan yang lebih layak bagi penenun marginal. Infrastruktur budaya masih bisa mendukung kembalinya kejayaan sutra Sulawesi Selatan. Luasnya potensi pasar tidak lepas dari faktor budaya yang melekatkan sutra dalam banyak ritual, yang akan memudahkan kerja-kerja promosi. Pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan produk sutra masih banyak dikuasai oleh para pelaku

karena sudah menjadi bagian dari tradisi (diajarkan turun-temurun) khususnya di daerah sentra-sentra persuteraan Sulawesi Selatan. Para calon penenun tidak akan kesulitan menemukan guru yang bisa mengajari mereka bila minat menenun kelak membesar. Demikian pula dengan para calon petani. Semua ini akan memudahkan proses perbaikan mutu produksi sutra Sulawesi Selatan.

Untuk itu, sangat dibutuhkan kebijakan dan kerangka kelembagaan yang bisa menjamin keberlanjutan program berjangka panjang untuk menciptakan kedaulatan dan keberlangsungan bibit nasional, menjaga dan memperbaiki kualitas data dan penelitian, serta menjalankan pemberdayaan terhadap pelaku-pelaku skala kecil. Semua upaya ini diharapkan lebih responsif gender, agar berujung pada mengokohkan dan menjamin kesinambungan persuteraan di Sulawesi Selatan. Sejumlah model dapat dimodifikasi untuk menyambungkan sektor-sektor yang sebelumnya dikelola secara terfragmentasi menjadi sebuah rantai nilai yang komprehensif. Misalnya kita bisa melihat contoh dari PT. Chul Thai Silk, Thailand dan PT Begawan Sutra, Sukabumi (KOTAK 11).

KOTAK 11 Dua Model Benchmarking Tatakelola Rantai Komoditas Sutra

Benchmarking 1: Chul Thai Silk, Thailand Model

Perusahaan ini dibangun 50 tahun lalu yang hanya berfokus pada bisnis menghasilkan benang sutra kualitas ekspor, atau pada dasarnya hanya bergelut pada bisnis pemintalan modern. Perusahaan ini mengembangkan model plasma inti dengan perusahaan mengkoordinir dan memberdayakan petani murbei dalam menghasilkan kualitas tinggi baik pakan maupun kokon. Kelompok tani yang mereka dampingi sangat sejahtera karena diberikan jaminan harga pembelian kokon yang tinggi.

Perusahaan ini sangat peduli, sebelum menjual bibit ulat maupun bibit pakan murbei, mereka menyediakan harga yang transparan dan tidak memberikan beban harga yang fluktuatif kepada petani.

Perusahaan ini memiliki laboratorium riset yang baik dalam mencegah penyakit pebrine, serta memiliki pabrik indukan bibit ulat yang berkualitas tinggi.

Peran pemerintah sangatlah kurang di model ini, pemerintah hanya memfasilitasi kebijakan agar bisnis ini tetap maju, atau pemerintah tidak memberikan bantuan subsidi pakan maupun bibit ulat. Semuanya dikerjakan dengan model bisnis yang profesional. Kualitas benang sutra yang dihasilkan dapat diekspor di Eropa dengan kualitas yang paling baik di dunia.

Benchmarking 2: PT. Begawan Sutra Nusantara, Sukabumi Model

PT Begawan Sutra Nusantara pada awalnya hanya bergerak di sektor hilir yakni menjual produk sutra seperti kain. Namun karena merasakan bahwa bisnis ini tergantung pada kualitas kokon yang baik, perusahaan ini lalu mulai bergerak di sektor hulu.

5.2. Rekomendasi Kebijakan

Rangkaian rekomendasi yang dirumuskan dari kajian ini disusun dalam bentuk matriks agar dapat menunjukkan konsistensi penalaran, sejak dari isu-isu yang ditemukan hingga program-program yang dibutuhkan untuk berusaha mengembalikan kejayaan sutra di Sulawesi Selatan.

ISU	TUJUAN	STRATEGI INTERVENSI	PROGRAM	PIHAK TERKAIT	LOKASI	JANGKA WAKTU	LEVEL
SEKTOR HULU							
Ketergantungan terhadap bibit impor	Produksi telur ulat sutra secara nasional yang berkualitas, mudah diakses dan dirawat oleh petani, dan berkelanjutan	Kerjasama dengan institusi penelitian di Sulawesi Selatan, untuk uji adaptasi F1 unggulan Sulsel.	<ul style="list-style-type: none"> Kerjasama dengan Badan Litbang Kehutanan KLHK, Bogor, dalam melaksanakan uji adaptasi berkelanjutan Memproduksi bibit telur yang adaptif untuk Sulawesi Selatan 	Badan Litbang Kehutanan, KLHK, Bogor; KPH Walanee; Pusat breeding Sulsel.	Wajo dan Soppeng	2021	Propinsi
		Kerjasama dengan Badan Litbang Kehutanan KLHK, Bogor, untuk melaksanakan uji adaptasi yang berkelanjutan dalam rangka menemukan galur ulat sutra yang paling adaptif untuk Sulawesi Selatan.			Enrekang, Wajo/ Soppeng	2021	Propinsi
	Pengadaan institusi yang mengelola fasilitas produksi telur ulat sutra dan tenaga pendukungnya.* * <i>Bertugas</i>	<ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi institusi (bila sudah ada); Penyediaan sarana dan prasarana untuk fasilitas <i>breeder</i>. Reposisi staf yang akan mengelola 	KPH Walanae; ex-UPTD persuteraan alam (Dinas Perindustrian Kab. Wajo); Perum Perhutani; Perusahaan swasta	Soppeng, Wajo	2022	Propinsi, Kabupaten	

		<i>memelihara dan menyediakan ulat setidaknya sampai instar 3, demi memastikan produksi/kualitas kokon yang baik di tingkat petani</i>	<i>fasilitas breeder.</i>				
Absennya upaya deteksi dini terhadap penyakit ulat sutra	Perbaikan sistem deteksi dini penyakit ulat sutra	Penyiapan infrastruktur, SDM, dan mekanisme untuk deteksi dini penyakit ulat sutra	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan laboratorium, SDM dan institusi pengelola untuk deteksi dini penyakit ulat sutra • Pengadaan pemantauan rutin dan sistem pelaporan cepat dan mudah akses (dari petani kepada petugas/penyuluh), untuk deteksi dini penyakit ulat sutra 	KPH atau Dinas Perindustrian Kab. Wajo; Dinas Pertanian Kab. Soppeng	Wajo, Soppeng	2021	Kabupaten/ Propinsi
					Wajo, Soppeng	2021	Kabupaten/ Propinsi
Penggunaan pestisida kimia di Kawasan budidaya murbei & ulat	Pengurangan penggunaan pestisida kimia	Penguatan kelembagaan petani Meningkatkan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengorganisasian petani dalam rangka budidaya murbei dan pemeliharaan 	Dinas Kehutanan dan Lembaga terkait	Wajo, Soppeng, Enrekang	2021	Kabupaten/ propinsi

Rendahnya kuantitas dan kualitas produksi kokon	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kokon	keterpaduan program pembinaan petani	<p>ulat sutra.³¹</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan pendamping/ penyuluh • Peningkatan kapasitas kompetensi dan insentif pendamping/ penyuluh • Fasilitasi kemitraan antara petani dengan pengusaha 		Soppeng, Wajo	2021	Kabupaten/ Propinsi
---	--	--------------------------------------	---	--	---------------	------	------------------------

³¹ Agar petani bisa secara kolektif membicarakan, mengatasi isu yang mereka hadapi, dan punya posisi tawar kuat. Dengan begitu, mereka akan bisa mengusahakan secara kolektif perbaikan kuantitas/kualitas kokon, harga kokon/benang yang rendah; menurunkan penggunaan pestisida; membuka akses terhadap deteksi dini. Mendapat dukungan pemerintah untuk semua upaya di atas.

SEKTOR MANUFAKTUR							
Rendahnya kualitas benang hasil pemintalan rakyat (untuk benang lusi)	Meningkatkan kualitas benang sutra yang dapat digunakan sebagai benang lusi	Perbaiki kelembagaan pengelola mesin pemintal <i>full automatic</i> (bantuan)* <i>*Kolaborasi dengan kelompok petani sebagai produsen kokon. Lewat serangkaian eksperimen kerjasama dan konsultasi kepada petani untuk menyiapkan skema penyuplaian kokon yang paling menguntungkan bagi petani/pemintal dan paling sesuai dengan operasi mesin</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengorganisasian petani mitra 	Petani terorganisir; pemintal rakyat; Dinas Perindustrian Kab. Wajo dan Soppeng; Dinas Perindustrian Provinsi	Soppeng, Wajo	2021	Propinsi
			<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk lembaga pengelola 		Soppeng, Wajo	2021	Kabupaten
			<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan tenaga ahli tekstil yang menangani permasalahan pemintalan 		Soppeng, Wajo	2021	Kabupaten
			<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga pengelola pemintalan menyiapkan mekanisme dan model pengelolaan alat pintal <i>full automatic</i> yang akan memastikan kestabilan pasokan kokon dan keuntungan bagi petani/pemintal 		Soppeng, Wajo	2021	UPT
Timbangnya akses penenun langganan dan	Penenun dapat mengakses bantuan secara	Perbaiki akses terhadap program bantuan kepada	Perbaiki database penenun	Dinas Perindustrian Kab. Wajo; Ornop lokal; Balitbangda	Wajo	2021	Kabupaten

pekerja terhadap bantuan pemerintah	adil dan tepat sasaran	seluruh penenun, melalui perbaikan mekanisme penyelenggaraan program, dan data penenun	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas mengembangkan instrumen yang mencakup informasi dasar, situasi ekonomi (pendapatan & belanja, jumlah produksi, pengusaha langganan/'bos', dst), sejarah akses bantuan/program pemerintah. • Melakukan sensus terhadap seluruh penenun di Kab. Wajo. • Mengembangkan mekanisme penyelenggaraan program untuk penenun. 	Provinsi	Wajo	2021	Kabupaten
					Wajo	2021	Kabupaten
					Wajo	2021	Kabupaten
Rendahnya tingkat upah penenun langganan dan	Mencapai tingkat pendapatan yang layak bagi seluruh penenun	Pembinaan dan pengawasan Dinas Tenaga Kerja terhadap	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Tenaga Kerja melakukan monitoring dan evaluasi berkala 	Dinas Tenaga kerja; kelompok penenun; pengusaha tenun	Wajo	2021	Kabupaten/ Propinsi

pekerja.		pengusaha	<p>terhadap pengusaha tenun besar yang mempekerjakan penenun, baik secara kontrak maupun upahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan konsultasi/pertemuan tiga pihak, secara berkala untuk membicarakan persoalan upah sebaiknya setelah ada hasil dari pengorganisasian, berupa data dari PAR, dan kemampuan bicara di hadapan publik (lihat di bawah) 		Wajo	2021	Kabupaten/ Propinsi
		Pengorganisasian tenaga kerja pertenunan untuk pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok penenun (berdasarkan tempat tinggal) Melakukan pelatihan-pelatihan bagi penenun agar terbiasa 	Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Wajo; Ornop lokal yang terbiasa memfasilitasi pengorganisasian perempuan.	Wajo	2021	Kabupaten

			<p>menjalankan pertemuan, kelompok, dan usaha secara mandiri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penelitian bersama mereka (PAR) untuk memformulasikan isu-isu mereka dan menjalankan tindak lanjutnya 		Wajo	2022	Kabupaten
		Bantuan alat tenun dan modal bagi penenun terorganisir	<p>Memberi bantuan alat tenun dan modal bagi penenun yang telah terorganisir</p> <p><i>* Agar mereka bisa membentuk usaha secara kolektif guna meningkatkan posisi tawar dan pendapatan mereka. Bantuan-bantuan dalam bentuk pelatihan dapat dilakukan berbasis kelompok-kelompok ini.</i></p>	Dinas Perindustrian Kab. Wajo; Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Wajo; pihak swasta.	Wajo	2021	Kabupaten

	SEKTOR HILIR						
Rendahnya pengetahuan konsumen untuk membedakan produk sutra menurut bahan (asli atau sintesis) dan menurut proses pembuatan (walida atau ATBM/ATM)	Meningkatkan pengetahuan konsumen untuk mengenali produk sutra menurut bahan dan menurut proses pembuatannya	Labelisasi proses pembuatan dan bahan produk sutra	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Peraturan Bersama Gubernur dan Bupati tentang labelisasi produk sutra serta sosialisasi kepada pelaku usaha • Penyediaan sarana dan tenaga pendukung proses labelisasi sutra 	Dinas Perdagangan Kabupaten	Propinsi	2022	Propinsi
					Propinsi	2022	Propinsi
Meredupnya permintaan produk sutra asli, dan terbatasnya even-even yang memperkenalkan produk sutra	Meningkatkan promosi dan mendorong perluasan penggunaan sutra pada berbagai even-even budaya, acara resmi dan kantor	Mendorong penggunaan sutra sebagai pakaian resmi kantor dan pada berbagai even budaya Menyelenggarakan even-even promosi dalam bentuk fashion show, pameran, galeri	<ul style="list-style-type: none"> • Program hari kerja dengan pakaian sutra • Promosi dalam bentuk fashion show, pameran, galeri, dan even budaya • Pembuatan Website Galeri Sutra yang dilengkapi <i>story telling</i> 	Dinas perindustrian; Dinas Koperasi, Pariwisata	Propinsi	2021	Propinsi, Kabupaten
					Propinsi	2021	Propinsi, Kabupaten
					Propinsi	2021	Propinsi, Kabupaten
Maraknya plagiasi motif yang berdampak	Meningkatkan sertifikasi motif produk sutra	Penyediaan layanan sistem sertifikasi motif	Perbaikan sistem sertifikasi motif produk sutra termasuk aturan	Dinas Perindustrian; Bapalitbangda; Lembaga terkait	Wajo	2021	Kabupaten

pada persaingan usaha yang kurang sehat		yang mudah diakses	reward dan punishment dalam plagiasi motif				
LINTAS SEKTOR							
Kesenjangan antara fakta banyaknya pekerja perempuan, petani tua, upah murah dengan kurangnya sensitifitas gender dan inklusi sosial dalam tata kelola sutra	Penguatan institusi pemerintah dengan pembekalan Petugas lapangan yang mempunyai cukup pengetahuan mengenai sensitifitas gender dan inklusi sosial dan prinsip prinsip FPIC (<i>free, prior, inform, and concern</i>)	Pelatihan sensitifitas gender dan inklusi sosial serta prinsip FPIC lainnya yang terinternalisasi dalam mandat institusi para pihak	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan yang sistematis terkait sensitifitas gender dan inklusi sosial, FPIC, dalam tata kelola sutra • Ujicoba dan evaluasi dari hasil pelatihan • Internalisasi kapasitas sensitifitas gender dan inklusi sosial dalam mandat institusi para pihak 	Dinas Kehutanan; Dinas Perindustrian; Dinas tenaga kerja; Dinas pemberdayaan perempuan, anak; Dinas yang mengurus pemberdayaan desa dan masyarakat; Masyarakat sipil (Ornop)	Wajo, Soppeng	2021	Kabupaten
Fragmentasi kelembagaan pemerintah yang bertumpu pada agensi kehutanan dan	Pembentukan institusi yang memiliki keluwesan bekerja lintas sektor, kekuatan	Pembentukan gugus tugas, yang terkoneksi dengan kebijakan pusat, kuat mengkoordinasi	Gugus tugas (dapat diterjemahkan sesuai dengan bentuk dan kewenangan provinsi) yang berperan mengakselerasi	Tim dapat dipimpin oleh Gubernur, dan tim tim <i>task force</i> yang dibentuk kabupaten dapat tergabung dengan	Propinsi, Kabupaten (prioritas Soppeng, Wajo)	2021	Propinsi, Kabupaten

perindustrian, serta lemahnya mitra pemerintah tidak cukup mengatasi kompleksitas tata kelola sutra	pelibatan mitra, kewenangan koordinasi kuat, dan kewenangan eksekusi kebijakan yang diperlukan	peran yang ada di provinsi dan kabupaten, lentur dalam sinkronisasi perencanaan, pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan oleh para pihak, dan implementasi program para pihak	rencana dan implementasi “mengembalikan kejayaan sutra”.	unit ini			
	Pengembangan mitra pemerintah yang kuat, baik yang berperan di luar pemerintah maupun yang terlibat sebagai mitra ‘resmi’ pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan mitra kuat di luar sistem birokrasi, untuk pengawasan dan kontrol (non parlemen) - Perluasan peran pelaku masyarakat sipil, yang tidak hanya bertumpu pada SSC di level Kabupaten, atau Mengembalikan mandat SSC sebagai asosiasi 	Pengembangan mitra pemerintah yang strategis dan kuat di level provinsi dan kabupaten, dengan penguatan SSC di Provinsi dan Kabupaten serta membuka peluang bagi masyarakat sipil lainnya	Gugus tugas yang akan dibentuk; Mitra dan/atau calon mitra gugus tugas yang teridentifikasi	Propinsi, Kabupaten prioritas	2021	Propinsi, Kabupaten

		pelaku usaha mitra pemerintah, yang bisa menjadi lembaga publik mitra pemerintah					
Kurangnya data yang valid dan lengkap terkait petani, pemintal, dan penenun	Penyusunan dan perbaikan sistem database yang lengkap, sistematis, terbaharui, dan dapat diakses oleh publik, serta publik dapat memberikan koreksi dan masukan	Program penyusunan data base yang lengkap, sistematis, terbaharui, dan dapat diakses oleh publik, serta publik dapat memberikan koreksi dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan sistem data base online/digitalisasi yang bersifat open source, dianalisis dan dikendalikan oleh institusi yang kuat, dengan display analisis data secara berkala ke publik • Kegiatan yang dilakukan oleh para pihak mesti memasukkan unsur updating data, evaluasi, output, outcome, dan impact yang telah dicapai 	Gugus tugas yang akan dibentuk BPS Sulsel Dinas Kehutanan Dinas Perindustrian Dinas tenaga kerja Dinas pemberdayaan perempuan, anak Dinas yang mengurus pemberdayaan desa dan masyarakat Masyarakat sipil (LSM)	Wajo, Soppeng	2021	Kabupaten
Kosongnya peran pengusaha yang usaha mereka	Penciptaan ruang bagi pelaku usaha	Melanjutkan dan menguatkan program	Penciptaan program program kewirausahaan baru dan atau	Gugus tugas yang akan dibentuk; Dinas Perindustrian;	Wajo, Soppeng	2021	Kabupaten, Propinsi

terkoneksi dengan pengorganisasian petani, pemintal, penenun, dan pendidikan publik konsumen	untuk memberikan ruang investasi yang sehat, <i>fair</i> dan bebas dari beban 'biaya yang tidak perlu' dan memberikan mandat bagi pelaku untuk pembinaan petani, pemintal, dan penenun	penciptaan kewirausahaan baru (seperti target Wajo dalam menciptakan 1000 pengusaha baru di sektor sutra) yang lebih terkoneksi dengan pembinaan pelaku kecil	pembinaan wirausaha baru yang terkoneksi dengan pembinaan pelaku kecil	Dinas UMKM; Dinas Perindustrian			
Peta jalan sutra saat ini masih bersifat parsial di tingkat kabupaten	Adanya kesamaan persepsi terhadap peta jalan sutra yang disepakati	Memetakan strategi yang dilakukan oleh setiap stakeholder pada wilayah kerja masing-masing	Penyusunan Peta Jalan Pembuatan bisnis model sutra yang melibatkan semua stakeholder	Gubernur; Gugus tugas yang akan dibentuk.	Propinsi	2021	Propinsi

DAFTAR PUSTAKA

- Akil, N (2015) Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wajo, *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 4(4):404-415
- Andadari L. (nd.) Peranan Litbang dan Inovasi dalam Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kokon Ulat Sutra (*Bombyx mori*). *Litbang KLHK*
- Andadari L. (2014). Pemuliaan Murbei dan Bibit Ulut Sutra Alam, Upaya Pemenuhan Kebutuhan Sutra Alam Nasional. *Litbang KLHK*
- Arrowsmith, J., Sisson, K., & Marginson, P. (2004). What can 'benchmarking' offer the open method of co-ordination?. *Journal of European public policy*, 11(2), 311-328.
- Badan Pusat Statistik (2020) Sulawesi Selatan Dalam Angka 2020, Makassar: *BPS Sul-Sel*
- Baker, L. (2006). Observation: A complex research method. *Library trends*, 55(1), 171-189.
- Balai Persuteraan Alam (2010) *Selayang Pandang Balai Persuteraan Alam, Gowa*. Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan Dan Perhutanan Sosial
- Bisnis.com, (2019). Menakar Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190307/99/897220/menakar-potensi-hasil-hutan-bukan-kayu>
- Cangara, S., Moelir, D. D., Suriani, S (2019) Pengembangan Produk Eksport dengan Inovasi Teknologi dan Perluasan Pasar ATBM Sutra di Pakkanna Kecamatan Tanasitolo, *Jurnal Anadara Pengabdian Masyarakat*, 1(2):158-165
- Challies, E.R.T. (2008) Commodity Chains, Rural Development and the Global Agri-food System. *Geography Compass* 2(2): 375-394, 10.1111/j.1749-8198.2008.00095.x
- Dady, Z., J. S. Mandey, M. R. Imbar, M. N. Regar 92016) Nilai Retensi Nitrogen Dan Energi Metabolis Ransum Menggunakan Daun Murbei (*Morus Alba*) Segar Pada Broiler, *Jurnal Zootek* 36 (1): 42 - 50
- Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel (2016). PROGRES PENGEMBANGAN SUTRA ALAM DI PROVINSI SULAWESI SELATAN. Makassar

- Dul, J., & Hak, T. (2007). *Case study methodology in business research*. Routledge.
- Fourcadet, O., Attaie, H., 2003. *Guidelines for Value Chain Analysis in the Agri-food Sector of Transitional and Developing Economies*. Food Agriculture Organisation of the United Nations.
- Gereffi, G. and Korzeniewicz, M. (1994) *Commodity Chains and Global Capitalism*. Greenwood Publishing Group.
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2011). *Introduction to powers of exclusion: land dilemmas in Southeast Asia*.
- Harbi, J., Nurrochmat, D. R., Kusharto, C. D (2015) Pengembangan Usaha Persuteraan Alamkabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, 2(2)*: 129-136
- Hedges, Mark and Dunn, Stuart (2018). Chapter 2: From citizen science to community co-production. *Academic Crowdsourcing in the Humanities*, 13-25. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100941-3.00002-4>
- Ibrahim, H., Amanah, S., Gani, D.S, Purnaningsih, N. (2013) Analisis Keberlanjutan Usaha Pengrajin Ekonomi Kreatif Kerajinan Sutra Di Provinsi Sulawesi Selatan, *Jurnal Teknologi Industri Pertanian 23(3)*:210-219
- IFAD (2014) *Value Chain Development and Poverty Reduction, Ifad*.
- Isnain, W, N. Muin dan N. Hayati (2019) Persepsi Dan Motivasi Petani Dalam Pengembangan Usaha Sutra Alam Di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan, *Jurnal Wasian 6 (1)*:01-10
- Isnain, W. & Muin, M (2015) Tanaman Murbei Sumberdaya Hutan Multi-Manfaat, *Info Teknis EBONI, 12 (2)*: 111-119
- Iwang, B., & Sudirman, S. (2020). Peranan Pemerintah dalam Memajukan Perusahaan Sutra di Sulawesi Selatan, Indonesia. *Southeast Asian Social Science Review, 5(1)*, 103-132.
- Kamaruddin, K., Usman, U. Laining, K. (2018) Penggunaan Tepung Daun Murbei (Morus Alba L) Dalam Pakan Pembesaran Kepiting Bakau (Scylla olivacea) *Jurnal Riset Akuakultur, 12 (4)*:351-359
- Kaplinsky, R., Morris, M., (2003) *A Handbook For Value Chain Analysis*, IDRC-International Development Research Center.

<https://doi.org/10.1057/9781137373755.0007>

- [Kemenhut] Kementerian Kehutanan. 2014. Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2013. Jakarta
- KLHK, 2020. Puslitbang Hutan-BLI dan Pemerintah Kabupaten Wajo Inisiasi Pengembangan Sutra Alam di Tahun 2020
- Krott, M., Bader, A., Schusser, C., Devkota, R., Maryudi, A., Giessen, L., & Aurenhammer, H. (2014). Actor-centred power: The driving force in decentralised community based forest governance. *Forest Policy and Economics*, 49, 34-42.
- Lathifah, A., Ernawati, B., Yuningrum, H. (2015) Pemberdayaan Ekonomi Pekerjaan Rumah Tangga Melalui Pelatihan Kerajinan Payet Di Kelurahan Sumurbroto Kecamatan Banyumanik Semarang, *Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 15 (1):39-56
- Maturidy, A. F. (2011). Preferensi Pelaku Usaha dalam Pengembangan Persuteraan Alam di Provinsi Sulawesi Selatan. *E-Jurnal Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin*, 1-11.
- Meixell, M. J., & Gargeya, V. B. (2005). Global supply chain design: A literature review and critique. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 41(6), 531-550.
- Miladiyah, I., Purwono, S. dan Mustofa. 2003. Efek ekstrak eter (Physalis minima Linn.) setelah pemberian jangka panjang terhadap kadar gula darah tikus diabetes. *Majalah Obat Tradisional Vol 8 (23)*. Yogyakarta
- Neilson, J., & Pritchard, B. (2011). *Value chain struggles: Institutions and governance in the plantation districts of South India* (Vol. 93). John Wiley & Sons.
- Nuraeni, S. (2017). Gaps in the thread: Disease, production, and opportunity in the failing silk industry in South Sulawesi, Indonesia. *Forest and Society*, 1(2): 78-85.
- Nurhaedah, M., & Bisjoe, A. R. H. (2013). Budidaya ulat sutra di Desa Sudu, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 10: 229-239

- Nurjayanti, E. D. (2011). Budidaya Ulat Sutra Dan Produksi Benang Sutra Melalui Sistem Kemitraan Pada Pengusahaan Sutra Alam (Psa) Regaloh Kabupaten Pati. *Mediagro*, 7(2).
- Porter, M. (1980) *Competitive Strategy - Technique for Analyzing Industries and Competitors*. The Free Press, New York.
- Porter, M. (1985) *Competitive Advantage - Creating and Sustaining Superior Performance*. The Free Press, New York.
- Rachmawati, AD A. (2012) Keswadayaan Komunitas Pengrajin Kain Tenun Ikat di Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. *Skripsi*, IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. *Rural Social*. 68 (2), 153-181.
- Ridwan., Saleh, M., Basir, Z., Ahmad, A. dan Afandi, A. I. (2011) *Laporan Akhir Fasilitasi Penelitian Persuteraan Alam di Provinsi Sulawesi Sulawesi Selatan. Makassar*. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Sadapotto, A. (2010) Penataan Institusi untuk Peningkatan Kinerja Persuteraan Alam di Sulawesi Selatan: Studi Komparasi di Enrekang, Soppeng dan Louding City, Cina, *Thesis*, Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Sadapotto, A. (2012) Proses kebijakan persuteraan alam di Sulawesi Selatan. *Perennial*, 8(1): 1-5.
- Scoones, I. (2015) *Sustainable Livelihoods and Rural Development*. Fernwood Publishing, Winnipeg, CA.
- Setiawan, D. & Wiryawan, K G (2015) Kecernaan Nutrien Pakan Tepung Daun Murbei Pada Sapi Peranakan Ongole, *Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu* 3(4): 262-267
- Suska, S. (2016). Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 357-380.
- Suyono, E. 2006. Pengaruh Program Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) Terhadap Pendapatan Petani Budidaya Ulat Sutra di Kabupaten Wonosobo. *Thesis* tidak dipublikasikan. Universitas Diponegoro.
- UNIDO (2009) *Agro-Value Chain Analysis and Development the Unido Approach*. doi: 10.1108/eb002170.

- van der Hel, S. (2016). New science for global sustainability? The institutionalisation of knowledge co-production in Future Earth. *Environmental science & policy*, 61, 165-175. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.03.012>
- van der Ploeg, J.D. (2013) *Peasants and the Art of Farming: Chayanovian Manifesto*. Fernwood Publishing. Winnipeg CA.
- Wirastuty, R. Y. (2019) Identifikasi Senyawa Kimia Yang Terkandung Pada Daun Murbei (*Morus alba* L), *Journal of Pharmaceutical Science and Herbal Technology* 4 (1):8-12

ISBN: 978 – 979-716-129-3



9 789797 161293